



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Bengkulu Selatan
2025

RPJMD

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2025-2029



H. Rifai Tajudin, S.Sos.
Bupati

Yevri Sudianto
Wakil Bupati



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 3 -

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dan

BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025-2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 4 -

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan rencana pembangunan jangka Panjang dan jangka menengah.



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 5 -

16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan Teknik cascading (penurunan) kinerja.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

**BAB II
RPJMD**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan dan strategi pembangunan daerah Tahun 2025-2029; dan
 - b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah, RENJA Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RPJMD berpedoman pada :
 - a. RPJMN Tahun 2025-2029;
 - b. RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045; dan
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 6 -

**Bagian Kedua
Sistematika**

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD adalah sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
 - BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - BAB V : PENUTUP
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terhadap implementasi program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Tindak lanjut atas pengendalian dan evaluasi implementasi RPJMD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Tindak lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan/atau
 - b. penyusunan RPJMD periode berikutnya berdasarkan hasil evaluasi RPJMD.
 - c. Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 7 -

Pasal 6

- (1) Dalam hal masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum ditetapkan, maka untuk kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPDP tahun berkenaan, Pemerintah Daerah tetap menyusun Rancangan RKPDP tahun berkenaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan mempedomani RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini, serta memperhatikan RPJPD, rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini maka penyebutan Perangkat Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

**BAB IV
PERUBAHAN RPJMD**

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya :
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPDP dan perubahan RENSTRA Perangkat Daerah.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal *10 desember* 2025
BUPATI BENGKULU SELATAN,



Diundangkan di Manna
pada tanggal *10 desember* 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,


SUKARNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN
2025 NOMOR **4**

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN, PROVINSI BENGKULU **4/53/2025**



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD)

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TAHUN 2025 - 2029

Nomor Kontrak :

KTR/DI/B.2/BAPPEDA-LITBANG/2025

Kerjasama

Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

dengan Universitas Bengkulu

Tahun Anggaran 2025

Kepala Bappeda Litbang

Kabupaten Bengkulu Selatan



FIKRI AL-HAFIDH, SSTP, MM
NIP. 19821001 200112 1 002

Ketua Tim Pelaksana



Dr. FACHRUZZAMAN, SE, MDM, Ak, CA.,
Asean CPA, Cert.IPSAS
NIP. 19740313 199601 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan	I-16
1.5. Sistematika Penulisan	I-20
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-4
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-55
2.3. Aspek Daya Saing Daerah	II-104
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II-131
2.5. Gambaran Keuangan Daerah.....	II-155
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis.....	II-169
2.6.1. Permasalahan Kabupaten Bengkulu Selatan	II-169
2.7. Isu Strategis	II-182
2.7.1. Isu Strategis Global.....	II-182
2.7.2. Isu Strategis Nasional	II-190
2.7.3. Isu Strategis Provinsi Bengkulu.....	II-200
2.7.4. Isu Strategis Kabupaten Bengkulu Selatan.....	II-203
BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	III-1
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	III-1
3.2. Arah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-12
BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-55
BAB V. PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1.	Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.....	II-1
Tabel II-2.	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024.....	II-15
Tabel II-3.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 ...	II-17
Tabel II-4.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	II-19
Tabel II-5.	Persentase Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik PLN Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023.....	II-21
Tabel II-6.	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023.....	II-24
Tabel II-7.	Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023.....	II-25
Tabel II-8.	Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023.....	II-27
Tabel II-9.	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2020-2024.....	II-30
Tabel II-10.	Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2024	II-32
Tabel II-11.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2024	II-33
Tabel II-12.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2021-2024	II-35
Tabel II-13.	Rasio Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2015-2024.....	II-38
Tabel II-14.	Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2020-2024	II-42

Tabel II-15. Proyeksi Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2030	II-45
Tabel II-16. Proyeksi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2030.....	II-47
Tabel II-17. Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2030.....	II-49
Tabel II-18. Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2030.....	II-51
Tabel II-19. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen) dan Provinsi Bengkulu 2018-2024.....	II-56
Tabel II-20. Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024.....	II-58
Tabel II-21. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Persen) dan Provinsi Bengkulu 2019-2024 (Juta Rupiah)	II-61
Tabel II-22. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2017-2024.....	II-63
Tabel II-23. Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2024.....	II-65
Tabel II-24. Indeks Pembangunan Manusia (UHH Hasil LF SP2020) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 ...	II-68
Tabel II-25. Umur Harapan hidup (Hasil LF SP2020) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.....	II-70
Tabel II-26. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2023.....	II-72
Tabel II-27. Prevelansi Stunting Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024.....	II-75
Tabel II-28. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024.....	II-77
Tabel II-29. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024.....	II-79
Tabel II-30. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024.....	II-81

Tabel II-31. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024.....	II-82
Tabel II-32. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2024 ...	II-85
Tabel II-33. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 2018-2023.....	II-86
Tabel II-34. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten/Kota se- Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023.....	II-92
Tabel II-35. Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2023.....	II-94
Tabel II-36. Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2019-2024	II-96
Tabel II-37. Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2018-2024.....	II-99
Tabel II-38. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2018-2024.....	II-101
Tabel II-39. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Bengkulu 2016-2023.....	II-103
Tabel II-40. Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024-2030.....	II-106
Tabel II-41. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah).....	II-108
Tabel II-42. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	II-112
Tabel II-43. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024	II-114
Tabel II-44. Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2022-2024	II-117
Tabel II-45. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Bengkulu Selatan (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024.....	II-120
Tabel II-46. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024	II-121

Tabel II-47. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Provinsi Bengkulu 2020-2024(Persen)II-123	II-123
Tabel II-48. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.....	II-125
Tabel II-49. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.....	II-126
Tabel II-50. Rasio Pajak Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2020-2024	II-128
Tabel II-51. Inflasi Kota Bengkulu tahun 2018-2023	II-130
Tabel II-52. Indeks Reformasi Hukum 2024	II-132
Tabel II-53. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2021-2024.....	II-133
Tabel II-54. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024 .	II-135
Tabel II-55. Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024.....	II-138
Tabel II-56. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu tahun 2021-2023.....	II-143
Tabel II-57. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022	II-147
Tabel II-58. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023	II-147
Tabel II-59. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2024	II-147
Tabel II-60. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2020-2024.....	II-149
Tabel II-61. Realisasi APBD Kabupaten Bengkulu Selatan 2020-2024.	II-155
Tabel II-62. Neraca Daerah Tahun Anggaran 2020-2024	II-165
Tabel II-63. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030.	II-167
Tabel II-64. Isu Strategis Transformasi Sosial Nasional	II-191
Tabel II-65. Isu Strategis Transformasi Ekonomi Nasional.....	II-193
Tabel II-66. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	II-197
Tabel II-67. Isu Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia.....	II-198
Tabel II-68. Isu Ketahanan Sosial dan Politik.....	II-200

Tabel II-69	Perumusan Isu Strategis Kabupaten Bengkulu Selatan	II-203
Tabel III-1.	Perumusan Misi RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029.....	III-5
Tabel III-2	Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029	III-9
Tabel III-3.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan.....	III-12
Tabel III-4.	Arah Kebijakan Berdasarkan Misi RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029.....	III-16
Tabel III-5	Arah Kebijakan dan Program Prioritas Rekomendasi KLHS	III-19
Tabel III-6.	Strategi Pembangunan Menurut Tujuan dan Sasaran	III-46
Tabel III-7	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Serta Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029.....	III-48
Tabel III-8	Keselerasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu dan Nasional	III-52
Tabel III-9.	Visi, Misi, Sasaran, Indikator, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	III-61
Tabel IV-1	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	IV-3
Tabel IV-2.	Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029	IV-55
Tabel IV-3.	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bengkulu Selatan.....	IV-57

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya.....	I-8
Gambar II-1. Perbandingan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.....	II-18
Gambar II-2. Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Kabupaten Bengkulu Selatan dan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	II-20
Gambar II-3. Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023.....	II-22
Gambar II-4. proyeksi persentase penduduk usia produktif Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2030	II-53
Gambar II-5. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024.....	II-57
Gambar II-6. Persentase Kemiskinan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024.....	II-59
Gambar II-7. Perbandingan PDRB per Kapita Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024	II-62
Gambar II-8. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2024.....	II-64
Gambar II-9. Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024	II-66
Gambar II-10. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.....	II-69
Gambar II-11. Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2023.....	II-71
Gambar II-12. Perbandingan Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2023.....	II-73

Gambar II-13. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024.....	II-78
Gambar II-14. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024.....	II-80
Gambar II-15. Perbandingan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2018-2023	II-87
Gambar II-16. Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024.....	II-97
Gambar II-17. Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Bengkulu Selatan dan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	II-127
Gambar II-18. Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024	II-134
Gambar II-19. Perbandingan Penilaian Kepatuhan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024.....	II-136
Gambar II-20. Perbandingan Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024.....	II-139
Gambar II-21. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024	II-140
Gambar III-1 Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Bengkulu	III-22

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada bagian yang mengatur perencanaan pembangunan daerah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah, sesuai kewenangannya, wajib menyusun dokumen rencana pembangunan daerah sebagai bagian yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, RPJMD disusun sebagai dokumen strategis yang menjadi acuan dalam penetapan arah kebijakan pembangunan daerah secara terarah, terukur, serta sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan berfungsi menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke dalam rencana pembangunan lima tahunan. Penyusunannya juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta memperhatikan keterkaitannya dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RPJMD merupakan tahap implementatif dari RPJPD dan harus disusun setiap lima tahun berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 juga mengacu pada ketentuan terbaru dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Periode 2025-2029. Instruksi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan dan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan RPJMN 2025-2029, agar arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata dari daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah, dan kebijakan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu lima tahun, terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dokumen ini menjadi pedoman resmi pelaksanaan pembangunan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan terpilih yang dilantik pada tanggal 11 Juni 2025 untuk masa bakti 2025-2029, sehingga seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam RPJMD ini disusun sebagai panduan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah selama periode pemerintahan tersebut.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 adalah **"Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan"**. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan menjadi 4 (empat) misi, yaitu: 1) Mewujudkan pembangunan desa dan kota yang setara melalui pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi; 2) Mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, industri kreatif, dan pariwisata dalam meningkatkan daya saing daerah; 3) Menyediakan layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas untuk membentuk sumber daya manusia dan lingkungan masyarakat yang unggul dan inklusif; 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan.

Dalam penyusunannya, RPJMD ini juga memperhatikan dinamika global, nasional, dan regional, seperti kemajuan teknologi digital, ketahanan energi, ketahanan pangan, transisi menuju ekonomi hijau dan biru, *sustainable development goals* (SDGs), serta isu-isu strategis lainnya yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah. Respons yang adaptif dan visioner terhadap isu-isu tersebut akan memperkuat posisi Kabupaten Bengkulu Selatan dalam skala provinsi maupun nasional.

Dengan landasan data yang kuat, perencanaan yang terukur, serta dukungan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan, RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman utama pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan pencapaian target jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku untuk memastikan kepastian hukum, konsistensi dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJPD, RPJMN, dan RTRW, serta menjaga efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah. Kepatuhan terhadap regulasi juga menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan kepentingan publik, sehingga kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan serta selaras dengan

kebutuhan masyarakat. Adapun dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor 9); dan

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

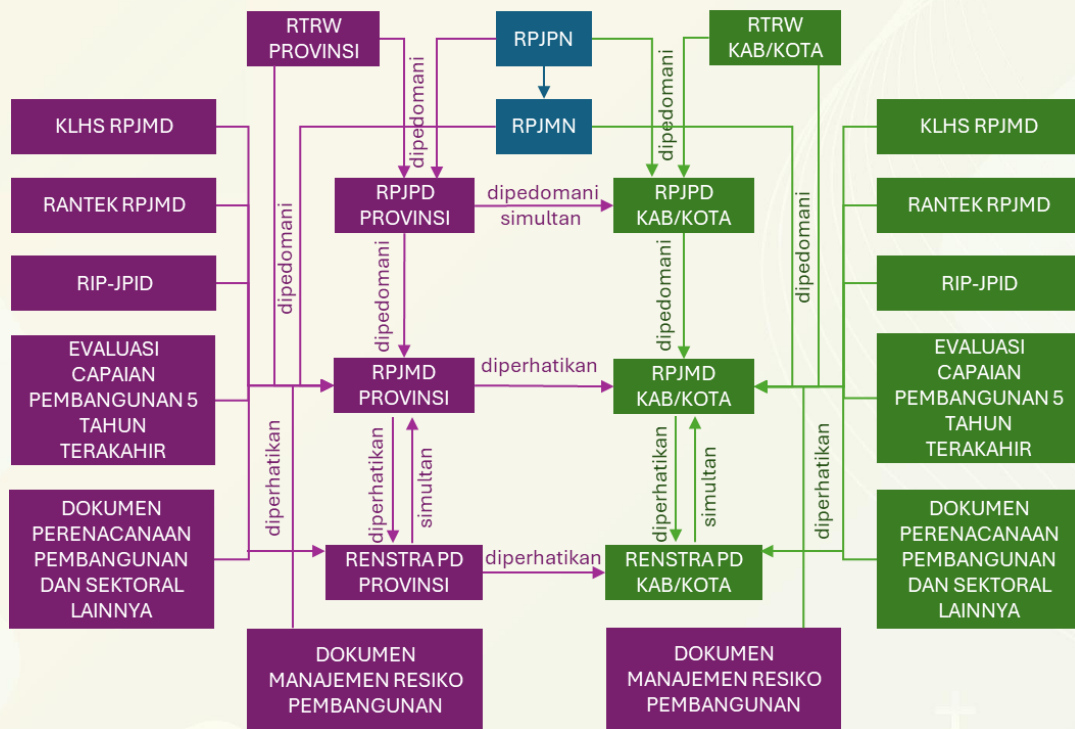
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta ketentuan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tujuan utama dari perencanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. Disusun berdasarkan kondisi, potensi, serta dinamika perkembangan daerah dan nasional.

RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).



Gambar I-1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD, sementara RKPD berfungsi sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD. Integrasi antar dokumen ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, efektif, efisien, dan

akuntabel, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan wilayah, serta penguatan daya saing Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah terdiri dari tiga tahapan, yaitu jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun), yang dilaksanakan secara sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada tingkat daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan, merupakan dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yang menetapkan arah pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi jangka panjang yang selaras dengan RPJPN;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang menjabarkan RPJPD dengan memperhatikan RPJMN, mencakup strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, program prioritas perangkat daerah, serta rencana kerja dan kerangka pendanaan indikatif;
- c. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat perangkat daerah yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan RPJMD dan menjadi dasar penyusunan APBD, yang

- mencakup kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah; dan
- e. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah), merupakan dokumen tahunan perangkat daerah yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam RKPD.

A. Hubungan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan dokumen perencanaan strategis untuk jangka waktu lima tahun yang memainkan peran kunci dalam pembangunan daerah. Dokumen ini tidak hanya menjadi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang saling terkait baik secara vertikal maupun horizontal. Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dan mengedepankan keterpaduan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua regulasi tersebut mengatur bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan dalam tahapan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun).

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

RPJPN merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu 20 tahun yang menjadi penjabaran dari tujuan pembentukan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. RPJPN memuat visi, misi, dan arah pembangunan nasional, yang menjadi dasar strategis bagi seluruh perencanaan pembangunan di tingkat daerah, termasuk RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 disusun dengan mengacu pada RPJPN dan menjadi pedoman utama dalam penyusunan RPJMD. RPJPD ini memuat visi jangka panjang daerah, misi, serta arah kebijakan pembangunan untuk periode 20 tahun. Dokumen ini berfungsi sebagai fondasi dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan disusun untuk periode lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kerja kepala daerah terpilih. Dalam proses penyusunannya, RPJMD ini mengacu pada RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan, memperhatikan RPJMD Provinsi Bengkulu, serta selaras dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Selain itu, RPJMD juga harus mempertimbangkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan guna memastikan keterpaduan antara rencana pembangunan dan pengelolaan tata ruang wilayah.

Selain itu, RPJMD wajib memperhatikan berbagai dokumen teknis dan pendukung, di antaranya:

- a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD) guna memastikan aspek keberlanjutan lingkungan,

- b. Rancangan Teknokratik RPJMD, sebagai acuan awal berbasis data dan rasionalitas,
- c. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID) yang memuat arah kebijakan dan strategi pengembangan iptek di daerah,
- d. Evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir, dan
- e. Dokumen perencanaan sektoral lainnya yang relevan.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan RPJMD dan mengacu pada RKPD Provinsi Bengkulu serta RKP Nasional. RKPD menjadi dokumen operasional yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan tahunan, rencana kerja dan pembiayaan yang akan diimplementasikan melalui mekanisme penganggaran.

B. Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

Sistem perencanaan pembangunan daerah terintegrasi erat dengan proses penganggaran. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) disusun berdasarkan RKPD, yang memuat program dan kegiatan prioritas tahunan. Dengan demikian, RAPBD mencerminkan keterkaitan langsung antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Proses ini bertujuan agar setiap kegiatan yang telah direncanakan mendapatkan alokasi anggaran secara efisien dan sesuai skala prioritas, guna mencapai hasil pembangunan yang optimal.

Dengan adanya integrasi dan sinkronisasi antara berbagai dokumen perencanaan—mulai dari RPJPN, RPJPD, RPJMD, RKPD, hingga ke dalam proses penganggaran melalui RAPBD—diharapkan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berlangsung secara terarah, sistematis, efektif, dan efisien. Penyusunan dokumen-dokumen tersebut dilakukan

secara partisipatif, berbasis data, dan memperhatikan kondisi serta potensi lokal, sehingga pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilaksanakan secara kolaboratif bersama para pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya;
- c. Mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. Disusun dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan lokal dan nasional,

C. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keterkaitan ini tercermin dalam struktur hubungan hierarkis dan koordinatif antara dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (lima tahunan), RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan disusun dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten sebagai panduan utama jangka panjang, serta memperhatikan RPJMN sebagai pedoman strategis dari pemerintah pusat. RPJMD ini juga dipengaruhi oleh sejumlah dokumen

pendukung yang memperkuat landasan substansial dan teknis dari perencanaan pembangunan daerah. Beberapa di antaranya memiliki peran penting sebagai berikut:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota

RTRW adalah dokumen perencanaan spasial yang menetapkan struktur ruang dan pola ruang wilayah, serta arah pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik dan potensi wilayah. RPJMD wajib memperhatikan RTRW untuk menjamin keterpaduan antara aspek spasial dan sektoral dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan mempertimbangkan RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan, program pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD dapat disesuaikan dengan zona peruntukan ruang seperti kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan permukiman, dan infrastruktur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak bertentangan dengan kapasitas dan daya dukung lingkungan wilayah.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD)

KLHS adalah instrumen penting yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam dokumen RPJMD. Kajian ini mencakup analisis terhadap potensi dampak lingkungan dari rencana kebijakan pembangunan, serta identifikasi isu strategis lingkungan hidup daerah. Dalam konteks Bengkulu Selatan, KLHS membantu memastikan bahwa rencana pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi fungsi ekosistem dan menjaga kualitas lingkungan hidup bagi generasi mendatang. KLHS juga penting untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

3. Rancangan Teknokratik RPJMD

Rancangan ini merupakan dokumen awal yang disusun secara teknokratik, berbasis data, indikator kinerja, serta analisis permasalahan dan potensi daerah. Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi fondasi awal sebelum RPJMD disusun melalui proses politis dan partisipatif. Ia berfungsi sebagai referensi objektif dan rasional untuk menentukan arah kebijakan, strategi, serta prioritas pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dokumen ini disusun oleh perangkat daerah teknis dan menjadi acuan dalam konsultasi publik dan pembahasan di DPRD.

4. Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIP-JPID)

RIP-JPID merupakan dokumen strategis yang memetakan arah pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di tingkat daerah secara jangka panjang. Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan, dokumen ini berperan penting dalam memastikan integrasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan strategi pemajuan inovasi yang berkelanjutan. RIP-JPID mengarahkan prioritas pembangunan agar berbasis pada peningkatan kapasitas riset, pengembangan teknologi tepat guna, dan inovasi sektor publik maupun privat, terutama pada sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, UMKM, dan industri kreatif. Selain itu, RIP-JPID juga mendukung pembentukan ekosistem inovasi daerah dan mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, serta masyarakat dalam mempercepat transformasi ekonomi berbasis pengetahuan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

5. Evaluasi Capaian Pembangunan Lima Tahun Terakhir

Evaluasi ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap keberhasilan, hambatan, dan pelajaran dari pelaksanaan RPJMD

sebelumnya. Data evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk merumuskan permasalahan dan tantangan pembangunan yang aktual, serta memperkuat penyusunan arah kebijakan dan sasaran dalam RPJMD periode berikutnya. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, evaluasi capaian lima tahun terakhir menjadi refleksi terhadap efektivitas program, ketepatan sasaran, serta daya serap anggaran pembangunan daerah.

Sebagaimana tergambar dalam bagan sistem perencanaan nasional, RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tidak disusun secara terpisah, melainkan simultan dengan dokumen penting lainnya, seperti Renstra Perangkat Daerah dan menjadi landasan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan. RKPD kemudian menjadi dasar penyusunan APBD, sehingga memperkuat keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran secara strategis dan operasional.

Secara keseluruhan, integrasi RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya bertujuan untuk menjamin pembangunan daerah berjalan secara terarah, terukur, efisien, berkelanjutan, dan akuntabel, dengan tetap menyesuaikan dinamika lokal maupun nasional. Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif, berbasis data, dan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan pendekatan tersebut, RPJMD menjadi dokumen yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan masa depan secara inklusif dan berkeadilan.

1.4. Maksud dan Tujuan

A. Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 bertujuan untuk

menjadi pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan periode 2025–2029. Dokumen ini disusun sebagai langkah strategis untuk mempercepat pencapaian pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. RPJMD ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan yang terarah dan berdampak nyata, guna mewujudkan cita-cita visi dan Misi Kabupaten Bengkulu Selatan Yang diarahkan untuk mewujudkan:

- a. Kemajuan daerah, melalui penguatan ekonomi lokal, percepatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan daya saing;
- b. Kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
- c. Kehidupan masyarakat yang harmonis dan adil, melalui pelayanan publik yang berkualitas dan pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

Penyusunan RPJMD ini dilakukan secara partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan—pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, komunitas lokal, dan masyarakat luas—dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berbasis pada data dan informasi yang valid. Dengan pendekatan ini, RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan menjadi landasan strategis bagi kepala daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

B. Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah

Menguraikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan terpilih ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah yang konkret, sistematis, dan terukur, serta selaras dengan dokumen RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan dan memperhatikan agenda pembangunan nasional maupun provinsi.

b. Menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Menentukan arah pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang responsif terhadap isu-isu strategis dan tantangan daerah, guna memastikan pembangunan yang adil, inklusif, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.

c. Mengintegrasikan dan Menyelaraskan Program Pembangunan

Mendorong sinergi antara kebijakan pembangunan daerah dengan program nasional dan provinsi, serta menjamin keterpaduan lintas sektor, baik di tingkat pemerintah, swasta, maupun masyarakat, berbasis pada potensi dan kearifan lokal.

d. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah, termasuk pembiayaan, untuk menghasilkan dampak yang maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

e. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Merumuskan strategi pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

f. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

g. Meningkatkan Daya Saing Daerah

Mengembangkan potensi unggulan Kabupaten Bengkulu Selatan, seperti sektor pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif untuk memperkuat ekonomi lokal dan kemandirian daerah dalam menghadapi persaingan regional dan global.

h. Menanggulangi Permasalahan Strategis Daerah

Merumuskan kebijakan dan program untuk mengatasi berbagai tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan antarwilayah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta permasalahan lingkungan dan perubahan iklim.

i. Menjamin Keberlanjutan Pembangunan

Merancang pembangunan berwawasan lingkungan yang menjamin keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pembangunan sosial budaya masyarakat.

Dengan adanya RPJMD ini, diharapkan Kabupaten Bengkulu Selatan mampu berkembang menjadi daerah yang lebih tangguh, mandiri, dan berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakatnya secara inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

a. Latar belakang;

Merumuskan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodesasi kepala daerah.

b. Dasar hukum penyusunan;

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

- c. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;

Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPD, Rencana Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannya.

- d. Maksud dan tujuan; dan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

- e. Sistematika penulisan.

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

2. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

- a. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat:

- i. Aspek geografi dan demografi;
- ii. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- iii. Aspek Daya Saing Daerah;
- iv. Aspek Pelayanan Umum.

Dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- i. Standar Pelayanan Minimal;
- ii. Kerjasama daerah;
- iii. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten/kota; dan
- iv. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.

- b. Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
 - c. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis paling sedikit memuat:
 - i. Permasalahan pembangunan daerah; dan
 - ii. Isu strategis daerah.
3. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- a. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran paling sedikit memuat:
 - i. Visi dan Misi; dan
 - ii. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
 - b. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:
 - i. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - ii. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- a. Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - i. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
 - ii. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 - b. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:

- i. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
- ii. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

5. BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan menyusut menjadi 1.570,10 km², terdiri dari 1.186,10 km² wilayah daratan dan 384 km² wilayah lautan, dari sebelumnya 5.949,14 km². Wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Selatan terbagi dalam 11 kecamatan, 142 desa, dan 16 kelurahan, dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kota Manna. Letak geografis Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada posisi 4°09'39"-4°33'34" Lintang Selatan dan 102°47'45"-103°17'18" Bujur Timur, dengan ketinggian rata-rata 74 meter di atas permukaan laut.

Tabel II-1. Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
1	Manna	Kayu Kuyit	33,17	2,80
2	Bunga Mas	Gindosuli	35,08	2,71
3	Kota Manna	Ibul	32,16	19,77
4	Pasar Manna	Pasar Bawah	5,84	2,96
5	Kedurang	Tanjung Alam	234,55	0,49
6	Kedurang Ilir	Lubuk Ladung	58,20	4,91
7	Seginim	Pasar Baru	61,52	5,19
8	Air Nipis	Suka Negeri	203,28	17,14
9	Pino	Masat	61,88	5,22
10	Ulu Manna	Simpang Pino	236,92	18,84
11	Pino Raya	Pasar Pino	223,50	19,97
Jumlah			1.186,10	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka

Secara administratif, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki posisi strategis yang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah penting di sekitarnya, yaitu Kabupaten Seluma di sebelah utara, Provinsi Sumatera

Selatan di sebelah timur, Kabupaten Kaur di sebelah selatan, serta Samudera Indonesia di sebelah barat. Letak geografis ini memberikan potensi besar dalam pengembangan kawasan perbatasan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah dalam kerangka pembangunan regional dan nasional.

Kepastian batas wilayah administratif ini menjadi aspek krusial dalam mendukung keberlangsungan pembangunan daerah yang tertib dan efisien. Persoalan batas wilayah yang selama ini kerap menimbulkan kendala administratif, sosial, dan pembangunan lintas wilayah, kini telah memperoleh kepastian hukum melalui beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi dasar legal penegasan batas antarwilayah. Beberapa regulasi penting yang telah mengatur batas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:

- a. Permendagri Nomor 100 Tahun 2017, yang menetapkan batas daerah antara Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Permendagri Nomor 9 Tahun 2020, yang mengatur batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma, keduanya berada dalam wilayah Provinsi Bengkulu;
- c. Permendagri Nomor 101 Tahun 2017, yang menegaskan batas antara Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, serta batas Kota Pagar Alam dengan Kabupaten Kaur; dan
- d. Permendagri Nomor 104 Tahun 2017, yang mengatur batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur dalam lingkup Provinsi Bengkulu.

Penetapan batas wilayah ini memiliki implikasi yang luas, tidak hanya dalam aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam hal perencanaan

tata ruang, pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur antarwilayah. Kepastian batas ini juga menjadi fondasi untuk menjaga stabilitas sosial di kawasan perbatasan, mencegah konflik klaim wilayah, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pengembangan ekonomi kawas

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki karakteristik geografi yang terdiri dari wilayah dataran rendah hingga perbukitan. Berdasarkan elevasi, wilayah dengan ketinggian 0-100 m dpl mencakup 50,88%, ketinggian 100-500 m sebesar 35,08%, dan wilayah di atas 500 m sebesar 14,04%. Curah hujan tahunan rata-rata di kabupaten ini mencapai 354 mm, dengan suhu minimum sekitar 20,5°C dan maksimum mencapai 35,4°C, serta kelembaban udara berkisar antara 82,44% hingga 85,89%.

Dalam aspek lingkungan dan kehutanan, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.784/Menhut-II/2012, luas kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai ±49.299,80 hektare, yang terdiri dari hutan lindung, suaka alam, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap. Angka ini setara dengan 41,56% dari total luas wilayah daratan kabupaten. Meski demikian, untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, telah diajukan usulan peninjauan terhadap beberapa kawasan hutan dalam rangka pelepasan atau perubahan fungsi ruang yang mendukung pemanfaatan ruang secara optimal, seperti pada kawasan HL Bukit Riki Reg. 32A dan HPT Peraduan Tinggi Reg. 79.

Dari perspektif penataan ruang, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki struktur ruang yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik secara merata dan berkelanjutan. Wilayah ini dibagi ke dalam sistem perkotaan dengan hirarki dan fungsi berbeda. Kecamatan Kota Manna dan Pasar Manna ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan industri pengolahan.

Sementara itu, kecamatan seperti Masat dan Simpang Pino difungsikan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL dan PPK) yang berfokus pada pengembangan agroindustri, pertanian, peternakan, kehutanan, serta pengelolaan sumber daya alam lainnya. Kecamatan lainnya seperti Pino Raya, Air Nipis, dan Seginim memiliki peran sebagai pusat pelayanan lingkungan (PPL) dengan kegiatan utama pada sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta pemukiman pedesaan.

Secara keseluruhan, struktur dan pola ruang Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan untuk menciptakan sistem ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Prinsip produktif dan berkelanjutan ini dimaknai sebagai hubungan fungsional antar wilayah pusat kegiatan yang mampu meningkatkan potensi lokal secara efisien dan efektif, sekaligus menjaga keseimbangan ekologi dan sosial budaya. Penataan ruang yang terencana diharapkan mampu menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan dua pilar utama yang sangat memengaruhi arah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Aspek geografi mencakup letak wilayah, luas, topografi, iklim, dan potensi sumber daya alam yang tersedia, sedangkan aspek demografi mencakup karakteristik penduduk seperti jumlah dan pertumbuhan, persebaran dan kepadatan, komposisi usia, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kedua aspek ini saling berinteraksi dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang terukur dan kontekstual, termasuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029.

Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Selatan, kondisi geografis memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan wilayah. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Provinsi Bengkulu, dengan batas wilayah langsung terhadap Kabupaten Seluma, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kaur, dan Samudera Indonesia di bagian barat. Luas daratan mencapai 1.186,10 km² dengan topografi yang bervariasi—mulai dari dataran rendah di wilayah pesisir hingga perbukitan di bagian pedalaman. Variasi ini menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan infrastruktur, penyediaan akses layanan dasar yang merata, serta optimalisasi potensi sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pariwisata bahari.

Sementara itu, dari aspek demografi, Kabupaten Bengkulu Selatan terus mengalami pertumbuhan penduduk yang berdampak langsung terhadap kebutuhan penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, serta penyediaan lapangan kerja. Tingginya proporsi penduduk usia produktif menjadi bonus demografi yang apabila dimanfaatkan dengan tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Namun demikian, persebaran penduduk yang masih dominan berada di wilayah pedesaan menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup, terutama di daerah yang aksesnya masih terbatas.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2029, pemahaman terhadap kondisi geografis dan demografis menjadi landasan strategis dalam menentukan prioritas pembangunan. Hal ini meliputi kebijakan pemerataan infrastruktur antarwilayah, penguatan layanan publik berbasis kebutuhan masyarakat, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan sektor unggulan lokal yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Dengan memahami secara menyeluruh kondisi geografis dan demografis tersebut, Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Selatan dapat memastikan bahwa proses pembangunan berjalan secara efektif, inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan serta harapan masyarakat secara komprehensif.

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki posisi geografis yang strategis di bagian selatan Provinsi Bengkulu dan menjadi pintu gerbang utama wilayah pesisir barat Sumatera yang menghadap langsung ke Samudera Indonesia. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Seluma di sebelah utara, Provinsi Sumatera Selatan di sebelah timur, Kabupaten Kaur di sebelah selatan, serta laut lepas di sebelah barat, menjadikan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai daerah penghubung antara kawasan pesisir dan kawasan pedalaman Pulau Sumatera. Letak ini memberikan nilai tambah dalam konteks mobilitas, perdagangan antarwilayah, dan perluasan pengaruh ekonomi dan budaya.

1. Kontribusi Geografis dan Konektivitas Wilayah

Dari aspek geografis dan konektivitas, Kabupaten Bengkulu Selatan berperan sebagai simpul penting dalam jaringan infrastruktur jalan lintas barat Sumatera, yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Keberadaan jalur ini menjadikan kabupaten ini strategis sebagai koridor transportasi dan distribusi barang dan jasa, serta mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir selatan. Dalam kerangka pembangunan infrastruktur regional, Bengkulu Selatan juga menjadi wilayah penting dalam pengembangan konektivitas pelabuhan perikanan dan pelabuhan niaga yang mengakses pasar nasional dan internasional melalui jalur laut.

2. Kontribusi Ekonomi Regional

Dari sisi ekonomi, Bengkulu Selatan merupakan daerah dengan potensi ekonomi multisektor, mulai dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, hingga pariwisata. Komoditas unggulan seperti padi, jagung, kopi, karet, dan kelapa sawit berperan tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan lokal, tetapi juga menopang rantai pasok untuk wilayah sekitar seperti Kabupaten Seluma dan Kaur. Selain itu, sektor perikanan laut memberikan kontribusi signifikan terhadap penyediaan protein hewani serta peluang pengembangan industri pengolahan hasil laut yang mendukung ketahanan pangan wilayah dan membuka lapangan kerja.

Kabupaten ini juga memiliki potensi ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal dan budaya tradisional, seperti produksi kuliner khas Pendap, kerajinan tangan berbasis etnik Serawai, hingga potensi jasa pariwisata berbasis alam dan budaya yang belum tergarap secara optimal. Potensi ini, jika dioptimalkan, mampu memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga pada skala provinsi dan lintas wilayah.

3. Kontribusi Sosial Budaya

Secara sosial dan budaya, Kabupaten Bengkulu Selatan berkontribusi dalam memperkuat identitas budaya Provinsi Bengkulu melalui pelestarian adat istiadat masyarakat Suku Serawai. Tradisi-tradisi seperti Kayiak Nari, Tari Andun, Nundang Padi, dan Nujuh Likur, tidak hanya memiliki nilai historis dan spiritual, tetapi juga menjadi modal sosial dan aset budaya yang berperan dalam pembangunan karakter masyarakat. Nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial yang melekat dalam tradisi ini

memperkuat fondasi sosial masyarakat sekaligus menjadi potensi unggulan dalam pengembangan pariwisata budaya.

4. Kontribusi Lingkungan Hidup dan Ekosistem Regional

Kabupaten Bengkulu Selatan juga berperan penting dalam mendukung fungsi ekologis dan keberlanjutan lingkungan di wilayah selatan Provinsi Bengkulu. Dengan luas kawasan hutan mencapai lebih dari 49.000 hektar, yang mencakup hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan suaka alam, kabupaten ini menjadi penyangga ekosistem regional, termasuk dalam menjaga ketersediaan air, perlindungan keanekaragaman hayati, dan mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor.

Selain itu, kawasan hutan dan pesisir memiliki potensi besar dalam pengembangan ekowisata, konservasi berbasis masyarakat, serta pengembangan wilayah hijau sebagai bagian dari upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Peran ini semakin penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam aspek lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.

5. Kontribusi Strategis dalam Tata Ruang dan Pola Pembangunan

Dalam konteks tata ruang wilayah, Kabupaten Bengkulu Selatan telah menetapkan struktur ruang yang mendorong terbentuknya sistem perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan lokal, seperti Kota Manna, Pasar Manna, dan Masat, yang difungsikan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW), pusat kegiatan lokal (PKL), dan pusat pelayanan lingkungan (PPL). Struktur ruang ini dirancang untuk menciptakan keterhubungan antarwilayah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan fungsi-fungsi permukiman, ekonomi, dan layanan publik secara merata

B. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan tersebar merata di berbagai kecamatan, mencerminkan keunggulan komparatif wilayah dalam sektor-sektor utama seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Potensi ini menjadikan sektor sumber daya alam sebagai motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, sekaligus sebagai basis penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatatkan nilai tambah bruto sebesar Rp1.308,51 miliar pada tahun 2024, meningkat dari Rp1.191,04 miliar pada tahun 2020. Kenaikan ini menunjukkan peran sentral sektor tersebut dalam struktur perekonomian daerah. Komoditas utama yang menjadi andalan antara lain padi, jagung, kelapa, kelapa sawit, dan kopi robusta yang tersebar di wilayah dataran tinggi maupun dataran rendah.

Sektor pertanian menjadi tulang punggung utama perekonomian, dengan dominasi usaha perorangan dalam skala kecil. Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, tercatat sebanyak 31.384 unit usaha pertanian perorangan atau sekitar 99,92% dari total usaha pertanian, dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Pino Raya, Seginim, dan Kota Manna. Karakteristik agraris ini menunjukkan pentingnya sektor pertanian dalam penyediaan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan penyumbang pendapatan daerah.

Subsektor perkebunan merupakan sektor dominan, dengan 23.157 unit usaha atau 73,79% dari total usaha pertanian perorangan. Komoditas utama seperti kelapa sawit dan kopi memiliki nilai ekonomi tinggi, namun sebagian besar masih dijual dalam bentuk mentah tanpa pengolahan lanjutan. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya nilai tambah yang diperoleh petani. Oleh karena itu, pengembangan industri hilir, promosi branding

produk unggulan lokal, dan penguatan kelembagaan seperti koperasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing.

Subsektor tanaman pangan, terutama padi sawah yang dikelola oleh 8.270 unit usaha, menjadi penopang ketahanan pangan lokal. Namun, sektor ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan irigasi, benih kurang unggul, dan metode budidaya tradisional. Diversifikasi tanaman pangan dengan jagung dan ubi kayu, serta penerapan teknologi budidaya modern menjadi solusi penting dalam meningkatkan produktivitas.

Subsektor hortikultura dengan 7.636 unit usaha menyumbang produk bernilai tinggi seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat. Namun, keterbatasan fasilitas pascapanen dan pemasaran menghambat potensi ekonominya. Intervensi berupa penyediaan cold storage, pelatihan pengolahan produk, dan kemitraan pasar perlu ditingkatkan.

Sektor perikanan juga memiliki prospek cerah, terutama perikanan tangkap yang didukung oleh garis pantai sepanjang lebih dari 70 km serta potensi perikanan budidaya air tawar dan tambak udang. Modernisasi alat tangkap, pelatihan nelayan, dan pengolahan hasil laut menjadi bagian dari agenda peningkatan produktivitas subsektor ini.

Potensi kehutanan Bengkulu Selatan terletak pada hasil hutan non-kayu seperti rotan, bambu, dan madu. Hutan lindung dan hutan produksi juga memberi peluang melalui skema perhutanan sosial yang mengutamakan konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pemanfaatannya masih terbatas akibat akses pasar dan teknologi pengolahan yang minim.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah regenerasi petani. Saat ini, sebanyak 63,72% pelaku usaha pertanian berusia di atas 45 tahun, menandakan urgensi keterlibatan generasi muda dalam sektor agraris. Petani milenial yang berjumlah 8.103 orang atau 26,09% dari total petani menjadi harapan dalam mengakselerasi adopsi teknologi modern seperti

pemanfaatan drone, aplikasi pertanian digital, dan alat mekanis. Urban farming pun mulai berkembang meskipun masih terbatas, dan dapat diperluas sebagai pendekatan inovatif pertanian perkotaan.

Penguatan sektor agraris secara keseluruhan membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, gudang penyimpanan, serta fasilitas pengolahan. Selain itu, kebijakan yang progresif, kolaborasi dengan sektor swasta, serta pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan menjadi kunci keberhasilan pembangunan sektor ini.

Kabupaten Bengkulu Selatan telah menetapkan target kontribusi sektor agraris terhadap PDRB sebesar 40% pada tahun 2045 dan peningkatan Indeks Ketahanan Pangan menjadi 85 sebagai indikator keberhasilan jangka panjang. Dengan integrasi perencanaan yang cermat, dukungan kebijakan yang kuat, dan partisipasi aktif masyarakat, potensi sumber daya alam Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dioptimalkan secara berkelanjutan untuk mendukung transformasi ekonomi daerah yang lebih tangguh, adil, dan berdaya saing tinggi.

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup merupakan dua konsep fundamental dalam pembangunan berkelanjutan. Daya dukung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan, seperti air bersih, udara, pangan, dan lahan produktif. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan dalam menyerap, menetralkan, dan mengelola limbah atau zat pencemar yang dihasilkan dari aktivitas manusia, tanpa menyebabkan kerusakan ekologis atau menurunkan kualitas lingkungan.

Dalam konteks pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan RPJMD, informasi mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi acuan penting dalam merancang kebijakan dan program pembangunan. Analisis ini membantu pemerintah daerah dalam menentukan kapasitas pembangunan wilayah, mengarahkan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan, serta mencegah terjadinya tekanan lingkungan yang berlebihan. Dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung, pembangunan diharapkan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjamin kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Data Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kabupaten Bengkulu Selatan yang disajikan melalui pendekatan indeks jasa ekosistem menunjukkan gambaran menyeluruh tentang kapasitas lingkungan dalam menopang keberlangsungan hidup dan pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Jasa ekosistem merupakan indikator penting dalam pengukuran daya dukung dan daya tampung karena mencerminkan kemampuan lingkungan untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (seperti pangan, air bersih, dan bahan bakar), mengatur sistem alam (seperti iklim, tata air, dan perlindungan terhadap bencana), serta mendukung nilai-nilai budaya dan keberlanjutan ekologis. Indeks ini diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah, yang menggambarkan sejauh mana lingkungan mampu menopang berbagai fungsi penting tersebut.

Terlihat bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kondisi daya dukung dan daya tampung yang bervariasi antar wilayah dan antar jenis jasa ekosistem. Pada beberapa fungsi seperti penyediaan serat (56,28%) dan penyerbukan alami (65,63%), indeks berada dalam kategori sangat tinggi hingga tinggi. Ini menandakan bahwa sektor pertanian dan kehutanan memiliki potensi ekologis yang kuat dan masih dapat dikembangkan secara

berkelanjutan. Begitu pula dengan pengaturan iklim dan pemurnian air, yang menunjukkan kapasitas ekologis daerah dalam menjaga stabilitas iklim mikro dan kualitas air tanah.

Namun demikian, tantangan besar juga terlihat dari sejumlah fungsi jasa ekosistem yang didominasi oleh kategori “rendah” hingga “sangat rendah”. Misalnya, pada fungsi pengolahan dan penguraian limbah (50,09%), ketersediaan ruang hidup (43,83%), dan budaya estetika (65,50%), mayoritas wilayah mengalami penurunan kapasitas lingkungan. Ini mencerminkan tekanan pembangunan yang tinggi, terutama di kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi yang tidak disertai dengan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan yang memadai. Akibatnya, kualitas lanskap dan kenyamanan ruang hidup menurun, yang berdampak langsung terhadap kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat.

Isu lainnya yang tidak kalah penting adalah kerentanan terhadap bencana ekologis, di mana indeks pengaturan dan perlindungan dari bencana menunjukkan nilai rendah (56,21% pada kategori rendah). Ini mengindikasikan bahwa sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kapasitas adaptif yang lemah terhadap risiko banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Untuk itu, penguatan sistem mitigasi dan adaptasi berbasis ekosistem, seperti rehabilitasi daerah aliran sungai, konservasi hutan lindung, serta restorasi lahan kritis menjadi kebutuhan mendesak.

Melihat kondisi tersebut, pemanfaatan data DDDTLH menjadi sangat penting sebagai instrumen teknokratik dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu merumuskan kebijakan dan strategi yang responsif terhadap daya dukung dan daya tampung aktual, antara lain melalui:

1. Peningkatan kapasitas pengelolaan limbah dan kualitas ruang hidup, khususnya di kawasan padat permukiman dan zona dengan daya tampung rendah;

2. Rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung dan daerah rawan bencana, termasuk optimalisasi fungsi hutan lindung, suaka alam, dan ekosistem DAS;
3. Penguatan sektor ekonomi berbasis jasa ekosistem, seperti pertanian organik, hutan rakyat, dan ekowisata berbasis komunitas lokal;
4. Integrasi informasi DDDTLH ke dalam dokumen perencanaan tata ruang, investasi, dan pengendalian pembangunan, agar sesuai dengan kapasitas ekologis wilayah; dan
5. Peningkatan kesadaran, kapasitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, dengan mendorong pelibatan aktif berbasis kearifan lokal dan kelembagaan komunitas.

Dengan menjadikan DDDTLH sebagai bagian integral dari perencanaan daerah, Kabupaten Bengkulu Selatan dapat membangun sistem pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat jangka panjang. Langkah ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat daerah.

D. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan secara menyeluruh dari tingkat nasional hingga individu, yang ditandai oleh tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, bermutu, aman, beragam, bergizi, terdistribusi secara merata, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemenuhan pangan ini juga harus memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai agama, keyakinan, dan budaya lokal guna mendukung kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif

secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara lintas sektor dan komprehensif, dengan fokus pada peningkatan produksi dalam negeri, stabilitas perdagangan, serta ketersediaan dan akses pangan di semua tingkat.

Guna menjamin konsumsi pangan yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas, diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai serta kebijakan ekonomi makro yang mampu menciptakan stabilitas pasokan dan harga pangan. Untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu daerah beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, digunakan sistem pengukuran berbasis Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP disusun berdasarkan tiga pilar utama, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator dalam IKP mempertimbangkan kesesuaian dengan indeks ketahanan pangan global, sensitivitas terhadap kondisi ketahanan pangan dan gizi, representasi ketiga pilar secara seimbang, serta ketersediaan data yang konsisten setiap tahun di seluruh wilayah.

Tabel II-2. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	72,4	74,54	72,3	73,67	74,63	74,91
Bengkulu Tengah	73	67,24	68,63	62,12	61,54	62,14
Bengkulu Utara	66,9	68,15	68,21	58,31	70,74	72,62
Kaur	70,1	70,68	72,12	71,51	73,9	74,75
Kepahiang	72,4	68,99	68,68	67,14	69,41	72,43
Kota Bengkulu	66,5	67,24	67,82	65,29	75,68	78,72
Lebong	72,2	76,09	74,38	74,86	75,84	77,06
Mukomuko	70,8	71,46	76,17	71,78	76,63	76,57
Rejang Lebong	70,9	70,64	67,54	66,68	72,67	73,11
Seluma	67,6	67,72	67,29	68,54	71,64	71,61
Provinsi Bengkulu	61,8	70,28	70,32	67,99	72,27	73,39

Sumber: <https://satudata.badanpangan.go.id/>

Secara umum, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan performa yang relatif stabil dan cenderung meningkat selama periode 2019-2024. Pada tahun 2019, IKP Bengkulu Selatan berada pada angka 72,4 dan meningkat menjadi 74,91 pada tahun 2024. Capaian

ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan mampu mempertahankan dan sedikit meningkatkan ketahanan pangan meskipun terdapat fluktuasi kecil pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan secara konsisten mencatatkan nilai IKP yang lebih tinggi, mengindikasikan kinerja ketahanan pangan yang lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi secara keseluruhan.

Ketika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Bengkulu Selatan tergolong sebagai daerah dengan IKP yang kuat. Kabupaten seperti Lebong, Kota Bengkulu, dan Mukomuko mencatatkan nilai yang sedikit lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir, sementara kabupaten lain seperti Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, bahkan sempat berada di bawah rata-rata provinsi. Stabilitas IKP Bengkulu Selatan dalam jangka menengah menjadi kekuatan tersendiri yang perlu terus diperkuat, terutama melalui intervensi lintas sektor untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan.

2. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Salah satu indikator yang mencerminkan tingkat ketahanan pangan masyarakat adalah prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan, yaitu persentase penduduk yang asupan energinya tidak mencapai kebutuhan minimum harian untuk hidup sehat dan aktif. Indikator ini mencerminkan seberapa besar bagian populasi yang rentan terhadap kelaparan tersembunyi akibat konsumsi energi pangan yang tidak mencukupi secara kronis.

Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Selatan, isu ketidacukupan konsumsi pangan menjadi perhatian penting dalam agenda pembangunan daerah, terutama mengingat kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang signifikan namun belum sepenuhnya mampu menjamin ketersediaan

dan akses pangan yang merata di seluruh wilayah. Kondisi geografis, pola konsumsi masyarakat, serta keterbatasan daya beli menjadi faktor yang saling terkait dalam membentuk dinamika ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, pemantauan dan pengendalian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menjadi bagian integral dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel II-3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

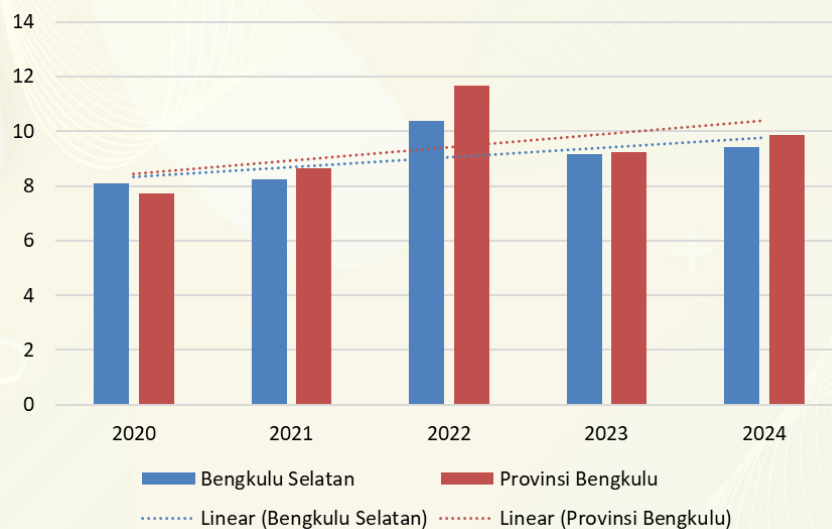
Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	8,09	8,25	10,38	9,16	9,42
Rejang Lebong	11,62	11,27	16,55	11,66	12,54
Bengkulu Utara	6,56	6,68	9,91	7,49	9,7
Kaur	6,33	7,01	9,54	9,52	12,36
Seluma	7,38	7,97	8,63	9,06	11,05
Mukomuko	3,64	5	5,94	4,86	5,56
Lebong	8,03	9,51	12,66	9,94	12,38
Kepahiang	10,99	11,3	15,4	13,17	13,7
Bengkulu Tengah	5,67	6	9,3	7,89	9,48
Kota Bengkulu	8,2	11,11	14,61	9,81	6,43
Provinsi Bengkulu	7,72	8,64	11,66	9,25	9,86

Sumber: BPS Indonesia

Selama periode 2020-2024, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung meningkat, dari 8,09 persen pada tahun 2020 menjadi 9,42 persen pada tahun 2024. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 10,38 persen, sebelum sedikit menurun pada tahun 2023 (9,16 persen) dan kembali meningkat pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan sempat berada di atas rata-rata provinsi pada tahun 2020 dan 2021, namun pada tahun 2022-2024, posisinya bergeser menjadi sedikit di bawah rata-rata provinsi, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 9,86 persen. Meskipun perbedaan ini tidak signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan ketahanan pangan di Bengkulu Selatan masih belum

tertangani secara optimal dan berisiko kembali meningkat apabila tidak diikuti dengan intervensi yang tepat.



Gambar II-1. Perbandingan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Kondisi ini mencerminkan adanya kerentanan terhadap akses pangan yang memadai, meskipun daerah ini memiliki potensi pertanian yang besar. Ketimpangan distribusi pangan, keterbatasan daya beli rumah tangga miskin, dan pola konsumsi yang belum beragam dapat menjadi faktor penyumbang utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan terintegrasi dalam peningkatan produksi pangan lokal yang bergizi, penguatan jaring pengaman sosial berbasis pangan, serta edukasi konsumsi pangan sehat, guna menurunkan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan secara berkelanjutan.

3. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak

Akses terhadap sumber air minum layak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, ketersediaan air minum

yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi bagian krusial dari pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah, sekaligus mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-6 tentang air bersih dan sanitasi layak. Bagi Kabupaten Bengkulu Selatan, pemenuhan akses air minum layak tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi rumah tangga, yang selanjutnya sangat relevan untuk dimasukkan dalam arah kebijakan dan sasaran strategis RPJMD 2025–2029.

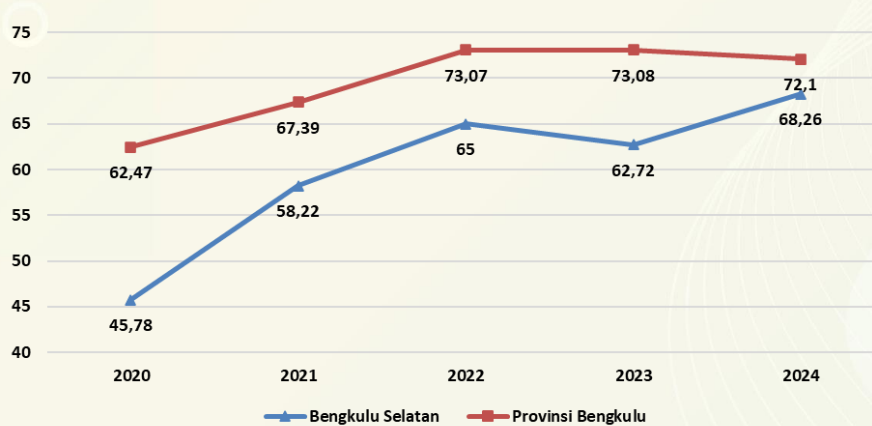
Tabel II-4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	45,78	58,22	65	62,72	68,26
Rejang Lebong	45,24	65,07	57,25	56,37	55,6
Bengkulu Utara	56,24	53,11	82,64	84,11	80,4
Kaur	79,4	80,95	83,94	84,18	79,79
Seluma	37,54	47,04	71,59	70,93	73,02
Mukomuko	79,41	75,99	75,73	75,45	75,82
Lebong	61,16	53,77	54,85	59,7	57,41
Kepahiang	63,18	62,65	68,61	62,14	64,82
Bengkulu Tengah	49,32	63,06	61,08	56,8	50,46
Kota Bengkulu	88,77	92,21	94,51	93,88	92,21
Provinsi Bengkulu	62,47	67,39	73,07	73,08	72,1

Berdasarkan data tahun 2020–2024, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 45,78% pada tahun 2020 menjadi 68,26% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam penyediaan layanan air minum, meskipun capaian tahun 2024 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang mencapai 72,10%.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, posisi Bengkulu Selatan berada di kelompok menengah. Capaian Bengkulu

Selatan sudah melampaui beberapa kabupaten seperti Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Lebong, namun masih tertinggal dibandingkan Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur yang consistently mencatat persentase di atas 79%. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada percepatan program penyediaan air minum layak, khususnya melalui penguatan infrastruktur distribusi, perluasan cakupan layanan PDAM, dan perlindungan sumber air bersih di tingkat lokal agar target pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.



Gambar II-2. Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Kabupaten Bengkulu Selatan dan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

4. Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik PLN

Ketersediaan akses listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pembangunan infrastruktur dasar dan kualitas hidup masyarakat. Akses terhadap penerangan listrik tidak hanya berdampak pada kenyamanan dan keamanan rumah tangga, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi kemajuan ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sosial masyarakat. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, peningkatan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN menjadi bagian penting dalam upaya pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan, terpencil, dan sulit dijangkau. Meskipun secara umum cakupan layanan listrik terus mengalami

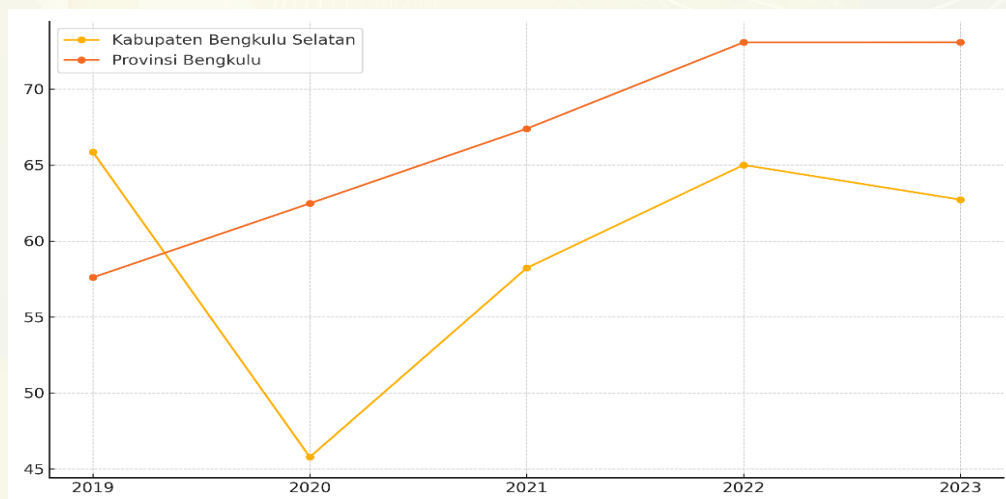
peningkatan dari tahun ke tahun, masih terdapat tantangan dalam memastikan keterjangkauan, keandalan, dan kesinambungan layanan listrik bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memperluas akses listrik PLN secara merata guna mendukung transformasi sosial dan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel II-5. Persentase Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik PLN Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Bengkulu	97,21	97,36	98,97	99,21	99,45
Bengkulu Selatan	99,62	96,25	99,87	99,84	99,35
Rejang Lebong	97,72	97,08	99,05	98,26	99,01
Bengkulu Utara	96,13	96,53	98,55	99,07	100
Kaur	94,31	95,54	99,44	99,33	98,36
Seluma	95,23	97,54	98,54	99	99,13
Mukomuko	96,33	94,28	97,74	99,44	99,52
Lebong	97,06	99,01	99,42	99,44	99,96
Kepahiang	97,19	95,76	97,47	98,35	98,82
Bengkulu Tengah	96,32	99,37	99,01	99,72	99,49
Kota Bengkulu	99,38	100	99,95	99,84	99,95

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan performa akses air minum layak yang tidak konsisten selama periode 2019-2023. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 65,85% dan kembali mendekati angka tersebut pada tahun 2022, namun sempat anjlok ke 45,78% pada tahun 2020. Perubahan tajam ini mencerminkan adanya kendala struktural atau kebijakan yang belum efektif dalam menjamin kesinambungan layanan air bersih. Meskipun mengalami perbaikan, tingkat akses air layak di Bengkulu Selatan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu pada tahun 2023.



Gambar II-3. Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023

Kabupaten Bengkulu Selatan mencatat perbaikan signifikan, meningkat hampir dua kali lipat dari 33,38% pada tahun 2019 menjadi 70,93% pada tahun 2023. Lonjakan ini menunjukkan adanya intervensi pembangunan infrastruktur atau program peningkatan akses air yang cukup berhasil. Sementara itu, rata-rata Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan secara konsisten hingga mencapai 73,08% pada 2023. Dibandingkan kedua kabupaten tersebut, Provinsi Bengkulu menunjukkan tren yang stabil dan menjadi tolok ukur bagi capaian daerah lain dalam penyediaan akses air minum layak.

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan kondisi ideal di mana lingkungan mampu mendukung keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya secara sehat, aman, dan berkelanjutan, serta terbebas dari pencemaran dan kerusakan. Dalam kerangka pembangunan daerah, kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu fondasi utama untuk menjamin kesinambungan pembangunan, menjaga keseimbangan daya

dukung dan daya tampung ekosistem, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Bagi Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dikenal memiliki kekayaan alam berupa kawasan hutan lindung, daerah aliran sungai, wilayah pesisir, dan potensi ekosistem laut, menjaga kualitas lingkungan hidup merupakan kunci penting dalam mengarahkan pembangunan yang ramah lingkungan. Dalam RPJMD 2025-2029, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan diarahkan melalui pendekatan yang tangguh terhadap perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan ekologi dan dapat menjamin kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan utama antara lain mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, menjaga fungsi ekologis lingkungan, mewujudkan keseimbangan ekosistem, serta menjamin keadilan antargenerasi, baik untuk masa kini maupun masa mendatang. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mendukung arah pembangunan berkelanjutan, dan merespons isu-isu lingkungan global seperti perubahan iklim dan degradasi keanekaragaman hayati.

Di Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai langkah sesuai dengan kewenangannya untuk mewujudkan

amanat tersebut. Upaya tersebut antara lain mencakup pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, serta pelestarian keanekaragaman hayati lokal, terutama di kawasan hutan, pesisir, dan sungai. Untuk mengukur kinerja dan efektivitas upaya perlindungan lingkungan hidup, digunakan instrumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang menjadi alat evaluasi kuantitatif dalam menilai kondisi dan capaian pembangunan lingkungan secara periodik. IKLH ini menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan dan program lingkungan di daerah, sekaligus mengarahkan agar pembangunan tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel II-6. Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)
Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023**

Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA)			Indeks Kualitas Udara (IKU)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Bengkulu Selatan	55,00	45,00	45,00	92,62	92,39	93,04
Rejang Lebong	58,33	63,33	61,67	86,56	88,41	89,58
Bengkulu Utara	50,00	50,00	30,00	87,47	89,35	91,46
Kaur	N/A	36,67	N/A	95,09	95,08	94,39
Seluma	45,00	30,00	60,00	93,04	92,98	94,48
Mukomuko	N/A	40,00	48,46	90,79	90,60	91,82
Lebong	50,00	48,57	52,00	95,32	96,67	96,21
Kepahiang	48,33	43,53	51,11	91,39	91,62	93,96
Bengkulu Tengah	44,29	40,40	54,17	87,68	86,94	89,28
Kota Bengkulu	44,12	45,00	37,78	88,70	88,10	90,65
Provinsi Bengkulu	49,81	46,18	48,98	90,81	91,27	92,49

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2024

Indeks kualitas lingkungan di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren yang relatif stagnan pada beberapa indikator utama, terutama Indeks Kualitas Air (IKA) yang menurun dari 55,00 pada tahun 2021 menjadi stagnan di angka 45,00 pada 2022 dan 2023. Angka ini berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang pada tahun 2023 mencapai 48,98. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Rejang Lebong dan Lebong, capaian IKA Bengkulu Selatan tertinggal cukup jauh. Sementara itu,

Indeks Kualitas Udara (IKU) di Bengkulu Selatan tergolong tinggi dan menunjukkan peningkatan kecil dari 92,62 ke 93,04 dalam tiga tahun terakhir, bahkan sedikit lebih tinggi dari rata-rata provinsi (92,49) pada tahun 2023.

Tabel II-7. Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023

Kabupaten/ Kota	Indeks Kualitas Lahan (IKL)			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Bengkulu Selatan	46,77	46,83	47,61	68,43 (Sedang)	64,59 (Sedang)	65,03 (Sedang)
Rejang Lebong	43,41	43,41	45,94	66,50 (Sedang)	70,12 (Sedang)	69,53 (Sedang)
Bengkulu Utara	57,21	57,21	56,93	66,75 (Sedang)	68,51 (Sedang)	60,79 (Sedang)
Kaur	66,36	66,36	66,42	53,04 (Sedang)	67,83 (Sedang)	52,77 (Sedang)
Seluma	45,90	45,90	45,94	64,65 (Sedang)	59,99 (Sedang)	70,89 (Baik)
Mukomuko	64,48	64,56	64,09	50,89 (Sedang)	66,87 (Sedang)	69,44 (Sedang)
Lebong	77,44	76,03	77,55	74,36 (Baik)	75,06 (Baik)	75,50 (Baik)
Kepahiang	29,19	29,19	29,51	61,58 (Sedang)	60,86 (Sedang)	63,73 (Sedang)
Bengkulu Tengah	25,62	25,62	26,59	57,77 (Sedang)	57,01 (Sedang)	62,35 (Sedang)
Kota Bengkulu	25,22	25,22	27,93	58,04 (Sedang)	58,12 (Sedang)	57,04 (Sedang)
Provinsi Bengkulu	55,52	55,19	55,80	71,46 (Baik)	70,82 (Baik)	72,10 (Baik)

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2024

Pada aspek Indeks Kualitas Lahan (IKL), Bengkulu Selatan mencatat angka sekitar 46,77–47,61 selama 2021–2023, yang masih berada di bawah rata-rata provinsi sebesar 55,80 di tahun 2023. Kabupaten seperti Lebong dan Kaur memiliki angka IKL yang jauh lebih tinggi dan stabil. Untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Bengkulu Selatan mempertahankan kategori “sedang” selama tiga tahun terakhir dengan skor yang cenderung datar, dari 68,43 di 2021 menjadi 65,03 di 2023. Sementara itu, rata-rata Provinsi Bengkulu sudah masuk dalam kategori “baik” sejak 2021 dan terus meningkat menjadi 72,10 pada 2023. Bahkan beberapa kabupaten seperti Lebong dan Seluma telah masuk kategori “baik” pada IKLH tahun 2023, yang menandakan pengelolaan lingkungan di daerah-daerah tersebut lebih efektif.

Secara umum, kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bengkulu Selatan masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun beberapa kabupaten lainnya. Upaya perbaikan kualitas air dan lahan perlu menjadi prioritas, di samping mempertahankan capaian positif pada kualitas udara. Program pengendalian pencemaran, rehabilitasi lingkungan, dan konservasi sumber daya alam harus ditingkatkan agar capaian indikator lingkungan dapat mendorong status kabupaten menuju kategori “baik” secara berkelanjutan.

2. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan alat ukur yang penting untuk menilai tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap berbagai jenis bencana, seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan lainnya. IRB dihitung berdasarkan tiga komponen utama: bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Bahaya mencerminkan potensi terjadinya bencana di suatu wilayah, kerentanan menunjukkan potensi dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan, sementara kapasitas mengukur kemampuan wilayah dalam menghadapi dan pulih dari bencana. Dengan mengintegrasikan ketiga komponen ini, IRB memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko yang dihadapi daerah, sehingga menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan yang tangguh bencana.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan, IRB merupakan indikator strategis yang harus dimasukkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Kabupaten ini memiliki potensi risiko yang cukup tinggi terhadap bencana banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Letak geografisnya yang berada pada jalur Cincin Api Pasifik menjadikan wilayah ini rentan terhadap gempa dan tsunami, sementara kondisi topografi yang terdiri dari sungai dan perbukitan menambah

potensi banjir dan longsor. Oleh karena itu, integrasi IRB ke dalam kebijakan pembangunan memungkinkan penyusunan strategi yang lebih adaptif dan berkelanjutan, seperti penguatan infrastruktur tahan bencana, penataan ruang berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesiapsiagaan masyarakat. Pendekatan ini akan memperkuat ketahanan wilayah dan memberikan perlindungan lebih baik terhadap penduduk dan aset strategis dari ancaman bencana yang terus meningkat.

Tabel II-8. Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Utara	205,60	205,60	186,25	189,19	189,19	186,92
Kaur	203,20	203,20	196,86	182,55	192,16	192,16
Seluma	191,20	191,20	165,74	172,23	163,04	165,81
Bengkulu Selatan	186,40	186,40	186,40	186,40	165,18	149,8
Bengkulu Tengah	173,20	173,20	167,80	167,80	163,99	152,34
Muko Muko	166,02	166,02	172,29	172,29	164,32	164,32
Kota Bengkulu	137,68	137,68	147,50	143,88	143,88	128,25
Kepahiang	138,00	138,00	138,00	117,49	101,31	112,35
Rejang Lebong	100,71	100,71	92,58	108,60	97,92	99,33
Lebong	118,00	118,00	118,00	113,09	106,49	89,52

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, BNPB, Tahun 2023

Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren positif dalam pengurangan risiko bencana. Selama periode 2019 hingga 2022, IRB Bengkulu Selatan stagnan di angka 186,40, mencerminkan minimnya peningkatan kapasitas mitigasi dan respons terhadap bencana. Namun, mulai tahun 2023, terjadi penurunan signifikan menjadi 165,18 dan kembali turun ke angka 149,80 pada tahun 2024. Penurunan sebesar 36,6 poin dalam dua tahun terakhir ini menandakan adanya perbaikan dalam aspek kesiapsiagaan, penguatan kelembagaan, maupun infrastruktur pendukung pengurangan risiko bencana.

Meski demikian, secara provinsi, IRB Bengkulu Selatan masih tergolong tinggi. Pada tahun 2024, Bengkulu Selatan berada di posisi keempat dengan IRB tertinggi dari sepuluh kabupaten/kota di Bengkulu, lebih tinggi dibanding Kota Bengkulu, Kepahiang, Lebong, dan Rejang

Lebong, namun masih lebih rendah dibanding Bengkulu Utara, Kaur, dan Seluma. Hal ini menunjukkan bahwa capaian positif dalam dua tahun terakhir belum cukup untuk menempatkan Bengkulu Selatan pada kategori risiko rendah.

Untuk itu, perlu ada kesinambungan upaya pengurangan risiko bencana yang lebih terencana dan sistematis. Penguatan program Desa Tangguh Bencana, pembangunan infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini, serta integrasi aspek kebencanaan dalam tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan menjadi sangat penting. Dengan langkah yang konsisten dan berbasis risiko, penurunan IRB tidak hanya menjadi indikator teknis, tetapi menjadi pijakan bagi terciptanya pembangunan daerah yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

F. Demografi

Demografi suatu daerah menggambarkan karakteristik statistik penduduk yang mencakup jumlah, kepadatan, struktur umur, tingkat kelahiran dan kematian, pola migrasi, serta kondisi sosial dan ekonomi yang membentuk dinamika populasi. Informasi demografis ini menjadi komponen penting dalam proses perencanaan pembangunan, karena memberikan dasar dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penyediaan lapangan kerja. Di tingkat daerah, analisis demografi berfungsi sebagai pedoman utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, agar program pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan, aspek demografi sangat berkaitan erat dengan berbagai sektor prioritas pembangunan, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus

berlangsung mendorong perlunya peningkatan kapasitas infrastruktur dan layanan publik agar kualitas hidup masyarakat tetap terjaga dan meningkat. Selain itu, struktur usia penduduk, khususnya dominasi kelompok usia produktif, menjadi faktor penting yang dapat diarahkan menjadi keunggulan demografis, asalkan didukung dengan kebijakan yang tepat, seperti penguatan keterampilan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan, dan perluasan kesempatan kerja.

Oleh sebab itu, pemahaman terhadap dinamika demografi di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi landasan strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan pembangunan di Bengkulu Selatan dapat berjalan secara berkelanjutan, memperkuat daya saing daerah, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk suatu wilayah merupakan indikator demografi yang menunjukkan banyaknya individu yang mendiami suatu daerah pada periode tertentu. Data jumlah penduduk mencerminkan dinamika pertumbuhan populasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti angka kelahiran, kematian, dan pola migrasi. Informasi ini sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan, infrastruktur transportasi, serta energi. Selain itu, jumlah penduduk juga berperan dalam menentukan potensi tenaga kerja dan tingkat konsumsi, yang menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan, jumlah penduduk menjadi salah satu variabel strategis dalam menentukan arah dan

prioritas kebijakan pembangunan. Dengan memahami jumlah penduduk serta struktur demografisnya, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Misalnya, apabila proporsi penduduk usia produktif cukup besar, maka arah kebijakan perlu difokuskan pada penciptaan lapangan kerja baru, penguatan sektor ketenagakerjaan, dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Sebaliknya, jika terdapat kecenderungan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia, maka perlu disiapkan kebijakan jaminan sosial, layanan kesehatan lanjut usia, serta pengembangan sistem pelayanan sosial yang adaptif.

Selain itu, jumlah penduduk juga menjadi faktor penting dalam perencanaan anggaran daerah, di mana alokasi sumber daya dan pembiayaan program harus disesuaikan dengan skala kebutuhan populasi yang ada. Dengan demikian, pemanfaatan data jumlah penduduk yang akurat menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan, sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Tabel II-9. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	2.005.045	2.032.384	2.059.373	2.086.006	2.112.235
Bengkulu Selatan	165.725	167.685	169.591	171.463	173.315
Rejang Lebong	276.005	279.280	282.519	285.710	288.832
Bengkulu Utara	295.825	299.479	303.111	306.659	310.125
Kaur	126.125	127.816	129.449	131.063	132.659
Seluma	207.314	209.961	212.544	215.063	217.507
Mukomuko	189.833	192.863	195.854	198.794	201.700
Lebong	105.947	107.447	108.902	110.347	111.750
Kepahiang	149.298	151.130	152.912	154.651	156.353
Bengkulu Tengah	116.344	117.986	119.571	121.139	122.673
Kota Bengkulu	372.629	378.737	384.920	391.117	397.321

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa Kabupaten Bengkulu

Selatan mengalami tren pertumbuhan penduduk yang stabil dari 165.725 jiwa pada tahun 2020 menjadi 173.315 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan jumlah penduduk ini menggambarkan pertumbuhan alami dan migrasi yang relatif konsisten, sejalan dengan dinamika demografis yang terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Bengkulu. Jika dibandingkan dengan daerah lain, jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada tingkat menengah, lebih besar dari Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Tengah, namun lebih kecil dibandingkan kabupaten-kabupaten seperti Rejang Lebong, Bengkulu Utara, dan Seluma.

Secara keseluruhan, Provinsi Bengkulu menunjukkan tren pertumbuhan populasi yang moderat, dari sekitar 2,005 juta jiwa di tahun 2020 menjadi 2,112 juta jiwa di tahun 2024. Kota Bengkulu tetap menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, sementara beberapa kabupaten lainnya, seperti Kaur dan Lebong, mencatatkan jumlah penduduk yang lebih kecil namun tetap mengalami pertumbuhan. Kabupaten Bengkulu Selatan dengan pertumbuhan yang cukup stabil memiliki peluang besar untuk memanfaatkan momentum demografi ini, terutama dalam mengoptimalkan potensi usia produktif yang mendominasi struktur penduduk.

Analisis terhadap tren ini menunjukkan peluang dan tantangan tersendiri. Peluangnya adalah adanya potensi tenaga kerja yang dapat mendorong sektor ekonomi, terutama pertanian, perdagangan, jasa, dan sektor industri kecil menengah (IKM). Pertumbuhan penduduk yang stabil juga menciptakan pasar lokal yang terus berkembang, yang bisa menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi berbasis komunitas. Namun, di sisi lain, tantangan yang harus dihadapi adalah meningkatnya kebutuhan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, serta infrastruktur jalan dan energi. Tanpa kesiapan perencanaan yang baik,

pertumbuhan jumlah penduduk berisiko menimbulkan tekanan terhadap kapasitas pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat.

Tabel II-10. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Manna	16.303	16.579	16.680	17.015	17.433
Kota Manna	31.807	32.187	32.542	32.897	33.354
Kedurang	11.990	12.118	12.267	12.370	12.506
Bunga Mas	6.828	6.906	6.986	7.055	7.144
Pasar Manna	17.954	17.919	18.369	18.094	17.811
Kedurang Ilir	8.944	9.093	9.151	9.329	9.551
Seginim	17.174	17.317	17.571	17.642	17.750
Air Nipis	12.441	12.615	12.729	12.915	13.150
Pino	12.775	12.876	13.070	13.112	13.180
Pinoraya	21.938	22.229	22.445	22.742	23.121
Ulu Manna	8.095	8.150	8.283	8.292	8.315
Bengkulu Selatan	166.249	167.989	170.093	171.463	173.315

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan data jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020 hingga 2024, tercatat adanya tren pertumbuhan penduduk yang stabil di hampir seluruh wilayah kecamatan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami peningkatan dari 166.249 jiwa pada tahun 2020 menjadi 173.315 jiwa pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya dinamika demografis yang positif, yang tidak hanya mencerminkan keberlanjutan populasi, tetapi juga menggambarkan kondisi sosial ekonomi daerah yang relatif stabil, mengingat faktor-faktor seperti kesehatan masyarakat, kelahiran, migrasi masuk, dan ketahanan ekonomi turut berkontribusi terhadap dinamika ini.

Jika dilihat lebih rinci, Kota Manna mencatatkan jumlah penduduk tertinggi dibandingkan kecamatan lain, yakni mencapai 33.354 jiwa pada tahun 2024. Kota Manna sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan layanan publik, secara alami menarik lebih banyak konsentrasi penduduk, sejalan dengan fungsi kotanya sebagai simpul aktivitas ekonomi dan

administrasi. Menyusul Kota Manna, Pino Raya juga mencatat angka yang cukup besar, dengan 23.121 jiwa di tahun yang sama, memperlihatkan peran wilayah ini sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru di bagian pedesaan yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang kuat.

Tabel II-11. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2024

Kelompok Umur	2021	2022	2023	2024
0-4	13.740	13.748	14.465	14.737
5-9	14.222	14.227	13.827	13.697
10-14	14.293	14.296	14.312	14.294
15-19	14.372	14.343	14.451	14.438
20-24	13.874	13.804	14.243	14.334
25-29	13.229	13.288	13.299	13.393
30-34	12.786	12.847	12.744	12.748
35-39	12.549	12.704	12.461	12.488
40-44	12.202	12.336	12.157	12.194
45-49	11.809	12.077	11.769	11.795
50-54	10.197	10.507	10.788	11.027
55-59	8.143	8.421	8.852	9.186
60-64	6.238	6.516	6.769	7.062
65-69	4.456	4.772	4.945	5.164
70-74	2.927	3.180	3.250	3.444
75+	2.862	3.027	3.131	3.314
Jumlah	167.989	170.093	171.463	173.315

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan

Di sisi lain, beberapa kecamatan seperti Bunga Mas dan Ulu Manna tercatat memiliki jumlah penduduk yang lebih kecil, masing-masing 7.144 jiwa dan 8.315 jiwa pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan karakteristik wilayah yang lebih rural, dengan tingkat kepadatan penduduk rendah dan aktivitas ekonomi yang lebih bertumpu pada sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Meskipun jumlah penduduknya kecil, wilayah-wilayah ini tetap memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, penyediaan sumber daya alam, serta sebagai lumbung pangan daerah. Perbedaan distribusi penduduk antar kecamatan ini juga menunjukkan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis karakteristik lokal, agar pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan dapat berjalan secara seimbang di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Komposisi penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan dominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun), yang mencerminkan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Meskipun demikian, tren peningkatan jumlah penduduk pada kelompok usia dini (0-14 tahun) dan usia lanjut (65 tahun ke atas) mengindikasikan adanya beban ketergantungan yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan kebijakan sosial dan ekonomi.

Keseimbangan antara peningkatan kualitas sumber daya manusia usia produktif dan pemenuhan kebutuhan kelompok usia tidak produktif menjadi kunci dalam mengoptimalkan peluang bonus demografi. Oleh karena itu, investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial perlu diprioritaskan untuk memastikan bahwa dinamika struktur penduduk ini dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator demografis yang menggambarkan tingkat perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, serta arus migrasi masuk dan keluar. Indikator ini memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan karena secara langsung berkaitan dengan kebutuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, serta penyediaan lapangan kerja. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk juga berdampak terhadap tekanan terhadap sumber daya alam dan kapasitas lingkungan hidup.

Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Selatan, pemahaman terhadap dinamika pertumbuhan penduduk menjadi sangat penting dalam

penyusunan RPJMD 2025–2029, karena akan menentukan arah dan strategi kebijakan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk yang stabil dan dikelola dengan baik dapat menjadi modal sosial dan ekonomi yang signifikan, karena berpotensi meningkatkan konsumsi domestik, memperluas basis tenaga kerja produktif, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa.

Tabel II-12. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2021-2024

Wilayah	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	1,48	1,4	1,13	1,12
Bengkulu Selatan	1,4	1,31	1,18	1,16
Rejang Lebong	1,04	0,95	1,23	1,2
Bengkulu Utara	1,29	1,21	1,28	1,26
Kaur	1,48	1,4	1,24	1,21
Seluma	1,69	1,61	1,56	1,54
Mukomuko	1,89	1,81	1,37	1,34
Lebong	0,6	0,51	1,18	1,16
Kepahiang	1,7	1,62	1,36	1,34
Bengkulu Tengah	1,6	1,51	1,68	1,66
Kota Bengkulu	1,79	1,71	1,35	1,32

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Namun demikian, jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan perluasan infrastruktur dasar, penciptaan lapangan kerja yang memadai, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, maka potensi tersebut justru dapat berubah menjadi tantangan serius, seperti meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pelayanan, hingga degradasi lingkungan. Oleh karena itu, dalam merancang kebijakan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu menjadikan analisis laju pertumbuhan penduduk sebagai dasar pengambilan keputusan, agar setiap program dan intervensi pembangunan benar-benar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat, adil dalam distribusinya, serta berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Berdasarkan data laju pertumbuhan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2021 hingga 2024, terlihat bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami tren pertumbuhan yang relatif stabil dan terkendali, dimulai dari angka 1,4% pada tahun 2021, lalu menurun menjadi 1,31% pada tahun 2022, 1,18% pada 2023, dan sedikit menurun lagi menjadi 1,16% pada tahun 2024. Tren penurunan ini terjadi secara bertahap dan mencerminkan situasi demografis yang tidak mengalami lonjakan drastis, baik dari sisi kelahiran, kematian, maupun migrasi. Meski ada penurunan, angka tersebut masih berada di atas rata-rata provinsi pada tahun 2024, yaitu 1,12%, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan tetap memiliki dinamika penduduk yang aktif dan tidak stagnan.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, laju pertumbuhan penduduk Bengkulu Selatan berada di kategori menengah. Kabupaten seperti Mukomuko, Kota Bengkulu, dan Kepahiang mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi, terutama pada tahun-tahun awal, dengan Mukomuko sempat mencapai 1,89% pada 2021. Namun demikian, mereka juga menunjukkan pola penurunan, menandakan bahwa fenomena perlambatan pertumbuhan penduduk tidak hanya terjadi di Bengkulu Selatan, tetapi merupakan tren umum di seluruh wilayah provinsi. Sebaliknya, Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih rendah dari Bengkulu Selatan dalam beberapa tahun, bahkan sempat berada di bawah 1%. Kondisi ini bisa disebabkan oleh tingkat migrasi keluar yang lebih tinggi, rendahnya angka kelahiran, atau keterbatasan akses ekonomi yang mendorong perpindahan penduduk.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan penduduk di Bengkulu Selatan berlangsung dengan cukup seimbang dibandingkan wilayah lain, tidak terlalu cepat yang dapat menimbulkan beban terhadap penyediaan layanan dasar, tetapi juga tidak terlalu lambat sehingga tetap

memberikan dorongan terhadap dinamika ekonomi lokal. Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peluang untuk melakukan perencanaan pembangunan secara lebih terukur dan adaptif. Pertumbuhan penduduk yang stabil juga mencerminkan kondisi sosial yang relatif aman, serta lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat. Di sisi lain, jika laju pertumbuhan ini tidak dimanfaatkan dengan baik, potensi penduduk usia produktif yang terus meningkat bisa berujung pada persoalan pengangguran atau beban sosial yang meningkat, terutama jika tidak disertai dengan ketersediaan lapangan kerja dan akses terhadap pendidikan yang memadai.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap data ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk tidak hanya dicatat sebagai angka statistik, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan daerah yang responsif dan pro-rakyat. Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki peluang besar untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas pembangunan, asalkan strategi pembangunan diarahkan pada penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan infrastruktur dan layanan dasar yang merata hingga ke tingkat desa.

3. Rasio Penduduk

Rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah, yang umumnya dinyatakan sebagai jumlah laki-laki per 100 perempuan. Rasio di atas 100 menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak, sementara rasio di bawah 100 berarti jumlah perempuan lebih dominan. Rasio ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kelahiran, kematian, migrasi, serta dinamika sosial dan ekonomi. Perubahan dalam rasio jenis kelamin memberikan informasi penting mengenai struktur demografi suatu

wilayah, termasuk distribusi populasi dan potensi tenaga kerja dalam berbagai sektor.

Dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, khususnya dalam penyusunan RPJMD 2025-2029, rasio jenis kelamin menjadi indikator penting dalam merancang kebijakan sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan yang berkeadilan. Ketimpangan rasio yang terlalu besar dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembangunan, seperti dalam penyediaan tenaga kerja di sektor yang lebih didominasi laki-laki (misalnya pertanian dan perikanan), maupun dalam pengembangan layanan publik berbasis gender seperti kesehatan ibu dan anak, perlindungan perempuan, dan pendidikan. Apabila jumlah perempuan lebih banyak, maka program-program yang mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan keterampilan, serta perluasan akses terhadap layanan dasar harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan.

Tabel II-13. Rasio Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2015-2024

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	104	104	104	104	104	104,72	104,6	104,51	104,38
Bengkulu Selatan	101	101	101	101	101	103,95	103,83	103,72	103,6
Rejang Lebong	103	103	103	102	102	104,34	104,21	104,02	103,86
Bengkulu Utara	105	105	105	105	105	104,87	104,74	104,52	104,36
Kaur	107	107	107	107	107	106,27	106,14	105,83	105,64
Seluma	106	106	106	105	105	106,38	106,25	106,24	106,15
Mukomuko	108	108	109	108	108	106,89	106,76	106,61	106,47
Lebong	104	104	104	104	104	104,68	104,55	104,58	104,48
Kepahiang	105	105	104	104	104	106,46	106,33	106	105,78
Bengkulu Tengah	105	105	105	105	105	105,44	105,31	105,11	104,96
Kota Bengkulu	101	101	101	101	101	101,86	101,74	101,99	101,97

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Selain itu, rasio jenis kelamin juga menjadi dasar perencanaan yang krusial dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan gender. Dengan memahami proporsi laki-laki dan perempuan hingga tingkat kecamatan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Selatan dapat merumuskan pendekatan pembangunan yang lebih tepat sasaran, adil, dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan mampu menjawab kebutuhan seluruh kelompok demografi, mendorong partisipasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, serta memperkuat arah pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Bengkulu Selatan.

Berdasarkan data rasio jenis kelamin penduduk di Provinsi Bengkulu dari tahun 2015 hingga 2024, Kabupaten Bengkulu Selatan mencatatkan tren peningkatan rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan secara konsisten, dari angka 101 pada tahun 2015 menjadi 103,6 pada tahun 2024. Artinya, dalam sembilan tahun terakhir, komposisi penduduk laki-laki secara bertahap terus mendominasi, dengan selisih yang semakin lebar terutama setelah tahun 2021. Kenaikan ini menunjukkan adanya pergeseran struktur demografi yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alami seperti kelahiran dan kematian, tetapi juga sangat mungkin terkait dengan pola migrasi penduduk, khususnya masuknya tenaga kerja laki-laki untuk sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, dan konstruksi yang menjadi tulang punggung ekonomi wilayah ini.

Jika dilihat secara komparatif dengan wilayah lain di Provinsi Bengkulu, posisi Bengkulu Selatan dalam hal rasio jenis kelamin tergolong relatif moderat. Rata-rata provinsi pada tahun 2024 adalah 104,38, sedikit lebih tinggi dari Bengkulu Selatan. Namun, terdapat beberapa kabupaten seperti Mukomuko, Seluma, dan Kaur yang mencatatkan rasio lebih tinggi dari 106, yang menandakan dominasi laki-laki yang sangat mencolok. Sementara itu, Kota Bengkulu mempertahankan rasio paling seimbang, berada stabil di kisaran 101 sejak tahun 2015. Kondisi ini memperlihatkan bahwa struktur demografi Bengkulu Selatan masih cukup berimbang dibanding kabupaten

lain, meskipun tetap menunjukkan kecenderungan ke arah ketimpangan yang perlu diwaspadai.

Tren peningkatan rasio ini memiliki implikasi penting dalam konteks pembangunan daerah. Di satu sisi, dominasi jumlah laki-laki berpotensi menjadi kekuatan produktif yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor padat karya, seperti pertanian, infrastruktur, hingga jasa logistik. Namun di sisi lain, ketimpangan gender yang terus meningkat dapat menimbulkan tekanan terhadap penyediaan layanan publik yang adil dan setara, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, akses pendidikan bagi perempuan, serta kesempatan ekonomi yang merata bagi kedua jenis kelamin. Ketidakeimbangan ini, jika dibiarkan, juga berpotensi memengaruhi tatanan sosial jangka panjang, termasuk dalam hal pembagian peran dalam rumah tangga, keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, dan risiko marginalisasi sosial.

Oleh karena itu, dalam menyusun RPJMD 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu menjadikan rasio jenis kelamin sebagai salah satu dasar penting dalam perencanaan pembangunan. Strategi yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapasitas layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan gender, seperti fasilitas kesehatan perempuan, pelatihan kerja berbasis inklusi, dan sistem perlindungan sosial yang memperhatikan kelompok rentan. Selain itu, penting pula untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi perempuan, mendorong partisipasi mereka dalam sektor-sektor produktif, dan memastikan keadilan akses terhadap sumber daya pembangunan.

4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan indikator demografis yang mengukur banyaknya penduduk yang menghuni suatu wilayah per satuan luas, biasanya dinyatakan dalam satuan jiwa per kilometer persegi

(jiwa/km²). Indikator ini memberikan gambaran tentang bagaimana populasi tersebar dalam suatu daerah, serta sejauh mana persebaran tersebut berpengaruh terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di wilayah dengan kepadatan tinggi, aktivitas ekonomi cenderung lebih dinamis, dan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi biasanya lebih mudah dijangkau. Sebaliknya, daerah dengan kepadatan rendah, terutama di kawasan pedesaan, hutan, dan daerah perbukitan, sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur, konektivitas, dan pelayanan dasar.

Dalam konteks perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan, yang secara geografis terdiri dari kawasan pesisir, dataran rendah, hingga perbukitan dengan persebaran penduduk yang tidak merata, pemahaman terhadap kepadatan penduduk menjadi hal yang sangat penting. Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti Kota Manna dan Pasar Manna, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, terdapat kecamatan seperti Kedurang, Kedurang Ilir, dan Ulu Manna, yang memiliki kepadatan rendah dan tantangan khas wilayah pedalaman, seperti aksesibilitas terbatas, jarak terhadap fasilitas pelayanan dasar yang jauh, serta masih rendahnya jangkauan infrastruktur modern.

Karena itu, data kepadatan penduduk harus menjadi salah satu dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029, agar arah pembangunan lebih proporsional dan tepat sasaran. Wilayah dengan kepadatan rendah perlu mendapatkan intervensi dalam bentuk penguatan aksesibilitas dan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaringan transportasi. Sementara itu, kawasan yang mulai mengalami pertumbuhan kepadatan penduduk yang signifikan memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan tata ruang, penyediaan perumahan, dan infrastruktur dasar, agar pertumbuhan tersebut tidak

menimbulkan beban terhadap daya dukung lingkungan dan pelayanan publik.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu merancang strategi pembangunan yang mempertimbangkan sebaran penduduk antar wilayah, termasuk dengan memperluas pembangunan pusat-pusat pelayanan di kecamatan dengan kepadatan rendah, memperkuat konektivitas jalan dan jaringan digital, serta memastikan bahwa seluruh wilayah, baik padat maupun jarang penduduk, mendapatkan akses yang setara terhadap hasil pembangunan. Dengan memahami secara utuh dan kontekstual pola kepadatan penduduk, Kabupaten Bengkulu Selatan dapat mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan, yang menjangkau semua lapisan masyarakat dan wilayah, tanpa meninggalkan kelompok atau daerah tertentu.

Tabel II-14. Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	99,88	102,6	102,34	103,63	104,93
Bengkulu Selatan	136,25	141,63	139,4	140,52	142,04
Rejang Lebong	178,6	170	181,59	184,45	186,46
Bengkulu Utara	66,16	69,23	67,57	68,42	69,19
Kaur	48,51	54,01	49,7	50,24	50,85
Seluma	85,45	87,69	87,86	88,4	89,41
Mukomuko	46,03	47,86	47,5	48,03	48,74
Lebong	63,78	55,56	64,35	66,21	67,05
Kepahiang	199,81	228,03	205,49	206,37	208,64
Bengkulu Tengah	103,07	96,49	105,81	106,98	108,34
Kota Bengkulu	2.485,47	2.495,74	2.560,32	2.602,07	2.643,34

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Data kepadatan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan secara konsisten menempati posisi menengah-atas dalam hal jumlah penduduk per kilometer persegi. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk Bengkulu Selatan tercatat sebesar 136,25 jiwa/km² dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 142,04 jiwa/km² pada tahun 2024. Meskipun

mengalami sedikit fluktuasi, khususnya pada tahun 2022 yang sempat turun ke angka 139,4 jiwa/km², tren keseluruhan menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil. Dibandingkan dengan rata-rata provinsi yang juga meningkat dari 99,88 jiwa/km² di tahun 2020 menjadi 104,93 jiwa/km² pada 2024, Kabupaten Bengkulu Selatan secara konsisten berada di atas rata-rata provinsi, mengindikasikan bahwa wilayah ini memiliki sebaran penduduk yang lebih padat dibandingkan sebagian besar wilayah lainnya di Bengkulu.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Kabupaten Bengkulu Selatan tidak sepadat Kota Bengkulu yang memiliki kepadatan sangat tinggi dan mendekati 2.650 jiwa/km², namun jauh lebih padat dibandingkan daerah-daerah seperti Mukomuko, Kaur, dan Lebong, yang seluruhnya berada di bawah 70 jiwa/km². Ini menunjukkan bahwa struktur spasial dan pusat-pusat permukiman di Bengkulu Selatan lebih berkembang, terutama di kecamatan-kecamatan yang berperan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan layanan publik. Sebaliknya, wilayah lain yang kepadatannya rendah cenderung memiliki karakteristik geografis yang lebih luas dengan populasi tersebar, seperti kawasan pesisir atau perbukitan, sehingga memerlukan pendekatan pembangunan yang berbeda.

Dari sudut pandang pembangunan, tingkat kepadatan penduduk Bengkulu Selatan yang relatif tinggi menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, kepadatan yang memadai dapat mendorong efisiensi penyediaan layanan dasar dan infrastruktur, memperkuat pasar lokal, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas dan usaha kecil. Namun, di sisi lain, tekanan terhadap infrastruktur, ruang permukiman, dan lingkungan hidup juga meningkat, terutama di wilayah perkotaan yang terus berkembang. Jika tidak ditangani dengan tata ruang yang baik dan pengendalian pembangunan yang ketat, kepadatan yang meningkat dapat menyebabkan

permasalahan seperti kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, hingga kesenjangan pelayanan antarwilayah.

Untuk merespons dinamika ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu menyusun strategi yang mempertimbangkan variasi kepadatan antar kecamatan. Di wilayah dengan kepadatan tinggi, kebijakan harus diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas perumahan, pengelolaan transportasi perkotaan, serta pengembangan ruang terbuka hijau dan sanitasi. Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan rendah perlu didorong melalui pembangunan pusat-pusat pelayanan baru, peningkatan konektivitas antarwilayah, dan penyebaran investasi secara lebih merata untuk mengurangi ketimpangan antar kawasan. Penting juga bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan data kepadatan ini dalam tata ruang wilayah dan penyusunan RPJMD 2025-2029 agar kebijakan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan nyata dan mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, serta merata di seluruh penjuru Kabupaten Bengkulu Selatan.

5. Proyeksi jumlah dan kepadatan penduduk

Pada tahun 2023, Pemerintah Pusat melalui kolaborasi antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), dan United Nations Population Fund (UNFPA), serta melibatkan sejumlah instansi terkait seperti BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan para pakar kependudukan, telah merilis dokumen Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2020-2050 yang didasarkan pada hasil Sensus Penduduk 2020. Proyeksi ini menggunakan pendekatan ilmiah berbasis tren pertumbuhan penduduk dan dinamika demografi nasional maupun regional.

Dengan mengacu pada pendekatan yang sama serta mempertimbangkan karakteristik pertumbuhan penduduk di tingkat

provinsi, maka diperoleh proyeksi penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2025 hingga 2030. Proyeksi ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan RPJMD 2025-2029, karena dapat digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan layanan dasar, perumahan, infrastruktur, serta peluang dan tantangan sosial ekonomi yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah ke depan.

Tabel II-15. Proyeksi Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	14.887	14.863	14.830	14.789	14.743	14.691
5-9	13.706	13.873	14.034	14.190	14.339	14.487
10-14	14.327	14.358	14.385	14.409	14.428	14.437
15-19	14.457	14.479	14.508	14.540	14.573	14.607
20-24	14.283	14.254	14.242	14.246	14.260	14.278
25-29	13.397	13.369	13.317	13.252	13.190	13.144
30-34	12.787	12.837	12.893	12.943	12.975	12.980
35-39	12.589	12.664	12.714	12.749	12.783	12.824
40-44	12.328	12.471	12.620	12.776	12.914	13.003
45-49	12.005	12.187	12.343	12.482	12.616	12.756
50-54	11.330	11.624	11.910	12.181	12.430	12.653
55-59	9.482	9.785	10.091	10.398	10.703	11.000
60-64	7.352	7.633	7.906	8.176	8.447	8.723
65-69	5.411	5.674	5.949	6.228	6.504	6.779
70-74	3.676	3.893	4.100	4.304	4.515	4.737
75+	3.565	3.848	4.163	4.499	4.851	5.214
Total	175.432	177.508	179.537	181.516	183.446	185.324

Sumber: SDI (Data diolah)

Berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025 hingga 2030, terlihat adanya tren peningkatan jumlah penduduk secara konsisten dari 175.432 jiwa pada tahun 2025 menjadi 185.324 jiwa pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan laju pertumbuhan penduduk yang relatif stabil, dengan penambahan rata-rata sekitar 2.000 jiwa per tahun. Pertumbuhan ini tersebar cukup merata di berbagai kelompok usia, menunjukkan dinamika demografis yang kompleks namun terkendali.

Jika ditelusuri berdasarkan struktur umur, kelompok usia muda (0-14 tahun) menunjukkan stabilitas jumlah yang relatif konstan, misalnya

kelompok usia 0-4 tahun menurun perlahan dari 14.887 jiwa pada 2025 menjadi 14.691 jiwa pada 2030, sementara kelompok 5-9 dan 10-14 tahun justru mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa angka kelahiran berada pada tingkat yang moderat dan relatif terjaga. Di sisi lain, kelompok usia produktif (15-64 tahun) mendominasi struktur populasi, dengan jumlah yang terus meningkat pada setiap subkelompok umur. Sebagai contoh, kelompok usia 50-54 tahun naik dari 11.330 jiwa pada 2025 menjadi 12.653 jiwa pada 2030, sedangkan kelompok usia 60-64 tahun meningkat dari 7.352 jiwa menjadi 8.723 jiwa pada periode yang sama. Ini menandakan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan masih menikmati bonus demografi, dengan proporsi penduduk usia produktif yang besar.

Namun demikian, pergeseran menuju penuaan penduduk mulai terlihat. Peningkatan cukup tajam terjadi pada kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas), terutama pada kelompok usia 75 tahun ke atas yang meningkat dari 3.565 jiwa pada 2025 menjadi 5.214 jiwa pada 2030, mencerminkan adanya transisi demografi ke arah struktur penduduk yang menua. Hal ini menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan kebijakan perlindungan sosial dan layanan kesehatan lansia, mengingat beban ketergantungan akan meningkat seiring bertambahnya usia penduduk.

Secara keseluruhan, data proyeksi ini memberikan sinyal bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan akan menghadapi dua tantangan utama dalam demografi ke depan, yaitu menjaga produktivitas penduduk usia kerja dan mengantisipasi peningkatan kebutuhan layanan untuk kelompok lansia. Untuk itu, perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang harus mengakomodasi dinamika ini melalui investasi di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta sistem jaminan sosial. Pemanfaatan bonus demografi secara optimal dan persiapan menuju era

aging population akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Bengkulu Selatan hingga 2030.

Tabel II-16. Proyeksi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2030

Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan/km ²
2025	175432	74,18
2026	177508	75,06
2027	179537	75,92
2028	181516	76,75
2029	183446	77,57
2030	185324	78,36

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025 hingga 2030, terlihat adanya tren peningkatan jumlah penduduk yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 175.432 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 74,18 jiwa per kilometer persegi (km²). Angka ini terus meningkat secara bertahap setiap tahun, hingga mencapai 185.324 jiwa pada tahun 2030, dengan kepadatan 78,36 jiwa/km². Kenaikan ini menunjukkan rata-rata penambahan lebih dari 1.000 jiwa per tahun, serta peningkatan kepadatan sekitar 0,7 hingga 0,8 jiwa/km² per tahun, yang mencerminkan laju pertumbuhan penduduk yang stabil dan terukur.

Secara demografis, kenaikan kepadatan ini dapat diartikan sebagai indikasi bertambahnya konsentrasi aktivitas dan permukiman penduduk di wilayah Bengkulu Selatan. Kepadatan yang meningkat dapat memberikan keuntungan dari sisi efisiensi pembangunan, seperti kemudahan dalam distribusi layanan dasar, peningkatan interaksi ekonomi lokal, dan efektivitas pemanfaatan infrastruktur publik. Namun, jika tidak diimbangi dengan penataan ruang dan sistem pelayanan yang memadai, peningkatan kepadatan juga dapat menimbulkan berbagai tekanan, antara lain pada sektor perumahan, sanitasi, transportasi, serta daya dukung lingkungan,

terutama di pusat-pusat pertumbuhan seperti Kota Manna, Pasar Manna, dan sekitarnya.

Oleh karena itu, data ini harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan, khususnya dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029. Pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah-langkah antisipatif, seperti penguatan sistem tata ruang yang berbasis zonasi kepadatan, pemerataan pembangunan antarwilayah, dan peningkatan investasi pada infrastruktur dasar di kecamatan-kecamatan dengan tren pertumbuhan cepat. Di sisi lain, wilayah yang masih memiliki kepadatan rendah dapat dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mengurangi tekanan di wilayah perkotaan. Dengan strategi yang berbasis data dan berorientasi pada keberlanjutan, peningkatan kepadatan penduduk dapat menjadi peluang untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bengkulu Selatan secara merata.

6. Proyeksi penduduk usia produktif

Penduduk usia produktif merujuk pada kelompok penduduk yang berada dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun, yang secara umum dianggap memiliki kemampuan untuk bekerja, menghasilkan pendapatan, dan berkontribusi secara aktif terhadap aktivitas sosial dan ekonomi. Kelompok ini menjadi sumber utama tenaga kerja dan merupakan penggerak utama dalam proses produksi, inovasi, serta konsumsi dalam suatu wilayah.

Dalam konteks pembangunan daerah, terutama untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029, penduduk usia produktif memiliki peran strategis sebagai modal demografi (demographic dividend) yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika komposisi penduduk

didominasi oleh kelompok usia produktif, maka potensi daya saing daerah akan semakin besar, asalkan didukung oleh kebijakan yang tepat, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan dan pendidikan vokasional, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan.

Namun demikian, tanpa intervensi kebijakan yang responsif, bonus demografi ini bisa menjadi beban, misalnya jika lapangan kerja terbatas, kualitas sumber daya manusia rendah, atau terjadi ketimpangan dalam distribusi akses ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, dalam RPJMD 2025-2029, pemerintah daerah perlu merancang strategi pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan penduduk usia produktif melalui program pelatihan kerja, inkubasi usaha, penguatan UMKM, serta pendidikan berbasis keterampilan, sehingga potensi besar ini benar-benar dapat dioptimalkan menjadi kekuatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel II-17. Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2030

Tahun	Total Usia Produktif	Total Penduduk	Persentase Usia Produktif (%)
2025	120.010	175.432	68,41
2026	121.303	177.508	68,34
2027	122.544	179.537	68,26
2028	123.743	181.516	68,17
2029	124.891	183.446	68,08
2030	125.968	185.324	67,97

Sumber: SDI (Data diolah)

Berdasarkan data proyeksi penduduk usia produktif Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025 hingga 2030, terlihat bahwa jumlah penduduk dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun) mengalami kenaikan secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia produktif diperkirakan mencapai 120.010 jiwa, yang setara dengan 68,41% dari total penduduk. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 125.968 jiwa pada tahun 2030, meskipun persentasenya terhadap total penduduk menunjukkan sedikit penurunan menjadi 67,97%.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah absolut penduduk usia produktif meningkat, pertumbuhan kelompok usia non-produktif (terutama usia lanjut) juga mulai mengalami peningkatan.

Tren ini mengindikasikan bahwa bonus demografi masih berlangsung di Kabupaten Bengkulu Selatan, di mana lebih dari dua pertiga penduduk berada dalam rentang usia yang produktif. Ini merupakan peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta mendorong inovasi dan produktivitas, baik di sektor formal maupun informal. Namun demikian, penurunan bertahap dalam persentase penduduk usia produktif mengisyaratkan perlunya kesiapan jangka panjang dalam menghadapi struktur demografi yang menua, di mana beban ketergantungan terhadap penduduk usia kerja akan semakin besar.

Dari sudut pandang perencanaan pembangunan dalam RPJMD 2025-2029, data ini menegaskan pentingnya strategi pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan adaptif. Pemerintah daerah perlu mengarahkan kebijakan pada pengembangan keterampilan kerja, pendidikan vokasional, penguatan sektor-sektor produktif seperti pertanian modern, ekonomi kreatif, dan digitalisasi UMKM, serta penyediaan lapangan kerja yang layak dan merata. Di sisi lain, pemerintah juga harus mulai mengantisipasi peningkatan kebutuhan layanan sosial dan kesehatan bagi kelompok usia non-produktif yang akan tumbuh dalam dekade mendatang. Dengan pendekatan yang terintegrasi, penduduk usia produktif dapat dioptimalkan sebagai motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Bengkulu Selatan.

7. Proyeksi angka ketergantungan

Proyeksi penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2025-2029 menunjukkan pola yang signifikan dalam memahami angka

ketergantungan, yaitu rasio antara populasi non-produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun serta lansia berusia 65 tahun ke atas) terhadap populasi usia produktif (15-64 tahun).

Tabel II-18. Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2030

Tahun	0-14	15-64	65+	Angka Ketergantungan (%)
2025	42.920	120.010	12.652	46,31
2026	43.094	121.303	13.415	46,58
2027	43.249	122.544	14.212	46,89
2028	43.388	123.743	15.031	47,21
2029	43.510	124.891	15.870	47,55
2030	43.615	125.968	16.730	47,91

Sumber: Data diolah

Berdasarkan proyeksi angka ketergantungan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025 hingga 2030, terlihat adanya tren kenaikan angka ketergantungan secara bertahap dari 46,31% pada tahun 2025 menjadi 47,91% pada tahun 2030. Angka ketergantungan ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia tidak produktif, yaitu kelompok usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Dengan kata lain, pada tahun 2025, setiap 100 orang usia produktif menanggung sekitar 46 orang yang tergolong tidak produktif, dan angka ini terus meningkat hingga hampir 48 orang pada akhir proyeksi.

Jika dilihat dari komponen pembentuknya, jumlah penduduk usia 0-14 tahun relatif stabil dalam kisaran 42.000 hingga 43.600 jiwa selama periode proyeksi, mencerminkan angka kelahiran yang cukup konstan. Namun, yang menarik adalah peningkatan yang signifikan terjadi pada kelompok usia 65 tahun ke atas, dari 12.652 jiwa pada tahun 2025 menjadi 16.730 jiwa pada tahun 2030. Hal ini menandakan bahwa struktur demografi Kabupaten Bengkulu Selatan secara perlahan bergerak menuju masyarakat yang menua (aging population), yang berdampak langsung terhadap kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, dan jaminan hari tua.

Kondisi ini membawa beberapa implikasi penting dalam konteks perencanaan pembangunan daerah. Di satu sisi, penduduk usia produktif masih mendominasi struktur populasi, yang berarti Kabupaten Bengkulu Selatan masih berada dalam fase bonus demografi dan memiliki peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, peningkatan beban ketergantungan terutama dari kelompok lansia menjadi tantangan yang harus diantisipasi pemerintah daerah, baik dari sisi perlindungan sosial maupun penguatan sistem layanan kesehatan lansia.

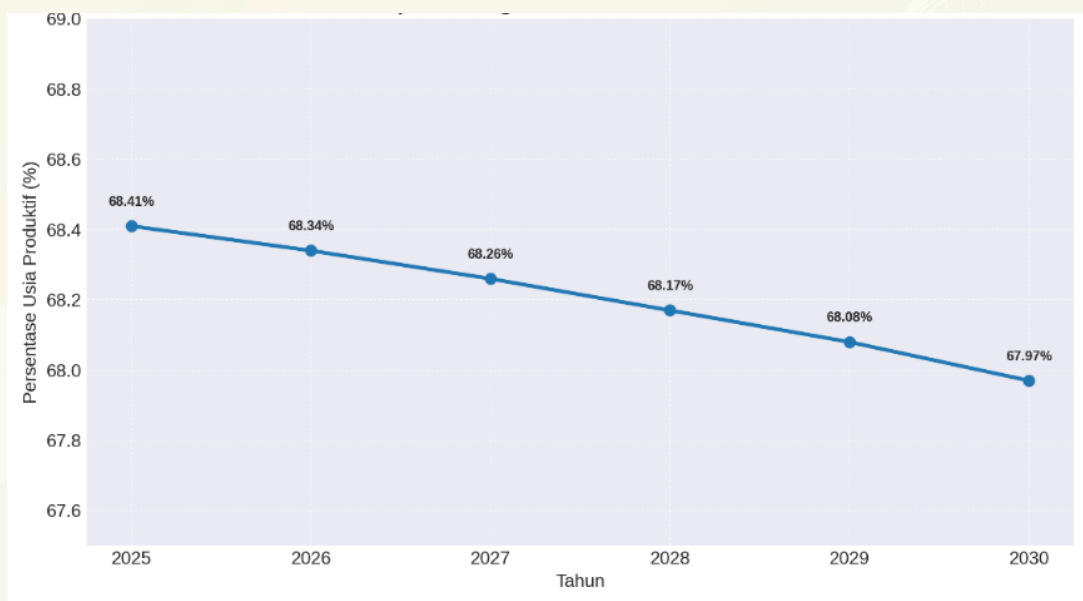
Sebagai bagian dari arah kebijakan RPJMD 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu mengembangkan strategi responsif demografi yang tidak hanya fokus pada pemberdayaan usia produktif melalui penciptaan lapangan kerja dan pelatihan vokasional, tetapi juga mempersiapkan skema perlindungan sosial untuk kelompok usia tidak produktif. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan infrastruktur ramah lansia, penyediaan layanan kesehatan berbasis komunitas, serta penguatan sistem jaminan sosial yang inklusif. Dengan kebijakan yang tepat, kenaikan angka ketergantungan tidak menjadi beban, tetapi justru mendorong terbentuknya sistem sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

8. Proyeksi bonus demografi

Berdasarkan proyeksi kependudukan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2030, wilayah ini diperkirakan akan masih berada dalam periode bonus demografi, yaitu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Selama periode tersebut, persentase penduduk usia produktif diproyeksikan stabil di atas 67%, bahkan mencapai puncaknya pada tahun 2025 dengan 68,41% dari total penduduk. Meskipun terjadi sedikit penurunan persentase hingga 67,97%

di tahun 2030, secara keseluruhan, struktur penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan tetap mencerminkan dominasi tenaga kerja potensial.

Kondisi ini membuka peluang besar bagi percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena pada fase ini beban ketergantungan terhadap penduduk usia produktif relatif rendah. Artinya, sebagian besar penduduk berada pada usia kerja yang dapat menjadi penggerak sektor ekonomi, baik melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan usaha mikro dan menengah, maupun penguatan sektor informal dan ekonomi kreatif berbasis lokal.



Gambar II-4. proyeksi persentase penduduk usia produktif Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2030

Namun demikian, bonus demografi tidak bersifat otomatis memberikan manfaat, melainkan membutuhkan kebijakan dan strategi yang tepat. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu merespons situasi ini dengan merancang kebijakan pembangunan sumber daya manusia secara terintegrasi, termasuk peningkatan akses pendidikan berkualitas, pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri, serta penciptaan lapangan kerja baru di sektor-sektor strategis. Selain itu, penting juga untuk

memperhatikan kelompok usia non-produktif yang mulai meningkat, terutama lansia, agar keberlanjutan sosial tetap terjaga.

Dengan perencanaan yang matang dan investasi pada kualitas penduduk usia produktif, bonus demografi yang dialami Kabupaten Bengkulu Selatan dalam periode RPJMD 2025-2029 dapat menjadi momentum strategis untuk mengakselerasi transformasi ekonomi, memperkuat ketahanan sosial, dan mempersempit kesenjangan antarwilayah, menuju masyarakat yang lebih mandiri, inklusif, dan sejahtera.

9. Proyeksi penduduk usia lanjut

Berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2030, terlihat tren peningkatan yang konsisten pada kelompok penduduk usia lanjut atau lansia, yaitu mereka yang berusia 65 tahun ke atas. Jumlah penduduk lansia diperkirakan terus meningkat dari sekitar 12.652 jiwa pada tahun 2025 menjadi sekitar 16.730 jiwa pada tahun 2030. Kenaikan ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Kabupaten Bengkulu Selatan akan mengalami pertumbuhan signifikan dalam kelompok usia tua, baik secara jumlah absolut maupun kontribusinya terhadap struktur demografi keseluruhan.

Kondisi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan mulai memasuki fase awal aging population, di mana proporsi lansia dalam populasi terus bertambah. Peningkatan ini terjadi seiring dengan menurunnya angka kelahiran dan membaiknya layanan kesehatan yang berdampak pada peningkatan usia harapan hidup. Fenomena ini merupakan tantangan sekaligus peluang dalam konteks pembangunan daerah. Di satu sisi, kebutuhan akan layanan kesehatan yang ramah lansia, sistem jaminan sosial, serta fasilitas publik yang inklusif akan meningkat. Di sisi lain, kelompok lansia yang sehat dan aktif tetap dapat berperan dalam

pembangunan, terutama dalam kegiatan berbasis komunitas dan pengembangan ekonomi keluarga.

Sebagai respons terhadap dinamika ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu mulai merumuskan kebijakan strategis yang berpihak pada kelompok lansia, baik dari sisi perlindungan sosial, penguatan layanan kesehatan primer, pengembangan komunitas lansia produktif, hingga penyusunan infrastruktur yang mendukung kehidupan yang nyaman dan bermartabat bagi penduduk lanjut usia. Dalam konteks RPJMD 2025–2029, peningkatan jumlah lansia ini harus menjadi salah satu perhatian utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator utama yang menunjukkan dinamika perkembangan ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu, yang biasanya diukur melalui perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian daerah mampu menghasilkan peningkatan produksi barang dan jasa, serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, konsisten, dan berkelanjutan menjadi pondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Selatan, LPE memiliki peran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah yang dilaksanakan selama periode RPJMD 2025–2029. Kinerja pertumbuhan

ekonomi mencerminkan sejauh mana program-program unggulan, seperti optimalisasi sektor pertanian rakyat, penguatan perikanan tangkap dan budidaya, serta pengembangan pariwisata berbasis budaya dan alam, mampu mendorong perputaran ekonomi lokal. Selain itu, peningkatan LPE juga menunjukkan dampak positif dari pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah yang mempermudah arus barang, jasa, dan mobilitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan, memperluas akses terhadap layanan publik, dan memperkuat daya saing Kabupaten Bengkulu Selatan di tingkat provinsi maupun nasional. Oleh karena itu, pemantauan LPE secara berkala menjadi instrumen penting dalam menyusun kebijakan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

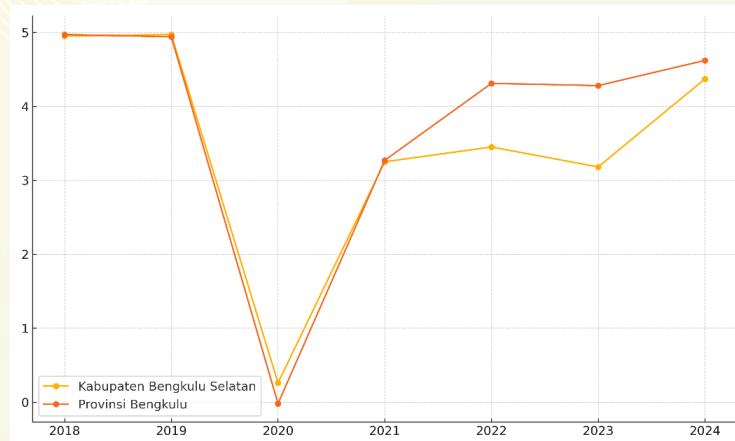
Tabel II-19. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen) dan Provinsi Bengkulu 2018-2024

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	4,97	4,94	-0,02	3,27	4,31	4,28	4,62
Bengkulu Selatan	4,95	4,97	0,26	3,25	3,45	3,18	4,37
Rejang Lebong	4,96	4,96	0,07	3,14	4,3	4,05	4,29
Bengkulu Utara	4,81	4,92	0,23	4,01	3,14	4,18	4,43
Kaur	4,98	4,98	0,12	3,08	3,78	3,4	4,15
Seluma	4,8	4,93	-0,01	2,18	2,92	2,61	4,06
Mukomuko	5,01	5,03	0,06	3,35	4,33	3,69	4,05
Lebong	5,01	4,97	0,1	3,08	2,98	2,84	4,3
Kepahiang	5	4,89	0,06	3,16	4,19	4,01	4,28
Bengkulu Tengah	4,97	4,97	-0,06	2,29	3,03	3,82	3,97
Kota Bengkulu	5,48	5,41	-0,25	3,47	5,69	5,53	5,39

Sumber : SDI Bengkulu Selatan

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan pemulihan secara bertahap pasca-pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi masih positif sebesar 0,26%, lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Bengkulu yang mengalami kontraksi -0,02%. Namun, laju pertumbuhan Bengkulu Selatan tetap berada di bawah provinsi sepanjang periode 2021-2023. Pada tahun 2023, pertumbuhan

ekonomi Bengkulu Selatan tercatat sebesar 3,18%, masih tertinggal dibandingkan capaian provinsi sebesar 4,28%. Baru pada tahun 2024, Kabupaten Bengkulu Selatan mencatatkan akselerasi signifikan hingga 4,37%, mendekati capaian provinsi.



Gambar II-5. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Bengkulu Selatan termasuk kelompok daerah dengan pertumbuhan ekonomi menengah. Kota Bengkulu consistently menunjukkan pertumbuhan tertinggi selama periode 2021-2024, bahkan mencapai 5,69% pada 2022. Sementara kabupaten seperti Seluma dan Bengkulu Tengah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, terutama pasca-2020. Capaian pertumbuhan ekonomi Bengkulu Selatan yang mulai membaik pada 2024 perlu dijaga dan didorong lebih lanjut melalui kebijakan penguatan investasi daerah, pengembangan sektor unggulan, dan peningkatan produktivitas ekonomi lokal agar kesenjangan dengan rata-rata provinsi dan kota utama dapat dipersempit.

2. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator penting yang menunjukkan persentase penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu ambang batas minimum untuk memenuhi kebutuhan

dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Indikator ini tidak hanya mencerminkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan mencerminkan masih adanya tantangan sosial dan ekonomi yang signifikan, serta menuntut perhatian serius dalam perumusan kebijakan yang berpihak pada kelompok masyarakat yang paling rentan.

Tabel II-20. Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024

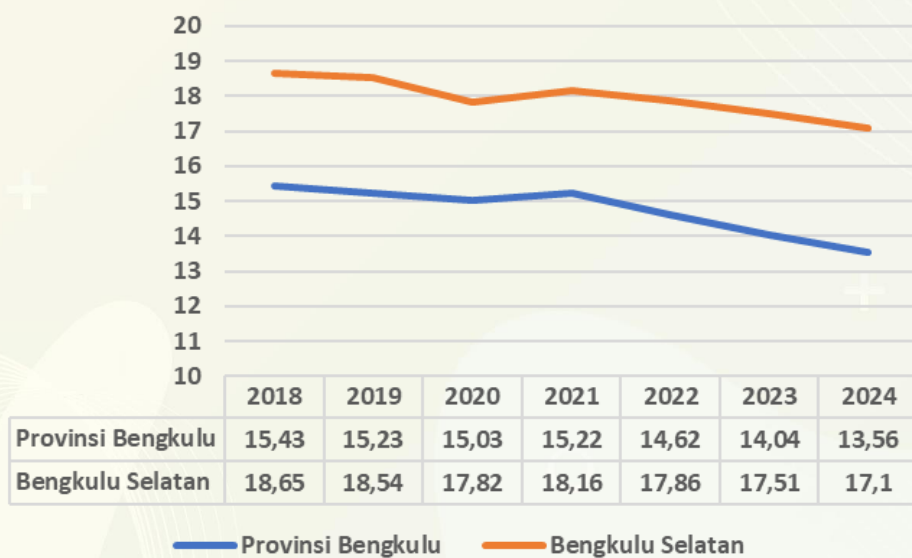
Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	15,43	15,23	15,03	15,22	14,62	14,04	13,56
Bengkulu Selatan	18,65	18,54	17,82	18,16	17,86	17,51	17,1
Rejang Lebong	16,23	15,95	15,85	15,85	15,65	14,79	14,65
Bengkulu Utara	11,81	11,65	11,67	11,61	11,48	11,29	10,96
Kaur	19,40	18,89	18,47	18,62	18,10	17,83	17,12
Seluma	19,60	19,10	18,56	18,72	18,36	18,00	17,23
Mukomuko	11,40	11,70	11,72	11,93	11,44	10,76	10,76
Lebong	11,59	11,77	11,85	12,00	12,03	11,15	10,45
Kepahiang	14,42	14,74	14,69	14,83	14,53	14,12	12,9
Bengkulu Tengah	8,20	8,80	9,30	9,68	9,76	9,40	10,14
Kota Bengkulu	18,82	18,09	17,65	17,89	15,73	14,71	13,76

Sumber: SDI Bengkulu Selatan

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029, penurunan angka kemiskinan akan menjadi indikator kunci yang harus dicapai. Upaya ini membutuhkan pendekatan yang terintegrasi lintas sektor, seperti peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan rumah layak, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Kemiskinan yang tinggi sering kali disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan yang produktif, terbatasnya akses terhadap permodalan usaha, kurangnya infrastruktur dasar, dan kualitas layanan publik yang belum optimal. Oleh karena itu, data kemiskinan harus dimanfaatkan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan berbasis bukti,

untuk mengidentifikasi kelompok yang paling terdampak dan merancang program yang tepat sasaran. Strategi pengentasan kemiskinan perlu didorong melalui kolaborasi antar sektor, pembangunan pedesaan yang berkeadilan, serta peningkatan akses layanan dasar yang merata dan berkualitas, demi terciptanya pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan secara perlahan selama periode 2018-2024, dari 18,65% pada tahun 2018 menjadi 17,10% pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, angka kemiskinan Bengkulu Selatan masih berada di atas rata-rata Provinsi Bengkulu, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 13,56%. Selama tujuh tahun terakhir, gap antara Bengkulu Selatan dan provinsi terus ada, menandakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di daerah ini berjalan lambat dan membutuhkan strategi yang lebih efektif serta terintegrasi dengan sektor-sektor pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal.



Gambar II-6. Persentase Kemiskinan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Bengkulu Selatan bersama Seluma dan Kaur termasuk dalam kelompok wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Bengkulu. Kabupaten seperti Bengkulu Utara, Mukomuko, dan Lebong mencatat angka kemiskinan yang jauh lebih rendah, dengan tren penurunan yang lebih signifikan. Bahkan Kabupaten Bengkulu Tengah, meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2024, tetap mempertahankan angka kemiskinan di bawah 11%. Sementara Kota Bengkulu mencatat penurunan tajam dari 18,82% (2018) menjadi 13,76% (2024), melampaui capaian Bengkulu Selatan. Hal ini menunjukkan perlunya akselerasi kebijakan pengurangan kemiskinan di Bengkulu Selatan yang lebih tajam, berbasis data, dan menysasar kelompok paling rentan secara lebih efektif.

3. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator utama untuk menilai rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan setiap penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam satu tahun. Perhitungan indikator ini dilakukan dengan membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk, sehingga mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan dan produktivitas suatu daerah. PDRB per kapita juga mencerminkan daya beli masyarakat dan kapasitas ekonomi lokal. Nilai yang tinggi menandakan potensi kesejahteraan yang lebih besar, sedangkan nilai yang rendah dapat mengindikasikan terbatasnya pertumbuhan sektor ekonomi dan rendahnya kontribusi dari aktivitas ekonomi produktif.

Dalam kerangka RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029, PDRB per kapita menjadi tolok ukur penting dalam menilai capaian pembangunan ekonomi. Kenaikan indikator ini diharapkan terjadi seiring dengan peningkatan output dari sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri kecil-menengah, serta jasa dan pariwisata. Namun

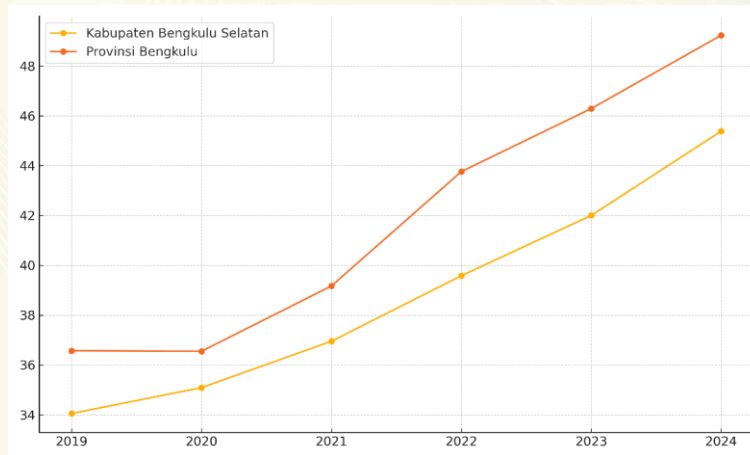
demikian, peningkatan nilai PDRB per kapita harus disertai dengan strategi yang memperkecil ketimpangan dan memperluas akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar, terutama di wilayah-wilayah tertinggal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar kecamatan menjadi langkah penting agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Bengkulu Selatan.

Tabel II-21. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Persen) dan Provinsi Bengkulu 2019-2024 (Juta Rupiah)

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	36,57	36,55	39,17	43,76	46,29	49,23
Bengkulu Selatan	34,05	35,09	36,95	39,58	42	45,38
Rejang Lebong	34,9	34,53	36,13	38,91	41,65	45,24
Bengkulu Utara	27,42	28,44	32,91	40,64	40,73	41,21
Kaur	29,05	28,62	30,52	32,65	34,7	37,42
Seluma	23,72	22,83	24,07	25,58	26,82	29,17
Mukomuko	27,81	27,75	29,52	31,74	34,2	37,51
Lebong	29,25	32,01	33,76	35,71	37,69	40,99
Kepahiang	31,13	29,54	31,42	33,75	36,31	40,07
Bengkulu Tengah	40,82	40,15	46,33	54,73	55,02	55,28
Kota Bengkulu	63,13	63,11	65,94	72,98	78,78	83,43

Sumber: BPS Provisis Bengkulu, 2025

Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama periode 2019-2024. Dari angka Rp34,05 juta pada tahun 2019, PDRB per kapita meningkat menjadi Rp45,38 juta pada tahun 2024. Meskipun pertumbuhan ini menggambarkan adanya perkembangan ekonomi yang positif, nilai tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang pada 2024 mencapai Rp49,23 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi rata-rata ekonomi per penduduk di Bengkulu Selatan masih tertinggal dibandingkan dengan tingkat provinsi, dan perlu penguatan dalam sektor-sektor produktif untuk mendorong akselerasi pertumbuhan.



Gambar II-7. Perbandingan PDRB per Kapita Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, posisi Bengkulu Selatan berada di kelompok menengah. Kabupaten Bengkulu Tengah secara konsisten mencatat PDRB per kapita yang lebih tinggi, bahkan melampaui rata-rata provinsi. Kota Bengkulu memiliki PDRB per kapita tertinggi, mencapai Rp83,43 juta pada tahun 2024, menunjukkan konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan. Sebaliknya, kabupaten seperti Seluma, Mukomuko, dan Kaur mencatatkan nilai PDRB per kapita yang lebih rendah dari Bengkulu Selatan, meskipun tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, peningkatan PDRB per kapita di Bengkulu Selatan perlu terus didorong melalui strategi diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas sektor unggulan lokal, serta pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi di wilayah pedesaan dan perbatasan.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan besarnya proporsi angkatan kerja di Kabupaten Bengkulu Selatan yang belum terserap dalam dunia kerja meskipun aktif mencari pekerjaan. Indikator ini menjadi cerminan langsung dari kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup dan sesuai dengan karakteristik

tenaga kerja yang tersedia. Dinamika TPT dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, kecocokan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta tersedianya peluang usaha di berbagai sektor. Tingginya angka pengangguran umumnya mengindikasikan bahwa adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja serta masih terbatasnya ruang tumbuh bagi sektor-sektor produktif.

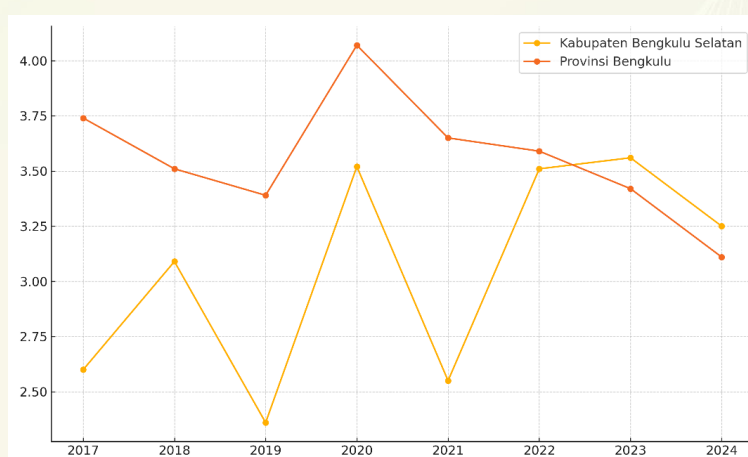
Dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029, TPT harus menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas arah kebijakan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan. Peningkatan serapan tenaga kerja hanya dapat tercapai apabila kebijakan pembangunan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang padat karya, didukung oleh sistem pelatihan kerja yang relevan dan terakses oleh kelompok usia produktif. Oleh karena itu, intervensi untuk menurunkan angka TPT perlu mencakup upaya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasional, fasilitasi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, serta penciptaan iklim investasi yang ramah tenaga kerja. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan akan menjadi kunci dalam mewujudkan pasar kerja yang sehat dan dinamis di Bengkulu Selatan.

Tabel II-22. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2017-2024

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	2,6	3,09	2,36	3,52	2,55	3,51	3,56	3,25
Rejang Lebong	3	1,69	2,84	3,7	2,45	2,28	2,94	2,43
Bengkulu Utara	3,89	2,72	4,14	3,82	3,51	4,16	3,33	2,89
Kaur	1,9	2,85	2,4	2,73	3,45	3,83	3,81	3,71
Seluma	3,22	2,95	2,23	3,04	3,44	1,74	2,68	2,38
Mukomuko	3,53	4,9	3,93	3,59	3,68	3,07	3,14	2,41
Lebong	3,57	6,34	4,01	3,92	3,18	3,16	2,72	2,55
Kepahiang	2,94	3,08	2,27	2,52	1,89	2,92	2,41	2,37
Bengkulu Tengah	2,72	3,48	4,63	4,45	4,07	2,48	3,20	2,56
Kota Bengkulu	6,61	5	4,29	6,82	6,35	6,15	5,04	5
Provinsi Bengkulu	3,74	3,51	3,39	4,07	3,65	3,59	3,42	3,11

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami fluktuasi selama periode 2017-2024. TPT sempat turun dari 3,09% pada 2018 menjadi 2,36% di 2019, namun meningkat cukup tajam menjadi 3,52% pada 2020, seiring dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar kerja. Pada tahun-tahun berikutnya, angka TPT kembali naik-turun dan mencapai 3,56% pada 2023, sebelum sedikit menurun ke 3,25% di tahun 2024. Meskipun penurunan ini merupakan sinyal positif, namun jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu yang berada di angka 3,11% pada tahun 2024, Bengkulu Selatan masih memiliki tingkat pengangguran yang sedikit lebih tinggi dari rerata provinsi.



Gambar II-8. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan termasuk dalam kelompok dengan tingkat pengangguran menengah. Kota Bengkulu secara konsisten memiliki TPT tertinggi, mencapai 6,82% pada 2020 dan tetap di atas 5% pada 2024. Sementara itu, beberapa kabupaten seperti Kepahiang, Seluma, dan Rejang Lebong mencatat TPT yang lebih rendah, menunjukkan bahwa beberapa wilayah telah lebih berhasil dalam menekan angka pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih terarah di Bengkulu Selatan, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja padat karya,

peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, dan penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah untuk memperluas daya serap tenaga kerja secara berkelanjutan.

5. Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat, dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 0, semakin merata distribusi pendapatan; sebaliknya, nilai yang mendekati 1 menunjukkan adanya konsentrasi pendapatan pada kelompok kecil dalam masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Selatan, Indeks Gini menjadi indikator penting yang merefleksikan keberhasilan atau kegagalan kebijakan pembangunan dalam menciptakan keseimbangan ekonomi antarkelompok dan wilayah. Ketimpangan yang tinggi menjadi sinyal adanya hambatan struktural dalam pemerataan hasil pembangunan dan akses terhadap peluang ekonomi.

Tabel II-23. Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2024

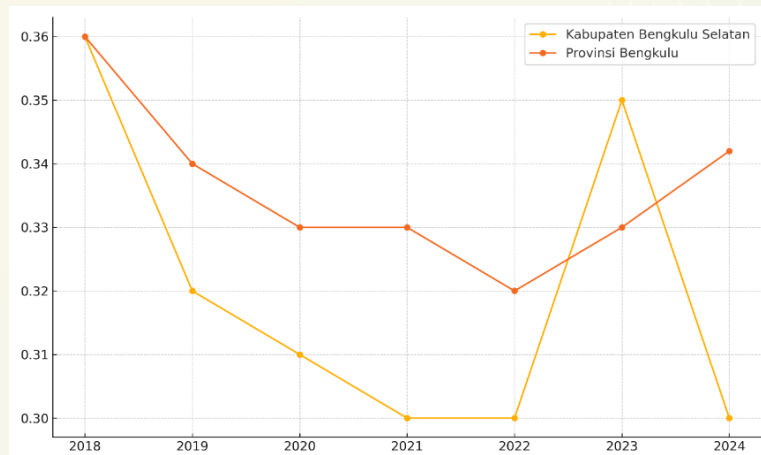
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	0,36	0,32	0,31	0,30	0,30	0,35	0,3
Rejang Lebong	0,33	0,30	0,29	0,35	0,30	0,30	0,28
Bengkulu Utara	0,35	0,30	0,28	0,31	0,28	0,30	0,28
Kaur	0,31	0,29	0,32	0,28	0,28	0,29	0,3
Seluma	0,31	0,30	0,29	0,25	0,29	0,29	0,28
Mukomuko	0,32	0,29	0,25	0,26	0,26	0,29	0,28
Lebong	0,29	0,31	0,28	0,27	0,27	0,29	0,29
Kepahiang	0,30	0,27	0,31	0,28	0,30	0,33	0,31
Bengkulu Tengah	0,29	0,26	0,26	0,25	0,24	0,27	0,27
Kota Bengkulu	0,39	0,36	0,37	0,38	0,37	0,38	0,44
Provinsi Bengkulu	0,36	0,34	0,33	0,33	0,32	0,33	0,342

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Dalam penyusunan RPJMD 2025-2029, Indeks Gini perlu dipantau secara serius karena ketimpangan yang tinggi bisa memperlebar kesenjangan sosial dan memperburuk kualitas hidup masyarakat yang tidak tersentuh oleh pertumbuhan ekonomi. Upaya menurunkan Indeks Gini harus terintegrasi dalam kebijakan yang mendorong akses inklusif terhadap

pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan produktif, dan infrastruktur dasar. Selain itu, penting untuk menguatkan ekonomi berbasis komunitas dan memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal.

Indeks Gini di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren fluktuatif dalam sepuluh tahun terakhir, dengan penurunan dari 0,36 pada tahun 2018 menjadi 0,30 pada 2021 dan 2022, sebelum naik kembali menjadi 0,35 pada tahun 2023 dan turun lagi ke 0,30 pada 2024. Meskipun nilai ini mendekati angka ideal (semakin kecil berarti semakin merata), fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Bengkulu Selatan masih belum sepenuhnya stabil. Ketimpangan yang naik kembali pada tahun 2023 bisa menjadi indikasi bahwa hasil pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, atau terjadi ketidakseimbangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dan lapangan kerja.



Gambar II-9. Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu, Gini Ratio Bengkulu Selatan berada pada posisi yang relatif seimbang sepanjang periode 2018-2024, meskipun beberapa kabupaten seperti Seluma, Bengkulu Tengah, dan Mukomuko berhasil mencatatkan nilai yang lebih rendah secara konsisten. Kota Bengkulu menempati posisi dengan

ketimpangan tertinggi, mencapai 0,44 pada tahun 2024, menunjukkan adanya konsentrasi pendapatan yang tinggi di wilayah perkotaan. Sementara itu, beberapa kabupaten seperti Rejang Lebong dan Bengkulu Utara menunjukkan capaian positif dengan tren penurunan yang stabil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan perlu terus memperkuat kebijakan pemerataan pembangunan, khususnya pada sektor-sektor padat karya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah, agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat dinikmati secara lebih adil dan menyeluruh oleh seluruh masyarakat.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas pembangunan manusia dari tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, IPM menjadi tolok ukur penting dalam merancang kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan dan berkelanjutan. Peningkatan IPM tidak hanya menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan akses terhadap layanan dasar, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas, kualitas angkatan kerja, dan daya saing daerah. Oleh karena itu, IPM berperan sebagai jembatan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam penyusunan RPJMD 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu memprioritaskan intervensi yang menyentuh langsung ketiga dimensi IPM secara simultan. Di sektor kesehatan, fokus perlu diberikan pada peningkatan mutu layanan dasar, pencegahan penyakit, dan perbaikan gizi masyarakat. Di sektor pendidikan, penguatan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah, serta pengurangan disparitas antarwilayah menjadi kunci. Sementara di aspek standar hidup,

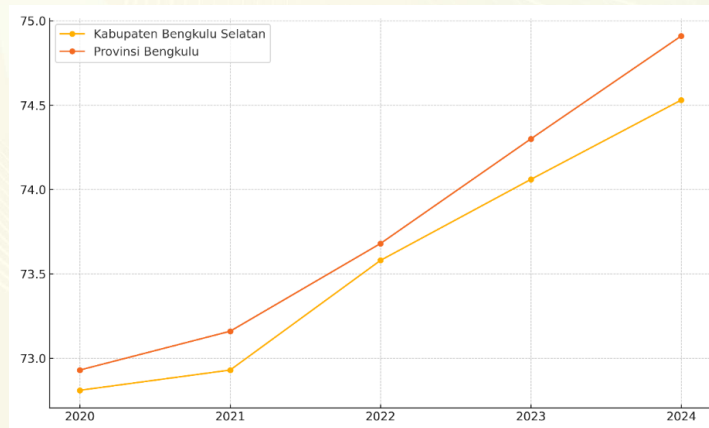
penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, pelatihan kerja, dan penguatan ekonomi berbasis potensi desa sangat relevan. Dengan sinergi lintas sektor dan kebijakan yang terarah, peningkatan IPM diharapkan tidak hanya berdampak pada perbaikan angka statistik, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bengkulu Selatan secara merata dan berkelanjutan.

Tabel II-24. Indeks Pembangunan Manusia (UHH Hasil LF SP2020) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	72,93	73,16	73,68	74,3	74,91
Bengkulu Selatan	72,81	72,93	73,58	74,06	74,53
Rejang Lebong	72,51	72,85	73,54	74,43	75,04
Bengkulu Utara	70,81	71,28	71,76	72,27	73,1
Kaur	69,52	69,71	70,3	70,92	71,53
Seluma	68,87	69	69,74	70,27	70,98
Mukomuko	71,47	71,67	72,15	73	73,65
Lebong	71,2	71,67	72,35	72,95	73,54
Kepahiang	69,91	70,38	70,85	71,38	72,05
Bengkulu Tengah	69,42	69,78	70,29	70,81	71,67
Kota Bengkulu	82,31	82,49	82,93	83,38	83,95

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Dimulai dari angka 72,81 pada tahun 2020, IPM Bengkulu Selatan naik menjadi 74,53 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas hidup masyarakat di daerah ini membaik, khususnya dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Meskipun demikian, capaian IPM Bengkulu Selatan masih sedikit di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu, yang mencapai 74,91 pada tahun 2024, menunjukkan masih adanya ruang untuk perbaikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



Gambar II-10. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan tergolong dalam kelompok dengan IPM tinggi, namun belum menjadi yang tertinggi. Kota Bengkulu secara konsisten berada di posisi teratas, mencapai 83,95 pada tahun 2024. Kabupaten Rejang Lebong juga mencatat IPM yang lebih tinggi dari Bengkulu Selatan, dengan angka 75,04 pada tahun yang sama. Sementara itu, kabupaten seperti Seluma, Kaur, dan Bengkulu Tengah masih berada di bawah Bengkulu Selatan dalam hal capaian IPM. Posisi ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan manusia yang telah diterapkan di Bengkulu Selatan mulai menunjukkan hasil positif, namun tetap memerlukan penguatan dalam pemerataan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan standar hidup agar dapat mengejar ketertinggalan dengan kabupaten/kota yang telah lebih maju.

B. Kesehatan untuk Semua

1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator demografis dan kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup penduduk secara keseluruhan. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, peningkatan UHH menjadi cerminan keberhasilan program pembangunan di sektor kesehatan, mulai dari perbaikan akses terhadap layanan medis, peningkatan kualitas fasilitas

kesehatan, hingga keberhasilan edukasi masyarakat dalam menjalani pola hidup sehat. UHH yang tinggi tidak hanya menandakan rendahnya angka kematian dini, tetapi juga memperlihatkan efektivitas sistem pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah perdesaan dan kelompok rentan.

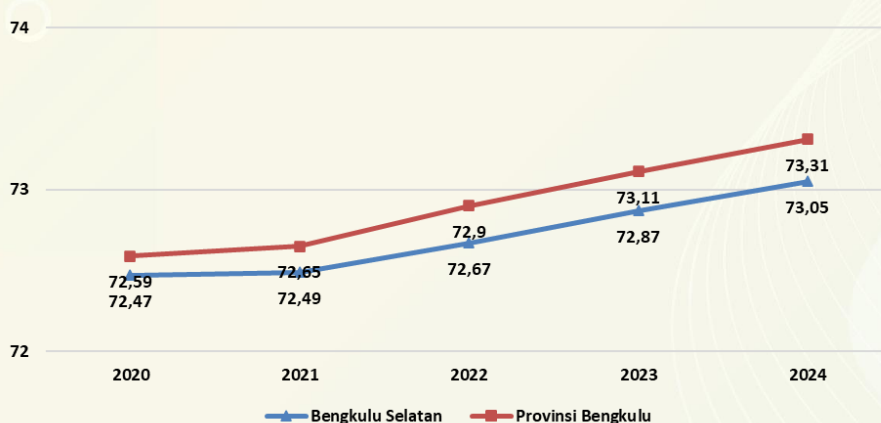
Dalam konteks RPJMD 2025-2029, UHH berperan penting sebagai komponen utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat yang memiliki usia harapan hidup tinggi cenderung lebih sehat dan produktif, serta memiliki kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu terus memperkuat integrasi kebijakan kesehatan dengan kebijakan pembangunan lainnya, terutama dalam hal peningkatan gizi, pemerataan layanan kesehatan dasar, serta pembangunan lingkungan yang mendukung hidup sehat. Peningkatan UHH tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga menjadi dasar dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik secara menyeluruh.

Tabel II-25. Umur Harapan hidup (Hasil LF SP2020) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	72,59	72,65	72,9	73,11	73,31
Bengkulu Selatan	72,47	72,49	72,67	72,87	73,05
Rejang Lebong	72,99	73,17	73,44	73,67	73,87
Bengkulu Utara	72,49	72,57	72,81	73,03	73,23
Kaur	72,12	72,22	72,49	72,74	72,97
Seluma	72,1	72,25	72,49	72,71	72,9
Mukomuko	73,11	73,19	73,44	73,71	73,95
Lebong	71,93	72,04	72,34	72,59	72,81
Kepahiang	71,73	71,87	72,07	72,26	72,41
Bengkulu Tengah	72,17	72,17	72,33	72,46	72,56
Kota Bengkulu	73,88	73,94	74,18	74,43	74,69

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Berdasarkan data umur harapan hidup (UHH) tahun 2020-2024, Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 72,47 tahun pada 2020 menjadi 73,05 tahun pada 2024. Kenaikan sebesar 0,58 tahun selama lima tahun terakhir ini mencerminkan perbaikan secara bertahap dalam kualitas hidup masyarakat, terutama dari sisi kesehatan, gizi, dan akses pelayanan dasar. Namun demikian, capaian tersebut masih berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu, yang mencatat umur harapan hidup sebesar 73,31 tahun pada tahun 2024.



Gambar II-11. Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2023

Perbedaan sekitar 0,26 tahun antara Bengkulu Selatan dan Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih terdapat ruang perbaikan dalam layanan kesehatan, pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Upaya peningkatan umur harapan hidup ke depan perlu difokuskan pada penguatan layanan primer seperti puskesmas, pemenuhan gizi anak dan ibu hamil, serta peningkatan sanitasi dan air bersih. Jika tren ini dapat dipertahankan dan diperkuat, Kabupaten Bengkulu Selatan berpotensi menyamai atau bahkan melampaui rata-rata provinsi dalam beberapa tahun ke depan.

2. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator komprehensif yang digunakan untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat dari perspektif keluarga sebagai unit terkecil dalam sistem sosial. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, IKS menjadi salah satu tolok ukur penting dalam mengevaluasi efektivitas program-program kesehatan, sekaligus sebagai dasar perumusan intervensi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Melalui indikator seperti cakupan imunisasi, status gizi balita, akses terhadap air bersih dan sanitasi layak, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, IKS mencerminkan kualitas hidup dan ketahanan kesehatan keluarga. Semakin tinggi nilai IKS, semakin besar pula peluang terwujudnya masyarakat Bengkulu Selatan yang sehat, produktif, dan mandiri.

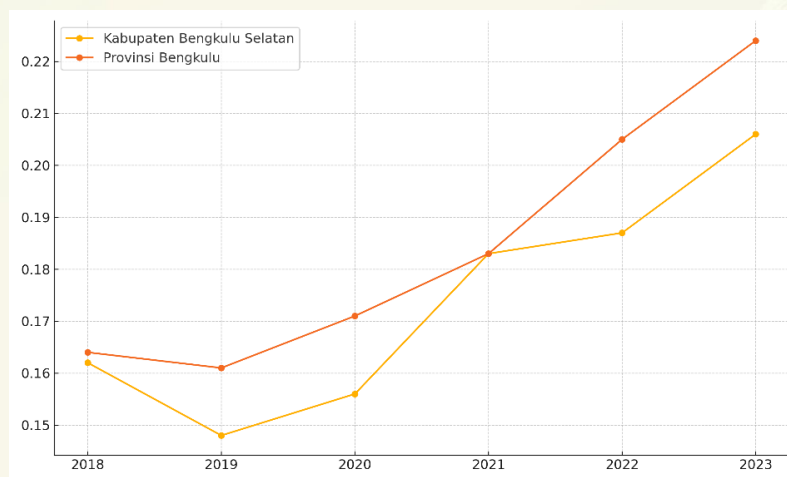
Tabel II-26. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2023

Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rejang Lebong	0,123	0,134	0,147	0,159	0,198	0,209
Kota Bengkulu	0,274	0,299	0,294	0,304	0,307	0,291
Bengkulu Utara	0,133	0,146	0,168	0,181	0,207	0,261
Lebong	0,081	0,073	0,08	0,081	0,118	0,135
Kepahiang	0,156	0,128	0,142	0,166	0,207	0,242
Bengkulu Tengah	0,156	0,128	0,136	0,165	0,186	0,256
Mukomuko	0,099	0,109	0,141	0,143	0,157	0,16
Seluma	0,13	0,115	0,149	0,166	0,178	0,187
Bengkulu Selatan	0,162	0,148	0,156	0,183	0,187	0,206
Kaur	0,098	0,083	0,085	0,085	0,127	0,134
Provinsi Bengkulu	0,164	0,161	0,171	0,183	0,205	0,224

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025–2029, peningkatan IKS menjadi bagian krusial dari arah pembangunan sektor kesehatan. Tantangan seperti keterbatasan akses layanan di daerah perdesaan, masih adanya ketimpangan layanan kesehatan, serta perilaku hidup tidak sehat yang belum sepenuhnya berubah, memerlukan pendekatan inovatif dan kolaboratif. Peningkatan IKS juga mendukung

pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, memperluas penyuluhan dan edukasi keluarga, serta mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperbaiki sanitasi dan memperkuat implementasi PHBS. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, peningkatan IKS akan menjadi landasan strategis dalam mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan membentuk masyarakat Bengkulu Selatan yang tangguh dan sejahtera.



Gambar II-12. Perbandingan Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2023

Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2018-2023, dari nilai 0,162 pada tahun 2018 menjadi 0,206 pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan kondisi kesehatan keluarga di berbagai aspek, seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi, cakupan imunisasi, status gizi balita, serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang mencapai 0,224 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Bengkulu Selatan mengalami kemajuan, percepatan peningkatan IKS masih diperlukan agar tidak tertinggal.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, posisi Bengkulu Selatan termasuk dalam kategori menengah. Kota Bengkulu secara konsisten mencatat IKS tertinggi di provinsi, meskipun mengalami sedikit penurunan pada 2023. Sementara itu, kabupaten seperti Bengkulu Utara, Kepahiang, dan Bengkulu Tengah menunjukkan peningkatan IKS yang lebih cepat dan kini melampaui capaian Bengkulu Selatan. Sebaliknya, daerah seperti Kaur dan Lebong masih mencatatkan nilai IKS yang lebih rendah. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan program kesehatan keluarga di Bengkulu Selatan secara lebih merata, termasuk melalui penyuluhan kesehatan, pemberdayaan kader posyandu, dan peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, guna memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap kondisi hidup yang sehat dan layak.

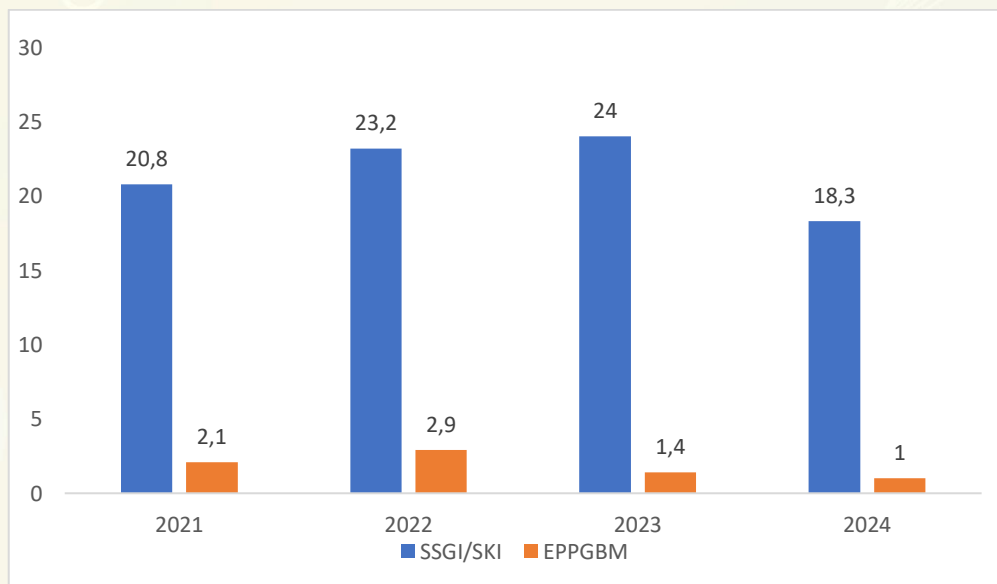
3. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting adalah indikator yang menunjukkan persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar usianya, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, kekebalan tubuh, serta potensi produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, stunting merupakan tantangan multidimensional yang mencerminkan ketidakcukupan pada berbagai aspek seperti pelayanan kesehatan, pola pengasuhan, sanitasi lingkungan, ketahanan pangan, serta kondisi sosial ekonomi keluarga.

Di Kabupaten Bengkulu Selatan, penurunan angka stunting menjadi prioritas penting dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam RPJMD 2025-2029. Stunting dipandang sebagai isu strategis karena menyangkut kualitas generasi mendatang yang akan menentukan arah pembangunan daerah. Untuk itu, pendekatan penanganan stunting di

Kabupaten Bengkulu Selatan perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu melalui penguatan posyandu, peningkatan layanan gizi, perbaikan akses air bersih dan sanitasi, serta edukasi intensif kepada ibu dan keluarga. Dengan intervensi lintas sektor yang konsisten dan berbasis data, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat mempercepat perbaikan kualitas hidup anak-anak dan menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan unggul.

Tabel II-27. Prevelansi Stunting Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024



Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) tahun 2021-2024, terlihat adanya penurunan dari tahun 2023-2024. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan dan penguatan berbagai intervensi sensitif maupun spesifik, seperti peningkatan cakupan posyandu, perbaikan gizi ibu dan anak, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Data EPPGBM yang merupakan data rutin menunjukkan angka prevalensi yang jauh lebih rendah dibandingkan SSGI. Pada tahun 2021

prevalensi tercatat 2,1%, dan mengalami peningkatan menjadi 2,9% pada tahun 2022, kemudian mengalami penurunan menjadi 1,4% pada 2023, dan kembali turun menjadi 1% pada tahun 2024. Perbedaan signifikan antara SSGI dan EPPGBM dapat dijelaskan oleh perbedaan metode dan cakupan pengumpulan data. EPPGBM mengandalkan laporan fasilitas kesehatan tingkat desa/kelurahan, sedangkan SSGI merupakan survei nasional yang secara metodologis lebih representatif pada tingkat populasi.

Secara keseluruhan, tren penurunan pada tahun 2024 memberikan sinyal positif terhadap keberhasilan program pemerintah dalam menurunkan stunting. Meski demikian, perbedaan angka antara kedua sumber data menegaskan pentingnya konsistensi dalam pemantauan dan penguatan validitas data sebagai dasar perencanaan pembangunan kesehatan ke depan.

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan formal masyarakat usia 25 tahun ke atas. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, RLS menjadi gambaran langsung dari bagaimana sistem pendidikan mampu menjangkau dan mempertahankan partisipasi belajar masyarakat hingga jenjang yang lebih tinggi. Angka RLS yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk dewasa yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, bahkan sebagian melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Hal ini memiliki implikasi luas terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal produktivitas kerja, kemampuan literasi, serta keterlibatan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Dalam kerangka RPJMD 2025-2029, peningkatan RLS merupakan salah satu target strategis Kabupaten Bengkulu Selatan dalam membangun

fondasi pembangunan manusia yang kuat. Peningkatan RLS tidak hanya akan meningkatkan komponen pendidikan dalam IPM, tetapi juga berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan akses informasi, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu didorong berbagai kebijakan afirmatif seperti pembangunan sekolah di wilayah tertinggal, penyediaan beasiswa pendidikan, peningkatan kapasitas guru, serta program pendidikan non-formal untuk warga dewasa yang putus sekolah. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, RLS akan menjadi pilar utama dalam mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang merata di Kabupaten Bengkulu Selatan.

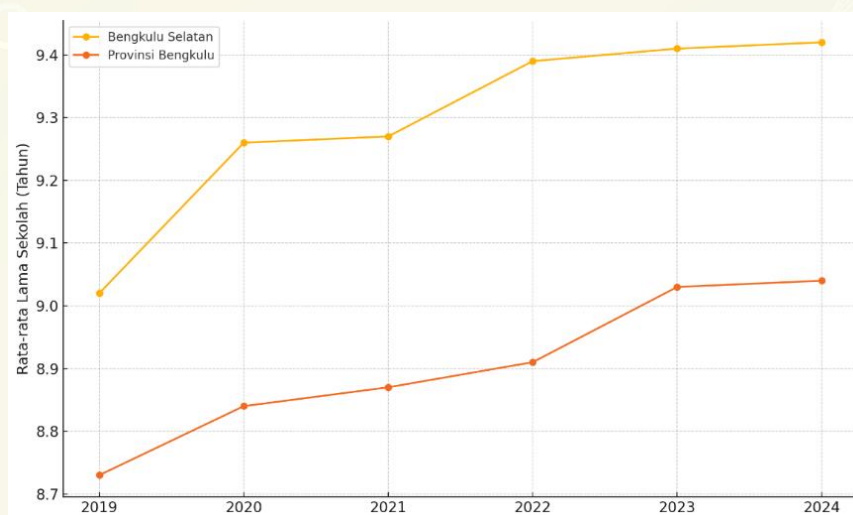
Tabel II-28. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	8,73	8,84	8,87	8,91	9,03	9,04
Bengkulu Selatan	9,02	9,26	9,27	9,39	9,41	9,42
Rejang Lebong	8,26	8,28	8,33	8,55	8,8	8,81
Bengkulu Utara	7,86	7,87	8,09	8,1	8,11	8,32
Kaur	8,25	8,37	8,38	8,39	8,41	8,47
Seluma	7,91	7,99	8	8,09	8,13	8,14
Mukomuko	7,99	8,29	8,3	8,31	8,56	8,57
Lebong	7,9	7,99	8,18	8,24	8,26	8,41
Kepahiang	7,93	8,24	8,29	8,3	8,36	8,37
Bengkulu Tengah	7,22	7,47	7,48	7,49	7,51	7,71
Kota Bengkulu	11,78	11,79	11,8	11,82	11,83	11,84

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2019-2024, dari 9,02 tahun pada 2019 menjadi 9,42 tahun pada 2024. Capaian ini secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Bengkulu yang pada tahun 2024 mencatat RLS sebesar 9,04 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, akses dan keberhasilan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan lebih baik dibandingkan dengan rerata provinsi.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan menempati posisi kedua tertinggi setelah Kota Bengkulu yang secara signifikan lebih tinggi dengan angka RLS mencapai 11,84 tahun pada 2024. Dibandingkan kabupaten lainnya seperti Rejang Lebong (8,81 tahun), Kaur (8,47 tahun), dan Seluma (8,14 tahun), Bengkulu Selatan berada pada posisi yang relatif unggul. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di daerah ini telah berjalan lebih baik, baik dari sisi pemerataan akses maupun keberhasilan pendidikan formal.



Gambar II-13. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan ukuran yang memperkirakan lamanya pendidikan formal yang akan ditempuh oleh anak usia masuk sekolah (sekitar usia 7 tahun), dengan asumsi bahwa tingkat partisipasi sekolah saat ini tetap konstan di masa mendatang. Indikator ini mencerminkan proyeksi akses pendidikan bagi generasi muda dan menjadi cerminan penting dalam melihat potensi masa depan sektor pendidikan di suatu daerah.

Di Kabupaten Bengkulu Selatan, HLS menjadi salah satu komponen strategis dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

khususnya pada dimensi pendidikan. Angka HLS yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan daerah makin inklusif dan peluang anak-anak untuk menempuh pendidikan lebih lama semakin terbuka. Namun, jika HLS masih rendah, hal tersebut bisa menjadi pertanda masih adanya kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terpencil, kondisi ekonomi keluarga yang belum stabil, serta tingginya angka putus sekolah pada jenjang menengah.

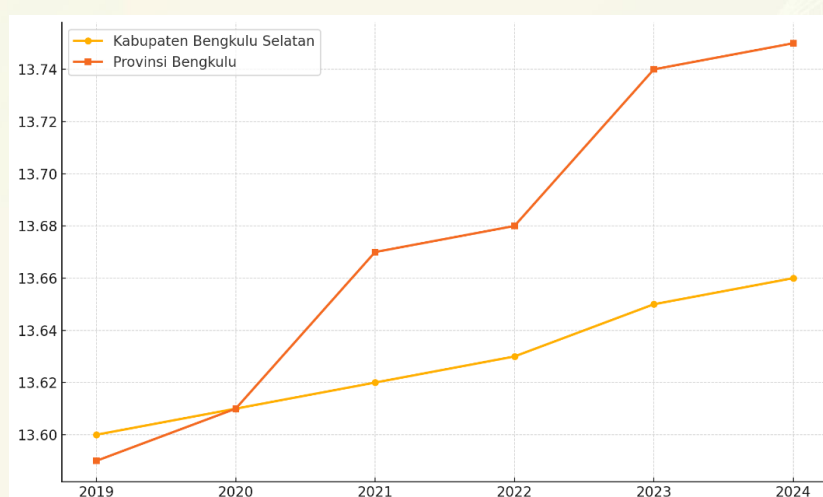
Tabel II-29. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	13,59	13,61	13,67	13,68	13,74	13,75
Bengkulu Selatan	13,6	13,61	13,62	13,63	13,65	13,66
Rejang Lebong	13,68	13,83	13,93	14,01	14,19	14,2
Bengkulu Utara	12,86	12,87	12,88	12,89	12,91	12,92
Kaur	12,98	12,99	13,06	13,07	13,14	13,15
Seluma	13,27	13,28	13,29	13,3	13,32	13,33
Mukomuko	12,72	12,73	12,74	12,76	12,86	12,87
Lebong	12,56	12,57	12,58	12,75	12,9	12,91
Kepahiang	12,89	12,9	13,12	13,13	13,14	13,16
Bengkulu Tengah	13,02	13,03	13,28	13,45	13,46	13,47
Kota Bengkulu	16,01	16,02	16,03	16,04	16,06	16,07

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Peningkatan HLS di Bengkulu Selatan harus menjadi salah satu sasaran pembangunan jangka menengah dalam kerangka RPJMD 2025-2029, sebagai bagian dari strategi mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan adaptif. Makin panjang harapan lama sekolah, makin besar peluang daerah ini menciptakan masyarakat yang terdidik dan produktif, yang pada akhirnya akan berdampak pada penguatan ekonomi lokal, pengurangan kesenjangan sosial, serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap tantangan global. Oleh karena itu, investasi di sektor pendidikan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas guru, pemerataan layanan pendidikan hingga pelosok, serta dukungan finansial kepada keluarga miskin agar seluruh anak dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa hambatan.

Meskipun nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bengkulu Selatan terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2024, yakni dari 13,60 tahun menjadi 13,66 tahun, namun capaian tersebut masih berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang meningkat dari 13,59 tahun menjadi 13,75 tahun pada periode yang sama. Ini menunjukkan bahwa akses dan kesempatan pendidikan bagi generasi muda di Bengkulu Selatan relatif stabil dan hampir setara dengan capaian provinsi, namun masih ada ruang perbaikan terutama dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan menengah dan tinggi.



Gambar II-14. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan menempati posisi menengah ke atas. Kota Bengkulu masih unggul secara signifikan dengan HLS mencapai 16,07 tahun pada 2024, menunjukkan perbedaan akses dan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan kabupaten. Namun demikian, dibandingkan kabupaten seperti Mukomuko, Lebong, dan Kaur yang HLS-nya masih di bawah 13,5 tahun, Bengkulu Selatan menunjukkan performa yang relatif lebih baik. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan HLS yang lebih progresif, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu terus memperkuat

infrastruktur pendidikan, mendukung program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa rentan, serta memastikan keberlanjutan pendidikan hingga jenjang lebih tinggi terutama di wilayah pelosok.

3. Angka Partisipasi Sekolah

Dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan, sektor pendidikan menjadi fondasi utama yang harus diperkuat melalui peningkatan akses, pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan. Dua indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan penduduk dalam sistem pendidikan formal adalah Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM menggambarkan persentase penduduk usia sekolah tertentu yang benar-benar sedang bersekolah sesuai jenjangnya, sedangkan APK mencerminkan jumlah seluruh penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, tanpa memandang usia, terhadap populasi usia sekolah yang seharusnya.

Dalam konteks perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029, analisis terhadap capaian APM dan APK sangat penting untuk memahami sejauh mana sistem pendidikan telah menjangkau seluruh kelompok usia sekolah, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan atau hambatan partisipasi pendidikan yang masih terjadi. Pemantauan kedua indikator ini juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi kelompok rentan dan wilayah terpencil, sehingga dapat mendukung pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara keseluruhan.

Tabel II-30. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI/Sederajat	107,13	113,54	107,04	97,52	97,23
SMP/MTs/ Sederajat	99,23	83,45	74,09	79,68	79,48
SMA/SMK/MA/Sederajat	63,67	63,84	64,93	79,14	85,71

Berdasarkan data Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020-2024, terlihat adanya dinamika partisipasi pendidikan di setiap jenjang. Pada jenjang SD/MI/ sederajat, APM cenderung mengalami penurunan dari angka tertinggi 113,54% pada tahun 2021 menjadi 97,23% pada tahun 2024. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh perbaikan pendataan atau berkurangnya jumlah anak usia sekolah dasar yang bersekolah di luar jenjang usianya.

Untuk jenjang SMP/MTs/ sederajat, terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 99,23% pada tahun 2020 menjadi 74,09% pada tahun 2022. Meskipun demikian, terdapat tren pemulihan di tahun-tahun berikutnya, dengan APM mencapai 79,48% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan intervensi pada masa transisi dari pendidikan dasar ke menengah pertama agar angka partisipasi tidak terus menurun.

Sementara itu, APM pada jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 63,67% di tahun 2020 menjadi 85,71% di tahun 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan program peningkatan akses pendidikan menengah atas, namun juga menegaskan bahwa sekitar 14% anak usia SMA masih belum terlibat dalam pendidikan formal, sehingga perlu strategi lanjutan untuk mencapai universalitas partisipasi di jenjang ini.

Tabel II-31. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI/Sederajat	98,8	98,36	96,83	105,78	100,92
SMP/MTs/ Sederajat	66,63	67,19	67,21	83,77	85,39
SMA/SMK/MA/Sederajat	105,98	104,21	99,57	100,1	125,04

Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020-2024, terlihat tren yang cukup variatif antar jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI/ sederajat, APK sempat menurun

dari 98,8% pada tahun 2020 menjadi 96,83% di tahun 2022, kemudian meningkat signifikan menjadi 105,78% di tahun 2023 sebelum kembali turun ke 100,92% pada tahun 2024. Kenaikan di atas 100% ini menunjukkan adanya peserta didik di luar kelompok usia ideal yang masih mengikuti pendidikan dasar, baik lebih muda maupun lebih tua.

Untuk jenjang SMP/MTs/ sederajat, terjadi peningkatan yang cukup stabil dari 66,63% di tahun 2020 menjadi 85,39% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan akses atau keberhasilan program transisi dari pendidikan dasar ke menengah pertama, meskipun angka tersebut masih di bawah 100% sehingga belum mencakup seluruh anak usia sekolah.

Sementara itu, pada jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat, APK mengalami peningkatan tajam, dari 99,57% pada tahun 2022 menjadi 125,04% pada tahun 2024. Pencapaian di atas 100% menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau lebih banyak peserta didik, termasuk mereka yang berusia lebih tua dari usia ideal. Meski demikian, angka ini juga perlu dikaji lebih lanjut terkait efektivitas pemerataan akses dan kualitas pendidikan menengah di daerah ini.

4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator penting yang tersusun dari tujuh komponen utama yang saling berkaitan dalam membentuk ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan. Komponen tersebut meliputi pemerataan layanan perpustakaan, kelengkapan koleksi bahan bacaan, kecukupan tenaga perpustakaan, serta tingkat kunjungan masyarakat harian. Selain itu, penilaian juga mencakup jumlah perpustakaan yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi, serta jumlah anggota aktif perpustakaan. Setiap elemen tersebut merepresentasikan dimensi

ketersediaan dan pemanfaatan layanan literasi secara konkret oleh masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Selatan, pembangunan literasi masyarakat yang tercermin melalui nilai IPLM perlu menjadi agenda prioritas dalam RPJMD 2025-2029, khususnya sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keberadaan perpustakaan sebagai sarana utama belum cukup apabila tidak diiringi dengan perbaikan mutu pelayanan dan penguatan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada perluasan jangkauan layanan perpustakaan hingga ke desa-desa, penguatan kapasitas pustakawan, serta pengembangan kegiatan literasi berbasis partisipasi masyarakat.

Dengan mengoptimalkan ketujuh unsur penyusun IPLM secara simultan, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki peluang besar untuk membentuk budaya literasi yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini akan menjadi fondasi penting dalam mendorong perubahan sosial yang progresif, memperkuat pendidikan non-formal, dan meningkatkan daya saing daerah di masa mendatang.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2023-2024, Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari skor 50,01 pada tahun 2023 menjadi 62,41 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam berbagai unsur penyusun IPLM, terutama pada aspek pemerataan layanan perpustakaan (naik dari 0,6667 menjadi 0,7363), kecukupan koleksi perpustakaan (dari 0,2878 menjadi 0,4059), serta keterlibatan masyarakat dan keanggotaan perpustakaan yang telah mencapai skor penuh (1,00).

Namun, meskipun trennya positif, masih terdapat ruang perbaikan terutama pada rasio kecukupan tenaga perpustakaan yang masih relatif

rendah (0,1604 pada 2024), serta tingkat kunjungan masyarakat per hari yang meskipun meningkat (dari 0,0464 menjadi 0,0665), tetap menjadi tantangan untuk mendorong budaya literasi yang lebih kuat. Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu (skor 65,96), posisi Bengkulu Selatan sedikit di bawah, namun telah melampaui capaian awalnya dan juga skor beberapa kabupaten lain seperti Kota Bengkulu (55,33) dan Seluma (28,18).

Tabel II-32. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2024

Kabupaten/Kota	Tahun	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	Jumlah Anggota Perpustakaan
Bengkulu Selatan	2023	50,01	0,6667	0,2878	0,147	0,0464	0,3526	1	1
Rejang Lebong		60,77	0,7576	0,2165	0,2311	0,0487	1	1	1
Bengkulu Utara		60,72	0,6102	0,423	0,1569	0,0606	1	1	1
Kaur		70,34	0,5548	0,6684	0,6363	0,064	1	1	1
Seluma		54,45	0,4154	0,2122	0,152	0,032	1	1	1
Mukomuko		57,68	0,488	0,4989		0,0506	1	1	1
Lebong		48,86	0,6076	0,1104		0,0133	0,6891	1	1
Kepahiang		46,88	0,5893	0,0949	0,2922	0,0302	1	1	0,2747
Bengkulu Tengah		60,38	0,4263	0,0975	1	0,0288	0,6742	1	1
Kota Bengkulu		60,53	0,7368	0,1349	0,3313	0,0339	1	1	1
Provinsi Bengkulu		59,83	0,5833	0,2664	0,2952	0,0429	1	1	1
Bengkulu Selatan	2024	62,41	0,7363	0,4059	0,1604	0,0665	1	1	1
Rejang Lebong		62,12	0,7485	0,2506	0,2975	0,052	1	1	1
Bengkulu Utara		31,25	0,6034	0,1983	0,1549	0,1374	1	0,0509	0,0427
Kaur		61,02	0,5307	0,3183	1	0,3741	1	0,0481	1
Seluma		28,18	0,4511	0,0169	0,1511	0,1132	1	0,1999	0,0405
Mukomuko		64,29	0,5558	0,5769	0,3647	1	1	1	0,0028
Lebong		65,27	0,7301	0,4232		0,7153	1	0,6999	1
Kepahiang		51,21	0,6006	0,1808	0,3717	0,0562	1	1	0,3756
Bengkulu Tengah		45,8	0,4463	0,471	1	0,0363	1	0,0797	0,173
Kota Bengkulu		55,33	0,7619	0,1658	0,4794	0,1777	1	1	0,2882
Provinsi Bengkulu		65,96	0,6097	0,2859	0,4734	0,2481	1	1	1

Dengan kemajuan yang telah dicapai, Bengkulu Selatan menunjukkan potensi untuk terus meningkatkan pembangunan literasi masyarakat melalui strategi yang fokus pada peningkatan kapasitas pustakawan, distribusi koleksi bahan bacaan yang merata, serta penciptaan program literasi yang lebih menarik dan partisipatif bagi seluruh lapisan masyarakat.

D. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan alat ukur krusial yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kemajuan pembangunan di bidang kebudayaan suatu daerah. Penilaian IPK mencakup berbagai dimensi seperti keragaman budaya, tingkat literasi, kualitas pendidikan, ketahanan sosial, serta partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Lebih dari sekadar mencerminkan kondisi budaya saat ini, IPK juga menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan publik yang berorientasi pada nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Tabel II-33. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 2018-2023

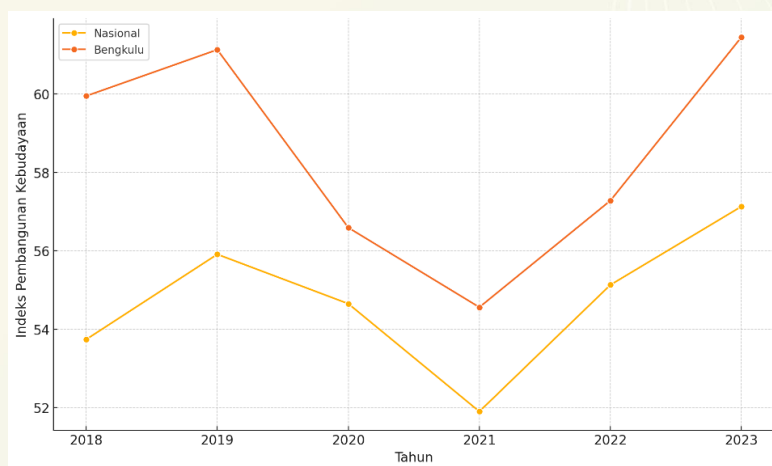
Tahun	Nasional	Bengkulu
2018	53.74	59.95
2019	55.91	61.13
2020	54.65	56.59
2021	51.90	54.56
2022	55.13	57.28
2023	57.13	61.45

Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, IPK berperan penting dalam mendorong pembangunan kebudayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kebudayaan di Bengkulu Selatan tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas daerah dan warisan sejarah, tetapi juga menyimpan potensi besar sebagai penggerak sektor ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis lokal. Peningkatan IPK mencerminkan keberhasilan dalam menanamkan nilai budaya dalam sistem pendidikan, mengaktifkan partisipasi warga dalam kegiatan seni dan adat, serta memperkuat kohesi sosial melalui praktik-praktik budaya seperti gotong royong dan pelestarian tradisi. Dengan menjadikan IPK sebagai

indikator utama pembangunan, Kabupaten Bengkulu Selatan berpeluang membangun ekosistem budaya yang kuat, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Bengkulu menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional selama periode 2018-2023. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak pandemi COVID-19, IPK Bengkulu berhasil pulih dan menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai 61,45 pada tahun 2023. Angka ini lebih tinggi dibandingkan IPK nasional yang berada di angka 57,13 pada tahun yang sama, menandakan bahwa upaya pelestarian dan pembangunan kebudayaan di daerah ini relatif efektif dan progresif.



Gambar II-15. Perbandingan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2018-2023

Peningkatan IPK ini merefleksikan komitmen kuat daerah dalam mendorong keberagaman budaya, literasi, partisipasi masyarakat dalam pelestarian tradisi, serta penguatan identitas lokal melalui sektor pendidikan dan sosial budaya. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan bagian integral dari Provinsi Bengkulu, pencapaian

ini menjadi landasan penting untuk terus mengarusutamakan kebudayaan dalam perencanaan pembangunan lima tahunan ke depan.

a. Dimensi Pendidikan

Dimensi Pendidikan dalam IPK Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 6,59% pada tahun 2023, dari 74,44 menjadi 79,35. Salah satu indikator yang mengalami peningkatan signifikan adalah persentase satuan pendidikan yang memiliki guru pengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian, yang meningkat sebesar 13,80%, dari 30,95 pada tahun 2022 menjadi 35,22 pada tahun 2023. Selain itu, jumlah guru master yang mendapatkan pelatihan metode pengajaran bahasa daerah juga mengalami peningkatan, dari 252 orang menjadi 260 peserta pelatihan.

Dimensi Pendidikan IPK Provinsi Bengkulu tahun 2024 diproyeksikan mencapai 77,60 poin. Berdasarkan baseline tahun 2018, capaian dimensi ini telah melampaui target tahun 2024 dengan pencapaian sebesar 131,30%. Meskipun demikian, peningkatan kualitas pendidikan tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan. Pada tahun 2023, Bengkulu menjadi salah satu dari 22 provinsi yang mendapatkan program revitalisasi bahasa daerah dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Program ini mencakup pelatihan bagi guru bahasa daerah, kepala sekolah, pengawas, siswa, serta komunitas penutur bahasa daerah. Program revitalisasi ini berfokus pada tiga bahasa lokal, yaitu Enggano, Rejang, dan Bengkulu dialek Serawai. Pelatihan yang diberikan kepada guru master diharapkan dapat diteruskan kepada guru lain dan diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah di tingkat kabupaten/kota.

b. Dimensi Budaya Literasi

Dimensi Budaya Literasi juga mengalami pertumbuhan sebesar 7,49% pada tahun 2023, dengan skor meningkat dari 57,60 menjadi 61,91. Indikator yang mengalami peningkatan terbesar adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam tiga bulan terakhir, yang meningkat sebesar 29,21%, dari 5,34 pada tahun 2022 menjadi 6,90 pada tahun 2023. Jumlah pengunjung perpustakaan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 mencapai 29 ribu orang, melampaui target 25 ribu pengunjung. Tren ini terus meningkat pada tahun 2023, dengan jumlah pengunjung mencapai 36 ribu orang, mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi.

Dimensi Budaya Literasi IPK Provinsi Bengkulu tahun 2024 diproyeksikan mencapai 66,06 poin. Hingga tahun 2023, capaian dimensi ini telah mencapai 68,26% dari target 2024. Untuk mencapai proyeksi tahun 2024, diperlukan peningkatan skor sebesar 4,15 poin. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2019 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap desa/kelurahan di Provinsi Bengkulu memiliki satu perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program ini diimplementasikan melalui Gerakan Satu Desa Satu Perpustakaan. Selain itu, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi, termasuk penyediaan bahan bacaan "Pojoek Raflesia Kantor Bahasa" di Perpustakaan Bank Indonesia, pojok baca di lobi perpustakaan daerah, serta kegiatan Jambore Literasi.

c. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Dimensi Ketahanan Sosial Budaya IPK Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 1,49% pada tahun 2023, dengan skor meningkat dari 75,77 menjadi 76,90. Indikator yang mengalami peningkatan terbesar adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan gotong royong, yang naik sebesar 8,83%, dari 29,45 pada tahun 2022 menjadi 32,05 pada tahun 2023. Pemerintah Kota Bengkulu, melalui Rencana Strategis Kecamatan Kampung Melayu 2019-2023, terus mendorong semangat gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan melalui program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.

Dimensi Ketahanan Sosial Budaya IPK Provinsi Bengkulu tahun 2024 diproyeksikan mencapai 81,07 poin. Hingga tahun 2023, capaian dimensi ini masih berada 17,72% di bawah target 2024. Untuk memenuhi target tersebut, skor IPK harus meningkat sebesar 4,17 poin dalam tahun mendatang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong praktik gotong royong secara berkelanjutan di tengah masyarakat. Gotong royong tidak hanya memperkuat ketahanan sosial budaya, tetapi juga meningkatkan solidaritas dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

Tradisi gotong royong tetap dijaga oleh masyarakat Bengkulu, seperti yang terlihat dalam berbagai praktik budaya lokal. Suku Rejang di Bengkulu Utara masih menjalankan tradisi "Bekejai" dalam upacara pernikahan adat kejai, yang bertujuan untuk melestarikan nilai tradisional sekaligus memperkuat persatuan. Sementara itu, di Kabupaten Seluma, Suku Serawai melestarikan tradisi "Ngidak Gelamai" saat menyambut Idul Fitri.

Dalam tradisi ini, masyarakat bersama-sama membuat dodol atau gelamai, yang menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong.

Dengan berbagai strategi yang telah diimplementasikan, Provinsi Bengkulu memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan IPK dalam berbagai dimensi. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta untuk memastikan bahwa pertumbuhan di setiap dimensi berjalan secara berkelanjutan, guna mencapai target pembangunan kebudayaan baik dalam jangka menengah maupun menuju visi Indonesia Emas 2045.

E. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan alat ukur penting untuk menilai pemenuhan hak-hak anak di suatu daerah, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta akses terhadap layanan sosial. IPA terdiri dari lima dimensi utama: Hak Sipil dan Kebebasan (D1), Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (D2), Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (D3), Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang (D4), serta Perlindungan Khusus (D5). Masing-masing dimensi memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas perlindungan anak, mulai dari identitas hukum hingga akses pendidikan dan penanganan anak dalam situasi rentan.

Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Selatan, IPA menjadi indikator strategis dalam RPJMD 2025–2029 untuk mengukur keberhasilan perlindungan anak dan memastikan tumbuh kembang anak berlangsung secara optimal. Tantangan seperti ketimpangan layanan dasar, kekerasan tersembunyi di lingkup keluarga, serta keterbatasan ruang aman dan ramah anak masih menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, pemerintah daerah

perlu memprioritaskan penguatan kapasitas keluarga, peningkatan kualitas layanan publik, penyediaan ruang aman bagi anak, serta sistem pelaporan kekerasan yang responsif. Dengan menjadikan IPA sebagai acuan pembangunan sosial, Kabupaten Bengkulu Selatan dapat membentuk generasi anak yang sehat, terlindungi, dan siap menghadapi masa depan.

Tabel II-34. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023.

	Tahun	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus	IPA
Kota Bengkulu	2021	53,650	89,890	75,910	32,530	75,330	66,600
	2022	47,860	88,010	79,730	33,400	73,920	65,560
	2023	44,350	91,310	78,670	32,680	75,870	65,690
Seluma	2021	45,260	82,950	74,450	34,290	73,360	63,020
	2022	52,770	81,010	73,910	33,300	69,580	62,980
	2023	48,130	84,560	79,320	31,180	76,530	64,950
Rejang Lebong	2021	46,280	76,020	68,120	30,970	66,720	58,500
	2022	49,080	73,720	71,190	28,230	64,170	58,050
	2023	45,620	80,810	73,510	30,200	75,280	62,130
Mukomuko	2021	42,930	77,870	77,640	32,600	79,690	63,090
	2022	48,820	79,620	78,310	30,000	78,160	63,970
	2023	52,610	81,370	77,960	31,240	69,550	63,380
Lebong	2021	44,160	59,430	72,670	25,140	76,430	56,330
	2022	50,150	73,630	71,720	31,330	65,150	59,110
	2023	52,580	66,170	71,590	33,030	73,600	60,100
Kepahiang	2021	43,010	73,040	75,710	20,950	70,100	57,490
	2022	49,520	70,780	75,250	29,930	63,870	58,460
	2023	48,350	76,640	74,430	32,210	66,240	60,300
Kaur	2021	44,830	79,810	78,580	30,540	79,840	63,730
	2022	48,320	78,960	80,680	30,330	71,310	62,700
	2023	45,000	74,750	81,140	29,950	75,220	61,990
Bengkulu Utara	2021	44,460	83,960	72,550	27,900	70,760	61,010
	2022	49,910	82,520	73,100	29,960	71,700	62,460
	2023	52,040	92,620	79,780	27,980	74,900	66,660
Bengkulu Tengah	2021	46,500	65,830	74,650	32,160	80,610	60,740
	2022	50,340	77,010	77,440	31,550	72,340	62,540
	2023	50,010	63,890	72,760	30,300	74,210	58,940
Bengkulu Selatan	2021	45,870	85,010	74,000	21,690	66,000	59,620
	2022	51,500	82,230	74,670	32,770	69,050	62,920
	2023	46,160	82,580	76,010	32,190	70,340	62,350

Sumber: <https://siga.kemendppa.go.id/>

Nilai Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Bengkulu Selatan meningkat dari 59,62 pada tahun 2021 menjadi 62,92 pada tahun 2022, namun kembali menurun ke angka 62,35 pada tahun 2023. Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang (D4), dari 21,69 menjadi 32,77 dalam satu tahun, yang kemudian sedikit turun menjadi 32,19 pada tahun berikutnya. Dimensi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (D3) juga mengalami kemajuan dari 74,00 ke 76,01. Sementara itu, dimensi Hak Sipil dan Kebebasan (D1) serta Perlindungan Khusus (D5) menunjukkan fluktuasi dan masih berada pada level moderat, mencerminkan perlunya penguatan perlindungan hukum dan sistem pelaporan terhadap kasus kekerasan atau eksploitasi anak.

Capaian IPA Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada posisi menengah di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu. Skor totalnya lebih tinggi dibandingkan beberapa wilayah seperti Bengkulu Tengah, Lebong, dan Kepahiang, namun masih tertinggal dari Kota Bengkulu dan Bengkulu Utara. Untuk meningkatkan skor IPA secara berkelanjutan, pemerintah daerah perlu memprioritaskan penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat, memperluas cakupan pengasuhan yang aman dan berkualitas, serta menjamin keterlibatan lintas sektor dalam mencegah kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak.

2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan indikator penting yang merefleksikan tingkat kesejahteraan dan ketahanan keluarga melalui berbagai dimensi, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan tempat tinggal, serta hubungan sosial. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, peningkatan IKK menjadi prioritas dalam pembangunan daerah karena keluarga yang sehat dan kuat akan melahirkan individu yang produktif, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Keluarga dengan akses terhadap

pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang terjangkau, dan kestabilan ekonomi memiliki kemampuan lebih besar untuk menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang dinamis.

Peningkatan kualitas keluarga memberi pengaruh langsung terhadap sektor-sektor pembangunan lainnya. Dalam bidang ekonomi, keluarga dengan pekerjaan layak akan mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung perekonomian lokal, terutama melalui UMKM. Di sektor kesehatan, keluarga yang memiliki akses layanan medis dan kondisi gizi yang baik akan berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup serta penurunan penyakit menular dan gizi buruk. Di bidang pendidikan, keluarga yang menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang menengah atau tinggi akan menciptakan generasi muda yang lebih siap bersaing di dunia kerja. Selain itu, pemenuhan infrastruktur dasar seperti rumah layak, air bersih, dan sanitasi di Bengkulu Selatan masih perlu diperkuat agar keluarga dapat hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong yang masih kuat di masyarakat Bengkulu Selatan juga menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan sosial. Secara keseluruhan, pembangunan berbasis keluarga akan membentuk fondasi yang kokoh bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di masa depan.

Tabel II-35. Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Komponen Kualitas Legalitas-Struktur	85,960	87,570	89,650	90,980
Komponen Kualitas Ketahanan Fisik	70,040	78,380	82,110	77,650
Komponen Kualitas Ketahanan Ekonomi	72,050	72,550	73,440	77,550
Komponen Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi	62,930	64,230	72,110	73,270
Komponen Kualitas Ketahanan Sosial -Budaya	57,100	58,610	61,100	62,630
Nilai IKK Total	71,170	74,390	77,890	78,140

Sumber: <https://kemenpppa.go.id/>

Data Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Bengkulu dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten di

hampir seluruh komponennya. Komponen Legalitas-Struktur mencatat angka tertinggi sepanjang periode tersebut, naik dari 85,96 pada 2020 menjadi 90,98 pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa aspek legal dan struktur keluarga di Provinsi Bengkulu, termasuk status pernikahan dan kepemilikan dokumen legal keluarga, telah berada pada tingkat yang relatif stabil dan tinggi. Sementara itu, komponen Ketahanan Fisik mengalami peningkatan signifikan pada 2021 dan 2022, namun sedikit menurun pada 2023 menjadi 77,65. Penurunan ini perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan aspek kesehatan, tempat tinggal, air bersih, dan sanitasi.

Komponen Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial-Psikologis terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, mencerminkan semakin kuatnya kapasitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan ketahanan sosial-emosional. Sementara itu, komponen Ketahanan Sosial-Budaya juga menunjukkan pertumbuhan yang konsisten meskipun masih merupakan komponen dengan nilai terendah, yakni hanya mencapai 62,63 pada 2023. Secara keseluruhan, nilai IKK Provinsi Bengkulu meningkat dari 71,17 pada 2020 menjadi 78,14 pada 2023. Ini menandakan adanya kemajuan nyata dalam peningkatan kualitas keluarga, meskipun masih dibutuhkan penguatan pada aspek sosial-budaya dan ketahanan fisik untuk menciptakan keseimbangan yang lebih utuh dalam pembangunan keluarga.

3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator penting yang digunakan untuk menilai sejauh mana kesenjangan antara laki-laki dan perempuan terjadi dalam aspek-aspek utama pembangunan, seperti kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi dalam dunia kerja. IKG dinyatakan dalam skala 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi

menunjukkan ketimpangan yang lebih besar. Indikator ini disusun berdasarkan sejumlah variabel kunci, termasuk angka kematian ibu, tingkat kelahiran remaja, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, dan perbedaan partisipasi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, IKG memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejauh mana perempuan memperoleh kesempatan dan manfaat yang setara dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik.

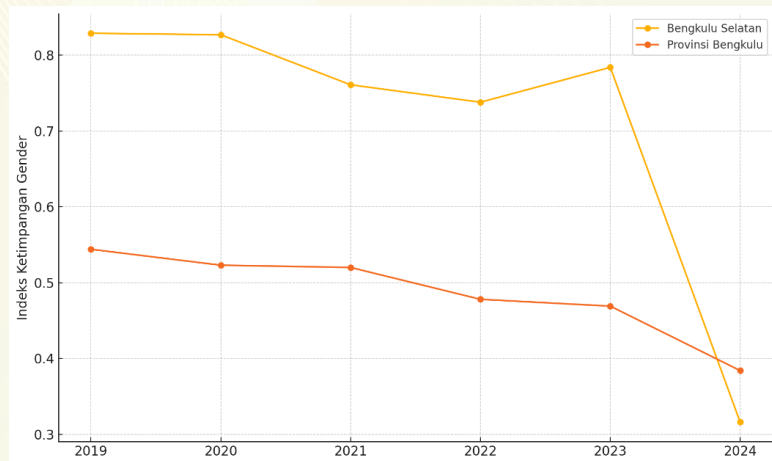
Tabel II-36. Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2019-2024

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	0,829	0,827	0,761	0,738	0,784	0,316
Rejang Lebong	0,52	0,469	0,537	0,46	0,45	0,392
Bengkulu Utara	0,588	0,6	0,592	0,538	0,513	0,477
Kaur	0,62	0,555	0,561	0,541	0,547	0,478
Seluma	0,566	0,572	0,541	0,552	0,505	0,493
Mukomuko	0,638	0,633	0,623	0,606	0,604	0,768
Lebong	0,557	0,545	0,474	0,499	0,52	0,432
Kepahiang	0,577	0,529	0,51	0,514	0,515	0,489
Bengkulu Tengah	0,537	0,485	0,512	0,536	0,524	0,483
Kota Bengkulu	0,443	0,412	0,464	0,328	0,319	0,159
Provinsi Bengkulu	0,544	0,523	0,52	0,478	0,469	0,384

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029, IKG menjadi alat ukur penting untuk menilai keberhasilan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kesetaraan gender. Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, partisipasi ekonomi, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu menempatkan isu pengurangan kesenjangan gender sebagai agenda prioritas. Langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi peningkatan peran perempuan dalam dunia kerja, perbaikan akses layanan kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan perempuan melalui pelatihan dan pembiayaan, serta mendorong representasi perempuan dalam lembaga pengambil kebijakan. Dengan

pendekatan ini, pembangunan di Bengkulu Selatan akan lebih adil dan merata, serta memberi ruang yang setara bagi semua warga tanpa diskriminasi gender.



Gambar II-16. Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

Dalam enam tahun terakhir (2019-2024), Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan fluktuasi yang signifikan dibandingkan Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2019 dan 2020, nilai IKG Bengkulu Selatan tergolong tinggi, yaitu di atas 0,82 yang menunjukkan ketimpangan gender yang serius. Meskipun terjadi penurunan bertahap hingga 2022, nilai IKG sempat meningkat kembali pada 2023 sebelum akhirnya turun drastis menjadi 0,316 di tahun 2024. Penurunan tajam ini mencerminkan adanya perbaikan kebijakan atau program yang berdampak positif terhadap kesetaraan gender.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu, IKG Bengkulu Selatan cenderung lebih tinggi hampir setiap tahun, menandakan bahwa ketimpangan gender di daerah ini umumnya lebih besar daripada tingkat provinsi. Namun, pada tahun 2024, nilai IKG Bengkulu Selatan berhasil berada di bawah rata-rata provinsi, mengindikasikan adanya kemajuan signifikan. Capaian ini menjadi sinyal positif bagi Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mendorong kesetaraan gender, namun tetap membutuhkan

konsistensi dan penguatan kebijakan yang berkelanjutan untuk mempertahankan tren positif tersebut.

4. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang menilai tingkat kesetaraan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam tiga aspek utama: kesehatan (melalui usia harapan hidup), pendidikan (rata-rata dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (berdasarkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan). Semakin kecil kesenjangan gender dalam aspek-aspek tersebut, semakin tinggi nilai IPG yang mendekati angka 100—menandakan kesetaraan dalam partisipasi dan akses terhadap hasil pembangunan.

Dalam kerangka RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2029, IPG menjadi indikator kunci untuk memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan secara adil dan tidak meminggirkan kelompok perempuan. Ketimpangan yang masih terjadi, baik dalam akses terhadap layanan dasar maupun keterlibatan perempuan dalam ranah sosial dan ekonomi, dapat menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Dengan menjadikan IPG sebagai bagian dari tolok ukur pembangunan, Kabupaten Bengkulu Selatan dapat mendorong kebijakan yang inklusif—yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kesetaraan hak, peluang, dan manfaat bagi seluruh warga, baik laki-laki maupun perempuan, dalam setiap proses pembangunan.

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode 2018 hingga 2024 menunjukkan tren yang cukup stabil dan relatif tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu. Meskipun pada tahun 2024 nilai IPG Bengkulu Selatan tercatat sebesar 91,89—lebih rendah dibanding tahun sebelumnya (94,74)—secara umum capaian IPG daerah ini konsisten berada di atas angka provinsi. Ini

menandakan adanya komitmen pembangunan yang cukup kuat dalam mengurangi kesenjangan gender di wilayah tersebut.

Tabel II-37. Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2018-2024

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	91,37	91,19	91,00	91,16	91,36	91,57	91,89
Bengkulu Selatan	94,08	94,05	94,14	94,31	94,72	94,74	94,89
Rejang Lebong	94,59	94,15	93,78	93,72	93,83	94,24	94,83
Bengkulu Utara	91,19	91,25	91,23	91,39	91,39	91,47	91,81
Kaur	87,20	87,13	87,12	87,17	87,51	87,72	87,83
Seluma	85,28	85,32	85,65	85,93	86,16	86,30	86,48
Mukomuko	84,18	83,95	83,88	84,03	84,22	84,87	85,61
Lebong	90,99	91,49	91,60	91,86	92,19	92,06	92,35
Kepahiang	95,20	95,32	95,80	95,73	96,11	96,01	96,16
Bengkulu Tengah	86,36	86,55	86,83	87,04	87,29	87,25	87,51
Kota Bengkulu	96,55	95,97	95,67	95,77	96,07	96,12	96,95

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu, posisi Bengkulu Selatan dalam hal IPG cukup kompetitif, walaupun belum mencapai nilai tertinggi seperti Kabupaten Kepahiang atau Kota Bengkulu. Namun demikian, Bengkulu Selatan tetap tergolong dalam kelompok daerah dengan pembangunan gender yang cukup setara, dengan capaian IPG yang berada di atas 90 selama enam tahun berturut-turut. Penurunan yang terjadi pada 2024 memerlukan perhatian khusus, karena bisa jadi merupakan indikasi awal adanya tantangan dalam pemenuhan hak-hak dasar perempuan, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IPG, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu meninjau ulang kebijakan dan program yang menysasar pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Pendekatan yang lebih terintegrasi melalui pendidikan berbasis gender, layanan kesehatan reproduksi yang menyeluruh, serta penguatan peran perempuan dalam sektor ekonomi dan pengambilan keputusan akan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pencapaian ini.

5. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana perempuan di Kabupaten Bengkulu Selatan memperoleh kesempatan yang setara dalam bidang kehidupan publik dan ekonomi. Indeks ini mencakup keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, kepemimpinan di posisi strategis, serta kontribusinya terhadap pendapatan ekonomi keluarga. Nilai IDG yang tinggi mencerminkan tingkat pemberdayaan perempuan yang kuat, di mana perempuan tidak hanya memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar, tetapi juga berperan aktif dalam memengaruhi arah kebijakan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan, khususnya pada RPJMD 2025-2029, peningkatan IDG menjadi komponen penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender secara nyata. Pemerintah daerah perlu memperkuat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan birokrasi, memperluas akses terhadap pelatihan kepemimpinan dan keterampilan, serta mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan wirausaha maupun sektor formal. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi bagian dari agenda sosial, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Bengkulu tahun 2019-2024, Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun masih berada di bawah rata-rata provinsi. Pada tahun 2019, IDG Bengkulu Selatan tercatat sebesar 55,20, dan perlahan meningkat menjadi 60,92 pada tahun 2024. Kenaikan sebesar 5,72 poin ini menandakan adanya perbaikan bertahap dalam pemberdayaan perempuan, terutama dalam akses terhadap peran publik,

ekonomi, dan pengambilan keputusan. Meskipun begitu, posisi ini masih menempatkan Bengkulu Selatan sebagai salah satu daerah dengan capaian IDG yang rendah di tingkat provinsi.

Tabel II-38. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2018-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu	69,78	70,48	70,22	70,13	70,06	75,69
Bengkulu Selatan	55,2	55,03	54,62	55,63	55,87	60,92
Rejang Lebong	64,71	64,82	65,7	63,57	63,13	64,53
Bengkulu Utara	65,77	62,32	62,52	62,39	61,88	59,07
Kaur	62,13	61,17	61,72	62,29	62,89	71,16
Seluma	65,68	65,6	61,92	62,98	59,07	66,86
Mukomuko	56,78	56,48	56,26	55,42	56,32	51,17
Lebong	67,14	70,74	70,41	74,79	74,25	80,46
Kepahiang	65,09	66,27	66,96	67,12	66,41	55,37
Bengkulu Tengah	76,71	76,78	77,1	76,85	74,93	75,3
Kota Bengkulu	77,58	77,68	77,67	77,54	75,94	76

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu yang mencapai 75,69 pada tahun 2024, Bengkulu Selatan tertinggal cukup jauh, yakni selisih sekitar 14,77 poin. Bahkan dibandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Kaur (71,16) dan Seluma (66,86), posisi Bengkulu Selatan masih lebih rendah. Capaian ini hanya sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Mukomuko yang justru mengalami penurunan IDG secara signifikan pada 2024 (51,17). Di sisi lain, Kabupaten Lebong mencatatkan IDG tertinggi di Provinsi Bengkulu sebesar 80,46, menandakan keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Rendahnya IDG Bengkulu Selatan selama periode 2019-2022 dapat dimaknai sebagai refleksi dari masih terbatasnya ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan, baik dalam pemerintahan, organisasi masyarakat, maupun kegiatan ekonomi produktif. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis di pemerintahan atau DPRD, keterbatasan akses

terhadap pelatihan dan permodalan usaha, serta norma budaya dan sosial yang masih membatasi peran perempuan dalam ranah publik.

Namun peningkatan IDG yang mulai tampak pada tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan mulainya perbaikan struktural dan peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap isu kesetaraan gender. Kemungkinan besar, hasil ini merupakan kontribusi dari intervensi program pemberdayaan perempuan, pelatihan keterampilan, dukungan untuk wirausaha perempuan, dan program inklusi sosial di tingkat desa dan kecamatan.

6. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indikator komprehensif yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan pemuda melalui lima dimensi utama: pendidikan dan keterampilan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja dan kepemimpinan, partisipasi dan keterlibatan sosial, serta kesetaraan gender dan inklusivitas. IPP memberikan cerminan sejauh mana pemuda di Kabupaten Bengkulu Selatan mendapatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, ruang berkreasi dan berpartisipasi, serta peluang ekonomi yang mendorong kemandirian dan daya saing. Nilai IPP yang tinggi menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan telah menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan dan peran aktif generasi muda dalam pembangunan daerah.

Dalam kerangka RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, IPP menjadi salah satu indikator strategis untuk mengukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia usia produktif yang akan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi dan inovasi sosial di masa mendatang. Pemuda di Bengkulu Selatan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk

transformasi digital, ketahanan pangan, serta isu-isu global lainnya. Oleh karena itu, peningkatan IPP harus menjadi prioritas melalui kebijakan lintas sektor, seperti penguatan pendidikan vokasi, pelayanan kesehatan remaja yang inklusif, dukungan terhadap kewirausahaan muda, dan peningkatan partisipasi pemuda dalam forum pembangunan daerah. Strategi ini menjadi fondasi penting dalam membentuk Kabupaten Bengkulu Selatan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan berbasis generasi muda yang berkualitas.

Tabel II-39. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Bengkulu 2016-2023

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendidikan	X1 (Rata-rata lama sekolah)	10,28	10,61	10,55	10,53	10,77	10,87	11,14	11,09	11,22
	X2 (APK Sekolah Menengah)	86,03	87,11	88,81	88,95	91,54	92,7	92,98	92,38	93,85
	X3 (APK Perguruan Tinggi)	36,53	41	41,52	38,31	37,63	38,39	38,66	38,15	38,01
	D1	66,67	73,33	73,33	70	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33
Kesehatan dan Kesejahteraan	X4 (Angka kesakitan pemuda)	9,29	8,99	7,29	7,21	8,7	8,23	8,61	10,7	6,52
	X5 (Persentase korban kejahatan)	1,47	1,55	1,93	1,31	1,77	1,54	1,18	0,87	0,79
	X6 (Persentase pemuda yang merokok)	29,72	28,36	29,75	29,75	30	29,54	28,21	28,03	27,12
	X7 (Persentase remaja perempuan yang sedang hamil)	23,83	16,04	16,31	16,31	14,94	27,3	23,12	23,12	11,21
	D2	47,5	52,5	50	55	50	42,5	52,5	52,5	65
Lapangan dan Kesempatan Kerja	X8 (Persentase pemuda wirausaha kerah putih)	0,18	0,97	0,28	0,21	0,32	0,32	0,51	0,56	0,63
	X9 (Tingkat pengangguran terbuka)	11,98	8,6	9,85	9,96	8,34	9,86	9,67	8,84	9,39
	D3	35	60	45	45	50	45	50	50	55
Partisipasi dan Kepemimpinan	X10 (Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan)	82,14	82,14	82,14	78,65	78,65	78,65	64,8	64,8	65,73
	X11 (Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi)	4,85	4,85	4,85	7,79	7,79	7,79	4,54	4,54	5,88
	X12 (Persentase pemuda yang memberikan saran / pendapat dalam rapat)	5,83	5,83	5,83	9,9	9,9	9,9	5,2	5,2	5,97
	D4	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	40	40	40
Gender dan Diskriminasi	X13 (Angka perkawinan usia anak)	12,77	14,5	14,61	14,33	13,24	10,68	11,93	11,93	7,01
	X14 (Persentase pemuda perempuan berusia 16-24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas)	46,64	43,27	46,22	45,8	45,81	47,34	48,93	48,93	48,33
	X15 (Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)	19,07	22,06	17,65	15,89	21,29	19,17	19,36	18,85	20,07
	D5	46,67	43,33	40	40	43,33	46,67	50	50	53,33
	IPP	48,5	55,17	51	51,33	52,67	50,83	53,17	53,17	57,33

Sumber: <https://ipp.sarikata.com>

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2023, terlihat bahwa capaian pembangunan pemuda mengalami fluktuasi meskipun menunjukkan tren positif secara umum. IPP meningkat dari 48,5 pada tahun 2015 menjadi 57,33 pada tahun 2023, mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas layanan yang mendukung pengembangan generasi muda. Kenaikan signifikan terutama terjadi pada domain kesehatan dan kesejahteraan (D2) yang melonjak dari 42,5 di tahun 2020 menjadi 65 pada 2023, yang mencerminkan membaiknya indikator seperti penurunan angka kesakitan, pengurangan korban kejahatan, dan turunnya persentase remaja perempuan yang hamil.

Namun demikian, masih terdapat tantangan di beberapa aspek. Partisipasi dan kepemimpinan (D4) stagnan di angka 40 sejak 2021, menunjukkan rendahnya keterlibatan pemuda dalam organisasi maupun pengambilan keputusan sosial. Demikian pula domain gender dan diskriminasi (D5) meski meningkat dari 46,67 menjadi 53,33, masih menunjukkan kesenjangan terkait partisipasi pemuda perempuan di sektor pendidikan tinggi dan sektor formal. Domain pendidikan (D1) stabil sejak 2019 di angka 73,33, menunjukkan bahwa capaian pendidikan formal pemuda di Bengkulu cukup baik dan konsisten. Dengan demikian, untuk meningkatkan IPP secara keseluruhan, diperlukan fokus lebih besar pada peningkatan partisipasi pemuda dalam masyarakat serta penguatan kebijakan inklusif berbasis gender.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan elemen kunci dalam mendukung transformasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Daya saing ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya manusia, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta efektivitas sistem ekonomi untuk menciptakan

pertumbuhan yang inklusif dan merata. Dalam kerangka RPJMD 2025–2029, strategi penguatan daya saing difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, mendorong inovasi lokal, penerapan prinsip ekonomi hijau dan biru, percepatan transformasi digital, serta integrasi ekonomi daerah ke dalam rantai pasok nasional dan global.

Selain itu, pemerataan pembangunan antara wilayah pesisir, pedesaan, dan perkotaan menjadi bagian penting dalam membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Stabilitas ekonomi makro juga menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga kesinambungan fiskal dan memperkuat kebijakan pembangunan yang berpihak pada pertumbuhan sekaligus pemerataan. Berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur daya saing daerah akan mencerminkan kesiapan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjawab tantangan masa depan secara adaptif, tangguh, dan kompetitif.

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Angka Ketergantungan

Dalam konteks daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan, salah satu indikator kunci yang menggambarkan beban ekonomi penduduk usia produktif adalah angka ketergantungan (dependency ratio). Indikator ini mengukur rasio antara jumlah penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Semakin rendah angka ketergantungan, semakin tinggi kapasitas penduduk usia kerja dalam mendukung kebutuhan penduduk non-produktif, yang mencerminkan potensi positif terhadap produktivitas dan daya saing wilayah.

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2024 menurut kelompok umur dan perhitungan angka ketergantungan, dapat disimpulkan bahwa beban penduduk usia produktif

(15-64 tahun) dalam menopang penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) mengalami sedikit penurunan. Angka ketergantungan tahun 2021 sebesar 49,5%, dan menurun menjadi 48,9% pada tahun 2024. Ini berarti, setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 49 penduduk usia non-produktif.

Tabel II-40. Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024-2030

Tahun	0-14	15-64	65+	Angka Ketergantungan (%)
2021	41.770	115.399	10.245	45,07
2022	42.271	116.843	10.979	45,57
2023	42.604	117.533	11.326	45,88
2024	42.728	118.665	11.922	46,05

Sumber: Data Diolah

Penurunan angka ketergantungan ini menunjukkan adanya perbaikan struktur demografi yang berpotensi meningkatkan produktivitas daerah. Dengan proporsi penduduk usia kerja yang lebih besar, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki peluang untuk memanfaatkan momentum bonus demografi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, asalkan didukung dengan kebijakan yang tepat dalam pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.

B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan merupakan indikator penting yang menggambarkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Semakin besar rasio ini, semakin tinggi pula nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dibandingkan dengan sektor lainnya. Dalam konteks pembangunan ekonomi, rasio ini mencerminkan sejauh mana suatu wilayah telah mengalami transformasi ekonomi dari sektor primer seperti pertanian

dan perikanan, ke sektor sekunder yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Penguatan industri pengolahan tidak hanya berdampak pada peningkatan output ekonomi, tetapi juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah (UKM) di tingkat lokal.

Bagi Kabupaten Bengkulu Selatan, peningkatan rasio PDRB industri pengolahan menjadi salah satu prioritas strategis dalam dokumen RPJMD 2025-2029. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah daerah untuk mendorong hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa, kopi, dan hasil perikanan, sehingga mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar sebelum produk dijual ke luar daerah. Selain itu, penguatan sektor ini juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperluas basis ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan rasio PDRB industri pengolahan menjadi landasan penting dalam membangun struktur ekonomi yang lebih produktif, berdaya saing, dan inklusif di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 selama periode 2020-2024 menunjukkan kontribusi yang relatif stabil, meskipun berada pada level yang cukup rendah. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang sekitar 3,10% terhadap total PDRB, dan angka ini hanya mengalami sedikit perubahan hingga tahun 2024, yaitu mencapai 2,91%. Nilai ini mencerminkan bahwa sektor industri pengolahan belum menjadi penggerak utama dalam struktur perekonomian daerah, meskipun dari sisi nominal mengalami peningkatan dari Rp112,22 miliar menjadi Rp121,31 miliar selama periode lima tahun.

Tabel II-41. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.191,04	1.218,15	1.267,16	1.284,62	1.308,51
Pertambangan dan Penggalian	84,18	85,28	86,44	91,10	96,20
Industri Pengolahan	112,22	115,20	118,42	117,59	121,31
Pengadaan Listrik dan Gas	3,66	3,88	4,15	4,35	4,57
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,71	5,76	6,00	6,38	6,64
Konstruksi	183,65	187,17	190,04	200,42	212,88
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	597,75	626,90	654,24	672,92	689,90
Transportasi dan Pergudangan	231,70	240,39	255,40	269,01	278,90
Informasi dan Komunikasi	70,47	71,69	77,83	84,97	93,22
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	132,90	140,53	151,95	166,67	182,08
Jasa Keuangan dan Asuransi	222,17	239,13	232,46	216,83	231,25
Real Estate	162,71	162,85	167,57	176,76	184,92
Jasa Perusahaan	9,23	9,14	10,29	11,09	12,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	352,49	362,11	361,61	386,21	419,34
Jasa Pendidikan	187,81	192,54	202,20	212,74	226,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53,84	58,37	60,55	66,00	71,42
Jasa lainnya	23,07	23,41	25,28	27,16	29,62
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3.624,59	3.742,51	3.871,61	3.994,82	4.169,51

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2025

Ketimpangan kontribusi ini menandakan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan masih didominasi oleh sektor-sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Padahal, sektor industri pengolahan memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mendorong hilirisasi komoditas unggulan lokal. Oleh karena itu, peningkatan rasio PDRB industri pengolahan perlu menjadi perhatian strategis dalam RPJMD 2025-2029 melalui kebijakan penguatan sektor UMKM industri, pengembangan kawasan industri berbasis potensi lokal, serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti energi dan logistik. Peningkatan kontribusi sektor ini akan memperkuat struktur ekonomi daerah, mengurangi ketergantungan pada sektor primer, serta mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum adalah perbandingan antara nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Rasio ini menjadi indikator penting dalam menilai kontribusi sektor pariwisata, perhotelan, restoran, dan jasa boga terhadap perekonomian daerah. Kenaikan rasio menunjukkan peningkatan peran subsektor ini dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal, yang erat kaitannya dengan mobilitas masyarakat, pertumbuhan wisatawan, serta perubahan pola konsumsi rumah tangga. Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki potensi wisata alam dan budaya, rasio ini dapat menjadi gambaran awal seberapa jauh potensi tersebut telah dioptimalkan secara ekonomi.

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga konstan tahun 2010, sektor Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan kontribusi yang terus meningkat terhadap total PDRB. Pada tahun 2020, nilai tambah bruto sektor ini mencapai Rp132,90 miliar dari total PDRB sebesar Rp3.624,59 miliar, sehingga kontribusinya sekitar 3,67%. Angka ini terus tumbuh secara konsisten hingga mencapai Rp182,08 miliar pada tahun 2024 dari total PDRB sebesar Rp4.169,51 miliar, atau sekitar 4,37%. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan permintaan terhadap layanan akomodasi dan makan-minum, baik dari aktivitas masyarakat lokal maupun dari wisatawan yang berkunjung ke Bengkulu Selatan. Kenaikan ini juga menjadi sinyal positif bahwa sektor ini mulai menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.

Dalam kerangka RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029, tren peningkatan rasio PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum perlu dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan yang lebih terfokus dan

terintegrasi. Pemerintah daerah dapat mengambil langkah strategis melalui penguatan destinasi wisata unggulan, promosi terpadu berbasis digital, pengembangan SDM kepariwisataan, serta insentif bagi pelaku usaha kuliner dan perhotelan lokal. Selain itu, konektivitas antarwilayah serta infrastruktur pendukung seperti jalan menuju objek wisata dan fasilitas umum juga harus diperkuat untuk meningkatkan daya tarik daerah. Dengan demikian, sektor Akomodasi dan Makan Minum tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi langsung, tetapi juga menciptakan efek berantai terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi desa, sejalan dengan misi pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang bertumpu pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu atau kelompok untuk menciptakan nilai tambah melalui penciptaan dan eksploitasi kekayaan intelektual. Sektor ini mencakup berbagai bidang seperti kuliner, kriya, musik, seni pertunjukan, desain, aplikasi digital, hingga film dan animasi. Dalam konteks pengukuran ekonomi daerah, kontribusi ekonomi kreatif sering tercermin dalam beberapa lapangan usaha yang tercatat dalam data PDRB, seperti sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Perusahaan, serta Jasa Lainnya. Penelusuran proporsi ekonomi kreatif melalui pendekatan PDRB memungkinkan untuk melihat sejauh mana sektor ini berperan dalam struktur ekonomi lokal.

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020-2024, sektor-sektor yang merepresentasikan ekonomi kreatif menunjukkan pertumbuhan yang cukup konsisten. Nilai sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum meningkat dari Rp132,90 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp182,08 miliar pada 2024, atau naik sekitar 36,9%. Sektor

Informasi dan Komunikasi juga mencatatkan pertumbuhan dari Rp70,47 miliar menjadi Rp93,22 miliar. Sektor Jasa Perusahaan dan Jasa Lainnya pun turut mengalami peningkatan nilai, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Jika seluruh sektor yang terkait dihitung secara konservatif, maka proporsinya terhadap total PDRB meningkat dari sekitar 6,3% di tahun 2020 menjadi lebih dari 7,5% pada 2024. Angka ini mencerminkan kontribusi yang semakin menguat dari ekonomi kreatif dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan.

Peningkatan proporsi PDRB ekonomi kreatif ini menjadi peluang strategis dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029. Sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru, mendukung inovasi lokal, dan memperkuat identitas budaya daerah. Oleh karena itu, arah pembangunan daerah ke depan perlu difokuskan pada pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan fasilitas pengembangan usaha kreatif, pelatihan keterampilan berbasis digital dan budaya, serta integrasi dengan sektor pariwisata dan UMKM. Dengan strategi tersebut, ekonomi kreatif akan menjadi pilar penting dalam mendukung transformasi ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan yang lebih berdaya saing dan adaptif terhadap perubahan zaman.

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tergolong dalam kelompok angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, TPAK digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk usia kerja terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi, baik di sektor formal maupun informal. Semakin tinggi angka TPAK, semakin besar proporsi masyarakat yang

berkontribusi langsung terhadap perekonomian daerah, yang pada gilirannya memperkuat struktur ketenagakerjaan dan produktivitas wilayah.

Selain sebagai cerminan keterlibatan penduduk dalam pasar kerja, TPAK di Bengkulu Selatan juga menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan. Tingginya TPAK menunjukkan bahwa terdapat peluang kerja yang terbuka dan adanya kesiapan tenaga kerja untuk mengisi posisi tersebut. Sebaliknya, TPAK yang rendah dapat mengindikasikan masih adanya hambatan seperti kurangnya akses lapangan kerja, minimnya pelatihan keterampilan, atau tingginya beban domestik, terutama bagi perempuan. Oleh karena itu, dalam kerangka perencanaan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029, peningkatan TPAK perlu dijadikan prioritas untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah dan memperluas kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel II-42. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	70,11	73,95	75,64	75,95	74,45
Rejang Lebong	77,93	76,09	74,46	77,86	74,92
Bengkulu Utara	72	67,62	67,72	68,6	71,9
Kaur	69,54	69,28	72,22	68,44	71,63
Seluma	76,45	70,13	70,57	73,44	73,45
Mukomuko	65,68	64,11	62,72	67,16	66,46
Lebong	74,38	72,01	72,8	70,23	71,67
Kepahiang	78,99	75,59	74,47	75,73	76,51
Bengkulu Tengah	69,71	67,32	65,16	64,96	68,89
Kota Bengkulu	65,99	65,42	66,29	66,61	68,54
Provinsi Bengkulu	71,73	69,75	69,81	70,91	71,71

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, yakni dari 70,11% menjadi 75,95%, sebelum sedikit menurun menjadi 74,45% di tahun 2024. Angka ini relatif tinggi dan stabil, yang mencerminkan tingginya tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi. Jika

dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu, TPAK Kabupaten Bengkulu Selatan konsisten berada di atas nilai provinsi, terutama selama tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas angkatan kerja di daerah ini dimanfaatkan secara optimal dibandingkan dengan wilayah provinsi secara umum.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu, posisi Bengkulu Selatan berada pada kategori sedang-tinggi. Kabupaten Kepahiang secara konsisten menempati posisi tertinggi, sementara Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Mukomuko menunjukkan nilai TPAK yang lebih rendah dari Bengkulu Selatan sepanjang lima tahun terakhir. Kabupaten juga sempat menunjukkan fluktuasi dan sempat menyamai bahkan melewati angka Bengkulu Selatan pada tahun 2020, namun secara umum tetap berada di bawah. Variasi antar daerah ini mencerminkan perbedaan dalam ketersediaan lapangan kerja, karakteristik sosial ekonomi, serta efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

5. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator penting yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menciptakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kebijakan atau program yang bersifat inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Penilaian ini disusun oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan menjadi salah satu alat ukur untuk mendorong budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah secara terstruktur dan berkelanjutan.

Bagi Kabupaten Bengkulu Selatan, penguatan inovasi daerah menjadi langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, seperti keterbatasan fiskal, rendahnya daya saing, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Dalam

beberapa tahun terakhir, geliat inovasi mulai tumbuh melalui berbagai inisiatif di sektor pelayanan dasar, tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Namun demikian, capaian indeks inovasi daerah Bengkulu Selatan masih tergolong sedang dan memerlukan penguatan kelembagaan inovasi, kolaborasi antar-perangkat daerah, serta keberanian mencoba pendekatan baru berbasis teknologi, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat.

Tabel II-43. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024

Wilayah	2021		2022		2023		2024	
	Indeks Inovasi	Kategori	Indeks Inovasi	Kategori	Indeks Inovasi	Kategori	Indeks Inovasi	Kategori
Provinsi Bengkulu	57,93	Inovatif	48,57	Inovatif	51,49	Inovatif	53,39	Inovatif
Kota Bengkulu	59,37	Inovatif	64	Sangat Inovatif	69,46	Sangat Inovatif	76,72	Sangat Inovatif
Bengkulu Utara	52,61	Inovatif	55,42	Inovatif	48,16	Inovatif	55,39	Inovatif
Bengkulu Selatan	50,42	Inovatif	37,95	Inovatif	51,45	Inovatif	54,34	Inovatif
Kepahiang	46	Inovatif	46,49	Inovatif	48,15	Inovatif	39,68	Inovatif
Seluma	45,05	Inovatif	42,85	Inovatif	42,73	Inovatif	51,64	Inovatif
Rejang Lebong	44,07	Inovatif	51,32	Inovatif	40,69	Inovatif	47,67	Inovatif
Bengkulu Tengah	37,47	Inovatif	40,24	Inovatif	34,18	Kurang Inovatif	42,04	Inovatif
Kaur	11,68	Kurang Inovatif	41,29	Inovatif	48,39	Inovatif	40,45	Inovatif
Mukomuko	11,76	Kurang Inovatif	41,54	Inovatif	32,89	Kurang Inovatif	23,16	Kurang Inovatif
Lebong	22,69	Kurang Inovatif	27,41	Kurang Inovatif	45,92	Inovatif	38,26	Inovatif

Bengkulu Selatan mencatat perkembangan yang fluktuatif namun menunjukkan tren positif dalam Indeks Inovasi Daerah selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, indeks berada pada level 50,42, masuk dalam kategori Inovatif dan berada di atas rata-rata kabupaten lain seperti Rejang Lebong (44,07) dan Bengkulu Tengah (37,47). Namun, terjadi penurunan cukup tajam di tahun 2022 menjadi 37,95 - meski tetap dalam kategori Inovatif, nilai ini merupakan yang terendah kedua se-Provinsi Bengkulu setelah Mukomuko (41,54). Penurunan sebesar 12,47 poin ini patut menjadi perhatian khusus, karena terjadi ketika sebagian besar wilayah lain justru

menunjukkan peningkatan, seperti Kaur yang melonjak dari 11,68 menjadi 41,29.

Tahun 2023 menjadi titik balik dengan kenaikan signifikan ke 51,45, mengembalikan posisi Bengkulu Selatan di atas rata-rata kabupaten (kecuali Kota Bengkulu dan Bengkulu Utara). Peningkatan ini lebih tinggi dibanding kenaikan provinsi yang hanya naik 2,92 poin dari 2022. Capaian ini terus berlanjut di tahun 2024 dengan indeks 54,34, menunjukkan tren konsisten meski masih di bawah capaian Bengkulu Utara (55,39) dan jauh di bawah Kota Bengkulu (76,72).

C. Transformasi Digital

1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan pendekatan penting untuk melihat kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital, baik di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. IMDI disusun berdasarkan pengembangan dari G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy, dan menjadi kerangka kerja komprehensif dalam mengukur keterampilan digital masyarakat secara objektif dan terstandarisasi.

Kerangka IMDI terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pilar, subpilar, dan indikator. Secara khusus, terdapat empat pilar utama dalam pengukuran IMDI, yaitu:

a. Infrastruktur dan Ekosistem

Pilar ini menjadi landasan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan jangkauan, kualitas, dan biaya layanan internet. Pilar ini menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap infrastruktur digital, serta pentingnya keberadaan ekosistem pembelajaran yang

mendukung kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi.

b. Keterampilan Digital

Pilar ini mencakup literasi digital dan keterampilan dasar penggunaan teknologi. Pengukuran dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kesetaraan, seperti perbedaan jenis kelamin dan tingkat pendidikan, untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penguasaan teknologi antar kelompok masyarakat. Pilar ini merujuk pada Digital Literacy Global Framework dari UNESCO sebagai acuan pengembangan indikator.

c. Pemberdayaan

Pilar ini mencerminkan sejauh mana masyarakat mampu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan peluang ekonomi, baik melalui usaha digital mandiri maupun partisipasi dalam ekonomi berbagi (sharing economy). Akses terhadap platform digital tidak hanya membuka ruang bagi peningkatan pendapatan, tetapi juga memperkuat inklusi keuangan dan kualitas hidup secara keseluruhan.

d. Pekerjaan

Pilar ini berfokus pada keterampilan digital yang dibutuhkan dalam dunia kerja, baik saat ini maupun di masa depan. Pengukuran meliputi kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital untuk menyelesaikan tugas kerja, serta kesesuaian antara permintaan keterampilan di pasar tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital.

Melalui keempat pilar ini, IMDI memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi era digital. Bagi Kabupaten Bengkulu Selatan, penguatan indikator-indikator IMDI menjadi

bagian strategis dalam mendorong transformasi digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian pembangunan berbasis teknologi informasi.

Tabel II-44. Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2022-2024

Tahun	Kabupaten/ Kota	Indeks Masyarakat Digital	Pilar Infrastruktur dan Ekosistem	Pilar Keterampilan Digital	Pilar Pemberdayaan	Pilar Pekerjaan
2022	Bengkulu Selatan	36,17	31,65	53,82	20,74	37,83
	Bengkulu Tengah	42,30	36,52	62,38	27,11	42,26
	Bengkulu Utara	33,81	33,85	39,51	22,84	39,3
	Kaur	39,08	33,96	51,04	22,88	47,81
	Kepahiang	45,67	36,71	67,67	27,93	48,89
	Kota Bengkulu	40,99	40,7	59,9	23,38	40,22
	Lebong	41,48	32,43	67,53	25,46	38,89
	Mukomuko	41,09	37,86	56,14	26,89	43,07
	Rejang Lebong	34,31	33,48	42,01	21,35	40,53
	Seluma	43,48	31,49	70,07	27,81	42,36
	Provinsi Bengkulu	39,82	34,86	57,06	24,64	42,12
2023	Bengkulu Selatan	41,88	55,2	50,86	27,01	35,23
	Bengkulu Tengah	46,42	53,95	70,65	24,62	36,01
	Bengkulu Utara	44,65	53,13	63,2	26,58	35,22
	Kaur	45,90	55,24	65,18	27,68	34,23
	Kepahiang	48,45	54,95	71,26	30,24	35,07
	Kota Bengkulu	45,72	56,58	71,35	21,39	32,8
	Lebong	44,59	56,29	62,48	23,98	36,4
	Mukomuko	46,68	53,77	68,75	27,47	35,58
	Rejang Lebong	41,88	53,16	53,17	26,36	35,66
	Seluma	45,93	53,1	70,28	24,81	34,55
	Provinsi Bengkulu	45,21	56,55	58,38	27,51	36,16
2024	Bengkulu Selatan	38,65	51,94	49,73	19,8	36,21
	Bengkulu Tengah	42,18	50,71	59,73	23,1	36,37
	Bengkulu Utara	45,46	54,08	69,21	22,25	37
	Kaur	44,19	49,13	64,13	25,81	38,41
	Kepahiang	47,88	51,01	66,29	32,91	40,82
	Kota Bengkulu	47,25	58,58	63,56	29	37,7
	Lebong	39,78	51,86	54,4	19,15	36,6
	Mukomuko	44,58	50,52	63,25	26,78	38,33
	Rejang Lebong	44,13	54,86	62,56	22,42	38,63
	Seluma	41,60	51,77	58,46	21,62	36,25
	Provinsi Bengkulu	43,57	52,45	61,13	24,28	37,63

Sumber: <https://imdi.sdmdigital.id/>

Selama periode 2022 hingga 2024, capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan pola yang

fluktuatif. Pada tahun 2022, nilai IMDI tercatat sebesar 36,17, meningkat cukup signifikan menjadi 41,88 pada tahun 2023, namun kembali menurun menjadi 38,65 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu yang secara berturut-turut berada pada angka 39,82 (2022), 45,21 (2023), dan 43,57 (2024), posisi Kabupaten Bengkulu Selatan secara konsisten berada di bawah rata-rata provinsi dalam tiga tahun terakhir. Penurunan nilai IMDI pada tahun 2024 di Bengkulu Selatan terutama disebabkan oleh anjloknya nilai pada pilar Pemberdayaan, yang turun dari 27,01 menjadi hanya 19,80—terendah di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Selain itu, pilar Keterampilan Digital juga mengalami penurunan dari 53,82 pada tahun 2022 menjadi 49,73 pada tahun 2024. Sementara itu, pilar Infrastruktur dan Ekosistem sempat mengalami peningkatan cukup signifikan dari 31,65 (2022) ke 55,20 (2023), namun sedikit menurun pada 2024 menjadi 51,94.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi kemajuan dalam pembangunan infrastruktur digital, pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keterampilan digital belum optimal. Rendahnya nilai pada pilar pemberdayaan menunjukkan bahwa akses terhadap platform digital belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang produktif, terutama oleh pelaku usaha kecil dan kelompok masyarakat rentan. Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pembangunan masyarakat digital ke depan adalah bagaimana memastikan ketersediaan infrastruktur digital yang merata diiringi dengan peningkatan kapasitas literasi, keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat secara nyata. Upaya ini penting dilakukan agar transformasi digital tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

D. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah indikator penting dalam sistem neraca nasional yang menggambarkan nilai investasi pada barang modal seperti bangunan, peralatan, mesin, kendaraan, dan infrastruktur lain yang digunakan dalam proses produksi dalam jangka panjang. PMTB mencerminkan tingkat penanaman modal di suatu wilayah dan menjadi sinyal terhadap arah serta kekuatan pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi nilai PMTB, semakin besar pula aktivitas investasi yang terjadi, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi di masa depan.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029, peningkatan PMTB memiliki makna strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nilai PMTB yang tinggi menunjukkan dinamika pembangunan fisik dan perbaikan infrastruktur yang mendukung sektor-sektor prioritas seperti pertanian, pariwisata, UMKM, dan jasa. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan iklim investasi yang kondusif melalui penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, penyederhanaan perizinan, serta pemberian insentif bagi investor lokal. Penguatan PMTB juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan lainnya dalam RPJMD, seperti penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2020-2024. Nilainya bertambah dari Rp1.440,63 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.639,04 miliar pada tahun 2024, atau tumbuh sebesar sekitar 13,8% dalam lima tahun. Kenaikan ini mencerminkan aktivitas investasi yang

terus bergerak positif di wilayah ini, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, terutama dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peralatan, serta sarana produksi jangka panjang lainnya.

Tabel II-45. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Bengkulu Selatan (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.241.597	2.302.337	2.436.763	2.561.338	2.687.647
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	97.927	94.654	103.002	112.899	126.965
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	734.428	753.203	762.313	812.889	886.477
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.440.634	1.497.151	1.550.080	1.595.551	1.639.037
Perubahan Inventori	17.492	465	15.779	-36.858	1.783
Net Ekspor Barang dan Jasa	-907.489	-905.305	-996.330	-1.051.003	-1.172.403
PDRB	3.624.589	3.742.506	3.871.606	3.994.817	4.169.506

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Selatan Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Peningkatan PMTB ini mengindikasikan adanya perbaikan kapasitas produksi dan pembangunan fisik yang dapat memperkuat struktur perekonomian daerah. Kenaikan yang stabil ini juga menandakan bahwa sektor investasi menjadi pendorong penting dalam pertumbuhan PDRB Bengkulu Selatan. Oleh karena itu, keberlanjutan tren peningkatan PMTB ini sangat penting untuk mendukung agenda prioritas dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan konektivitas antarwilayah, dan daya saing daerah berbasis infrastruktur yang kuat.

E. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Indeks Infrastruktur/Indeks Keseimbangan Layanan Infrastruktur

Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan umum, khususnya dalam mendukung konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta aksesibilitas masyarakat terhadap pusat pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Jalan yang mantap dan terhubung dengan baik menjadi prasyarat penting dalam

mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap kondisi jalan menjadi bagian krusial dalam perencanaan pembangunan daerah, guna memastikan infrastruktur transportasi darat mampu menjawab kebutuhan mobilitas penduduk dan mendukung penguatan daya saing wilayah secara berkelanjutan.

Tabel II-46. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	368,34	82,92	92,67	96,07	112,47
Sedang	348,51	598,33	604,32	608,78	531,76
Rusak	564,12	536,06	39,02	68,36	100,86
Rusak Berat	0,00	63,66	544,96	507,76	412,91
Bengkulu Selatan	1280,97	1280,97	1.280,97	1.280,97	1.158,00

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan data panjang jalan menurut kondisi di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020-2024, terdapat dinamika signifikan dalam kualitas infrastruktur jalan. Total panjang jalan relatif stabil pada kisaran 1.280 km hingga tahun 2023, namun menurun menjadi 1.158 km pada tahun 2024, yang kemungkinan mencerminkan adanya perubahan klasifikasi jalan atau pemutakhiran data.

Dari sisi kondisi, terjadi peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik dari 82,92 km pada 2021 menjadi 112,47 km pada 2024. Namun, peningkatan ini masih tergolong lambat jika dibandingkan dengan masih tingginya jalan dalam kondisi rusak berat, yang mencapai 412,91 km pada 2024 meskipun telah menurun dari puncaknya 544,96 km pada 2022. Sementara itu, jalan sedang mendominasi struktur jalan dengan panjang 531,76 km pada 2024, dan jalan rusak tercatat 100,86 km. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas jalan masih menjadi tantangan besar, dan diperlukan percepatan rehabilitasi jalan rusak untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak merupakan indikator yang mencerminkan persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal sesuai standar kelayakan, baik dari sisi fisik bangunan, luas ruang tinggal, ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pencahayaan dan ventilasi yang memadai, hingga ketahanan terhadap iklim dan bencana. Selain aspek fisik, kelayakan hunian juga mempertimbangkan elemen non-fisik seperti rasa aman dan akses terhadap infrastruktur dasar, termasuk listrik dan jalan yang memadai.

Indikator ini sangat relevan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat karena berkaitan langsung dengan kesehatan, produktivitas, dan pengembangan sumber daya manusia. Lingkungan tempat tinggal yang sehat dan aman menciptakan fondasi yang kuat bagi stabilitas keluarga serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi warga. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, peningkatan akses terhadap hunian layak merupakan kebutuhan mendesak, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan pesisir yang masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029, penyediaan hunian yang layak menjadi salah satu fokus utama untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ketersediaan perumahan yang memadai memiliki kontribusi signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan mendukung pelaksanaan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, pembangunan hunian yang layak, terjangkau, dan merata harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel II-47. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Provinsi Bengkulu 2020-2024(Persen)

2020	2021	2022	2023	2024
47,94	51,36	54,98	54,74	56,52

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Provinsi Bengkulu tahun 2020–2024, terlihat adanya tren peningkatan secara bertahap, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Pada tahun 2020, hanya 47,94% rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak. Angka ini kemudian meningkat menjadi 51,36% pada 2021 dan terus naik menjadi 54,98% pada 2022. Namun, pada 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 54,74%, sebelum akhirnya kembali meningkat ke 56,52% pada tahun 2024.

Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah provinsi, termasuk kabupaten/kota di dalamnya, dalam memperbaiki kondisi perumahan melalui berbagai program seperti bantuan rumah tidak layak huni, pembangunan perumahan berbasis komunitas, dan penyediaan akses air bersih serta sanitasi. Namun, dengan lebih dari 40% rumah tangga masih belum memiliki akses terhadap hunian layak, tantangan besar masih dihadapi terutama di daerah pedesaan dan kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Untuk Kabupaten Bengkulu Selatan, tren ini menjadi referensi penting dalam menyusun kebijakan perumahan dan kawasan permukiman dalam RPJMD 2025–2029. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah memperluas program rehabilitasi rumah, memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyediaan perumahan terjangkau, serta memastikan pembangunan rumah baru memenuhi kriteria hunian layak baik dari segi struktur bangunan, akses air bersih, sanitasi, hingga pencahayaan alami. Dengan strategi yang terencana dan berbasis data, peningkatan persentase

hunian layak akan mendorong kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3. Persentase Desa Mandiri

Status Desa Mandiri merupakan indikator tertinggi dalam klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), yang merefleksikan keberhasilan desa dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, pencapaian status Mandiri pada suatu desa mencerminkan tersedianya infrastruktur dasar yang memadai, pelayanan publik yang berkualitas, partisipasi masyarakat yang aktif, serta aktivitas ekonomi desa yang berjalan dengan baik. Desa Mandiri juga menunjukkan adanya tata kelola pemerintahan desa yang efektif serta kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi lokal dan menghadapi tantangan secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam sistem klasifikasi IDM, desa dibagi ke dalam lima kategori, yakni: Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal. Status Mandiri berada di level tertinggi dan menjadi simbol kemajuan desa, sedangkan desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal masih menghadapi kendala serius dalam layanan dasar, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029, peningkatan status desa menjadi agenda strategis, baik melalui perbaikan infrastruktur, penguatan kapasitas aparatur desa, maupun pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Percepatan transformasi desa menuju Mandiri tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan IPM, penurunan kemiskinan, serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan di daerah.

Tabel II-48. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM
Bengkulu Selatan	2,27	Cukup	0,6749	Berkembang	0,7011	Berkembang	0,7161	Maju	0,7411	Maju
Rejang Lebong	1,66	Kurang	0,6461	Berkembang	0,6749	Berkembang	0,6909	Berkembang	0,7066	Berkembang
Bengkulu Utara	1,82	Cukup	0,6749	Berkembang	0,6925	Berkembang	0,7008	Berkembang	0,7187	Maju
Kaur	1	Kurang	0,6504	Berkembang	0,6659	Berkembang	0,6913	Berkembang	0,7092	Maju
Seluma	1,19	Kurang	0,6404	Berkembang	0,6531	Berkembang	0,6656	Berkembang	0,6796	Berkembang
Mukomuko	1,54	Kurang	0,6924	Berkembang	0,7018	Berkembang	0,7266	Maju	0,7485	Maju
Lebong	1,66	Kurang	0,6295	Berkembang	0,6469	Berkembang	0,666	Berkembang	0,6864	Berkembang
Kepahiang	2,03	Cukup	0,6518	Berkembang	0,669	Berkembang	0,6864	Berkembang	0,7106	Maju
Bengkulu Tengah	1,43	Kurang	0,6266	Berkembang	0,6563	Berkembang	0,6901	Berkembang	0,7104	Maju
Kota Bengkulu	1,74	Kurang	0,7123	Maju	0,7572	Maju	0,7572	Maju	0,7572	Maju
Provinsi Bengkulu	2,9	Baik	0,6559	Berkembang	0,6748	Berkembang	0,6935	Berkembang	0,7176	Maju

Sumber: <https://idm.kemendesa.go.id/>

Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren peningkatan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Dimulai dari status “Cukup” dengan skor 2,27 di tahun 2020, nilai IDM Bengkulu Selatan kemudian tercatat sebesar 0,6749 (Berkembang) di tahun 2021, meningkat menjadi 0,7011 di tahun 2022, dan mencapai status “Maju” sejak tahun 2023 dengan nilai 0,7161 hingga meningkat lagi menjadi 0,7411 di tahun 2024. Capaian ini menandakan percepatan pembangunan desa yang berhasil mendorong perbaikan pada aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar secara menyeluruh.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu secara keseluruhan, Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan performa yang relatif lebih baik dalam beberapa tahun terakhir. Provinsi Bengkulu baru mencapai status “Maju” di tahun 2024 dengan nilai IDM 0,7176, lebih rendah dari Bengkulu Selatan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Bengkulu Selatan termasuk salah satu dari sedikit daerah yang mampu mencapai status “Maju” lebih awal dan mempertahankannya. Beberapa kabupaten seperti Seluma dan Lebong masih berada pada kategori “Berkembang” hingga tahun 2024, menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah yang masih perlu dijumpatani melalui strategi pembangunan desa yang lebih merata dan inklusif.

4. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak

Akses terhadap sanitasi yang layak merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan di sektor kesehatan dan lingkungan. Sanitasi layak mencakup fasilitas buang air besar yang higienis, aman, dan tidak mencemari lingkungan, serta dikelola secara berkelanjutan. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, peningkatan cakupan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi bagian integral dari agenda pembangunan daerah, mengingat masih adanya kesenjangan akses antar wilayah dan kelompok masyarakat.

Tabel II-49. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

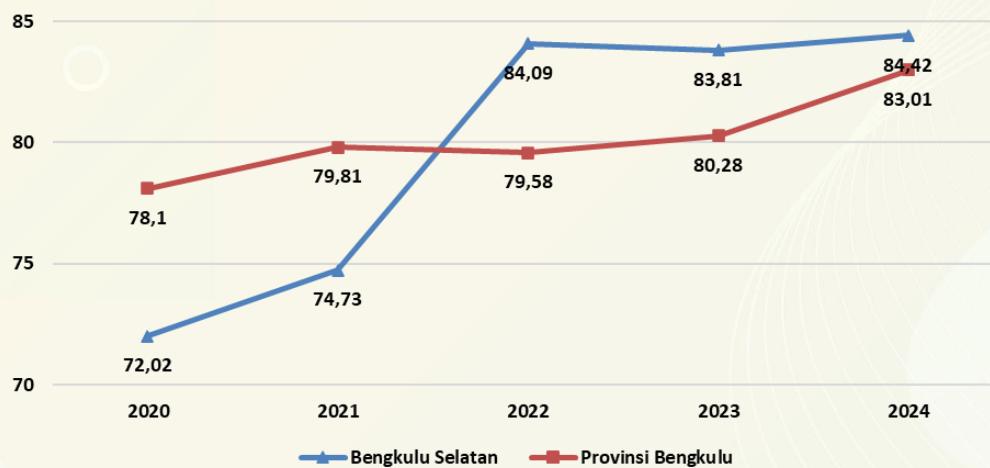
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	72,02	74,73	84,09	83,81	84,42
Rejang Lebong	70,02	71,5	70,3	64,41	71,81
Bengkulu Utara	79,23	83,37	83,43	82,44	85,53
Kaur	78,21	81,23	82,14	83,4	84,63
Seluma	76,96	80,84	81,66	81,77	85,75
Mukomuko	81,04	86,78	79,12	90,84	88,61
Lebong	66,8	51,55	59,12	65,23	59,49
Kepahiang	65,95	66,89	68,54	70,55	72,55
Bengkulu Tengah	85,44	74,05	75,45	78,9	81,37
Kota Bengkulu	95,71	97,49	94,99	93,94	96,15
Provinsi Bengkulu	78,1	79,81	79,58	80,28	83,01

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Berdasarkan data tahun 2020-2024, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren peningkatan secara umum, dari 72,02% pada tahun 2020 menjadi 84,42% pada tahun 2024. Capaian ini berada sedikit di atas rata-rata Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 sebesar 83,01%, menandakan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan telah berhasil melampaui target provinsi dalam hal akses sanitasi.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, posisi Bengkulu Selatan tergolong baik, meskipun belum mencapai tingkat akses

tertinggi seperti Kota Bengkulu (96,15%) dan Kabupaten Mukomuko (88,61%). Namun, pencapaian ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas layanan sanitasi dasar dan meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman. Dengan mempertahankan tren positif ini dan memperluas cakupan wilayah intervensi, Kabupaten Bengkulu Selatan berpotensi mencapai target universal access untuk sanitasi layak dalam periode RPJMD berikutnya.



Gambar II-17. Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Bengkulu Selatan dan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

F. Stabilitas Ekonomi Makro

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting yang menggambarkan kapasitas fiskal daerah dalam menggali potensi penerimaan dari sektor ekonomi lokal. Rasio ini mengukur sejauh mana kontribusi sektor usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat terhadap pendapatan asli daerah melalui instrumen pajak. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kemandirian fiskal, mengurangi

ketergantungan pada transfer pusat, dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Di Kabupaten Bengkulu Selatan, tren realisasi pajak daerah selama periode 2020-2024 menunjukkan kecenderungan meningkat dari Rp9,42 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp12,27 miliar pada tahun 2024. Meskipun nominal ini terus mengalami kenaikan, namun ketika dibandingkan dengan besaran PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), kontribusinya terhadap total nilai tambah ekonomi daerah masih relatif kecil.

Tabel II-50. Rasio Pajak Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2020-2024

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
2020	9.420.358.876,00	3.624	0,259901
2021	10.266.060.492,78	3.742	0,27431
2022	11.044.389.479,04	3.871	0,285266
2023	12.599.373.156,00	3.994	0,315393
2024	12.271.714.596,07	4.169	0,29432

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan

Sebagai gambaran, nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan saja pada tahun 2024 mencapai Rp1.308,51 miliar, sedangkan total PDRB seluruh sektor jauh lebih tinggi. Dengan nilai pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp12,27 miliar, rasio pajak daerah terhadap PDRB secara agregat diperkirakan masih berada di bawah 1%. Rasio yang rendah ini mengindikasikan bahwa potensi penerimaan daerah dari sektor pajak belum tergali secara optimal, dan struktur ekonomi daerah yang didominasi oleh sektor informal serta pertanian skala kecil menjadi salah satu tantangan utamanya.

Beberapa jenis pajak daerah yang menjadi andalan, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, dan pajak penerangan jalan, masih menghadapi kendala dalam pendataan objek pajak, basis pajak yang sempit, serta kepatuhan wajib pajak yang rendah. Selain itu, kegiatan ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya terdokumentasi dalam sistem

administrasi perpajakan turut mempersempit ruang optimalisasi pendapatan.

Untuk meningkatkan rasio ini, diperlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah secara terencana. Upaya digitalisasi sistem pajak, pembaruan data objek pajak, serta edukasi kepada wajib pajak mengenai manfaat kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan. Di sisi lain, penguatan kapasitas aparatur pajak daerah serta inovasi layanan pemungutan juga dapat mendorong efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan daerah.

Ke depan, peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB merupakan bagian integral dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan membangun basis penerimaan yang sehat dan berkelanjutan, Kabupaten Bengkulu Selatan akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai prioritas pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

2. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan indikator ekonomi penting yang mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode, serta berdampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak terkendali dapat memperbesar beban hidup terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, data inflasi spesifik belum tersedia karena wilayah ini belum menjadi kota Indeks Harga Konsumen (IHK). Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, digunakan data inflasi Kota Bengkulu sebagai pendekatan, mengingat eratnya keterkaitan arus barang, konsumsi, dan perdagangan antarwilayah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, inflasi memiliki pengaruh terhadap proyeksi pendapatan daerah, perhitungan belanja publik, dan

target pertumbuhan ekonomi riil. Kestabilan harga menjadi dasar penting untuk menjaga efektivitas kebijakan anggaran, termasuk dalam penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan pengendalian kemiskinan. Oleh karena itu, penguatan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), peningkatan produksi pangan lokal, serta efisiensi distribusi barang dan jasa menjadi strategi penting agar stabilitas harga dapat terjaga dan pembangunan ekonomi daerah berlangsung secara berkelanjutan.

Tabel II-51. Inflasi Kota Bengkulu tahun 2018-2023

Bulan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	0,99	0,88	0,14	0,39	0,54	0,62
Februari	-0,3	-0,28	0,09	0,14	-0,1	0,04
Maret	0,37	-0,23	-0,02	0,23	0,74	0,25
April	0,26	0,54	-0,35	0,1	1,45	0,28
Mei	0,32	1,11	0,41	0,11	0,53	0,17
Juni	0,81	0,76	0,04	0,31	0,6	0,21
Juli	0,87	0,56	-0,23	-0,12	0,91	0,49
Agustus	-1,8	0,86	-0,22	0,16	-0,24	-0,07
September	0,59	0,64	0,08	0,17	1,22	0,23
Oktober	-0,74	0,56	0,02	-0,02	-0,14	0,28
November	0,2	0,27	0,35	0,52	0,05	0,3
Desember	0,79	0,59	0,14	0,39	0,23	0,24
Tahunan	2,35	2,91	0,89	2,42	5,92	3,09

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Berdasarkan data inflasi Kota Bengkulu tahun 2018-2023, terlihat bahwa tingkat inflasi tahunan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,92%, yang mencerminkan tekanan harga cukup besar, kemungkinan akibat gangguan rantai pasok dan kenaikan harga energi serta pangan secara nasional. Sebaliknya, inflasi terendah tercatat pada tahun 2020 sebesar 0,89%, yang dapat dikaitkan dengan melemahnya permintaan domestik akibat pandemi COVID-19.

Secara umum, inflasi tahunan Kota Bengkulu berada dalam rentang yang relatif moderat dan terkendali pada sebagian besar tahun, yakni berkisar antara 2% hingga 3% pada tahun 2018, 2019, 2021, dan 2023. Ini menunjukkan bahwa secara umum stabilitas harga cukup terjaga dalam jangka menengah. Tren ini memberikan gambaran penting bagi Kabupaten

Bengkulu Selatan sebagai wilayah yang menggunakan inflasi Kota Bengkulu sebagai proksi, terutama dalam perencanaan ekonomi, proyeksi belanja daerah, serta strategi pengendalian harga melalui penguatan sektor pangan dan distribusi.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan reformasi hukum telah berjalan secara efektif di tingkat nasional maupun daerah. Indeks ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menciptakan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Penguatan reformasi hukum di daerah sangat diperlukan untuk mendorong iklim investasi yang sehat, memperkuat pelayanan publik berbasis kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Selatan, pelaksanaan reformasi hukum menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Reformasi ini mencakup pembenahan regulasi, penyederhanaan prosedur hukum, peningkatan kualitas pelayanan hukum, serta pemberantasan praktik hukum yang diskriminatif atau koruptif. Oleh karena itu, pencapaian Indeks Reformasi Hukum di daerah menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan transformasi tata kelola hukum sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, Kabupaten Bengkulu Selatan berhasil meraih skor 87,32 dalam Indeks Reformasi Hukum dan dikategorikan dalam tingkat "A /

Sangat Baik". Capaian ini mencerminkan adanya komitmen kuat pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip-prinsip reformasi hukum, khususnya dalam hal penyederhanaan regulasi, peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tabel II-52. Indeks Reformasi Hukum 2024

Kabupaten/Kota	Nilai	Kategori
Muko-Muko	98,58	AA / Istimewa
Kota Bengkulu	96,18	AA / Istimewa
Provinsi Bengkulu	87,66	A / Sangat Baik
Bengkulu Selatan	87,32	A / Sangat Baik
Seluma	86,78	A / Sangat Baik
Kepahiang	77,3	BB / Baik
Rejang Lebong	76,86	BB / Baik
Bengkulu Utara	76,66	BB / Baik
Bengkulu Tengah	67,9	B / Cukup Baik
Kaur	66,58	B / Cukup Baik
Lebong	66,24	B / Cukup Baik

Sumber: <https://bengkulu.kemenkum.go.id/>

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan menempati peringkat keempat tertinggi, berada tepat di bawah Kabupaten Muko-Muko (98,58), Kota Bengkulu (96,18), dan Pemerintah Provinsi Bengkulu (87,66), serta unggul tipis dari Kabupaten Seluma (86,78). Posisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk dalam jajaran daerah dengan kinerja reformasi hukum terbaik di provinsi ini.

Meskipun telah mencapai kategori "Sangat Baik", ruang perbaikan masih terbuka, khususnya untuk mendorong pencapaian kategori tertinggi yakni "AA / Istimewa". Upaya tersebut dapat diarahkan pada pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan hukum, peningkatan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam penegakan hukum dan pengawasan pelayanan publik. Dengan konsistensi dan inovasi berkelanjutan, Kabupaten Bengkulu Selatan berpotensi menjadi daerah rujukan dalam pelaksanaan reformasi hukum di tingkat kabupaten.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, telah mengintegrasikan teknologi digital dalam tata kelola administrasi dan pelayanan publik. Penilaian ini mencakup aspek kebijakan, tata kelola data, penyelenggaraan layanan digital, keamanan informasi, dan infrastruktur teknologi. Nilai SPBE yang tinggi menunjukkan kematangan dalam penerapan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi digital dalam proses pemerintahan.

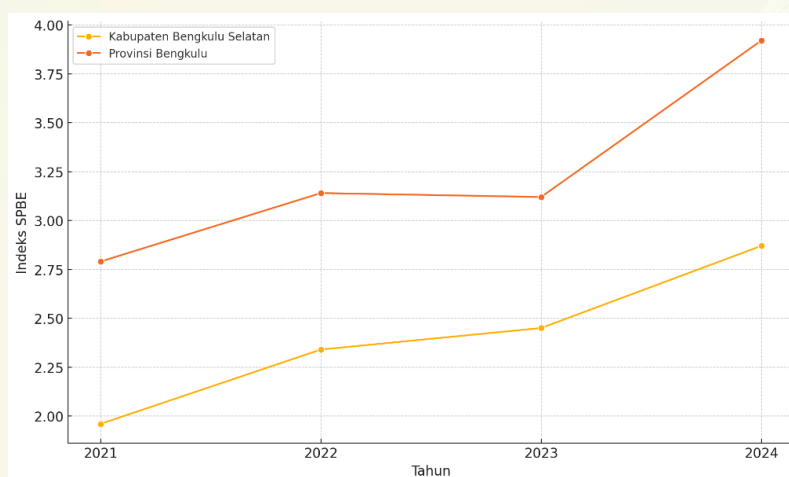
Tabel II-53. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2021-2024

Nama Instansi	2021		2022		2023		2024	
	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat
Provinsi Bengkulu	2,79	Baik	3.14	Baik	3,12	Baik	3,92	Sangat Baik
Bengkulu Utara	1,44	Kurang	2.20	Cukup	2,9	Baik	3,28	Baik
Bengkulu Selatan	1,96	Cukup	2.34	Cukup	2,45	Cukup	2,87	Baik
Rejang Lebong	1,84	Cukup	2.80	Baik	3,23	Baik	3,24	Baik
Kaur			1.27	Kurang	2,24	Cukup	2,42	Cukup
Seluma	1,41	Kurang	2.57	Cukup	2,54	Cukup	2,26	Cukup
Mukomuko	1,74	Kurang	2.06	Cukup	2,07	Cukup	2,07	Cukup
Kepahiang	1,94	Cukup	2.13	Cukup	2,28	Cukup	2,47	Cukup
Lebong	1,55	Kurang	1.55	Kurang	2,93	Baik	3,38	Baik
Bengkulu Tengah	1,29	Kurang	2.37	Cukup	2,55	Cukup	2,84	Baik
Kota Bengkulu	1,68	Kurang	2.22	Cukup	2,61	Baik	2,63	Baik

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Bagi Kabupaten Bengkulu Selatan, peningkatan nilai SPBE memiliki arti strategis dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mempercepat transformasi birokrasi digital. Pemerintah daerah yang mampu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dapat menyederhanakan prosedur pelayanan, memperpendek waktu layanan, serta memperluas akses warga terhadap hak-hak administratif secara daring. Selain itu, SPBE juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, SPBE harus menjadi pilar penting dalam agenda reformasi tata kelola daerah. Melalui penguatan sistem digital dan integrasi layanan, pemerintah kabupaten dapat menjangkau wilayah terpencil dengan lebih efektif, meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran publik. Penerapan SPBE yang kuat juga mendukung keterpaduan pembangunan antara pusat dan daerah, sekaligus memperkuat posisi Bengkulu Selatan dalam ekosistem pemerintahan digital nasional.



Gambar II-18. Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024

Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren positif dalam peningkatan indeks SPBE selama empat tahun terakhir, dari skor 1,96 (predikat Cukup) pada tahun 2021 menjadi 2,87 (predikat Baik) pada tahun 2024. Meskipun pencapaian ini menandai kemajuan signifikan, posisi Kabupaten Bengkulu Selatan masih tertinggal dibandingkan Provinsi Bengkulu yang pada tahun 2024 telah mencapai skor 3,92 dengan predikat "Sangat Baik".

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, posisi Bengkulu Selatan relatif lebih baik dibandingkan daerah seperti Kaur dan Mukomuko, yang masih berada pada predikat "Cukup" di tahun 2024.

Namun, Bengkulu Selatan masih berada di bawah Rejang Lebong, Lebong, dan Bengkulu Utara yang telah mencapai atau melampaui skor 3,0. Hal ini menjadi refleksi bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu memperkuat kebijakan transformasi digital dan meningkatkan integrasi sistem informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan efisien.

3. Indeks Pelayanan Publik

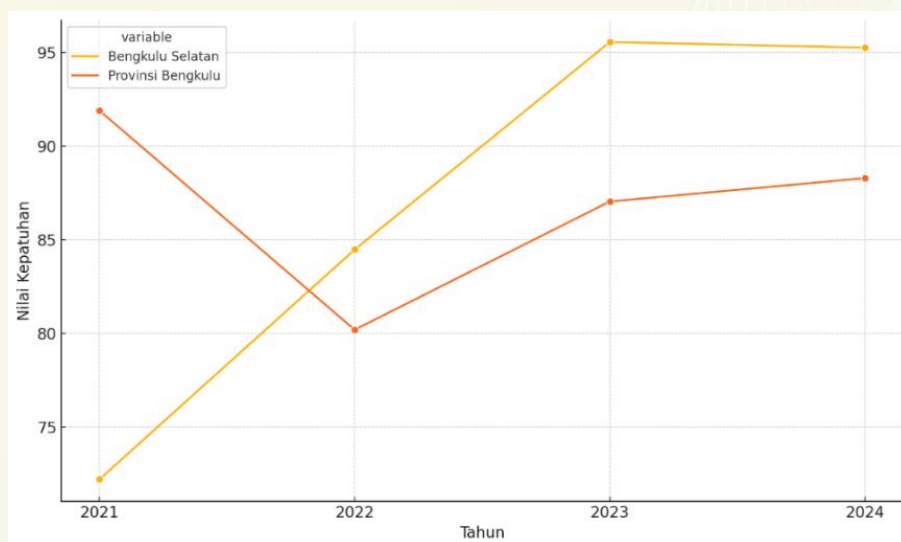
Sistem zonasi penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik oleh Ombudsman RI kini telah diperbarui dengan pendekatan yang lebih terstruktur, menggunakan klasifikasi nilai dan kategori kualitas yang lebih terperinci. Prinsip dasar masih menggunakan simbol lampu lalu lintas (traffic light), namun kini Zona Hijau dibedakan menjadi Kategori A (nilai 88,00-100) yang merepresentasikan Kualitas Tertinggi, dan Kategori B (nilai 78,00-87,99) sebagai Kualitas Tinggi. Zona Kuning mencakup Kategori C (nilai 54,00-77,99) yang menunjukkan Kualitas Sedang, sementara Zona Merah terbagi atas Kategori D (nilai 32,00-53,99) dan Kategori E (nilai 0-31,99) yang menggambarkan Kualitas Rendah hingga Terendah. Pendekatan baru ini memberikan pemetaan yang lebih akurat terhadap tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai daerah.

Tabel II-54. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Kaur	57,99	89,01	96,14	96,14
Bengkulu Selatan	72,21	84,48	95,57	95,27
Rejang Lebong	65,99	83,05	93,76	93,07
Lebong	97,65	84,23	93,07	93,76
Kepahiang	88,74	85,97	92,72	92,72
Bengkulu Tengah	51,05	64,89	91,33	91,33
Kota Bengkulu	89,05	83,21	90,47	90,74
Seluma	62,71	85,51	89,1	89,61
Bengkulu Utara	83,51	78,56	88,34	88,34
Mukomuko	54,79	60,35	90,02	90,64
Provinsi Bengkulu	91,91	80,2	87,05	88,3

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Bagi Kabupaten Bengkulu Selatan, penerapan sistem zonasi ini menjadi alat penting dalam menilai dan memperbaiki kinerja penyedia layanan publik, baik di tingkat perangkat daerah maupun unit layanan teknis. Hasil penilaian tidak hanya menjadi refleksi atas kualitas layanan saat ini, tetapi juga panduan strategis dalam meningkatkan standar pelayanan agar lebih adaptif, transparan, dan berbasis kepuasan masyarakat. Daerah yang berhasil masuk dalam Zona Hijau akan memperoleh pengakuan dan insentif, sementara yang masih berada di Zona Kuning atau Merah harus segera merumuskan langkah perbaikan yang terukur. Dengan demikian, sistem ini turut memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di Bengkulu Selatan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.



Gambar II-19. Perbandingan Penilaian Kepatuhan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024

Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai kepatuhan Kabupaten Bengkulu Selatan masih berada pada zona kuning dengan skor 72,21 (kategori kualitas sedang), namun sejak 2022 hingga 2024, skor tersebut melonjak ke zona hijau kategori B dan A, yakni 84,48 pada 2022, 95,57 pada 2023, dan

95,27 pada 2024. Capaian ini menempatkan Bengkulu Selatan dalam kategori Kualitas Tinggi dan Kualitas Tertinggi, menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di daerah ini telah berjalan sangat baik.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu yang pada 2024 mencatat nilai 88,30 (kategori kualitas tinggi), Kabupaten Bengkulu Selatan berada di atas rata-rata provinsi dan bersaing ketat dengan kabupaten/kota lain di wilayah tersebut. Nilainya sedikit lebih rendah dari Kabupaten Kaur (96,14), namun tetap lebih tinggi dibanding Mukomuko (90,64), Seluma (89,61), dan Bengkulu Utara (88,34). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan telah berhasil menjadi salah satu daerah dengan kinerja pelayanan publik terbaik di Provinsi Bengkulu, sejalan dengan tujuan RPJMD untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

4. Indeks Integritas Nasional

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan terhadap tingkat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengukuran ini mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan praktik korupsi dalam birokrasi, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan. SPI disusun berdasarkan masukan dari aparatur pemerintah, masyarakat pengguna layanan, dan ahli, dengan hasil berupa skor 0-100 yang mencerminkan tingkat kematangan integritas tata kelola pemerintahan suatu daerah.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029, SPI dapat dijadikan sebagai indikator penting dalam menilai efektivitas reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola daerah.

Pemanfaatan hasil SPI memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi area rawan integritas dan merumuskan strategi pencegahan yang lebih terarah. Upaya peningkatan skor SPI dapat dilakukan melalui penguatan fungsi Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal, pengembangan sistem informasi yang transparan dan mudah diakses publik, serta peningkatan kompetensi dan integritas aparatur sipil negara melalui pelatihan yang berkelanjutan.

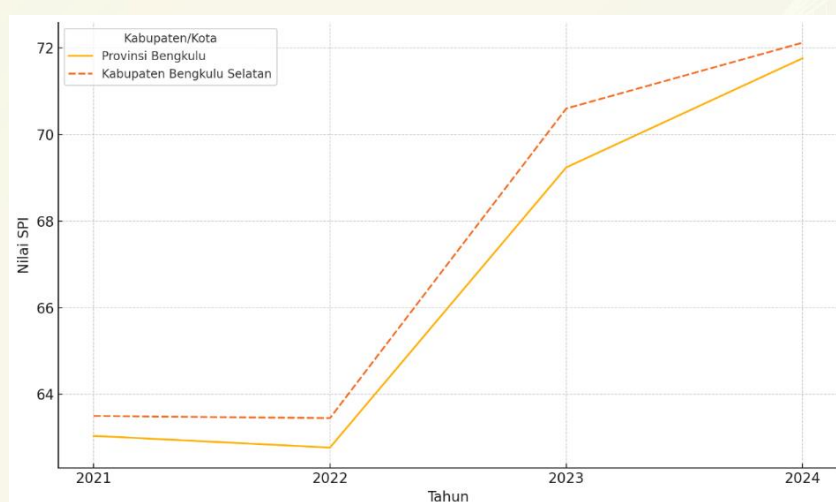
Tabel II-55. Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024

Nama Instansi	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	63,04	62,77	69,24	71,76
Bengkulu Selatan	63,5	63,45	70,6	72,12
Rejang Lebong	72,64	65,86	71,65	74,62
Bengkulu Utara	72,58	72,62	74,21	73,15
Kaur	67,9	68,98	71,54	70,72
Seluma	71,69	63,55	70,26	63,07
Mukomuko	64,7	72,74	73,77	73,02
Lebong	75,21	71,36	70,94	69,66
Kepahiang	75,74	74,66	73,7	74,44
Bengkulu Tengah	76,15	65,82	72,3	66,64
Kota Bengkulu	72,37	71,41	72,51	70,67

Sumber: <https://spi.kpk.go.id/>

Selain penguatan kelembagaan, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi elemen penting dalam membangun tata kelola yang berintegritas. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu menciptakan ruang dialog publik, sistem pengaduan yang aman dan responsif, serta mekanisme keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mempercepat terwujudnya pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan bersih dari praktik penyimpangan. Integrasi SPI ke dalam dokumen RPJMD merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada prinsip good governance dan pelayanan publik yang berkualitas.

Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Nilai SPI meningkat dari 63,5 pada tahun 2021 menjadi 72,12 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik koruptif. Peningkatan skor ini juga menunjukkan adanya perbaikan dalam persepsi dan pengalaman masyarakat maupun aparatur pemerintah terhadap sistem pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang lebih berintegritas.



Gambar II-20. Perbandingan Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024

Jika dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan selalu berada sedikit di atas capaian provinsi pada periode 2021-2024, yang menunjukkan performa integritas relatif lebih baik. Sementara dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, capaian SPI Bengkulu Selatan berada pada posisi menengah. Kabupaten seperti Kepahiang dan Rejang Lebong mencatat nilai lebih tinggi pada tahun 2024, yaitu masing-masing 74,44 dan 74,62. Namun demikian, Bengkulu Selatan tetap menunjukkan progres yang positif dan stabil, menjadikannya sebagai salah satu daerah yang mengalami peningkatan signifikan dalam

pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis integritas. Kondisi ini menjadi bekal penting bagi Kabupaten Bengkulu Selatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam kerangka RPJMD 2025-2029.

5. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator strategis yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana efektivitas tata kelola pemerintahan dijalankan secara bersih, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Komponen utama dalam penilaian indeks ini mencakup manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan internal, serta efektivitas sumber daya manusia aparatur.

Gambar II-21. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024

	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	B	B	BB
Bengkulu Utara	CC	B	BB
Bengkulu Selatan	C	B	BB
Rejang Lebong	CC	BB	BB
Kaur	C	C	CC
Seluma	C	B	BB
Mukomuko	CC	CC	BB
Kepahiang	CC	CC	BB
Lebong	CC	CC	BB
Bengkulu Tengah	CC	CC	BB
Kota Bengkulu	CC	CC	BB

Sumber: <https://1data.menpan.go.id/#>

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, penguatan reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peningkatan skor Indeks Reformasi Birokrasi tidak hanya menjadi refleksi kinerja kelembagaan, tetapi juga menjadi prasyarat utama dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan, efisiensi anggaran, serta pencapaian target-target pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, indikator ini perlu secara konsisten dipantau dan diperkuat sebagai bagian dari kerangka transformasi tata kelola pemerintahan daerah.

Berdasarkan data Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2022-2024, Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, Bengkulu Selatan memperoleh predikat C, yang mencerminkan birokrasi dengan kualitas rendah dan berbagai aspek tata kelola pemerintahan yang masih perlu perbaikan. Namun, pada tahun 2023, peringkat ini meningkat menjadi B, yang menandakan adanya perbaikan dalam berbagai aspek kinerja birokrasi, termasuk dalam hal pelayanan publik, akuntabilitas, dan pengawasan internal.

Kemajuan tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian predikat BB (Baik), sejajar dengan mayoritas kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu. Peningkatan ini mencerminkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan telah berhasil melakukan transformasi birokrasi secara sistematis dan konsisten. Perbaikan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Tren positif ini perlu terus dijaga dan diperkuat dalam kerangka RPJMD 2025-2029 untuk mencapai birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi.

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

1. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi dijalankan di suatu daerah, yang dihitung berdasarkan tiga aspek utama: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi. Masing-masing aspek ini mencerminkan kondisi yang sangat fundamental bagi kehidupan bernegara—mulai dari ruang partisipasi masyarakat dalam menyuarakan pendapat dan berserikat, pelaksanaan pemilu yang adil dan partisipatif, hingga efektivitas lembaga seperti DPRD dan peradilan dalam menjalankan fungsinya secara demokratis. Dengan skala 0-100, nilai IDI memberikan gambaran tentang mutu demokrasi, yang kemudian dikategorikan sebagai baik (80 ke atas), sedang (60-80), dan buruk (di bawah 60). IDI tidak hanya sekadar angka, tetapi mencerminkan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam bingkai hak, kewajiban, dan transparansi.

Untuk Kabupaten Bengkulu Selatan, nilai IDI menjadi elemen penting dalam kerangka RPJMD 2025-2029 karena memperkuat pondasi tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif. Demokrasi yang sehat di tingkat daerah berperan langsung dalam menciptakan stabilitas politik yang dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan jangka menengah. Dengan IDI yang baik, masyarakat akan memiliki ruang yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Hal ini tidak hanya mempercepat pencapaian program prioritas, tetapi juga meningkatkan legitimasi pemerintah daerah di mata publik. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu memastikan agar sistem politik lokal mendukung kebebasan berpendapat, keterbukaan informasi, dan transparansi anggaran, serta memperkuat peran lembaga

pengawasan dan DPRD sebagai bagian dari ekosistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Tabel II-56. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu tahun 2021-2023

2023	2022	2021
74,26	73,23	72,73

Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu tahun 2021 hingga 2023, terlihat adanya tren peningkatan kualitas demokrasi secara bertahap. Pada tahun 2021, IDI Bengkulu tercatat sebesar 72,73, kemudian meningkat menjadi 73,23 pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 74,26 pada tahun 2023. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun, tren ini menunjukkan arah positif dalam penguatan demokrasi di wilayah Bengkulu. Dengan angka IDI yang berada dalam rentang 60-80, Provinsi Bengkulu termasuk dalam kategori sedang, namun secara perlahan mendekati kategori baik (nilai di atas 80).

Peningkatan IDI ini mencerminkan perbaikan dalam beberapa aspek demokrasi, seperti semakin terbukanya ruang partisipasi publik, meningkatnya kebebasan sipil, serta kinerja lembaga-lembaga demokrasi yang mulai menunjukkan efektivitas yang lebih baik. Bagi Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai bagian dari Provinsi Bengkulu, tren ini menjadi landasan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis dan responsif. Pemerintah daerah perlu terus menjaga dan meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil warga. Upaya ini akan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih inklusif dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan di tingkat lokal.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). IDSD untuk di level provinsi terdapat 62 indikator dan di level kabupaten/kota, ada 48 indikator dari 12 pilar. Keduabelas pilar tersebut adalah:

a. Pilar 1: Institusi

Pilar Institusi mengukur kekuatan kondisi institusi di daerah, dengan indikator yaitu keamanan, modal sosial, check and balances, transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan Pemerintah.

b. Pilar 2: Infrastruktur

Pilar Infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas infrastruktur di daerah, dengan indikator, yaitu, infrastruktur transportasi, infrastruktur utilitas kelistrikan, dan infrastruktur air minum.

c. Pilar 3: Adopsi TIK

Pilar ini mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah, dengan indikator, yaitu pengguna telepon seluler, jangkauan jaringan 4G, pelanggan internet *fixed-broadband*, dan pengguna internet.

d. Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro

Pilar ini mengukur kondisi keuangan daerah, dengan indikator inflasi, kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, nilai investasi, dan PDRB per kapita.

e. Pilar 5: Kesehatan

Pilar Kesehatan mengukur “harapan hidup” yang disesuaikan dengan kesehatan di daerah melalui indikator angka harapan hidup.

f. Pilar 6: Keterampilan

Pilar Keterampilan mengukur kuantitas dan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di daerah. Indikatornya adalah tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan.

g. Pilar 7: Pasar Produk

Pilar Pasar Produk mengukur keterbukaan pasar produk di daerah melalui dimensi persaingan domestik, dengan indikator tingkat dominasi pasar, dan persaingan sektor jasa.

h. Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja

Pilar Pasar Tenaga Kerja menggambarkan fleksibilitas dan pemanfaatan tenaga kerja di daerah, dengan indikator kebijakan pasar tenaga kerja aktif, upah pekerja, dan kesetaraan upah perempuan dan laki-laki.

i. Pilar 9: Sistem Keuangan

Pilar ini mengalokasikan sumber daya dan investasi yang dapat dimanfaatkan suatu daerah, dengan indikator kredit usaha rakyat per penduduk, pembiayaan lembaga ventura kepada umkm/start-up, dan rasio kredit bermasalah terhadap total pinjaman.

j. Pilar 10: Ukuran Pasar

Pilar Ukuran Pasar menggambarkan ukuran pasar yang dapat menguatkan struktur industri di daerah melalui dua indikator, yaitu PDRB, dan Rasio Nilai Impor terhadap PDRB.

k. Pilar 11: Dinamisme Bisnis

Pilar ini menggambarkan kapasitas sektor swasta untuk menghasilkan dan mengadopsi teknologi baru dan cara baru di daerah, dengan indikator biaya untuk memulai usaha, dan waktu untuk memulai usaha.

I. Pilar 12: Kapabilitas Inovasi

Pilar Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dalam tiga tahun terakhir, yakni dari 2,94 pada tahun 2022 menjadi 3,11 pada 2023, dan kemudian 3,64 di tahun 2024. Perbaikan ini mencerminkan penguatan beragam pilar daya saing yang dinilai oleh BRIN, termasuk institusi, infrastruktur, inovasi, hingga pasar tenaga kerja. Peningkatan skor pada Pilar 2 (Infrastruktur) dari 1,35 menjadi 3,3 menunjukkan adanya kemajuan dalam ketersediaan dan kualitas layanan dasar seperti transportasi, listrik, dan air minum. Selain itu, Pilar 6 (Keterampilan) dan Pilar 7 (Pasar Produk) juga mengalami kemajuan konsisten, mencerminkan peningkatan kualitas tenaga kerja serta persaingan pasar produk yang lebih sehat di wilayah Bengkulu Selatan.

Tabel II-57. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022

Wilayah	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	SKOR IDSD
Nasional	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	3,14	5	2,62	3,26
Prov. Bengkulu	3,92	2,11	4,17	2,64	3,67	3,18	3,18	4,2	4,23	1,04	5	2,35	3,29
Bengkulu Selatan	3,84	1,35	2,87	2,36	3,69	3,72	3,53	3,6	4,21	0,25	5	0,76	2,94
Rejang Lebong	3,94	2,18	2,77	2,42	3,77	3,22	2,94	4,06	2,04	0,46	5	0,82	2,94
Bengkulu Utara	4,16	2,77	2,55	2,56	3,66	3,27	2,35	3,86	3,36	0,55	5	0,85	2,94
Kaur	3,8	1,83	2,09	2,36	3,6	2,94	2,4	2,85	2,1	0,94	5	0,95	2,91
Seluma	3,86	1,26	2,44	2,03	2,99	2,94	2,12	2,54	1,75	0,19	5	0,97	2,8
Mukomuko	3,88	2,28	2,32	2,24	3,36	3,13	2,18	2,77	2,01	0,94	5	0,76	2,9
Lebong	4,2	1,76	2,3	2,34	3,31	3,15	2,31	2,56	2,61	0,14	5	1,24	2,75
Kepahiang	4,11	1,7	2,9	2,38	3,16	2,58	2,45	2,61	1,65	0,95	5	0,45	2,65
Bengkulu Tengah	3,87	1,86	2,99	2,17	3,69	3,13	3,42	2,09	1,49	0,19	5	0,53	2,77
Kota Bengkulu	4,03	2,69	4,97	2,79	3,85	4,19	5	4,6	4,15	1,04	5	3,41	3,81

Sumber: <https://brin.go.id/>

Tabel II-58. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Wilayah	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	SKOR IDSD
Nasional	4,3	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,38	3,22	3,03	3,44
Prov. Bengkulu	4,26	2,67	4,26	3,43	3,73	3,24	3,1	4,5	2,96	3,96	2,52	2,28	3,47
Rata-Rata Kab/Kota	4,07	2,26	3,88	3,36	3,59	3,02	3,95	4,26	3,7	3,5	2,59	2,44	3,06
Bengkulu Selatan	4,08	2,3	4,18	3,7	3,64	3,07	3,87	4,18	3,53	3,25	2,5	2,44	3,11
Rejang Lebong	4,09	2,39	3,99	3,32	3,77	3,39	3,85	3,91	3,44	4,15	2,78	2,64	3,19
Bengkulu Utara	4,19	2,81	3,77	3,2	3,73	3,55	3,07	3,6	3,6	3,25	2,57	2,24	2,91
Kaur	3,81	2,02	3,29	3,84	3,36	3,26	2,55	4,1	3,4	3,5	2,67	2,04	2,85
Seluma	3,87	1,95	3,76	3,6	3,15	3,24	2,45	3,96	3,57	3,33	2,22	1,84	2,74
Mukomuko	4,06	1,73	3,53	3,68	3,22	3,22	2,47	3,22	2,57	3,22	2,4	2,07	2,78
Lebong	4,09	2,05	3,65	3,51	3,41	3,55	2,55	3,56	3,05	3,55	2,5	2,01	2,99
Kepahiang	4,2	2,49	4,05	3,85	3,72	3,4	2,6	4,07	3,46	3,27	2,27	2,09	3,03
Bengkulu Tengah	4,16	2	4,12	3,86	3,72	3,44	2,7	4,11	3,41	3,57	2,35	2	2,95
Kota Bengkulu	4,16	2,98	5	2,81	3,88	4,35	5	4,67	4,33	4,52	2,79	3,52	3,83

Sumber: <https://brin.go.id/>

Tabel II-59. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

Wilayah	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	SKOR IDSD
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
Prov. Bengkulu	4,28	2,56	3,52	4,02	3,75	4,33	3,07	3,38	3,35	3,99	2,68	2,83	3,48
Rata-Rata Kab/Kota	4,4	3,07	4,04	3,82	3,6	4,13	2,84	3,84	2,31	3,72	3,74	1,71	3,43
Bengkulu Selatan	4,51	3,3	4,2	3,68	3,62	4,27	3,57	3,93	2,63	3,7	4,7	1,55	3,64
Rejang Lebong	4,6	3,1	4,24	3,61	3,69	4,28	3,79	3,86	2,27	3,93	4,49	1,69	3,63
Bengkulu Utara	4,64	3,2	3,76	3,79	3,65	3,98	2,1	3,86	2,55	3,86	3,41	1,41	3,35
Kaur	4,26	2,76	3,43	4,09	3,53	4,04	2,24	3,76	2,19	3,49	4,54	1,62	3,33
Seluma	4,37	3,04	3,94	4,03	3,62	4,08	2,25	3,34	2,35	3,58	3,68	1,57	3,32
Mukomuko	4,64	2,8	3,83	3,93	3,53	4,04	2,32	3,05	2,62	3,66	2,58	0,85	3,16
Lebong	4,27	3,08	3,29	4,13	3,25	4,11	2,43	3,93	2,35	3,45	4,12	2,44	3,4
Kepahiang	3,99	3,05	4,45	3,71	3,63	4,15	2,73	3,68	1,67	3,59	3,49	1,09	3,27
Bengkulu Tengah	4,53	3,23	4,38	3,77	3,63	4,12	1,97	4,05	1,27	3,59	3,1	1,18	3,24
Kota Bengkulu	4,18	3,12	4,91	3,46	3,82	4,21	5	4,93	3,16	4,36	3,28	3,7	4,01

Sumber: <https://brin.go.id/>

Meski menunjukkan progres positif, terdapat beberapa pilar yang masih menjadi titik lemah. Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi), misalnya, masih berada di angka rendah yaitu 1,55 pada 2024, meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa kapasitas daerah dalam mengelola penelitian dan pengembangan, serta mendorong kreativitas dan kolaborasi lintas sektor masih perlu diperkuat. Demikian pula dengan Pilar 10 (Ukuran Pasar) yang meski membaik, masih menunjukkan keterbatasan kapasitas pasar lokal dalam mendorong industri daerah. Skor pada Pilar 11 (Dinamisme Bisnis) meningkat dari 2,5 menjadi 4,7, menandakan bahwa iklim usaha mulai lebih kondusif, terutama dari segi efisiensi prosedur dan biaya memulai usaha.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan berhasil melampaui rata-rata provinsi pada tahun 2024, yaitu 3,64 dibanding 3,48. Capaian ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan telah bergerak lebih cepat dalam meningkatkan daya saing lintas sektor. Dengan penguatan pada sejumlah pilar strategis, serta konsistensi perbaikan pada pilar-pilar seperti keterampilan, pasar tenaga kerja, dan institusi, maka Bengkulu Selatan memiliki peluang besar untuk menjadi simpul pertumbuhan baru di wilayah selatan provinsi. Ke depan, peningkatan IDSD ini perlu dijadikan dasar dalam penyusunan strategi pembangunan jangka menengah agar transformasi daya saing dapat terus berlangsung secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

D. Evaluasi Capaian Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

Tabel II-60. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2020-2024

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
- Pendidikan						
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	95.019	72.22	95.423	95.423	95.019
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95.309	82.022	94.658	96.064	95.309
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94.692	47.16	84.883	86.408	94.692
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	62.804	62.745	62.065	90.995	62.804
- Kesehatan						
1.b.1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	1.919	0.083	0.083	2.001	1.919
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	50	100	100
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	75.099	85.398	81.622	84.246	75.099
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	55.087	90.033	73.64	66.101	55.087
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	56.163	81.229	88.782	69.583	56.163
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	88.694	74.348	79.882	96.758	88.694
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97.552	93.268	94.532	100	97.552
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	71.908	69.38	35.68	92.195	71.908
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	87.344	19.175	81.461	84.681	87.344
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74.484	21.577	28.343	67.452	74.484
1.b.11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85.059	15.371	31.776	86.318	85.059
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	97.551	95.219	53.689	100
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	81.248	20.43	61.444	72.615	81.248
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	56.925	9.143	68.689	38.428	56.925
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	21.671	100	100	100	21.671
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	100	100	100	0

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	8.575	64.989	59.93	59.93	8.575
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	18.756	84.623	89.367	18.837	18.756
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	67.85	87.223	88.28	88.28	67.85
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	20	68.75	89.683	100
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	55.633	10.016	10.232	10.232	55.633
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	30.435	100	100	100	30.435
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100	100	100
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	100	4.918	0	0
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	100	100	100	0
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0	100	3.603	0.264	0
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2.971	8.958	8.958	9.271	2.971
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	0.129	0.124	1.027	100
- Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	96.053	92.063	94.545	100
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	2.632	100	100	100
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	1	100	100	100
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0.056	1	100	0.146	0.056
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	91.235	4000	100	100	91.235
1.e.6	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9.5	15	100	100	9.5
- Sosial						
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	4.568	99.225	100	100
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
- Tenaga Kerja						
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	5.556	100	100	100	5.556
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	9.365	0.244	100	70.662	9.365
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	58.908.645	3.690.539	103.642	4.223	58.908.645
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur	6.557	72.941	100	6.557	6.557

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
	Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).					
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	23.348	100	100	76.972	23.348
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	5.896	100	64.969	24.462	5.896
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100	0.028	0.021	100	100
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	18.363	20.391	5.188	5.859	18.363
- Pangan						
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	107.201	13.185	155.683	343	107.201
- Pertanian						
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	85.008	100	100	0	85.008
2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	100	100	0	0
2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	85.008	100	100	0	85.008
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	100	100	100	0
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	100	100	100	0
2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	100	100	100	0
- Lingkungan Hidup						
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	67.03	68.14	64.59	65.03	67.03
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	46.456	91.861	44.397	42.354	46.456
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	100	5	0	0
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	98.283	99.573	98.389	96.908	98.283
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	55.088	62.818	47.136	50.562	55.088
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	99.139	96.846	95.919	99.5	99.139
2.k.1.4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	23.333	65	15	17.073	23.333
- Pemberdayaan masyarakat dan desa						
2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	100	100	100	100
2.l.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	179.661	3.478	5.682	10.169	179.661
- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana						
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.27	2.3	2.41	2.38	2.27
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	79.279	85.185	72.769	43.737	79.279

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	2.962	6.257	15.618	9.233	2.962
- Perhubungan						
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	1.75	80	0.8	0.8	60
2.n.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0.723	0.84	0.84	0.84	0.14
- Komunikasi dan Informatika						
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	80	65.385	65.385	17.526	80
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	8.16	100	72.539	75.532	8.16
- Koperasi, usaha kecil dan menengah						
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	56.667	21.053	21.368	21.277	56.667
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	0.397	0.426	1.41	0.411	0.397
- Penanaman Modal						
2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	63.056	604.247	86.916	49.291	63.056
- Kepemudaan dan Olahraga						
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.862	0.567	0.691	1.618	1.862
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3.641	5.241	5.289	3.606	3.641
2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	24	1	1	1	24
- Statistik						
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	73.171	37.5	100	100	73.171
2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	73.171	37.5	100	100	73.171
- Persandian						
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	47.597	100	100	100	47.597
- Kebudayaan						
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	40	100	100	42.308	40
- Perpustakaan						
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	3.2	81.26	82.45	87.38	18.9
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	18.89	26	28.64	39.94
- Kearsipan						
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	75009	62.66	75	75	75009
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek	1	1	1	1	0

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
	kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					
3. Urusan Pilihan						
- Kelautan dan Perikanan						
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	22.76	52715090	95.361	85.094	22.76
- Pariwisata						
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0.522	4.211	3.03	12.745	0.522
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	0.047	30	34.059	0.081	0.047
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	1.089	57.09	973.881	6.423	1.089
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.869	6196.48	1.062	26.273	1.869
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	101.544	1372663674	2.299	2.863	101.544
- Pertanian						
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	485.792	429.577	491.673	447.708	485.792
3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	-3.713	125.954	-92.139	-47.567	-3.713
- Kehutanan						
3.d		100	75	100	100	100
- Energi dan Sumber Daya Mineral						
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0	100	100	100	0
- Perdagangan						
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	48.124	100	100	2.055	48.124
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	65.109	100	61.037	70.581	65.109
3.f.3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0.013	13.245	100	100	0.013
- Perindustrian						
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	18.408	17.256	5.851	36.851	18.408
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	100	75	1	0
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	7.143	100	0	0
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	7.143	100	100	0
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri	0	7.143	100	100	0

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
	(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota					
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	150	95	1	95	150
- Transmigrasi						
3.h	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
- Perencanaan dan Keuangan						
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	15.059	16.432	15.073	15.612	15.059
4.a.2	Rasio PAD	5.373	1.321.296.006	6.246	6.078	5.373
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3.317	2	3012	3
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	2	2.52	3	3
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	65.695	52.31	72.07	69.734	65.695
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	3	100	1	1	3
- Pengadaan						
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0	0	0
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100	32.639	17.2	100	100
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	72.631	32.131	11.574	64.746	72.631
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	27.507	22.144	95.925	48.793	27.507
- Kepegawaian						
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	89.42	85.045	91.307	178.672	89.42
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	29.01	4.234	65.499	24.375	29.01
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0	5.357	8.347	36.25	0
- Manajemen Keuangan						
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	20.276	65.515	59.036	42.218	20.276
4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	165.885	22.853	45.645	42.614	165.885
4.d.3	Manajemen Aset	4	100	4	4	4
4.d.4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	2.44	6.425	5.762	5.64	2.44
- Transparansi dan Partisipasi Publik						
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	93.732	10	10	100	93.732
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	41.667	25	25	100	41.667

2.5. Gambaran Keuangan Daerah

A. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Tabel II-61. Realisasi APBD Kabupaten Bengkulu Selatan 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	1.004.992.976.845,31	975.908.268.317,25	940.466.281.998,82	1.007.440.267.259,12	1.069.119.261.939,40
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	86.145.400.985,68	72.499.882.535,25	58.742.310.404,82	61.261.628.777,12	56.711.203.175,40
Pajak Daerah	9.420.358.876,00	10.266.060.492,78	11.044.389.479,04	12.599.373.156,00	12.271.714.596,07
Retribusi Daerah	1.087.468.340,00	1.360.087.449,55	1.489.468.338,00	2.018.132.345,00	2.710.198.977,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.150.687.236,44	2.365.618.764,50	1.552.864.848,47	2.106.101.645,85	1.810.607.397,54
Lain-lain PAD Yang Sah	73.486.886.533,24	58.508.115.828,42	44.655.587.739,31	44.538.021.630,27	39.918.682.204,79
PENDAPATAN TRANSFER	910.050.426.859,63	875.052.434.790,00	881.723.971.594,00	946.178.638.482,00	1.004.161.000.502,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	785.327.995.240,00	828.154.003.877,00	823.630.670.636,00	899.268.330.967,00	968.626.915.911,00
Dana Perimbangan	785.327.995.240,00	717.178.808.877,00	715.399.722.636,00	766.478.101.967,00	846.041.315.911,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.798.109.774,00	18.125.433.294,00	25.569.617.685,00	61.908.829.000,00	74.982.267.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	519.472.760.000,00	513.903.304.000,00	512.931.502.200,00	538.937.532.929,00	576.579.957.977,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	164.897.616.780,00	95.750.357.368,00	83.954.199.537,00	60.186.900.723,00	88.263.268.909,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	86.159.508.686,00	89.399.714.215,00	92.944.403.214,00	105.444.839.315,00	106.215.822.025,00
Dana Insentif Daerah (DID)			6.187.022.000,00	23.681.209.000,00	-
Dana Desa	110.975.195.000,00	110.975.195.000,00	102.043.926.000,00	109.109.020.000,00	110.220.296.000,00
Insentif Fiskal					12.365.304.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.747.236.619,63	46.898.430.913,00	58.093.300.958,00	46.910.307.515,00	35.534.084.591,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	13.747.236.619,63	46.898.430.913,00	58.093.300.958,00	46.910.307.515,00	35.534.084.591,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.797.149.000,00	28.355.950.992,00			8.247.058.262,00
Pendapatan Hibah	-	5.422.865.000,00			
Pendapatan Lainnya	8.797.149.000,00	22.933.085.992,00			8.247.058.262,00

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA DAERAH	1.029.807.319.350,07	923.061.517.247,20	942.991.312.312,76	1.006.119.388.782,02	1.099.091.490.622,19
BELANJA OPERASI	674.298.585.875,07	648.868.386.949,20	679.617.519.995,76	701.230.931.136,22	762.400.753.784,00
Belanja Pegawai	425.392.451.557,00	422.593.473.719,20	406.097.652.913,00	426.377.760.392,60	457.081.011.642,00
Belanja Barang dan Jasa	203.994.784.318,07	208.803.667.130,00	253.491.480.682,76	243.238.824.818,62	265.129.753.098,00
Belanja Hibah	42.011.950.000,00	16.042.846.100,00	18.070.686.400,00	30.554.604.925,00	39.274.989.044,00
Belanja Bantuan Sosial	2.899.400.000,00	1.428.400.000,00	1.957.700.000,00	1.059.741.000,00	915.000.000,00
BELANJA MODAL	172.479.948.353,00	108.829.322.598,00	106.716.991.417,00	134.917.775.194,80	161.869.962.152,19
Belanja Modal Tanah	95.125.000,00				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.864.060.411,00	15.565.416.196,00	22.985.968.665,00	35.969.974.112,00	35.512.212.913,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.715.399.208,00	45.855.240.832,00	23.107.862.006,00	37.269.475.284,11	8.915.882.794,19
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.865.471.337,00	44.120.390.052,00	57.154.390.497,00	57.893.408.976,69	100.136.854.995,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.939.892.397,00	3.288.275.518,00	3.468.770.249,00	3.784.916.822,00	10.284.761.450,00
Belanja Modal Aset Lainnya					7.020.250.000,00
BELANJA TAK TERDUGA	15.297.473.222,00	12.740.000,00	49.208.820,00	23.187.760,00	-
Belanja Tak Terduga	15.297.473.222,00	12.740.000,00	49.208.820,00	23.187.760,00	-
Belanja TRANSFER	167.731.311.900,00	165.351.067.700,00	156.607.592.080,00	169.947.494.691,00	174.820.774.686,00
SURPLUS / (DEFISIT)	-24.814.342.504,76	52.846.751.070,05	-2.525.030.313,94	1.320.878.477,10	-29.972.228.682,79
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.825.967.183,80	2.861.624.679,04	55.708.327.749,09	53.183.297.435,15	54.504.175.912,25
Penggunaan SiLPA	30.825.967.183,80	2.861.624.679,04	55.708.327.749,09	53.183.297.435,15	54.504.175.912,25
Pinjaman Dalam Negeri	-				-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.150.000.000,00				-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-				-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	3.150.000.000,00				-
PEMBIAYAAN NETTO	27.675.967.183,80	2.861.624.679,04	55.708.327.749,09	53.183.297.435,15	54.504.175.912,25
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	2.861.624.679,04	55.708.375.749,09	53.183.297.435,15	54.504.175.912,25	24.531.947.229,46

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan meningkat kembali pada tahun terakhir. Total pendapatan daerah pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1,004 triliun, menurun secara bertahap hingga mencapai titik terendah pada tahun 2022 sebesar Rp940,46 miliar, sebelum kembali meningkat pada tahun 2023 dan mencapai Rp1,069 triliun pada tahun 2024. Meskipun terdapat fluktuasi, secara umum kinerja pendapatan menunjukkan pemulihan dan perbaikan pasca pandemi.

Struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah. Sepanjang lima tahun terakhir, komponen pendapatan transfer selalu mendominasi dengan proporsi di atas 85% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2024, pendapatan transfer mencapai Rp1,004 triliun atau sekitar 93,92% dari total pendapatan daerah. Porsi terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang secara konsisten menjadi andalan pembiayaan belanja daerah.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren penurunan yang perlu menjadi perhatian. Pada tahun 2020, PAD tercatat sebesar Rp86,15 miliar, namun terus menurun menjadi hanya Rp56,71 miliar pada tahun 2024. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2024 hanya sebesar 5,3%, jauh dari ideal untuk menciptakan kemandirian fiskal daerah.

Komponen PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, seluruhnya mengalami fluktuasi. Meskipun terdapat peningkatan pada komponen retribusi daerah (dari Rp1,08 miliar pada 2020 menjadi Rp2,71 miliar pada 2024), namun komponen dominan seperti "lain-lain PAD yang sah" justru mengalami penurunan cukup tajam, yaitu dari Rp73,49 miliar

pada 2020 menjadi hanya Rp39,91 miliar pada 2024. Hal ini menjadi indikasi lemahnya optimalisasi aset daerah dan rendahnya inovasi pendapatan lokal.

Pajak daerah, sebagai salah satu indikator kemandirian fiskal, menunjukkan tren positif meskipun relatif lambat. Nilai pajak daerah meningkat dari Rp9,42 miliar pada 2020 menjadi Rp12,27 miliar pada 2024. Namun, peningkatan ini masih belum cukup signifikan untuk menopang belanja daerah secara mandiri.

Komponen pendapatan lainnya seperti hibah dan pendapatan lain-lain tidak konsisten muncul dalam seluruh tahun anggaran, menunjukkan ketergantungan terhadap kebijakan sektoral pemerintah pusat maupun ketersediaan bantuan luar.

Secara keseluruhan, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan masih menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan PAD sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat menjadikan daerah rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional. Oleh karena itu, ke depan perlu dirumuskan strategi peningkatan PAD yang lebih agresif dan inovatif melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, optimalisasi aset daerah, peningkatan layanan publik berbasis digital, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan BUMDes.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan cerminan dari prioritas dan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, tren belanja daerah selama periode 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan yang cukup konsisten, dengan total realisasi yang meningkat dari Rp1,03 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,10 triliun pada tahun 2024.

Secara struktural, belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Dari keempat komponen tersebut, belanja operasi merupakan yang paling dominan, menyerap lebih dari 65% total belanja daerah setiap tahunnya. Pada tahun 2024, belanja operasi mencapai Rp762,4 miliar, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp674,3 miliar. Komponen terbesar dalam belanja operasi adalah belanja pegawai, yang menunjukkan tren stabil dan meningkat dari Rp425,4 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp457,1 miliar pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan masih besarnya proporsi anggaran yang digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan aparatur sipil negara. Meskipun penting untuk menjamin kelangsungan pelayanan publik, kecenderungan ini juga menandakan perlunya rasionalisasi agar lebih banyak ruang fiskal dialokasikan untuk belanja produktif.

Belanja barang dan jasa, yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, mengalami peningkatan dari Rp203,9 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp265,1 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini dapat mencerminkan penguatan kapasitas pelayanan pemerintah daerah, meskipun perlu dikaji lebih dalam mengenai efisiensi dan dampaknya terhadap output pembangunan.

Sementara itu, belanja modal yang mencerminkan investasi pemerintah untuk pembangunan fisik, infrastruktur, dan aset tetap lainnya menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Setelah sempat menurun dari Rp172,5 miliar (2020) ke Rp106,7 miliar (2022), anggaran ini kembali naik menjadi Rp161,8 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini positif karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, terutama dalam bidang jalan, irigasi, dan jaringan yang menyerap hampir 62% dari total belanja modal tahun 2024.

Namun, perlu dicatat bahwa belanja untuk gedung dan bangunan mengalami penurunan signifikan, dari Rp68,7 miliar pada tahun 2020

menjadi hanya Rp8,9 miliar pada tahun 2024. Ini dapat menunjukkan berkurangnya pembangunan fasilitas fisik seperti kantor, sekolah, atau fasilitas kesehatan, atau bisa juga mengindikasikan efisiensi melalui optimalisasi bangunan yang sudah ada.

Belanja hibah dan bantuan sosial juga mendapat porsi yang cukup besar dalam struktur belanja operasi. Belanja hibah meningkat hampir dua kali lipat dari Rp16 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp39,3 miliar pada tahun 2024, yang mengindikasikan upaya pemerintah untuk memperluas dukungan terhadap lembaga non-pemerintah atau kelompok masyarakat. Sementara itu, belanja bantuan sosial menurun secara bertahap dari Rp2,9 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp915 juta pada tahun 2024, kemungkinan karena pergeseran kebijakan pasca-pandemi COVID-19.

Belanja tak terduga, yang berfungsi sebagai cadangan untuk pengeluaran darurat, tercatat hanya signifikan pada tahun 2020 sebesar Rp15,3 miliar dan menurun drastis hingga nihil pada tahun 2024. Hal ini dapat dimaknai sebagai membaiknya kondisi fiskal dan terkendalinya risiko-risiko tak terduga, meskipun keberadaan cadangan tetap diperlukan untuk menjaga ketahanan fiskal.

Terakhir, belanja transfer ke desa dan kelurahan menunjukkan tren stabil, meningkat dari Rp167,7 miliar pada 2020 menjadi Rp174,8 miliar pada 2024. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat desentralisasi fiskal serta pembangunan berbasis kewilayahan melalui peningkatan alokasi dana transfer ke pemerintah desa.

Secara umum, struktur dan tren belanja daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama lima tahun terakhir mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyeimbangkan belanja rutin dan pembangunan. Meski demikian, terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan efisiensi belanja, mengurangi dominasi belanja pegawai, dan mengarahkan lebih banyak anggaran ke kegiatan produktif dan infrastruktur yang dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara lebih berkelanjutan.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen penting dalam siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus pembiayaan. Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Selatan, pembiayaan daerah selama periode tahun 2020 hingga 2024 memperlihatkan dinamika yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal dan keberlanjutan program pembangunan.

Selama lima tahun terakhir, sumber utama penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp30,83 miliar, yang seluruhnya berasal dari SiLPA. Jumlah ini kemudian menurun drastis pada tahun 2021 menjadi hanya Rp2,86 miliar, mencerminkan rendahnya sisa kas yang dapat digunakan dari tahun sebelumnya. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, penerimaan pembiayaan kembali meningkat signifikan, yaitu sebesar Rp55,71 miliar pada tahun 2022, Rp53,18 miliar pada 2023, dan Rp54,50 miliar pada tahun 2024.

Sepanjang periode 2020-2024, pemerintah daerah tidak melakukan pinjaman daerah maupun penyertaan modal, sehingga struktur pembiayaan tetap mengandalkan SiLPA tanpa menimbulkan kewajiban jangka panjang. Hanya pada tahun 2020, terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3,15 miliar yang digunakan untuk membayar pokok pinjaman dalam negeri, sementara pada tahun-tahun berikutnya tidak terdapat pengeluaran pembiayaan.

Akumulasi dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan menghasilkan pembiayaan netto positif setiap tahun, dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sebesar Rp55,71 miliar dan Rp53,18 miliar. Ketersediaan pembiayaan netto yang cukup besar ini berperan strategis dalam menutupi defisit anggaran serta menjaga kelancaran pelaksanaan program-program prioritas daerah. Meski demikian, penggunaan pembiayaan dari SiLPA secara berulang dan dominan perlu diwaspadai, karena dapat menandakan belum optimalnya perencanaan dan penyerapan anggaran tahun sebelumnya. Ketergantungan terhadap SiLPA sebagai sumber pembiayaan juga berisiko apabila terjadi penurunan drastis dalam ketersediaan kas tahun berjalan.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya penguatan perencanaan anggaran, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan kas daerah yang lebih akurat dan efisien. Selain itu, alternatif pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), pemanfaatan aset daerah, atau pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang produktif, tanggung jawab sosial & lingkungan (CSR), *private investment*, pinjaman/hibah luar negeri, dan pinjaman bank/lembaga keuangan dan sinergi pendanaan dapat menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa membebani APBD secara langsung. Dengan tata kelola pembiayaan yang lebih terarah dan inovatif, Kabupaten Bengkulu Selatan berpeluang meningkatkan kemampuan fiskalnya dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencerminkan efisiensi pelaksanaan

anggaran serta kemampuan pengelolaan fiskal suatu daerah. Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Selatan, tren SiLPA selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan realisasi belanja daerah dan strategi pembiayaan.

Pada tahun 2020, SiLPA tercatat sebesar Rp2,86 miliar. Angka ini relatif kecil dibandingkan tahun-tahun berikutnya, menandakan adanya keseimbangan antara penerimaan dan belanja, meskipun pada tahun tersebut daerah mengalami defisit anggaran sebesar Rp24,81 miliar yang kemudian ditutup melalui penerimaan pembiayaan. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2021, ketika SiLPA meningkat tajam menjadi Rp55,71 miliar. Peningkatan ini tidak lepas dari kinerja belanja daerah yang lebih rendah dibandingkan pendapatan dan pembiayaan yang tersedia, termasuk pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 dan 2023, tren SiLPA masih cukup tinggi, masing-masing sebesar Rp53,18 miliar dan Rp54,50 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian anggaran belum terserap optimal, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, efisiensi pengadaan, atau kendala administratif dalam penyaluran anggaran. Meskipun demikian, tingginya SiLPA juga memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan belanja pada tahun berikutnya, terutama untuk kegiatan yang sifatnya berkelanjutan atau tertunda.

Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan signifikan pada nilai SiLPA menjadi Rp24,53 miliar. Penurunan ini dapat mencerminkan dua hal: pertama, meningkatnya efektivitas penyerapan anggaran belanja; dan kedua, meningkatnya kapasitas daerah dalam mengelola pelaksanaan program secara lebih terencana dan tepat waktu. Meski begitu, penurunan SiLPA juga perlu dicermati untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran

tetap berjalan beriringan dengan pencapaian output dan outcome pembangunan yang direncanakan.

Secara umum, SiLPA Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan kemampuan fiskal daerah dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan dan fleksibilitas fiskal tahunan. Namun, akumulasi SiLPA yang terlalu besar dan berulang juga dapat mengindikasikan perencanaan anggaran yang kurang presisi atau pelaksanaan kegiatan yang tidak optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan efektivitas pembangunan, serta memastikan bahwa SiLPA benar-benar mencerminkan surplus anggaran yang produktif dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Neraca Daerah Tahun Anggaran 2020-2024

Neraca Daerah adalah gambaran menyeluruh kondisi faktual wilayah yang mencakup aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan, serta menjadi landasan teknokratik penting dalam penyusunan RPJMD. Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Selatan, Neraca Daerah membantu mengidentifikasi masalah dan potensi pembangunan secara objektif, sehingga arah kebijakan dalam RPJMD benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Misalnya, rendahnya akses air minum layak dan kenaikan angka kemiskinan di tengah membaiknya indikator makro menjadi sinyal perlunya intervensi yang lebih inklusif dan tepat sasaran. Dengan demikian, RPJMD tersusun bukan berdasarkan asumsi, melainkan berpijak pada realitas dan data yang terukur.

Berdasarkan data Neraca Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan daerah secara umum menunjukkan tren positif, dengan peningkatan total aset dan ekuitas dari tahun ke tahun. Total aset daerah meningkat dari Rp1,30 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,50 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini

didorong terutama oleh pertumbuhan aset tetap yang menjadi komponen terbesar, yaitu sekitar 85-90% dari total aset, yang menggambarkan adanya investasi berkelanjutan dalam bentuk infrastruktur dan barang milik daerah.

Tabel II-62. Neraca Daerah Tahun Anggaran 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET					
A. Aset Lancar	50.820.448.292,03	101.635.820.549,59	86.859.574.085,84	95.181.043.713,48	123.289.243.100,04
B. Investasi Jangka Panjang	52.352.112.074,42	54.962.630.074,42	54.962.630.074,42	54.962.630.074,42	54.962.630.074,42
C. Aset Tetap	1.181.714.374.007,62	1.223.178.324.847,03	1.257.726.066.798,77	1.293.634.612.751,46	1.294.235.581.015,91
D. Aset Lainnya	17.407.466.755,00	16.518.580.862,40	17.912.282.442,10	34.783.665.296,80	29.178.605.916,84
JUMLAH ASET	1.302.294.401.129,07	1.396.295.356.333,44	1.417.460.553.401,13	1.478.561.951.836,16	1.502.066.860.107,21
KEWAJIBAN					
A. Kewajiban Jangka Pendek	11.861.135.542,00	6.113.403.149,00	11.863.326.260,00	26.609.489.802,00	30.617.235.547,90
B. Kewajiban Jangka Panjang					-
EKUITAS	1.290.433.265.587,07	1.390.181.953.184,44	1.405.597.227.141,13	1.451.952.462.034,16	1.471.449.624.559,31
JUMLAH EKUITAS	1.290.433.265.587,07	1.390.181.953.184,44	1.405.597.227.141,13	1.451.952.462.034,16	1.471.449.624.559,31

Aset lancar juga mengalami peningkatan signifikan, dari Rp50,82 miliar pada 2020 menjadi Rp123,29 miliar pada 2024, mencerminkan meningkatnya likuiditas daerah. Sementara itu, investasi jangka panjang tetap stabil selama lima tahun terakhir di angka Rp54,96 miliar. Aset lainnya menunjukkan fluktuasi, dengan lonjakan tajam pada tahun 2023 sebelum menurun kembali di 2024.

Di sisi kewajiban, kewajiban jangka pendek relatif kecil dibandingkan total aset dan ekuitas, meskipun meningkat signifikan dari Rp11,86 miliar pada 2020 menjadi Rp30,62 miliar pada 2024. Tidak terdapat kewajiban jangka panjang yang tercatat dalam neraca, yang menunjukkan struktur kewajiban yang konservatif dan cenderung berhati-hati dalam mengambil utang jangka panjang. Ekuitas daerah—yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban—juga meningkat konsisten dari Rp1,29 triliun pada 2020 menjadi Rp1,47 triliun pada 2024, mencerminkan posisi keuangan yang sehat dan akumulasi surplus anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, Neraca Daerah ini mencerminkan kondisi keuangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang cukup solid, dengan struktur

aset yang kuat, kewajiban yang relatif rendah, dan peningkatan ekuitas yang berkelanjutan. Hal ini menjadi modal penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan di masa mendatang.

C. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

Proyeksi Keuangan Daerah merupakan estimasi kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam beberapa tahun ke depan, yang disusun berdasarkan perkembangan dan tren pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, serta berbagai asumsi makroekonomi dan kebijakan fiskal yang berlaku. Proyeksi ini berfungsi sebagai acuan utama untuk menilai kapasitas keuangan daerah dalam mendanai program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan, sekaligus sebagai alat untuk mengantisipasi potensi risiko fiskal. Melalui proyeksi keuangan yang terukur, pemerintah daerah dapat mengelola belanja secara lebih efisien, menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta memastikan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, proyeksi keuangan daerah memegang peranan strategis dalam menentukan batas dan ruang fiskal yang realistis bagi perumusan prioritas pembangunan. Program dan kegiatan yang dirancang dalam RPJMD harus selaras dengan kemampuan keuangan daerah agar rencana pembangunan tidak hanya bersifat visioner, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, proyeksi keuangan daerah menjadi penghubung antara arah kebijakan dan sasaran pembangunan dengan kapasitas fiskal yang tersedia, sekaligus menjamin kesinambungan antara proses perencanaan dan penganggaran selama lima tahun ke depan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel II-63. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	REALISASI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	1.037.903.802.498,00	1.069.403.113.294,98	1.074.750.128.861,45	1.080.123.879.505,77	1.085.524.498.903,29	1.090.952.121.397,80
	A. Pendapatan Asli Daerah	49.302.262.536,00	64.882.923.148,68	65.207.337.764,42	65.533.374.453,25	65.861.041.325,51	66.190.346.532,14
	B. Pendapatan Transfer	978.285.595.862,00	992.642.056.453,80	997.605.266.736,07	1.002.593.293.069,75	1.007.606.259.535,10	1.012.644.290.832,77
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.315.944.100,00	11.878.133.692,50	11.937.524.360,96	11.997.211.982,77	12.057.198.042,68	12.117.484.032,89
	JUMLAH PENDAPATAN	1.037.903.802.498,00	1.069.403.113.294,98	1.074.750.128.861,45	1.080.123.879.505,77	1.085.524.498.903,29	1.090.952.121.397,80
2	BELANJA	1.076.804.940.125,00	1.101.485.206.692,95	1.106.992.632.726,41	1.112.527.595.890,05	1.118.090.233.869,49	1.123.680.685.038,84
	A. Belanja Operasi	770.558.329.803,00	782.218.424.513,81	786.129.516.636,37	790.060.164.219,56	794.010.465.040,65	797.980.517.365,86
	B. Belanja Modal	132.544.678.322,00	143.567.066.239,14	144.284.901.570,34	145.006.326.078,19	145.731.357.708,58	146.460.014.497,12
	C. Belanja Tak Terduga	2.193.092.000,00	1.507.500.000,00	1.515.037.500,00	1.522.612.687,50	1.530.225.750,94	1.537.876.879,69
	D. Belanja Transfer	171.508.840.000,00	174.192.215.940,00	175.063.177.019,70	175.938.492.904,80	176.818.185.369,32	177.702.276.296,17
	JUMLAH BELANJA	1.076.804.940.125,00	1.101.485.206.692,95	1.106.992.632.726,41	1.112.527.595.890,05	1.118.090.233.869,49	1.123.680.685.038,84
	SURPLUS/DEFISIT	-38.901.137.627,00	-32.082.093.397,97	-32.242.503.864,96	-32.403.716.384,28	-32.565.734.966,20	-32.728.563.641,04
3	PEMBIAYAAN	38.901.137.627,00	32.082.093.397,97	32.242.503.864,95	32.403.716.384,28	32.565.734.966,20	32.728.563.641,03
	A. Penerimaan	38.901.137.627,00	32.082.093.397,97	32.242.503.864,95	32.403.716.384,28	32.565.734.966,20	32.728.563.641,03
	B. Pengeluaran	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN	38.901.137.627,00	32.082.093.397,97	32.242.503.864,95	32.403.716.384,28	32.565.734.966,20	32.728.563.641,03
	PEMBIAYAAN NETTO						

Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2026-2030 menunjukkan arah pengelolaan fiskal yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan nominal pendapatan dan belanja daerah secara bertahap. Pada sisi pendapatan, total pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari baseline tahun 2024 sebesar Rp1,037 triliun menjadi sekitar Rp1,091 triliun pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan optimisme fiskal yang moderat dan realistis, dengan tetap memperhitungkan kondisi makroekonomi serta kebijakan fiskal nasional dan daerah.

Struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer, yang pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp992,64 miliar dan meningkat menjadi Rp1,012,64 triliun pada tahun 2030. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Bengkulu Selatan masih sangat bergantung pada dana perimbangan. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun mengalami peningkatan dari Rp49,30 miliar pada tahun 2024 menjadi

sekitar Rp66,19 miliar pada tahun 2030, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Pada sisi belanja, total belanja daerah diproyeksikan meningkat dari Rp1,076 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,123 triliun pada tahun 2030. Belanja operasi tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja daerah, dengan nilai yang meningkat secara bertahap dari Rp782,22 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp797,98 miliar pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa belanja rutin untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik masih mendominasi penggunaan anggaran. Di sisi lain, belanja modal diproyeksikan meningkat secara terbatas, dari Rp143,57 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp146,46 miliar pada tahun 2030, yang mencerminkan upaya menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur meskipun dalam ruang fiskal yang terbatas.

Selama periode proyeksi, Kabupaten Bengkulu Selatan diperkirakan mengalami defisit anggaran yang relatif stabil, dengan nilai defisit berkisar antara Rp32,08 miliar hingga Rp32,73 miliar per tahun. Defisit tersebut direncanakan untuk ditutup sepenuhnya melalui pembiayaan daerah, yang seluruhnya bersumber dari penerimaan pembiayaan tanpa adanya pengeluaran pembiayaan. Pola ini menunjukkan bahwa pengelolaan defisit masih berada dalam batas yang terkendali dan dirancang untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah dalam jangka menengah.

Secara keseluruhan, proyeksi keuangan daerah ini memberikan gambaran bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Bengkulu Selatan pada periode 2026-2030 masih cukup terbatas, namun dikelola secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 perlu menempatkan kebijakan

peningkatan kemandirian fiskal, efisiensi belanja, serta penajaman prioritas pembangunan sebagai agenda utama, agar arah pembangunan daerah tetap selaras dengan kemampuan keuangan yang tersedia dan dapat dilaksanakan secara efektif serta bertanggung jawab.

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah menjadi landasan penting dalam proses perencanaan pembangunan, karena berperan dalam mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang telah dicapai dengan target yang ditetapkan, serta membandingkan keadaan saat ini dengan tujuan jangka panjang yang ingin diwujudkan. Permasalahan pembangunan tidak hanya menunjukkan indikator yang belum terpenuhi, tetapi juga mencakup aspek yang telah berjalan baik namun masih membutuhkan penguatan guna menjamin pelayanan publik yang lebih optimal dan berkelanjutan. Di sisi lain, isu strategis merupakan tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah, bersifat lintas sektor, memerlukan kebijakan yang terintegrasi dan sistemik, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

2.6.1. Permasalahan Kabupaten Bengkulu Selatan

A. Belum Optimalnya Kualitas, Keterjangkauan, dan Pemerataan Infrastruktur

Permasalahan Belum Optimalnya Kualitas, Keterjangkauan, dan Pemerataan Infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Selatan sangat nyata dan terbukti dari berbagai indikator yang menunjukkan kondisi infrastruktur jalan dan irigasi masih belum memadai. Berdasarkan data tahun 2024, dari total 1.158,14 km panjang jalan kabupaten, hanya 112,47 km atau sekitar 9,71% yang dalam kondisi baik. Sementara itu, jalan dengan kondisi rusak

berat masih mendominasi sepanjang 412,91 km atau lebih dari 35% total jalan, meskipun angka ini telah menurun dari puncaknya 544,96 km pada tahun 2022.

Di sisi lain, jalan dengan kondisi sedang mencapai 531,76 km dan jalan rusak ringan sepanjang 100,86 km. Artinya, hampir setengah jaringan jalan kabupaten berada dalam kondisi tidak ideal, menghambat mobilitas penduduk, arus distribusi barang dan jasa, serta akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Hal ini sangat merugikan terutama bagi desa-desa yang berada di wilayah perbukitan dan pesisir yang jauh dari pusat pemerintahan, seperti di Kecamatan Kedurang, Bunga Mas, dan Seginim.

Tak hanya jalan, keterbatasan infrastruktur irigasi juga menjadi hambatan serius bagi sektor pertanian. Subsektor tanaman pangan seperti padi sawah yang dikelola oleh 8.270 unit usaha menghadapi ketergantungan pada irigasi tadah hujan yang sangat dipengaruhi musim. Kondisi ini menyebabkan risiko gagal panen yang tinggi dan menurunkan produktivitas. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian dan keterbatasan jaringan irigasi teknis di kawasan pertanian utama memperburuk situasi tersebut.

Permasalahan infrastruktur ini tidak hanya berdampak pada ekonomi lokal, tetapi juga berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029 perlu memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan jalan mantap, peningkatan kualitas dan cakupan jaringan irigasi, serta pemerataan infrastruktur dasar ke wilayah hinterland. Intervensi yang tepat pada sektor ini akan memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan membuka peluang pertumbuhan yang lebih inklusif di seluruh penjuru kabupaten.

B. Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah Masih Rendah

Struktur ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan hingga tahun 2024 masih sangat bergantung pada sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Tiga sektor ini berkontribusi sebesar Rp1.308,51 miliar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, menjadikannya sektor unggulan daerah. Namun, besarnya kontribusi ini tidak berbanding lurus dengan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan ekonomi di sektor pertanian masih didominasi oleh usaha kecil perorangan yang bersifat subsisten, dengan nilai tambah yang rendah karena minimnya proses hilirisasi dan integrasi ke rantai nilai nasional maupun global.

Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa 99,92% unit usaha pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan dikelola oleh perseorangan, dengan jumlah total mencapai 31.384 unit. Unit-unit ini tersebar terutama di Kecamatan Pino Raya, Seginim, dan Manna. Sub-sektor perkebunan menempati porsi terbesar, yaitu 73,79% dari total unit usaha pertanian, dengan komoditas utama kelapa sawit (15.178 unit) dan kopi (7.458 unit). Namun, sebagian besar hasil perkebunan ini masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah tanpa pengolahan lanjutan. Kondisi ini menyebabkan petani tidak memperoleh nilai tambah yang optimal, serta ketergantungan pada harga pasar komoditas global yang fluktuatif.

Sementara itu, subsektor tanaman pangan seperti padi sawah yang dikelola oleh 8.270 unit usaha mengalami kendala dalam produktivitas akibat keterbatasan irigasi teknis, penggunaan benih unggul yang belum merata, serta rendahnya adopsi teknologi budidaya modern. Hal ini diperparah oleh minimnya fasilitas pascapanen seperti penggilingan padi modern dan gudang penyimpanan. Di sisi lain, sektor hortikultura yang memiliki 7.636 unit usaha belum mampu menunjukkan kontribusi maksimal terhadap PDRB karena persoalan logistik, transportasi, serta ketiadaan

sistem rantai dingin (cold chain) yang dapat menjaga kesegaran produk dari petani ke pasar.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada sektor perikanan dan kehutanan. Meskipun Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki garis pantai sepanjang ± 70 km dan potensi hasil laut yang melimpah, sektor ini masih terkendala oleh rendahnya modernisasi alat tangkap dan belum berkembangnya industri pengolahan hasil laut. Produk hasil hutan non-kayu seperti rotan dan madu juga belum dikelola dalam skala ekonomi yang memadai karena terbatasnya akses pembiayaan, teknologi, dan pasar. Hal ini menegaskan bahwa sektor primer belum terintegrasi secara utuh dengan sektor sekunder dan tersier yang seharusnya mendorong penciptaan nilai tambah dan peluang kerja lebih luas.

Sementara itu, sektor industri pengolahan hanya menyumbang 2,91% terhadap total PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2024. Meskipun mengalami pertumbuhan nominal dari Rp112,22 miliar (2020) menjadi Rp121,31 miliar (2024), namun angka ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder belum berjalan efektif. Padahal, penguatan industri pengolahan sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Lebih lanjut, capaian Indeks Daya Saing Daerah Bengkulu Selatan memang menunjukkan tren peningkatan dari 2,94 (2022) menjadi 3,64 (2024). Namun, pencapaian ini belum merata di seluruh pilar penyusun daya saing. Pilar Kapabilitas Inovasi masih tertinggal dengan skor hanya 1,55, yang menunjukkan lemahnya kemampuan daerah dalam mengembangkan inovasi lokal, teknologi tepat guna, serta adaptasi digital oleh pelaku ekonomi daerah. Selain itu, rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur penunjang UMKM, dan rendahnya akses pembiayaan membuat sektor ekonomi kreatif belum berkembang maksimal, meskipun

kontribusinya terhadap PDRB meningkat dari 6,3% (2020) menjadi sekitar 7,5% (2024).

Secara keseluruhan, permasalahan ini mencerminkan perlunya strategi pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah, diversifikasi produk, adopsi teknologi, dan penguatan ekosistem usaha lokal. Modernisasi pertanian, hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan kawasan agropolitan, penguatan UMKM berbasis lokalitas, serta peningkatan daya saing ekonomi kreatif dan pariwisata menjadi arah intervensi strategis yang perlu diprioritaskan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029 untuk mengatasi permasalahan struktural dan mewujudkan ekonomi daerah yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

C. Ketimpangan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Permasalahan ketimpangan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pembangunan manusia yang inklusif dan merata. Dari sisi kesehatan, Indeks Keluarga Sehat (IKS) Bengkulu Selatan memang menunjukkan peningkatan dari 0,162 pada tahun 2018 menjadi 0,206 pada tahun 2023, namun capaian ini masih di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang telah mencapai 0,224. Kesenjangan ini menandakan bahwa akses terhadap air bersih, sanitasi, layanan imunisasi, dan status gizi balita belum merata di seluruh wilayah, terutama di desa-desa terpencil dan kawasan pesisir.

Prevalensi stunting juga masih menjadi isu krusial yang berakar pada persoalan gizi, sanitasi, dan pola asuh, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam angka dalam dokumen. Namun demikian, peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan pemberdayaan posyandu menjadi

langkah penting untuk mempercepat perbaikan indikator kesehatan keluarga secara menyeluruh.

Di sektor pendidikan, ketimpangan partisipasi antar jenjang pendidikan terlihat jelas. Data Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI yang sempat mencapai 113,54% pada tahun 2021 justru menurun menjadi 97,23% pada tahun 2024. Penurunan yang signifikan juga terjadi pada jenjang SMP/MTs dari 99,23% (2020) menjadi 74,09% (2022), meskipun sedikit membaik ke 79,48% di tahun 2024. APM untuk jenjang SMA/SMK meningkat dari 63,67% (2020) menjadi 85,71% (2024), namun masih menyisakan sekitar 14% anak usia SMA yang belum terlibat dalam pendidikan formal.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Bengkulu Selatan juga stagnan di angka 9,42 tahun pada 2024, hanya sedikit di atas rata-rata provinsi (9,04), dan tidak banyak berubah dari capaian tahun sebelumnya. Ini menunjukkan masih banyak penduduk usia 25 tahun ke atas yang hanya menamatkan pendidikan dasar, dan menjadi cerminan dari lemahnya daya dorong sistem pendidikan untuk menjangkau wilayah tertinggal dan kelompok rentan.

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan, masih terdapat ketimpangan geografis dan sosial dalam layanan dasar. Permasalahan ini perlu ditangani secara lintas sektor, melalui penguatan kapasitas sekolah dan fasilitas kesehatan, pemerataan distribusi guru dan tenaga medis, serta peningkatan peran pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung akses pendidikan dan kesehatan. Tanpa langkah nyata, ketimpangan ini akan terus memperlebar jurang pembangunan antarwilayah dan kelompok sosial di Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Ekonomi

Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi perhatian serius karena menunjukkan

ketertinggalan yang cukup signifikan dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Berdasarkan data tahun 2024, persentase penduduk miskin di Bengkulu Selatan mencapai 17,10%, lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi Bengkulu sebesar 13,56% dan nasional sebesar 9,36%. Meskipun terjadi penurunan dari 18,65% pada tahun 2018, tren tersebut menunjukkan perlambatan dalam penanganan kemiskinan selama tujuh tahun terakhir.

Tingginya angka kemiskinan ini berbanding lurus dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang direpresentasikan oleh Indeks Gini. Nilai Gini Ratio Bengkulu Selatan mengalami fluktuasi dalam rentang 0,36 pada 2018 hingga 0,30 pada 2024, dengan lonjakan kembali ke angka 0,35 pada 2023. Meskipun angka 0,30 relatif mendekati distribusi ideal, ketidakstabilan ini menunjukkan belum meratanya hasil pembangunan, di mana kelompok miskin belum sepenuhnya menikmati pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya akses terhadap layanan dasar seperti air minum layak, sanitasi, hunian yang layak, dan jaminan sosial. Misalnya, meskipun cakupan sanitasi layak telah mencapai 84,42% pada 2024 dan sedikit melampaui rata-rata provinsi, masih terdapat ketimpangan antarwilayah dalam pemenuhannya. Akses terhadap air minum layak pun belum universal, hanya mencapai 68,26% pada 2024, jauh tertinggal dibandingkan Kota Bengkulu (94,51%) dan Mukomuko (75,82%).

Kemiskinan juga tidak terlepas dari terbatasnya peluang kerja produktif. Meskipun TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Bengkulu Selatan berada pada kategori menengah, penciptaan lapangan kerja produktif dan padat karya masih menjadi tantangan. Keterbatasan akses terhadap permodalan dan pelatihan kewirausahaan juga menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi masyarakat bawah.

Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Bengkulu Selatan bersifat struktural dan multidimensi, mencakup aspek akses ekonomi, ketimpangan distribusi, serta lemahnya pemerataan layanan

dasar. Untuk itu, diperlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang bersifat holistik dan berbasis data, mencakup perluasan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, intervensi infrastruktur dasar, serta integrasi program sosial secara lebih efektif dan tepat sasaran.

E. Belum Optimalnya Partisipasi Masyarakat, Khususnya Perempuan

Partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Namun, di Kabupaten Bengkulu Selatan, keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan masih tergolong rendah, yang tercermin dari capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang belum memuaskan. Pada tahun 2024, IDG Kabupaten Bengkulu Selatan hanya mencapai 60,92—angka ini tidak hanya berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu (75,69), tetapi juga masih tertinggal dibanding beberapa kabupaten lainnya seperti Kaur (71,16) dan Seluma (66,86).

Rendahnya IDG ini menunjukkan bahwa perempuan di Bengkulu Selatan belum memperoleh kesempatan yang setara dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, keterwakilan dalam lembaga legislatif atau kelembagaan publik, dan pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan. Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Bengkulu Selatan yang berada di angka 0,51—lebih tinggi dari rata-rata provinsi sebesar 0,44—juga menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam berkontribusi aktif terhadap pembangunan daerah.

Fakta bahwa kontribusi perempuan terhadap pendapatan ekonomi rumah tangga dan keterlibatan dalam organisasi sosial maupun

kelembagaan pemerintahan masih rendah, memperkuat argumen bahwa partisipasi perempuan belum optimal. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan afirmatif dan pendekatan pemberdayaan yang lebih progresif untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses pelatihan vokasional, dukungan usaha mikro berbasis perempuan, pelibatan aktif dalam Musrenbang desa dan kecamatan, serta pembentukan forum perempuan yang representatif di tingkat lokal. Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan ke depan harus memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat, tanpa kecuali, termasuk kelompok perempuan, terlibat dalam proses pembangunan secara setara dan bermakna.

F. Minimnya Penerapan Teknologi dan Transformasi Digital

Penerapan teknologi informasi dan transformasi digital di Kabupaten Bengkulu Selatan masih belum merata di seluruh perangkat daerah. Meskipun capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan peningkatan dari 1,96 (kategori Cukup) pada tahun 2021 menjadi 2,87 (kategori Baik) pada tahun 2024, angka ini masih jauh di bawah capaian Provinsi Bengkulu yang telah mencapai skor 3,92 (kategori Sangat Baik) pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya integrasi layanan digital dan keterpaduan infrastruktur TIK di lingkungan birokrasi kabupaten.

Kondisi ini berdampak pada masih dominannya model pelayanan publik yang konvensional, seperti layanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Padahal, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital memiliki potensi untuk menyederhanakan prosedur, mempercepat waktu pelayanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, khususnya di wilayah terpencil dan perdesaan.

Kelemahan dalam penerapan transformasi digital juga tercermin dari belum maksimalnya pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy), serta masih terbatasnya partisipasi masyarakat melalui kanal digital untuk pengawasan dan perencanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu segera memperkuat tata kelola SPBE melalui peningkatan kapasitas SDM digital, penguatan infrastruktur TIK, serta integrasi layanan antar perangkat daerah guna mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, dan responsif. Tanpa percepatan transformasi digital yang menyeluruh, Kabupaten Bengkulu Selatan akan tertinggal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing.

G. Risiko Bencana Alam dan Kualitas Lingkungan yang Menurun

Kabupaten Bengkulu Selatan menghadapi tantangan serius terkait risiko bencana alam dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Secara geografis, wilayah ini berada pada jalur Cincin Api Pasifik dan memiliki topografi yang didominasi oleh perbukitan dan daerah aliran sungai, sehingga sangat rentan terhadap bencana banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Bengkulu Selatan selama tahun 2019-2022 berada pada angka stagnan 186,40, mencerminkan kapasitas mitigasi yang belum memadai. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, IRB menurun signifikan menjadi masing-masing 165,18 dan 149,80. Meski begitu, Bengkulu Selatan tetap berada di posisi keempat tertinggi dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, menunjukkan bahwa tingkat risikonya masih relatif tinggi dibandingkan daerah lain seperti Rejang Lebong dan Lebong.

Penurunan risiko ini belum diiringi dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang memadai. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Bengkulu Selatan dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) masih berada pada

kategori “sedang”, dengan skor stagnan di kisaran 65,03, di bawah rata-rata provinsi sebesar 72,10 yang sudah masuk kategori “baik”. Khususnya, Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan penurunan dari 55,00 (2021) menjadi stagnan di 45,00 pada 2022 dan 2023—menandakan lemahnya pengelolaan sumber air bersih. Sebaliknya, Indeks Kualitas Udara (IKU) cukup tinggi dan stabil, berada pada angka 93,04 pada 2023, sedikit di atas rata-rata provinsi.

Selain risiko bencana dan pencemaran air, tekanan lingkungan diperparah oleh alih fungsi lahan dan pengelolaan limbah yang belum optimal. Berdasarkan data Indeks Jasa Ekosistem, kapasitas lingkungan dalam fungsi pengolahan limbah hanya berada pada angka 50,09% (kategori rendah), dan ketersediaan ruang hidup hanya 43,83%. Rendahnya fungsi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah mengalami penurunan kualitas lanskap, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

Dengan kompleksitas tantangan tersebut, dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem mitigasi risiko bencana, termasuk infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini, serta tata ruang berbasis risiko. Pada saat yang sama, perlu ditingkatkan pengelolaan limbah dan konservasi kawasan lindung, terutama pada wilayah pesisir dan hutan yang memiliki peran penting sebagai benteng alami terhadap abrasi dan perubahan iklim. Langkah ini penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap ekosistem dan menjamin keberlanjutan pembangunan di Bengkulu Selatan.

H. Ketahanan Pangan Masih Lemah

Ketahanan pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan menghadapi tantangan struktural yang cukup kompleks, terutama terkait pola produksi yang belum adaptif terhadap krisis iklim dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Meskipun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Bengkulu Selatan menunjukkan tren peningkatan dari 72,4 pada tahun 2019 menjadi 74,91

pada tahun 2024—lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bengkulu—namun stabilitas tersebut belum menjamin keberlanjutan sistem pangan, terutama dari aspek produksi dan distribusi.

Sektor tanaman pangan masih didominasi oleh padi sawah yang dikelola oleh 8.270 unit usaha, namun produktivitasnya rendah karena bergantung pada irigasi tadah hujan, penggunaan benih yang kurang unggul, serta teknik budidaya yang tradisional. Diversifikasi tanaman seperti jagung dan ubi kayu sudah mulai dilakukan, tetapi belum secara masif dan terintegrasi. Sementara itu, sektor hortikultura dengan 7.636 unit usaha memiliki potensi ekonomi tinggi melalui komoditas sayuran dan buah-buahan, tetapi terkendala oleh minimnya fasilitas pascapanen, seperti cold storage, serta akses pasar yang belum berkembang.

Sektor perikanan juga menyimpan peluang besar melalui perikanan tangkap di garis pantai sepanjang lebih dari 70 km dan perikanan budidaya, tetapi modernisasi alat tangkap dan pengolahan hasil laut masih terbatas. Tantangan regenerasi petani juga muncul dengan dominasi usia pelaku usaha tani yang didominasi kelompok usia di atas 45 tahun (63,72%), menandakan rendahnya keterlibatan generasi muda dalam pertanian. Petani milenial hanya mencakup 26,09% atau sekitar 8.103 orang.

Di sisi lain, iklim yang tidak menentu dengan curah hujan rata-rata tahunan 354 mm dan ketergantungan pada irigasi alami menjadikan sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim. Rendahnya adopsi teknologi seperti pertanian presisi, infrastruktur irigasi yang terbatas, dan belum terintegrasinya sistem distribusi pangan juga menambah kompleksitas persoalan. Oleh karena itu, meskipun indikator IKP menunjukkan kondisi yang relatif stabil, sistem pangan Bengkulu Selatan tetap memerlukan penguatan dari hulu hingga hilir agar mampu menjamin keberlanjutan pasokan, kestabilan harga, dan ketahanan terhadap guncangan iklim maupun ekonomi.

I. Masih Lemahnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan kemajuan, namun belum sepenuhnya optimal. Meskipun Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan dari predikat C pada tahun 2022 menjadi BB (Baik) pada 2024, hal ini masih menyisakan tantangan dalam hal efektivitas internal birokrasi dan pelayanan publik yang konsisten berbasis data. Survei Penilaian Integritas (SPI) juga menunjukkan peningkatan dari skor 63,5 (2021) menjadi 72,12 (2024), namun posisi Bengkulu Selatan masih berada di tingkat menengah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu seperti Kepahiang (74,44) dan Rejang Lebong (74,62).

Dari sisi pelayanan publik, nilai Penilaian Kepatuhan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik meningkat dari 72,21 pada tahun 2021 menjadi 95,27 pada 2024, menempatkan Kabupaten Bengkulu Selatan pada kategori Kualitas Tertinggi. Namun, keberhasilan ini belum dibarengi dengan penerapan sistem pengawasan dan evaluasi yang sepenuhnya berbasis bukti serta partisipatif.

Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) juga meningkat dari skor 1,96 (2021) menjadi 2,87 (2024), tetapi capaian ini masih tertinggal jauh dibandingkan rata-rata provinsi (3,92 pada 2024). Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum merata di seluruh perangkat daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan serta pelayanan publik masih perlu diperkuat.

Dengan demikian, meskipun terdapat tren positif dalam upaya reformasi birokrasi dan pelayanan publik, Kabupaten Bengkulu Selatan masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sepenuhnya transparan, efisien, dan akuntabel. Diperlukan penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan literasi digital aparatur, serta

pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi untuk mendorong pemerintahan yang berbasis data dan inklusif.

2.7. Isu Strategis

2.7.1. Isu Strategis Global

Isu strategis global merupakan tantangan atau permasalahan berskala internasional yang berdampak luas dan lintas batas negara, mencakup berbagai aspek seperti lingkungan, ekonomi, sosial, teknologi, kesehatan, dan keamanan. Isu-isu ini muncul sebagai konsekuensi dari globalisasi, kemajuan teknologi, dan ketimpangan pembangunan antarnegara, sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan membutuhkan kerja sama dan komitmen kolektif dari seluruh dunia. Isu-isu ini tidak hanya berdampak pada negara maju, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial-ekonomi di tingkat nasional dan daerah, termasuk dalam aspek ketahanan pangan, bencana alam, inflasi, kemiskinan, dan stabilitas sosial. Pemerintah daerah perlu memahami dan merespons isu strategis global dalam setiap perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah, agar kebijakan yang diambil mampu adaptif terhadap dinamika global dan memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Merujuk dari world bank report, UNICEF Global Report, UN Desa, CDC's Global, Global Climate Report dan European Central Bank terdapat 8 (delapan) isu Global sebagai berikut ini:

A. Ketidak Setaraan Sosial dan Ekonomi Global

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi global merupakan salah satu isu paling mendasar yang terus membayangi tatanan dunia modern. Di tengah kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi global yang pesat, distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya masih jauh dari merata. Data dari World Inequality Database tahun 2024 menunjukkan

bahwa 10% individu terkaya menguasai lebih dari 50% pendapatan nasional di banyak negara besar seperti India, Rusia, dan Amerika Serikat. Hal ini mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan berkeadilan.

Di sisi lain, sekitar 3,4 miliar orang di seluruh dunia hidup dengan pendapatan kurang dari \$6,85 per hari, angka yang mencerminkan kondisi kerentanan sosial dan ekonomi yang sangat tinggi. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada ketidakstabilan sosial dan meningkatnya polarisasi, tetapi juga menjadi hambatan utama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, pendidikan yang merata, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pekerjaan yang layak.

Ketidaksetaraan yang semakin melebar juga menimbulkan risiko jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi global, karena melemahkan daya beli masyarakat luas dan mempersempit basis konsumsi domestik di banyak negara. Selain itu, ketimpangan dapat memperburuk ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintahan, memperkuat populisme, dan menciptakan ketegangan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, isu ini menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan di tingkat global maupun nasional untuk merumuskan strategi redistribusi ekonomi yang adil, memperkuat perlindungan sosial, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga menyentuh lapisan masyarakat paling rentan.

A. Transformasi Digital dan Revolusi Industri 4.0

Transformasi digital dan Revolusi Industri 4.0 telah mengubah secara fundamental cara manusia bekerja, berinteraksi, dan mengelola sumber daya. Perkembangan pesat teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), komputasi awan, big data, dan

otomatisasi cerdas menjadi pendorong utama dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi lintas sektor mulai dari manufaktur, pertanian, hingga layanan publik. Diperkirakan pasar global Industri 4.0 akan mencapai nilai sebesar 279,75 miliar dolar AS pada tahun 2028 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 16,3%. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital telah menjadi kekuatan disruptif yang tak terelakkan dalam lanskap pembangunan global, sekaligus membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inovatif dan terintegrasi.

Namun, di balik potensi besar tersebut, transformasi digital juga membawa tantangan struktural yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah kesenjangan digital, yakni disparitas akses terhadap teknologi antara negara maju dan berkembang, atau bahkan antara kawasan urban dan rural di dalam satu negara. Ketimpangan ini berisiko memperlebar jurang ketidaksetaraan, terutama dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi berbasis digital. Selain itu, meningkatnya pemanfaatan data dan teknologi canggih juga menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang komprehensif, baik terkait perlindungan data pribadi, etika penggunaan AI, maupun keamanan siber. Penguatan kapasitas digital dan penyusunan kebijakan yang adaptif menjadi kunci agar transformasi ini dapat berlangsung secara inklusif, adil, dan berkelanjutan.

B. Krisis Pangan dan Energi

Krisis pangan dan energi telah menjadi isu strategis yang mengancam ketahanan global, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok. Laporan Global Report on Food Crises 2024 mencatat bahwa sekitar 282 juta orang di 59 negara mengalami kelaparan akut, yang sebagian besar disebabkan oleh konflik bersenjata, tekanan ekonomi, dan kejadian iklim ekstrem seperti kekeringan atau banjir.

Lonjakan harga pangan global turut memperparah kerentanan kelompok miskin dan rentan, serta menghambat pencapaian tujuan pengentasan kelaparan dan malnutrisi di berbagai wilayah. Ketidakseimbangan antara produksi dan distribusi pangan juga menunjukkan lemahnya sistem pertanian dan logistik global dalam menghadapi guncangan berskala besar.

Krisis energi global semakin memperkuat tekanan terhadap perekonomian dunia. Ketidakstabilan pasokan energi akibat konflik geopolitik, fluktuasi harga minyak dan gas, serta keterbatasan akses terhadap energi bersih menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kesenjangan energi antarnegara. Harga energi yang tinggi tidak hanya membebani rumah tangga, tetapi juga menurunkan daya saing industri, khususnya di negara-negara berkembang. Situasi ini menunjukkan urgensi transisi menuju energi terbarukan yang lebih stabil, terjangkau, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong investasi dalam ketahanan energi nasional dan sistem pangan yang adaptif terhadap krisis global.

C. Migrasi, Urbanisasi dan Perkotaan Global

Migrasi internasional dan urbanisasi menjadi fenomena global yang terus meningkat seiring dengan perubahan demografi, ketimpangan pembangunan, serta tekanan sosial dan ekonomi di berbagai belahan dunia. Pada tahun 2024, jumlah migran internasional tercatat mencapai 304 juta orang, naik signifikan dari 275 juta pada tahun 2020. Migrasi terjadi karena berbagai faktor seperti konflik, perubahan iklim, kemiskinan, serta harapan terhadap kehidupan yang lebih baik di negara atau kota tujuan. Mobilitas manusia dalam skala besar ini tidak hanya berdampak pada negara tujuan, tetapi juga membawa konsekuensi sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks bagi negara asal maupun transit.

Urbanisasi yang berlangsung dengan sangat cepat telah menciptakan tekanan besar terhadap kota-kota global, terutama di negara berkembang. Pertumbuhan populasi perkotaan yang tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar yang memadai menyebabkan munculnya berbagai permasalahan seperti kemacetan, kekurangan perumahan layak, sanitasi buruk, dan akses terbatas terhadap layanan pendidikan serta kesehatan. Selain itu, urbanisasi juga memperbesar risiko ketimpangan sosial dan segregasi wilayah di dalam kota itu sendiri, yang dapat memicu konflik sosial dan marginalisasi kelompok tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan kebijakan migrasi yang inklusif agar proses urbanisasi dan perpindahan penduduk dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan.

D. Penurunan Kepercayaan Terhadap Institusi Pemerintahan

Penurunan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan menjadi fenomena global yang kian mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hasil survei Pew Research Center pada Mei 2024 menunjukkan bahwa hanya 22% warga Amerika Serikat yang percaya bahwa pemerintah mereka akan melakukan hal yang benar. Kondisi serupa juga terlihat di negara-negara OECD, di mana 44% responden menyatakan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kepercayaan terhadap pemerintah nasional. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketidaktransparanan, korupsi, ketidakefisienan layanan publik, serta kegagalan pemerintah dalam merespons krisis seperti pandemi dan perubahan iklim. Ketika kepercayaan publik menurun, legitimasi pemerintah pun turut tergerus, memicu apatisme politik, penurunan partisipasi warga negara, hingga meningkatnya populisme dan disinformasi.

Dampak dari fenomena global ini juga berpotensi dirasakan di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Bengkulu Selatan. Ketika masyarakat mulai meragukan integritas dan kapabilitas pemerintah daerah, akan muncul hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan, resistensi terhadap kebijakan publik, dan menurunnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi lokal. Kurangnya kepercayaan dapat memperlambat reformasi birokrasi dan melemahkan efektivitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal ini perlu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan responsif. Penguatan komunikasi publik, pemanfaatan teknologi digital, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan kebijakan menjadi langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan daerah yang inklusif dan akuntabel.

E. Ancaman Pandemi dan Kesehatan Global

Ancaman pandemi dan gangguan kesehatan global masih menjadi perhatian utama dunia, bahkan setelah berakhirnya fase krisis dari pandemi COVID-19. Tahun 2024 mencatat setidaknya 17 wabah penyakit menular yang tergolong berbahaya, termasuk kemunculan virus Marburg dan varian baru flu burung (H5Nx), yang menunjukkan bahwa potensi penyebaran penyakit lintas negara tetap tinggi. Selain itu, kasus demam berdarah dilaporkan mencapai lebih dari 12 juta di berbagai wilayah tropis, menjadikannya angka tertinggi sepanjang sejarah. Fenomena ini tidak hanya memperlihatkan lemahnya sistem ketahanan kesehatan global, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya respons cepat, koordinasi lintas negara, serta investasi berkelanjutan dalam sistem pengawasan dan deteksi dini.

Di tengah mobilitas manusia yang semakin tinggi, urbanisasi yang padat, dan perubahan iklim yang memperluas habitat vektor penyakit, sistem kesehatan masyarakat harus mampu beradaptasi secara cepat

terhadap ancaman baru maupun yang terus berkembang. Pandemi tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga menghantam stabilitas ekonomi, pendidikan, dan struktur sosial. Oleh karena itu, pembangunan sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif, termasuk di tingkat lokal seperti Kabupaten Bengkulu Selatan, menjadi sangat penting. Upaya ini meliputi penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan kapasitas tenaga medis, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelacakan dan pengawasan penyakit, serta edukasi masyarakat secara masif agar siap menghadapi risiko kesehatan global di masa depan.

F. Geopolitik dan Fragmentasi Global

Geopolitik dan fragmentasi global menjadi salah satu isu strategis yang semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan antarnegara, terutama antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan internasional yang ditandai dengan meningkatnya proteksionisme, sanksi ekonomi, serta pembentukan blok-blok aliansi baru yang saling bersaing. Situasi ini memicu ketidakstabilan global dan menciptakan ketidakpastian dalam sistem perdagangan internasional, aliran modal, serta rantai pasok global. Data terbaru menunjukkan bahwa fragmentasi geopolitik telah menyebabkan penurunan aliran investasi langsung asing (FDI) global sekitar 3% atau setara dengan €30 miliar pada tahun 2024. Hal ini menjadi indikator bahwa kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dunia turut tergerus akibat eskalasi ketegangan politik antarnegara.

Dampak dari fragmentasi geopolitik ini tidak hanya dirasakan di tingkat global, tetapi juga menular ke tingkat nasional dan daerah. Ketidakpastian dalam perdagangan dan investasi internasional dapat memengaruhi stabilitas harga komoditas, kelangkaan barang impor penting, serta menurunkan daya saing ekspor daerah. Bagi daerah seperti Kabupaten

Bengkulu Selatan, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menarik investasi, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik melalui penguatan sektor ekonomi lokal, diversifikasi sumber pertumbuhan, serta membangun iklim investasi yang kondusif agar tetap resilien terhadap dampak dinamika geopolitik global.

G. Perubahan Iklim dan Krisis Ekologis

Perubahan iklim dan krisis ekologis merupakan tantangan terbesar umat manusia di abad ke-21 yang dampaknya semakin nyata dan luas. Tahun 2024 mencatat rekor suhu rata-rata global tertinggi dalam sejarah, dengan 14,5% permukaan bumi mengalami suhu ekstrem pada bulan Juni. Kenaikan suhu ini mendorong peningkatan intensitas dan frekuensi bencana alam seperti gelombang panas, banjir bandang, kekeringan ekstrem, dan badai tropis. Selain itu, kebakaran hutan besar-besaran, terutama di wilayah tropis seperti Amazon, Afrika Tengah, dan Asia Tenggara, telah menyebabkan kehilangan hutan seluas 6,7 juta hektar angka tertinggi dalam dua dekade terakhir. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memperburuk krisis keanekaragaman hayati, meningkatkan emisi karbon, serta mengganggu siklus air dan pertanian global.

Di tengah tekanan tersebut, krisis ekologis juga memperbesar risiko terhadap ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi, terutama bagi negara berkembang dan daerah yang bergantung pada sumber daya alam. Kabupaten Bengkulu Selatan, misalnya, yang memiliki wilayah pesisir, pertanian, dan hutan, rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti abrasi pantai, gagal panen, dan berkurangnya debit air bersih. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan

prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam seluruh kebijakan sektoral, termasuk melalui konservasi lingkungan, penggunaan energi terbarukan, perlindungan daerah aliran sungai (DAS), serta edukasi masyarakat terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang.

2.7.2. Isu Strategis Nasional

Untuk memastikan sinkronisasi dan harmonisasi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu strategis nasional menjadi hal krusial bagi Kabupaten Bengkulu Selatan. Isu-isu ini tidak hanya merefleksikan arah kebijakan pembangunan nasional dalam dokumen RPJMN 2025–2029, tetapi juga berfungsi sebagai pijakan utama bagi pemerintah daerah dalam merancang rencana pembangunan jangka menengah yang adaptif, relevan, dan sesuai dengan dinamika serta potensi lokal. Kesesuaian antara agenda transformasi nasional dan kondisi riil di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi fondasi penting dalam menentukan strategi pembangunan daerah yang terintegrasi dengan prioritas nasional. Hal ini bertujuan untuk menjamin pembangunan yang efektif, inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan daya saing daerah. Analisis yang komprehensif terhadap isu-isu strategis nasional beserta relevansinya dengan konteks Kabupaten Bengkulu Selatan, agar perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam rangka menyusun isu strategis Kabupaten Bengkulu Selatan, diperlukan analisa yang tepat terhadap isu-isu yang mempengaruhinya. Berdasarkan kajian pada dokumen RPJMN 2025-2029, telah diidentifikasi terdapat lima isu strategis nasional seperti, Isu Transformasi Sosial Nasional, Isu Transformasi Ekonomi Nasional, Isu Transformasi Tata Kelola

Pemerintahan, Isu Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, dan Isu Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi. Berdasarkan isu-isu tersebut secara lebih mendalam akan dibahas isu dan permasalahan yang mendasarinya.

A. Isu Transformasi Sosial Nasional

Tabel II-64 Isu Strategis Transformasi Sosial Nasional

No.	Kategori	Permasalahan
1.	Kesehatan untuk Semua	Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi (189/100.000)
		Stunting masih tinggi (21,6%)
		Prevalensi obesitas terus meningkat (21,8%)
		Persentase aktivitas fisik cukup pada penduduk usia ≥ 10 tahun masih rendah (66,5%)
		Kasus baru TBC peringkat ke-2 dunia (385 per 100.000 penduduk)
		Kasus baru kusta peringkat ke-3 dunia (10.976 kasus baru)
		43,78% puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes sesuai standar
		20,36% RSUD kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang
		78,35% rumah sakit terakreditasi paripurna
63,54% FKTP terakreditasi paripurna		
2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Akses pendidikan belum merata (APK PAUD rendah; tingkat penyelesaian SMA/SMK/MA sederajat 76,79%)
		Kualitas pendidikan masih rendah (skor PISA: membaca 359; matematika 366; sains 383)
		Kualitas fasilitas, dan distribusi guru terbatas (<50% memiliki sertifikat pendidik dan hanya 870 ribu guru)
		Kualifikasi pendidikan angkatan kerja masih rendah (55,43% berpendidikan SMP ke bawah)
		.Rendahnya kualitas lulusan, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah (40,9% yang bekerja di bidang keahlian non tinggi)
		Daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional masih rendah (peringkat 75 dari 132 negara dalam GII pada tahun 2022)
3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Akurasi program bantuan sosial masih rendah
		Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim
		Kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah
		Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan
		Program Jaminan Sosial belum optimal dan inklusif

Agenda pembangunan nasional 2025-2029 menempatkan pemenuhan pelayanan dasar sebagai prioritas utama, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, guna membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Namun, pelaksanaan

agenda ini masih menghadapi tantangan di berbagai sektor yang memerlukan kebijakan yang tepat dan strategi yang terarah.

Sektor kesehatan, Kabupaten Bengkulu Selatan masih menghadapi rendahnya cakupan layanan, tingginya angka penyakit menular dan tidak menular, serta ketimpangan akses antarwilayah. Di bidang pendidikan, persoalan meliputi keterbatasan akses dan kualitas pendidikan, distribusi guru yang belum merata, serta rendahnya daya saing perguruan tinggi. Perlindungan sosial masih menghadapi persoalan akurasi sasaran, keterbatasan layanan bagi kelompok rentan, serta rendahnya literasi dan cakupan program jaminan sosial, terutama bagi pekerja informal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu merumuskan kebijakan yang selaras dengan strategi nasional dan berbasis pada kebutuhan lokal, agar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

B. Isu Transformasi Ekonomi Nasional

Isu-isu strategis transformasi ekonomi nasional mencerminkan tantangan utama yang juga dirasakan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Salah satunya adalah lemahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap ekonomi. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, kegiatan industri masih terbatas, nilai tambah produk pertanian dan perikanan belum optimal, serta pemanfaatan teknologi masih rendah. Potensi perikanan dan pesisir belum dikelola secara maksimal. Diversifikasi usaha di wilayah pesisir masih minim, dan belum ada kebijakan tata kelola ekonomi biru yang kuat. Ekonomi kreatif juga belum berkembang karena kurangnya dukungan terhadap pelaku usaha kreatif, lemahnya promosi, dan terbatasnya akses pasar.

Mayoritas tenaga kerja di Kabupaten Bengkulu Selatan berpendidikan menengah ke bawah dan bekerja di sektor informal. Ini mempengaruhi produktivitas daerah dan menyulitkan pengembangan sektor industri atau

jasa modern. Pertanian sebagai sektor utama juga menghadapi masalah produktivitas rendah, minimnya regenerasi petani muda, dan degradasi lahan.

UMKM dan koperasi di Kabupaten Bengkulu Selatan masih kesulitan dalam mengakses pembiayaan dan memanfaatkan teknologi. Banyak pelaku usaha kecil belum memiliki pendampingan usaha dan belum siap terhubung dengan pasar digital. Sementara itu, infrastruktur dasar di wilayah perdesaan masih belum memadai. Akses terhadap air bersih, sanitasi, dan jalan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan. Transformasi energi ke arah yang lebih bersih juga belum berjalan cepat. Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi energi terbarukan seperti mikrohidro dan surya, namun pemanfaatannya masih sangat terbatas. Kesadaran terhadap pekerjaan hijau pun masih rendah.

Digitalisasi belum merata. Banyak desa masih belum terjangkau jaringan internet yang stabil, sehingga pemanfaatan teknologi informasi belum bisa mendorong ekonomi lokal secara optimal. Sektor pariwisata juga belum mampu berkontribusi signifikan terhadap perekonomian karena keterbatasan akses, promosi, dan infrastruktur. Melihat kondisi ini, Kabupaten Bengkulu Selatan perlu fokus pada pengembangan sektor unggulan yang berbasis potensi lokal. Langkah ini perlu diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan UMKM, percepatan digitalisasi, serta pembangunan infrastruktur dan energi ramah lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis nasional dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel II-65 Isu Strategis Transformasi Ekonomi Nasional

No	Kategori	Permasalahan
1.	Industri	Deindustrialisasi akibat penurunan rasio PDB industri pengolahan
		Rendahnya produktivitas tenaga kerja dalam industri
		Kompleksitas dan daya saing produk industri masih rendah

No	Kategori	Permasalahan
		Adopsi teknologi lama masih dominan
		Mismatch produk dengan permintaan global
		Rendahnya kemampuan inovasi dalam industri
		Tuntutan energi hijau semakin besar dalam industri
2.	Ekonomi Biru	Upaya konservasi kawasan perairan dan pesisir yang belum maksimal
		Rendahnya diversifikasi usaha ekonomi biru
		Kurangnya kebijakan tata kelola pada sektor ekonomi biru
3.	Ekonomi Kreatif	Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal
		Indeks kekayaan intelektual Indonesia masih di bawah rata-rata
		Kurangnya akses dalam komersialisasi kekayaan intelektual
		Kurangnya kemitraan dalam ekosistem ekonomi kreatif
		Daya saing SDM ekonomi kreatif yang masih rendah
4.	Produktivitas Tenaga Kerja	Besarnya angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah
		Ketidaksesuaian keahlian dengan kebutuhan industri
		Belum terbangunnya sistem informasi pasar tenaga kerja yang kredibel
		Stagnasi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
5.	Pertanian	Rendahnya nilai tambah produk pertanian
		Rendahnya produktivitas pertanian
		Rendahnya adopsi teknologi pertanian
		Aging farmer
		Degradasi kualitas lahan
6.	UMKM dan Koperasi	Rendahnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian
		Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam UMKM
		Belum optimalnya akses UMKM terhadap pendanaan
		Rendahnya wirausaha yang berorientasi tumbuh
7.	Perkotaan dan Perdesaan	Belum optimalnya kontribusi perkotaan terhadap ekonomi nasional
		Pola pembangunan perkotaan yang tidak merata
		Kurangnya layanan perkotaan yang memadai
		Masalah sosial-ekonomi di perkotaan
		Degradasi lingkungan perkotaan dan risiko bencana
		Tata kelola wilayah yang belum terpadu
		Ketimpangan kesejahteraan antara perkotaan dan perdesaan
		Perubahan struktur ekonomi akibat pembangunan urbanisasi
8.	Pekerjaan Hijau	Minimnya pemahaman dunia industri terhadap pekerjaan hijau
		Belum terintegrasinya strategi SDM dalam pekerjaan hijau
		Belum memadainya pengembangan keahlian SDM untuk pekerjaan hijau
		Terbatasnya akses pendanaan dalam mendukung pekerjaan hijau
		Lemahnya peran dunia usaha dan akademisi dalam pekerjaan hijau
9.	Pengelolaan Hutan Lestari	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional masih rendah
		Rendahnya produktivitas sektor hasil hutan kayu
		Belum optimalnya pemanfaatan bioekonomi sektor kehutanan
		Kurangnya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan
		Rendahnya dukungan regulasi dalam pengelolaan hutan
		Tingginya tingkat deforestasi
		Belum optimalnya kerja sama multistakeholder dalam pengelolaan hutan
10.	Percepatan Transisi Energi	Ketergantungan terhadap energi fosil yang terus meningkat
		Emisi GRK sektor energi cukup tinggi
		Potensi energi terbarukan masih belum dimanfaatkan optimal
		Kualitas infrastruktur ketenagalistrikan belum memadai
		Kurangnya dukungan regulasi dalam transisi energi

No	Kategori	Permasalahan
		Dominasi pembangkit listrik berbasis fosil masih tinggi
		Ketergantungan pada impor energi meningkat
		Belum optimalnya rantai nilai dalam transisi energi
11.	Digital	Kurangnya pondasi dalam percepatan digitalisasi nasional
		Belum meratanya akses infrastruktur digital
		Kurangnya adopsi teknologi digital dalam industri dan layanan publik
		Kurangnya investasi dalam SDM digital
		Belum optimalnya sistem keamanan siber
12.	Badan Usaha Milik Negara	Rendahnya daya saing BUMN dalam sektor ekonomi
		Kurangnya kontribusi BUMN dalam ekonomi nasional
		Kurangnya efisiensi pengelolaan BUMN dalam pembangunan nasional
13.	Pariwisata	Destinasi wisata menghadapi masalah keberlanjutan budaya
		Aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata masih belum optimal
		Kurangnya kualitas layanan wisata
		Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan akibat minimnya pilihan wisata
		Kurangnya keterampilan SDM pariwisata
14.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Keterbatasan integrasi ekonomi domestik dan global
		Ketimpangan sektor perdagangan antarwilayah
		Kurangnya partisipasi dalam perdagangan global
		Kurangnya akses keuangan untuk mendukung ekspor
		Regulasi yang menghambat ekspor dan investasi
		Ketimpangan sektor perdagangan dalam negeri akibat regulasi yang belum efisien

C. Isu Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan fondasi penting dalam proses perencanaan pembangunan dan telah diakui secara luas sebagai faktor penentu keberhasilan kebijakan publik. Dalam kerangka RPJMN 2025-2029, tata kelola tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup dimensi politik dan hukum. Esensi utama dari tata kelola yang baik terletak pada kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efisien, berintegritas, serta menjamin transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, dan kebermanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.

Perubahan global yang berlangsung cepat, termasuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang bersih dan responsif, menjadikan transformasi tata kelola sebagai agenda yang semakin mendesak.

Pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu menyesuaikan sistem tata kelolanya agar selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan mampu menjaga konsistensi serta kesinambungan program lintas sektor.

Implementasi tata kelola di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan cenderung berfokus pada aspek prosedural dan belum menyentuh substansi tata kelola secara komprehensif. Hal ini terlihat dari rendahnya efektivitas dalam mencegah praktik-praktik korupsi, yang tercermin pula dari menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi secara nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Persoalan tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya distribusi tugas dan kewenangan antarunit kerja menjadi hambatan utama dalam menciptakan birokrasi yang efisien dan adaptif. Keadaan ini berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan, terganggunya kelancaran pelayanan publik, dan berkurangnya efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Intervensi politik dalam birokrasi turut menjadi persoalan yang memengaruhi stabilitas dan kesinambungan kebijakan. Fluktuasi dinamika politik lokal seringkali menyebabkan inkonsistensi arah kebijakan, yang pada akhirnya melemahkan tata kelola yang berbasis prinsip-prinsip good governance. Untuk merespons hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas regulasi, dan menanamkan budaya birokrasi yang profesional serta independen dari pengaruh politik.

Jika berbagai tantangan ini tidak segera diatasi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan akan terus terhambat dan pencapaian pembangunan tidak akan mampu menjawab kebutuhan serta ekspektasi masyarakat. Reformasi tata kelola yang berkelanjutan perlu dikawal sebagai

dasar yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan yang modern, transparan, akuntabel, dan kompetitif. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel II-66. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

No.	Kategori	Permasalahan
1	Integritas Partai Politik	Integritas partai politik belum terwujud karena standar etika belum ada, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi belum terlembaga, rekrutmen politik belum terbuka, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan belum optimal.
2	Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan	Lemahnya kontrol dalam pencegahan di sektor-sektor rawan korupsi serta rendahnya budaya antikorupsi yang menghambat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.
3	Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat serta belum memadainya kompetensi digital penyelenggara dan pengguna pelayanan publik.
4	Sistem Penggajian Tunggal	Disparitas kesejahteraan ASN pusat dan daerah, remunerasi ASN belum memenuhi prinsip kompetitif, manfaat pensiun ASN masih rendah, dan adanya dual sistem penggajian ASN.
5	Manajemen Talenta	Penerapan sistem merit belum optimal, belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D, dan 34% ASN berusia 50 tahun ke atas (aging).
6	Kualitas Regulasi	Kondisi hiper regulasi, kewenangan pengelolaan regulasi tersebar di beberapa Kementerian, SDM di bidang regulasi belum memadai, serta partisipasi dalam pembentukan regulasi belum optimal.
7	Integrasi Proses Bisnis	Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi, tidak efektif, serta tumpang tindih program yang memboroskan anggaran.

D. Isu Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Sistem hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, belum maksimalnya penerapan hak asasi manusia, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Akibatnya, kepatuhan hukum masih rendah, dan akses terhadap keadilan belum merata, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kelompok rentan. Perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk memperkuat keamanan dan kesadaran bela negara, namun belum didukung oleh sistem yang merata. Demokrasi lokal masih bersifat

prosedural, ditandai dengan rendahnya partisipasi masyarakat, maraknya politik uang, serta belum kuatnya peran lembaga legislatif. Nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan juga belum sepenuhnya membentuk kehidupan sosial dan politik masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu memperkuat tata kelola hukum, politik, dan ekonomi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sinergi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan agar pembangunan bisa berjalan lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel II-67. Isu Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

No.	Kategori	Permasalahan
1	Stabilitas Makro	Risiko climate action; deglobalisasi; krisis lapangan pekerjaan; krisis utang; konfrontasi geoekonomi; asset bubble burst; inflasi tinggi; tingkat suku bunga tinggi; masih geopolitik; disrupsi rantai pasok; perlemahan ekonomi global; transisi demografi; potensi pandemi ke depan; rendahnya penerimaan perpajakan; terbatasnya belanja negara; serta imbal hasil obligasi yang tinggi.
2	Demokrasi	Demokrasi masih prosedural dengan ciri: kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; politik electoral masih memiliki permasalahan seperti politik uang dan polarisasi isu SARA; serta fungsi-fungsi asasi demokrasi belum terlaksana optimal.
3	Politik Luar Negeri	Dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri; konflik intra dan antar negara; disrupsi rantai pasok global; tren global economic decoupling; belum selesainya perundingan batas wilayah; serta postur dan sinergi diplomasi Indonesia yang belum ideal.
4	Hukum	Praktik penegakan hukum yang belum terpadu; efisiensi rendah; HAM belum menjadi dasar utama; rendahnya budaya hukum masyarakat akibat minimnya literasi dan pemberdayaan; keterbatasan akses terhadap keadilan; serta kelembagaan penegak hukum yang belum profesional.
5	Keamanan	Ancaman insurgensi; konflik sosial; serangan terorisme; pelanggaran batas wilayah; kejahatan transnasional; disrupsi teknologi; pelanggaran hukum di wilayah perbatasan; serta perlindungan IIVN dari serangan siber.
6	Pertahanan	Dampak konflik hegemoni; perubahan tipologi perang semakin kompleks; perang berbasis Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, dan High Yield Explosive (CBRNE); serta meningkatnya respons negara-negara dalam memperkuat industri pertahanan.

E. Isu Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan perlu diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara nilai agama, budaya lokal, dan pelestarian lingkungan. Nilai-nilai tersebut penting sebagai dasar dalam memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat. Peran sumber daya manusia, khususnya dari lingkungan keluarga, sangat penting dalam membentuk karakter dan etika masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan harus melibatkan semua kelompok secara setara, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, terutama dalam akses terhadap layanan dasar dan peluang pembangunan.

Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan tekanan terhadap sumber daya alam, Kabupaten Bengkulu Selatan menghadapi tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Alih fungsi hutan yang tidak terkendali mengganggu fungsi ekosistem dan menurunkan kualitas lingkungan. Petani dan nelayan juga belum menikmati peningkatan kesejahteraan karena rendahnya produktivitas dan akses pasar. Di sisi lain, pengelolaan sampah menjadi isu yang mendesak karena kapasitas TPA mendekati batas maksimal tanpa solusi pengelolaan yang terintegrasi.

Kabupaten Bengkulu Selatan juga menghadapi risiko perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian, perikanan, air bersih, dan kesehatan masyarakat. Masalah bencana alam, kelangkaan air, serta infrastruktur sanitasi yang belum memadai memperparah kondisi sosial dan ekonomi warga. Untuk itu, arah pembangunan daerah harus dirancang secara menyeluruh dengan mengedepankan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan yang berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel II-68. Isu Ketahanan Sosial dan Politik

No.	Kategori	Permasalahan
1.	Isu Agama	Nilai agama belum optimal dalam pembangunan, wawasan dan identitas nasional belum maju, serta rendahnya literasi keagamaan.
2.	Isu Budaya	Karakter dan jati diri bangsa menghadapi tantangan negatif budaya global, nilai Pancasila belum terinternalisasi, serta rendahnya peran budaya dalam pembangunan.
3.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Belum optimalnya peran keluarga, rendahnya pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan, serta masih adanya ketimpangan gender.
4.	Pangan	Belum idealnya kualitas pangan, rendahnya kapasitas produksi pangan, serta tata kelola sistem pangan yang masih lemah.
5.	Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati	Kualitas air, udara, dan lahan semakin menurun, meningkatnya pembuangan limbah ilegal, serta ancaman kepunahan spesies tumbuhan dan hewan.
6.	Energi	Akses energi yang belum merata, pemanfaatan energi baru-terbarukan masih rendah, serta tata kelola energi yang belum efektif.
7.	Bencana dan Perubahan Iklim	Frekuensi bencana meningkat drastis, jutaan keluarga tinggal di daerah rawan bencana, serta dampak perubahan iklim yang makin luas.

2.7.3. Isu Strategis Provinsi Bengkulu

Dalam upaya memperkuat keterpaduan antara kebijakan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota, sinkronisasi serta harmonisasi perencanaan menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Provinsi Bengkulu, sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa arah kebijakan yang dirumuskan sejalan dengan prioritas daerah, termasuk Kabupaten Bengkulu Selatan. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap isu-isu strategis tingkat provinsi menjadi kunci dalam merancang perencanaan pembangunan daerah yang adaptif, kontekstual, dan berdampak nyata. Dengan membangun keterkaitan yang kuat antara isu provinsi dan kebutuhan lokal, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi

pembangunan yang tidak hanya sinkron dengan agenda provinsi, tetapi juga mampu menjawab tantangan dan mengoptimalkan potensi wilayah secara berkelanjutan. Adapun terdapat 6 (enam) isu strategis Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance* dalam tata kelola pemerintahan.
2. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah.
3. Kurangnya pengembangan hilirisasi komoditas unggulan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
4. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang merata dan berkualitas
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta mitigasi kebencanaan.
6. Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas

Provinsi Bengkulu saat ini dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan. Salah satu isu utama adalah belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance* dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini tercermin dari masih adanya praktik birokrasi yang belum efisien, rendahnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Pada sektor ketahanan pangan, Provinsi Bengkulu juga menghadapi tantangan serius. Ketergantungan pada pasokan luar daerah, belum kuatnya sistem produksi lokal, serta lemahnya infrastruktur pendukung

menjadikan ketahanan pangan masih rentan terhadap gejolak harga dan krisis distribusi. Hal ini diperparah dengan kurang optimalnya pengembangan hilirisasi komoditas unggulan, seperti kopi, karet, sawit, dan perikanan. Potensi besar sektor-sektor ini belum mampu dimaksimalkan untuk menciptakan nilai tambah, memperkuat industri lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar dan strategis. Sebagian wilayah di Bengkulu masih mengalami keterbatasan akses jalan, air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi. Ketimpangan infrastruktur ini berdampak pada rendahnya konektivitas antarwilayah dan lambatnya pertumbuhan kawasan potensial. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal, serta lemahnya sistem mitigasi kebencanaan, membuat wilayah ini rentan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Ketimpangan juga terjadi dalam aspek sosial, khususnya pada akses dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Ketidakmerataan ini tidak hanya memperlebar jurang ketimpangan antarwilayah, tetapi juga menghambat terwujudnya pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan mengidentifikasi dan memahami isu-isu strategis di atas, pemerintah kabupaten, termasuk Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan arah kebijakan provinsi. Pendekatan ini akan memastikan sinergi yang kuat antar level pemerintahan dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

2.7.4. Isu Strategis Kabupaten Bengkulu Selatan

Perumusan isu strategis yang relevan dan berdampak nyata harus memperhatikan keterkaitan antara potensi dan permasalahan yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Selatan dengan dinamika isu-isu lingkungan yang lebih luas, baik yang bersumber dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maupun isu-isu global, nasional, dan Provinsi Bengkulu. KLHS menjadi acuan utama dalam mengidentifikasi isu-isu lingkungan hidup yang harus direspons secara bijak. Di samping itu, dinamika pembangunan pada level global, nasional, dan provinsi juga menjadi pertimbangan penting guna memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap tantangan eksternal, tetapi juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berbasis pada potensi lokal. Tabel berikut menyajikan keterkaitan antara potensi dan permasalahan daerah dengan isu lingkungan dinamis (KLHS, global, nasional, dan provinsi), yang kemudian dirumuskan menjadi isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan:

Tabel II-69 Perumusan Isu Strategis Kabupaten Bengkulu Selatan

Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis				Isu Strategis Kabupaten Bengkulu Selatan
	Isu KLHS	Global	Nasional	Provinsi Bengkulu	
Belum optimalnya kualitas, keterjangkauan dan pemerataan infrastruktur	Pelayanan infrastruktur dasar air minum yang belum optimal		Transformasi Ekonomi; Isu Ketahanan Sosial,	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang merata dan berkualitas.	Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Terbatasnya Konektivitas Antarwilayah
Belum Optimalnya Produktivitas Ekonomi Dan Daya Saing Daerah yang Berwawasan Lingkungan	Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal; Pengelolaan lingkungan hidup, terutama sampah yang belum optimal; Daerah rawan bencana alam	Cuaca Ekstrem; Perubahan Perubahn Kritis Terhadap Ekosistem; Biodiversity dan Gangguan Ekosistem; Krisis Sumber Daya Alam; Polarisasi Sosial	Transformasi Ekonomi; Budaya dan Ekologi	Kurangya pengembangan hilirisasi komoditas unggulan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.; Belum optimalnya ketahanan pangan daerah	Rendahnya Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Lokal
					Ketahanan Pangan Daerah Rentan terhadap Krisis Iklim dan Degradasi Lahan
					Kualitas Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana yang Meningkat
Belum meratanya akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan	Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal	Involuntary Migration; Dampak Buruk Teknologi Berbasis AI	Isu Ketahanan Sosial,	Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas.	Kualitas SDM Masih Rendah dan Tidak Merata

Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis				Isu Strategis Kabupaten Bengkulu Selatan
	Isu KLHS	Global	Nasional	Provinsi Bengkulu	
Belum optimalnya partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan	Angka kemiskinan yang masih tinggi	Polarisasi Sosial	Transformasi Sosial	Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas.	Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Ekonomi
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan		Misinformasi dan Disinformasi	Transformasi Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good and clean governance dalam tata kelola pemerintahan	Keterbatasan Digitalisasi Layanan dan Efisiensi Birokrasi

1) Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Terbatasnya Konektivitas Antarwilayah

Isu strategis ini menjadi krusial karena menyangkut keadilan spasial, efektivitas pembangunan, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM), meskipun terjadi peningkatan status dari “Cukup” (2020) menjadi “Maju” (2024) dengan skor 0,7411, ketimpangan antardesa masih nyata. Hingga 2024, hanya Kecamatan Air Nipis yang mencapai status desa mandiri, sementara mayoritas desa lainnya, khususnya di wilayah perbukitan dan pesisir seperti Kecamatan Kedurang, Seginim, dan Bunga Mas, masih berada pada kategori berkembang atau tertinggal. Ketimpangan ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam distribusi hasil pembangunan yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi.

Salah satu indikator ketimpangan yang paling mencolok adalah kondisi infrastruktur jalan. Berdasarkan data Dinas PUPR, dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 1.158,14 km, hanya 112,47 km atau 9,71% yang tergolong dalam kondisi mantap, dan bahkan menurut data lain hanya 42,37% dari 929,39 km jalan kabupaten yang tergolong mantap hingga

tahun 2023. Artinya, lebih dari separuh jaringan jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Hal ini berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat desa, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta distribusi hasil pertanian dan komoditas unggulan dari wilayah-wilayah seperti Pino Raya dan Kedurang ke pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perkotaan Manna.

Rendahnya kualitas dan keterhubungan jaringan jalan strategis seperti Manna-Tais, Manna-Krui, dan Manna-Pagaralam juga menjadi hambatan utama dalam mengintegrasikan wilayah hinterland dengan pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Keterbatasan konektivitas antarwilayah ini tidak hanya memperlemah distribusi logistik dan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan, tetapi juga memperbesar risiko munculnya kantong-kantong kemiskinan baru dan ketimpangan sosial yang lebih luas.

Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029 perlu menetapkan strategi peningkatan konektivitas dan pemerataan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama. Intervensi seperti pembangunan jalan mantap, jembatan penghubung, SPAM perkotaan, rumah bersanitasi, dan penataan permukiman kumuh harus diintegrasikan dengan pemberdayaan desa dan penguatan kawasan perdesaan prioritas (KPP). Dengan pendekatan ini, pembangunan akan lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan, serta mampu memperkuat daya saing wilayah secara menyeluruh.

2) Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Ekonomi

Isu strategis mengenai Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan sangat penting untuk diangkat karena berimplikasi langsung pada keberlanjutan pembangunan dan keadilan sosial. Berdasarkan data dokumen, angka kemiskinan

Bengkulu Selatan pada tahun 2024 masih tercatat sebesar 17,10%, jauh di atas rata-rata Provinsi Bengkulu (13,56%) maupun nasional (sekitar 9,36%). Meskipun tren penurunan tampak sejak 2018, kecepatan penurunan angka kemiskinan sangat lambat dan stagnan, menunjukkan bahwa strategi saat ini belum cukup efektif menjangkau akar permasalahan kemiskinan struktural.

Ketimpangan sosial ekonomi juga tercermin dalam fluktuasi nilai Indeks Gini yang menunjukkan adanya ketidakmerataan pendapatan di masyarakat. Nilai Indeks Gini Bengkulu Selatan sempat menurun dari 0,36 (2018) menjadi 0,30 (2022), tetapi kemudian naik kembali ke 0,35 (2023), sebelum kembali turun ke 0,30 pada 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya dinikmati secara merata, terutama oleh masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman seperti Kedurang, Air Nipis, dan Seginim. Permasalahan ini diperparah oleh terbatasnya akses terhadap layanan dasar, rendahnya jangkauan program perlindungan sosial, minimnya lapangan pekerjaan produktif, dan keterbatasan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, serta sarana pendidikan dan kesehatan yang layak.

Kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan antar generasi dan menurunkan mobilitas sosial masyarakat miskin. Oleh karena itu, isu ini harus menjadi prioritas dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029, melalui strategi lintas sektor yang mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyediaan pekerjaan layak, perluasan cakupan jaminan sosial, dan peningkatan kualitas layanan dasar. Pendekatan inklusif dan berbasis data perlu diadopsi untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang paling rentan, dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

3) Rendahnya Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Lokal

Isu strategis ini menjadi sangat krusial karena menyangkut struktur ekonomi daerah yang masih sangat tergantung pada sektor pertanian tradisional berskala kecil, namun belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki 31.384 unit usaha pertanian perorangan yang mencakup 99,92% dari total usaha pertanian, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kecamatan Pino Raya (5.191 unit), Seginim (3.963 unit), dan Kota Manna (3.307 unit). Sebagian besar usaha ini masih bersifat tradisional dan subsisten.

Sektor pertanian yang menyerap sekitar 49% tenaga kerja ini masih menghadapi tantangan produktivitas akibat terbatasnya akses terhadap teknologi, sarana produksi, infrastruktur pascapanen, dan pasar. Subsektor perkebunan mendominasi dengan 73,79% dari unit usaha, khususnya kelapa sawit (15.178 unit) dan kopi (7.458 unit), namun sebagian besar hasilnya dijual dalam bentuk mentah tanpa proses hilirisasi. Sementara itu, subsektor tanaman pangan seperti padi sawah (8.270 unit usaha) masih terkendala oleh irigasi yang belum optimal, penggunaan benih lokal kurang unggul, serta minimnya pupuk bersubsidi. Subsektor hortikultura (7.636 unit usaha) pun menghadapi tantangan logistik, penyimpanan, dan akses pasar, sehingga menyebabkan tingginya kehilangan hasil panen.

Dalam konteks makro, meskipun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi kontributor utama PDRB (Rp1.308,51 miliar pada 2024), transformasi ekonomi menuju sektor pengolahan masih sangat lambat. Industri pengolahan hanya menyumbang sekitar 2,91% dari PDRB meski nilainya meningkat dari Rp112,22 miliar (2020) menjadi Rp121,31 miliar (2024). Selain itu, mayoritas tenaga kerja di sektor ini berpendidikan menengah ke bawah dan bekerja di sektor informal, sehingga sulit untuk mengadopsi inovasi dan teknologi baru. Tantangan regenerasi juga

muncul, karena 63,72% pelaku usaha pertanian berusia di atas 45 tahun, sementara hanya 26,09% tergolong petani milenial.

Potensi pengembangan ekonomi lokal melalui UMKM dan ekonomi kreatif juga belum optimal. Padahal, kontribusi sektor ini terhadap PDRB meningkat dari 6,3% (2020) menjadi lebih dari 7,5% pada 2024. Namun, rendahnya akses pembiayaan, teknologi olahan, dan platform digital masih menjadi hambatan utama. Hal serupa juga terjadi pada subsektor perikanan dan kehutanan yang menyimpan peluang besar namun belum tergarap maksimal akibat kurangnya alat tangkap modern, fasilitas penyimpanan, dan sistem distribusi.

Jika tidak diintervensi secara strategis, kondisi ini akan memperlebar kesenjangan ekonomi antarwilayah dan kelompok sosial, serta menahan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, modernisasi sektor pertanian dan perikanan, hilirisasi komoditas unggulan, pemberdayaan UMKM berbasis lokalitas, serta pengembangan kawasan agropolitan dan urban farming perlu menjadi prioritas dalam RPJMD 2025-2029. Tujuan utamanya adalah memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kontribusi sektor agraris terhadap PDRB menuju 40% pada 2045, dan menciptakan ekonomi lokal yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

4) Kualitas SDM Masih Rendah dan Tidak Merata

Isu strategis mengenai rendahnya kualitas SDM dan ketimpangannya antarwilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan juga tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun IPM Bengkulu Selatan mengalami peningkatan dari 67,78 (2020) menjadi 69,49 (2023), angka ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu sebesar 71,76, apalagi jika dibandingkan dengan IPM nasional sebesar 74,39. Kategori IPM Bengkulu Selatan masih tergolong "sedang", dan ketertinggalan ini

menunjukkan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat belum merata dan belum optimal.

Kontribusi komponen utama IPM menunjukkan tantangan yang saling terkait. Harapan Lama Sekolah (HLS) stagnan di angka 13,66 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hanya 9,42 tahun, yang artinya masih banyak penduduk usia dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan menengah. Dari sisi kesehatan, Umur Harapan Hidup pada 2023 tercatat 69,90 tahun, masih di bawah rata-rata nasional yang sudah menyentuh angka lebih dari 71 tahun. Di sisi pengeluaran, pengeluaran per kapita riil masyarakat per tahun meningkat dari Rp9,87 juta (2020) menjadi Rp10,81 juta (2023), tetapi belum menunjukkan lonjakan signifikan sebagai penopang daya beli masyarakat.

Ketimpangan kualitas SDM juga tampak dalam distribusi capaian IPM antar kecamatan. Kecamatan Manna sebagai pusat kota mencatat IPM tertinggi, sedangkan wilayah seperti Kedurang Ilir, Seginim, dan Air Nipis tertinggal dalam hal pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup. Ketimpangan ini berpotensi memperlebar jurang kesenjangan sosial dan ekonomi apabila tidak segera ditangani melalui kebijakan afirmatif.

Dengan demikian, peningkatan IPM secara berkelanjutan dan merata harus menjadi fokus utama dalam RPJMD 2025-2029. Hal ini memerlukan upaya penguatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, peningkatan keterjangkauan layanan publik, pengembangan pendidikan vokasi berbasis potensi daerah, serta intervensi gizi dan kesehatan keluarga. Upaya tersebut bukan hanya akan meningkatkan skor IPM, tetapi juga memperkuat fondasi daya saing daerah dalam jangka panjang.

5) Ketahanan Pangan Daerah Rentan terhadap Krisis Iklim dan Degradasi Lahan

Isu strategis mengenai Ketahanan Pangan Daerah yang Rentan terhadap Krisis Iklim dan Degradasi Lahan menjadi semakin krusial dalam konteks pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkulu Selatan. Meskipun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) daerah menunjukkan tren peningkatan dari 72,4 (2019) menjadi 74,91 pada tahun 2024 dan secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Bengkulu, stabilitas ini masih menyembunyikan kerentanan struktural pada sisi produksi, distribusi, dan keberlanjutan sistem pangan.

Kabupaten Bengkulu Selatan sangat bergantung pada sektor pertanian tradisional, khususnya tanaman pangan seperti padi sawah yang dikelola oleh 8.270 unit usaha. Namun, produktivitas subsektor ini masih rendah karena keterbatasan irigasi, dominasi penggunaan benih varietas lokal, dan terbatasnya pupuk bersubsidi. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi permukiman dan lahan non-pertanian juga mempersempit ruang produksi pangan yang strategis. Hal ini diperparah oleh kondisi infrastruktur irigasi yang tidak memadai, termasuk pada dua kawasan strategis yakni D.I. Air Nipis Seginim dan D.I. Air Seluma, yang berfungsi menopang ketahanan pangan regional. Rehabilitasi dua Daerah Irigasi (D.I.) ini menjadi sangat penting karena keduanya memiliki peran vital dalam intensifikasi pertanian sawah dan penyediaan pasokan pangan pokok di wilayah perdesaan.

Selain faktor teknis, tantangan terbesar datang dari perubahan iklim dan degradasi lahan. Berdasarkan dokumen RPJMD, Kabupaten Bengkulu Selatan menghadapi ancaman abrasi pantai, gagal panen akibat kekeringan, serta menurunnya debit air bersih yang berdampak langsung terhadap produktivitas sektor pertanian dan keberlangsungan sistem pangan. Indeks pengaturan dan perlindungan terhadap bencana ekologis

juga menunjukkan skor rendah (56,21%), menandakan lemahnya kapasitas adaptif wilayah terhadap risiko bencana iklim seperti banjir dan kekeringan.

Secara kelembagaan, kapasitas sistem cadangan pangan dan logistik masih lemah. Minimnya fasilitas penyimpanan, pengolahan, dan distribusi pangan modern (misalnya gudang berpendingin atau silo) berkontribusi pada tingginya tingkat kehilangan hasil panen dan fluktuasi harga pangan. Jika tidak diatasi, kerentanan ini akan melemahkan ketahanan pangan jangka panjang dan meningkatkan risiko kelangkaan pangan akibat gangguan iklim dan krisis global.

6) Kualitas Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana yang Meningkat

Isu strategis mengenai Kualitas Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana yang Meningkat menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan karena menyangkut keberlanjutan ekologis, keamanan warga, serta ketangguhan wilayah menghadapi perubahan iklim dan bencana alam. Berdasarkan data Indeks Kualitas Air (IKA), Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir, dari 55,00 pada 2021 menjadi stagnan di angka 45,00 pada 2022 dan 2023, jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 48,98 pada 2023. Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) terjaga di atas 92, namun ketidakseimbangan antara kualitas udara dan kualitas air menunjukkan permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang belum holistik.

Selain itu, daya dukung ekosistem wilayah juga menghadapi tekanan signifikan. Berdasarkan pendekatan indeks jasa ekosistem, Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan kinerja rendah pada fungsi pengolahan dan penguraian limbah (50,09%), ketersediaan ruang hidup (43,83%), dan perlindungan terhadap bencana (56,21%). Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas wilayah mengalami tekanan lingkungan akibat pembangunan yang belum disertai infrastruktur dan pengelolaan limbah yang memadai.

Dari sisi kerawanan bencana, Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk daerah dengan potensi risiko tinggi terhadap banjir, tanah longsor, dan gempa bumi karena letaknya di jalur Cincin Api Pasifik dan didominasi oleh topografi perbukitan serta sungai. Meskipun terdapat tren positif pada Indeks Risiko Bencana (IRB)—yang menunjukkan penurunan dari 186,40 pada 2022 menjadi 165,18 pada 2023 dan 149,80 pada 2024—kabupaten ini tetap menempati posisi keempat dengan risiko tertinggi dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Artinya, risiko tetap tinggi dan belum berada pada kategori aman.

Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya ruang terbuka hijau, tekanan terhadap kawasan hutan, dan tingginya alih fungsi lahan, yang mempercepat degradasi lingkungan dan menurunkan kapasitas ekosistem dalam menyerap dampak perubahan iklim. Sebagian wilayah pesisir juga menghadapi ancaman abrasi, sementara wilayah perbukitan rawan longsor dan desa-desa di dataran rendah terancam banjir akibat limpasan permukaan dan pendangkalan sungai.

Oleh karena itu, kebijakan strategis yang perlu diambil meliputi penguatan sistem mitigasi dan adaptasi berbasis ekosistem, peningkatan pengelolaan limbah dan kualitas air, rehabilitasi ruang terbuka hijau dan daerah aliran sungai, serta penguatan infrastruktur tahan bencana dan sistem peringatan dini. Kebijakan ini tidak hanya penting untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana, tetapi juga menjadi prasyarat bagi pembangunan yang berkelanjutan, sehat, dan berkeadilan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

7) Keterbatasan Digitalisasi Layanan dan Efisiensi Birokrasi

Isu strategis mengenai Keterbatasan Digitalisasi Layanan dan Efisiensi Birokrasi menjadi sangat penting dalam konteks peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Meskipun terdapat kemajuan, data menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan belum merata di seluruh perangkat daerah. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bengkulu Selatan menunjukkan tren peningkatan dari skor 1,96 (kategori Cukup) pada tahun 2021 menjadi 2,87 (kategori Baik) pada tahun 2024. Namun demikian, capaian ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang telah mencapai skor 3,92 dengan predikat “Sangat Baik” pada tahun yang sama, dan juga masih tertinggal dari kabupaten/kota lain seperti Rejang Lebong dan Bengkulu Utara yang telah melampaui skor 3,0.

Perkembangan ini mengindikasikan bahwa transformasi digital di Bengkulu Selatan belum optimal. Masih banyak layanan publik yang dijalankan secara konvensional, integrasi data antarperangkat daerah belum kuat, dan pemanfaatan sistem informasi berbasis bukti untuk pengawasan serta evaluasi kinerja belum merata. Hal ini juga didukung oleh hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi yang menunjukkan tren perbaikan dari predikat C (2022), B (2023), hingga BB atau Baik (2024). Meski mencerminkan perbaikan, transformasi birokrasi belum sepenuhnya mengarah pada pelayanan publik yang adaptif, efisien, dan akuntabel.

Isu ini semakin mendesak karena infrastruktur teknologi informasi belum menjangkau seluruh wilayah, terutama desa-desa yang belum memiliki akses internet yang stabil. Hal ini membatasi adopsi layanan digital oleh masyarakat dan memperlemah upaya integrasi layanan secara daring. Tanpa sistem digital yang kuat dan inklusif, tantangan dalam pengawasan partisipatif, perencanaan berbasis data, dan efisiensi anggaran akan terus berlanjut.

Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029 perlu menempatkan transformasi digital sebagai pilar utama reformasi tata kelola. Penguatan infrastruktur digital, percepatan integrasi sistem informasi, penyederhanaan layanan berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas

SDM digital di tingkat perangkat daerah menjadi prioritas untuk menciptakan birokrasi yang lincah, adaptif, dan transparan. Pendekatan ini akan memperkuat posisi Bengkulu Selatan dalam ekosistem pemerintahan digital nasional serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

A. Visi dan Misi

Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan

Visi “Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan” menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan wilayah yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi juga memiliki daya saing yang tinggi di tingkat regional maupun nasional, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan. Kemandirian dibangun melalui penguatan ekonomi lokal yang berbasis potensi unggulan daerah seperti pertanian, industri kreatif, dan pariwisata. Sektor-sektor ini diarahkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Daya saing diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi daerah, serta efisiensi tata kelola yang mendukung iklim investasi dan pelayanan publik yang kompetitif. Pemerataan pembangunan antara desa dan kota dilakukan melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan terjangkau, agar seluruh wilayah tumbuh secara seimbang dan saling menguatkan. Dalam jangka panjang, keberlanjutan dijaga melalui pemenuhan hak dasar masyarakat atas layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan nilai-nilai budaya dan harmoni sosial. Semua upaya tersebut bertumpu pada tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan partisipatif,

sehingga arah pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat terus berjalan secara konsisten, adaptif, dan berkesinambungan menuju masa depan yang lebih tangguh dan inklusif.

Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 untuk mencapai:

- **Bengkulu Selatan Mandiri**

Mewujudkan Bengkulu Selatan yang mandiri berarti membangun kemampuan daerah untuk tumbuh dan berkembang atas dasar kekuatan sendiri, terutama melalui penguatan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan wilayah. Kemandirian ini diarahkan melalui pembangunan desa dan kota secara setara dengan pengembangan infrastruktur yang merata dan berkualitas sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kemandirian ekonomi didorong melalui diversifikasi sektor unggulan seperti pertanian, ekonomi kreatif, dan pariwisata yang berdaya saing, sehingga mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, serta menurunkan kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah. Kemandirian juga diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan akuntabel yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Seluruh upaya ini diarahkan agar Kabupaten Bengkulu Selatan tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri dan berdaya tahan terhadap berbagai tantangan pembangunan.

- **Bengkulu Selatan Berdaya Saing**

Mewujudkan Bengkulu Selatan yang berdaya saing berarti membangun kemampuan daerah dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dan mampu bersaing secara produktif di tingkat

regional maupun nasional. Daya saing ini diarahkan melalui penguatan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi strategis seperti pertanian, industri kreatif, dan pariwisata yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperluas basis ekonomi lokal. Penguatan daya saing juga dilakukan dengan mendorong stabilitas ekonomi makro, peningkatan ketahanan pangan, serta kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan daerah. Selain itu, reformasi tata kelola pemerintahan dilakukan secara konsisten untuk menciptakan lingkungan usaha yang efisien, transparan, dan digital, sehingga mendorong iklim investasi yang sehat serta mempercepat transformasi ekonomi daerah. Dengan demikian, Kabupaten Bengkulu Selatan ditargetkan menjadi daerah yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga kompetitif, tangguh, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan ke depan.

- **Bengkulu Selatan Berkelanjutan**

Bengkulu Selatan yang berkelanjutan tercermin dalam pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan sumber daya alam, kualitas hidup masyarakat, serta tatanan sosial dan budaya. Keberlanjutan diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lingkungan keluarga yang sehat dan berbudaya. Pelayanan dasar yang terjangkau dan merata tidak hanya membentuk sumber daya manusia yang unggul, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Selain itu, penguatan ketahanan pangan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dilakukan secara berwawasan lingkungan agar

produktivitas tetap terjaga tanpa mengorbankan kelestarian. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan digital dan transparan mendorong kesinambungan reformasi birokrasi dan akuntabilitas layanan publik. Semua ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan Bengkulu Selatan sebagai daerah yang tumbuh secara harmonis, inklusif, dan tangguh dari waktu ke waktu.

Visi tersebut menjadi arah utama pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Visi ini tidak hanya mencerminkan cita-cita daerah untuk tumbuh secara otonom dan bertumpu pada potensi lokal, tetapi juga menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah merumuskan empat misi strategis yang mencerminkan keterpaduan antara arah kebijakan nasional dan regional.

Dalam perumusan misi dilakukan pertimbangan secara substansial terhadap Asta Cita yang menekankan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, serta ketahanan sosial budaya dan lingkungan. Selain itu misi juga disusun selaras dengan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2045 dan 17 arah pembangunan sebagai kerangka jangka menengah yang operasional. Selain itu, misi RPJMD ini memperhatikan arah pembangunan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029, sehingga pembangunan daerah berjalan selaras dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan regional.

Adapun perumusan Misi RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mempertimbangkan berbagai dokumen terserbut tergambar dalam tabel dihalaman selanjutnya berikut ini:

Tabel III-1. Perumusan Misi RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029

Visi RPJMD Bengkulu Selatan	Misi RPJMD Bengkulu Selatan	Asta Cita	Misi RPJMD Bengkulu Selatan	17 arah pembangunan	Misi RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029
Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan	Mewujudkan pembangunan desa dan kota yang setara melalui pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (Misi 1)	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur (Asta Cita 3) ; Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (Asta Cita 6)	Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang merata dengan perencanaan yang berkesinambungan; dan Mewujudkan pelestarian alam untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup yang baik dan ketahanan daerah terhadap bencana	IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi; IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas; dan IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Misi 2)
	Mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, industri kreatif, dan pariwisata dalam meningkatkan daya saing daerah (Misi 2)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (Asta Cita 2) ; Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (Asta Cita 5)	Mewujudkan transformasi ekonomi menuju kemandirian pangan dan perekonomian yang merata dan berdaya saing	IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; IE5 Penerapan Ekonomi Hijau; IE11 Stabilitas Ekonomi Makro; dan IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan (Misi 4)
	Menyediakan layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas untuk membentuk sumber daya manusia dan lingkungan masyarakat yang unggul dan inklusif (Misi 3)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) (Asta Cita 1) ; Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (Asta Cita 4) ; dan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (Asta Cita 8)	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya	IE1 Kesehatan untuk Semua; IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata; IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif; IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial; IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; dan IE14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman (Misi 3)
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan (Misi 4)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba (Asta Cita 7)	Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang profesional dan berkualitas untuk pelayanan publik prima	IE6 Transformasi Digital; IE9 Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif; dan IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius (Misi 1)

Misi 1: Mewujudkan pembangunan desa dan kota yang setara melalui pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai landasan utama pembangunan yang merata antarwilayah desa dan kota. Pengembangan infrastruktur tidak hanya diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan akses masyarakat terhadap layanan dasar, tetapi juga sebagai upaya nyata dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendorong kemajuan wilayah secara merata, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat dan layak huni. Pembangunan diarahkan agar mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan ketangguhan terhadap risiko bencana.

Misi 2: Mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, industri kreatif, dan pariwisata dalam meningkatkan daya saing daerah. Dalam mewujudkan perekonomian yang mandiri dan tangguh, Kabupaten Bengkulu Selatan mendorong diversifikasi ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan. Fokus diarahkan pada penguatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penyangga ketahanan pangan sekaligus motor pertumbuhan desa. Di saat yang sama, pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata difungsikan sebagai penggerak ekonomi baru yang berbasis potensi lokal, budaya daerah, serta Pariwisata Ramah Muslim (PRM). Melalui strategi ini, pertumbuhan ekonomi diharapkan berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kemandirian fiskal dan investasi daerah.

Misi 3: Menyediakan layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas untuk membentuk sumber daya manusia dan lingkungan masyarakat yang unggul dan inklusif. Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas dalam mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh. Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan, sebagai fondasi pembentukan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, serta berbudaya dan religius. Upaya ini dilengkapi dengan penciptaan lingkungan keluarga yang sehat, ramah anak, serta kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, religiusitas, toleransi, dan harmoni sosial. Peningkatan akses terhadap layanan dasar dilakukan secara merata untuk seluruh lapisan masyarakat, guna memastikan tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan terbuka terhadap partisipasi publik. Transformasi birokrasi dilakukan dengan mendorong penggunaan teknologi digital dan penguatan kapasitas aparatur untuk mendukung pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berintegritas. Tata kelola keuangan dan kinerja pemerintahan diarahkan agar memenuhi prinsip akuntabilitas dan sesuai dengan standar audit publik. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan berpihak pada kebutuhan rakyat.

B. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029 disusun sebagai bagian integral dari visi “Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”. Perumusan tujuan merupakan penjabaran langsung dari empat misi utama kepala daerah, yang bertujuan untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi lokal. Seluruh tujuan ini tidak hanya mencerminkan prioritas pembangunan daerah, tetapi juga mengakomodasi arah pembangunan nasional dalam kerangka Asta Cita, RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan, serta selaras dengan 17 arah pembangunan jangka panjang dan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029.

Tujuan pembangunan daerah diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah, peningkatan kualitas desa dan permukiman, serta penciptaan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selain itu, tujuan pembangunan mencakup upaya meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat stabilitas ekonomi makro, serta menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, digital, dan partisipatif. Aspek pembangunan manusia juga mendapat perhatian penting melalui peningkatan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta penciptaan lingkungan keluarga yang sehat dan inklusif.

Sasaran dirumuskan secara terukur dari setiap tujuan, dengan pendekatan berbasis outcome yang memperhatikan keberlanjutan, efektivitas program, dan kesejahteraan masyarakat. Keterpaduan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran menjadi fondasi arah kebijakan daerah, yang diperkuat dengan indikator kinerja yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi secara sistematis. Dengan demikian, perencanaan pembangunan lima tahunan ini diharapkan mampu mewujudkan transformasi Bengkulu Selatan menuju daerah yang mandiri secara ekonomi, adil secara sosial, dan

berkelanjutan secara lingkungan. Penjelasan lebih lanjut mengenai keterkaitan misi, tujuan, sasaran, dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-2 Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029

Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal (2024)	Target						Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Mewujudkan pembangunan desa dan kota yang setara melalui pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kualitas desa melalui pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi		Indeks Pembangunan Infrastruktur	2,88	2,91	2,93	2,95	3,00	3,02	3,06	Dinas PUPR, dan Dinas Perhubungan
		Mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata antarwilayah untuk meningkatkan kualitas desa serta menurunkan ketimpangan ekonomi masyarakat	Indeks desa	80,13	80,13	82,05	84,33	86,43	88,22	90,11	DPMD
			Indeks Gini	0,3	0,295	0,29	0,285	0,28	0,275	0,27	Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Distransnaker, Dinas Perdagangan, Dinas Dikbud, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan strategis secara merata	Nilai komponen Bidang Infrastruktur Dasar pada IPI	1,53	1,54	1,56	1,57	1,59	1,60	1,62	Dinas PUPR
			Nilai komponen Bidang Infrastruktur Strategis serta Konektivitas Wilayah pada IPI	1,72	1,75	1,78	1,81	1,86	1,89	1,94	Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan
		Meningkatnya kualitas pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	67,03	66,96	67,17	67,38	67,59	67,8	68,01	DLHK
Indeks Resiko Bencana	149,8		145	143	142	141	140	139	BPBD		
Mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, industri kreatif, dan pariwisata dalam meningkatkan daya saing daerah	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk daya saing daerah		Pertumbuhan Ekonomi	4,37	4,38-4,70	4,71-5,14	5,15-5,68	5,69-6,32	6,33-6,96	6,97-7,60	Dinas Perdagangan, DPMPSTP, Dinas Pertanian, Distransnaker, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, dan Dinas Pariwisata
			Indeks daya saing daerah	3,64	3,68	3,72	3,76	3,8	3,84	3,9	Bappeda Litbang
		Meningkatnya ketahanan pangan melalui sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Indeks Ketahanan Pangan	74,91	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,5	Dinas Ketahanan Pangan
			Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB (harga konstan)	1,86%	1,89%	1,92%	1,95%	1,98%	2,01%	2,04%	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan DLHK
		Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%) (harga konstan)	9,71%	9,74%	9,77%	9,80%	9,83%	9,86%	9,89%	Dinas Pariwisata
			persentase pertumbuhan sektor ekraf aktif (%)	0	13,16	26,32	39,47	52,63	65,79	78,95	Dinas Pariwisata

Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal (2024)	Target						Perangkat Daerah	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Meningkatnya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,25	3,2	3,15	3,1	3,05	3	2,95	Distransnaker	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,45	74,66	74,87	75,08	75,29	75,5	75,71	Distransnaker	
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,12	0,13	0,23	0,33	0,42	0,52	0,62	Bapenda	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto	37,95	37,97	37,99	38,01	38,03	38,05	38,07	Dinas Perdagangan	
Menyediakan layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas untuk membentuk sumber daya manusia dan lingkungan masyarakat yang unggul dan inklusif	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan lingkungan masyarakat yang unggul dan berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia	74,53	74,85	75,17	75,49	75,81	76,13	76,45	Dinas Kesehatan, Dinas Dikbud, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, dan Distransnaker	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	73,05	73,44	73,82	74,21	74,59	74,98	75,37	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat yang merata	Rata-Rata lama sekolah	9,42	9,6	9,78	9,96	10,14	10,32	10,5	Dinas Dikbud
				Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,66	13,9	13,97	14,05	14,07	14,13	14,14	Dinas Dikbud
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	39,96	40	40,5	41	41,5	42	42,5	Dinas Perpustakaan
			Terciptanya lingkungan keluarga yang sehat dan berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	65,02	65,49	66,16	67,04	67,91	68,88	69,65	DPPKBP3A
				Indeks Perlindungan Anak	63,34	64,37	65,38	66,39	67,4	68,1	69	DPPKBP3A
			Terciptanya kualitas lingkungan masyarakat yang inklusif	Indeks Pemberdayaan Gender	60,92	62,39	63,86	65,33	66,8	68,27	69,74	DPPKBP3A
				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	71,67	72,67	73	73,35	73,67	74	74,67	Dinas Kesbangpol
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	17,1	17,09-16,65	16,64-15,65	15,64-14,65	14,64-13,65	13,64-12,65	12,64-11,65	Dinas Sosial, Dinas Dikbud, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, dan Distransnaker
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	BB	71,00 (BB)	72,00 (BB)	75 (BB)	78,02 (BB)	80,10 (A)	80,25 (A)	Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital, transparan, dan berintegritas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,87	2,95	2,97	3,01	3,02	3,32	3,37	Diskominfo
				Indeks Pelayanan Publik	3,94	3,97	4,00	4,20	4,50	4,75	5,00	Satpol PP, Dukcapil, DPMPSTP, Bapenda, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Kecamatan
			Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	95,27	95,27	95,50	95,80	96,00	96,35	96,75	Sekretariat Daerah	

Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal (2024)	Target					Perangkat Daerah	
					2025	2026	2027	2028	2029		2030
			Survei Penilaian Integritas	72,12	73.00	75.00	77.00	79.00	81.00	83.00	Inspektorat
			Indeks Reformasi Hukum	87,32	87,82	88,32	88,82	89,32	89,82	90,32	Sekretariat Daerah
			Indeks Inovasi Daerah	54,34	55	62,5	63	63,5	64	65,01	Bappeda Litbang
			Indeks Profesionalitas ASN	70,07	71	74	76	78	81	83	BKPSDM
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	63,24 (B)	64,00 (B)	66 (B)	70 (BB)	75 (BB)	80 (A)	82 (A)	Sekretariat Daerah
			Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKD

3.2. Arah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

A. Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029

Untuk memastikan terwujudnya pembangunan yang efektif, terukur, dan berkelanjutan, arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 disusun secara bertahap dan strategis. Penahapan ini dilakukan sebagai respons terhadap kompleksitas tantangan pembangunan, keterbatasan kapasitas fiskal, serta perlunya kesinambungan antarprogram lintas sektor. Lima tahap kebijakan pembangunan dirancang agar saling memperkuat dari segi waktu, sumber daya, dan sasaran, dimulai dari penguatan fondasi kelembagaan dan infrastruktur dasar, hingga menuju reformasi tata kelola dan peningkatan daya saing daerah.

Tabel III-3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan

Arah Kebijakan				
2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan fondasi transformasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan dalam pemerataan pembangunan dan berwawasan lingkungan	Peningkatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Akselerasi ekonomi berkelanjutan yang ditopang oleh SDM yang berdaya saing	Penguatan kemandirian ekonomi yang didukung oleh SDM berdaya saing, serta inklusi sosial	Konsolidasi dan Perwujudan Kabupaten Bengkulu yang mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan melalui penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, serta pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan

Tahapan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tidak hanya berfungsi sebagai kerangka implementatif pembangunan, tetapi juga sebagai strategi terpadu untuk memutus rantai kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara adil dan merata. Pendekatan ini mencerminkan semangat transformasi struktural dan sosial yang berpihak pada kelompok

rentan serta mendorong kemandirian dan daya saing ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Arah kebijakan tahun 2026 “Penguatan fondasi transformasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan dalam pemerataan pembangunan dan berwawasan lingkungan” dilakukan dengan:

1. Reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan
2. Evaluasi *e-government* dan peningkatan kualitas kapasitas SDM
3. Mendorong perencanaan pembangunan yang inklusif, berwawasan lingkungan
4. Memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk pemerataan pembangunan wilayah

Arah kebijakan Tahun 2027 “Peningkatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat” dilakukan dengan:

1. Penguatan transparansi dan pengawasan dengan digitalisasi
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis
3. Penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kualitas akses pendidikan dan pelatihan
4. Mendorong pembangunan infrastruktur ekonomi (pasar, kawasan industri, pariwisata, dan pusat pertanian terpadu)
5. Optimalisasi pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan berketahanan iklim
6. Ekspansi dan diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, industri pengolahan, penguatan pariwisata berbasis kearifan lokal, serta peningkatan kemitraan dan kolaborasi investasi

7. Peningkatan kapasitas produk pangan lokal melalui penguatan infrastruktur hilirisasi dan implementasi digitalisasi pemasaran

Arah kebijakan Tahun 2028 “Akselerasi ekonomi berkelanjutan yang ditopang oleh SDM yang berdaya saing” dilakukan dengan:

1. Evaluasi *e-government* dan peningkatan kualitas kapasitas SDM
2. Percepatan pengembangan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur sosial dan akses layanan yang inklusif untuk mendorong produktivitas dan daya saing SDM
4. Mendorong inovasi ekonomi kreatif berbasis potensi lokal
5. Optimalisasi sumber daya alam dan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan daya saing produk unggulan, serta pariwisata berkualitas yang ramah muslim dan berkelanjutan
6. Optimalisasi hilirisasi dan peningkatan daya saing produk pangan lokal secara terintegrasi

Arah Kebijakan Tahun 2029 “Penguatan kemandirian ekonomi yang didukung oleh SDM berdaya saing, serta inklusi sosial” dilakukan dengan:

1. Penguatan implementasi kebijakan antikorupsi dan memperluas partisipasi masyarakat
2. Peningkatan produktivitas dan penguatan daya saing SDM untuk meningkatkan kualitas hidup melalui keterbukaan akses pekerjaan tanpa diskriminasi
3. Memperluas program pemberdayaan masyarakat rentan dan kelompok termarginal
4. Meningkatkan inklusi keuangan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal
5. Memperluas jejaring kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat

6. Penguatan kolaborasi dengan sektor swasta dan pencanaan untuk program lingkungan

Arah kebijakan tahun 2030 “Konsolidasi dan Perwujudan Kabupaten Bengkulu yang mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan melalui penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, serta pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan” dilakukan dengan:

1. Konsolidasi transformasi tata kelola pemerintahan dan memastikan keberlanjutan program
2. Monitoring, pengembangan dan penyempurnaan infrastruktur
3. Mengevaluasi dampak kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, serta merencanakan keberlanjutan program untuk masa depan
4. Mengintegrasikan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029 dirumuskan sebagai panduan kerja sistematis untuk menjabarkan misi pembangunan ke dalam langkah-langkah strategis yang operasional, sinergis, dan terukur. Setiap arah kebijakan disusun untuk memastikan keterhubungan yang kuat antara visi-misi kepala daerah dengan tujuan, sasaran, dan outcome RPJMD. Pendekatan ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tidak berjalan parsial, tetapi saling memperkuat antar sektor serta selaras dengan strategi pembangunan nasional (RPJMN) dan prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu.

Secara tematik, arah kebijakan daerah dibagi dalam empat kelompok besar, yaitu:

Tabel III-4. Arah Kebijakan Berdasarkan Misi RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029

No	Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
1	Mewujudkan pembangunan desa dan kota yang setara melalui pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Pemerataan pembangunan desa dan kota; Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan; Rehabilitasi irigasi; Pembangunan rumah bersanitasi; Infrastruktur dasar.	Fokus pada penanganan ketimpangan wilayah, pemenuhan layanan dasar dan konektivitas kawasan.
2	Mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, industri kreatif, dan pariwisata dalam meningkatkan daya saing daerah	Peningkatan produktivitas sektor pertanian; Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif; Penguatan kota agropolitan; Revitalisasi kawasan wisata.	Bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dan menciptakan lapangan kerja.
3	Menyediakan layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas untuk membentuk sumber daya manusia dan lingkungan masyarakat yang unggul dan inklusif	Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan; Sistem rujukan RSUD Hasanuddin Damrah; Pemenuhan gizi; Penguatan keluarga dan perlindungan anak.	Memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing SDM daerah.
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan	Transformasi layanan publik berbasis digital; SPBE; Transparansi anggaran dan sistem pengawasan; Peningkatan partisipasi masyarakat.	Mendorong efisiensi birokrasi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

I. Misi 1: Mewujudkan pembangunan desa dan kota yang setara melalui pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Arah kebijakan pembangunan diarahkan pada pemerataan pembangunan antarwilayah melalui penguatan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh desa dan kota. Penekanan dilakukan pada pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan secara terpadu, pembangunan rumah bersanitasi layak, serta rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Di kawasan perkotaan, seperti Manna, pembangunan diarahkan pada penataan permukiman, penyediaan ruang terbuka hijau, dan pengembangan sistem air minum (SPAM).

Melalui strategi ini, pemerintah daerah berupaya mengatasi ketimpangan spasial, memperluas konektivitas antarwilayah, serta menjamin pemenuhan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan jalan mantap. Intervensi ini juga mendukung upaya penurunan kemiskinan di desa-desa dengan status berkembang dan tertinggal, serta memperkuat struktur spasial pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan.

II. Misi 2: Mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, industri kreatif, dan pariwisata dalam meningkatkan daya saing daerah

Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan hortikultura melalui intensifikasi, modernisasi alat pertanian, serta penguatan jaringan irigasi dan pascapanen. Selain itu, dilakukan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, serta penguatan peran Kota Agropolitan Manna sebagai simpul distribusi dan pengolahan hasil pertanian.

Pengembangan pariwisata diarahkan pada revitalisasi kawasan potensial yang mengangkat nilai budaya dan kekayaan alam lokal, sekaligus membuka peluang usaha baru yang inklusif. Melalui pendekatan ini, daerah ditargetkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas, mendorong inovasi usaha kecil menengah, serta memperkuat ketahanan ekonomi dari sektor produktif yang ramah lingkungan.

III. Misi 3: Menyediakan layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas untuk membentuk sumber daya manusia dan lingkungan masyarakat yang unggul dan inklusif

Arah kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara merata, dengan fokus pada kelompok

rentan dan daerah terpencil. Pelayanan kesehatan ditingkatkan melalui penguatan sistem rujukan, pemenuhan gizi keluarga, serta revitalisasi RSUD Hasanuddin Damrah Manna sebagai pusat layanan unggulan. Di sektor pendidikan, perluasan akses, peningkatan literasi, dan pengembangan pendidikan vokasi menjadi prioritas.

Kebijakan ini juga mencakup penguatan institusi keluarga dan perlindungan anak melalui integrasi program sosial dan layanan dasar. Tujuannya adalah membentuk masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, serta siap menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang dengan daya saing sumber daya manusia yang tinggi.

IV. Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan

Arah kebijakan ditujukan pada reformasi birokrasi melalui transformasi layanan publik berbasis digital (SPBE), peningkatan efisiensi dan integrasi sistem pemerintahan, serta penyederhanaan layanan kepada masyarakat. Transparansi anggaran dan penguatan sistem pengawasan internal juga menjadi prioritas, guna mendorong akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Selain itu, partisipasi masyarakat diperluas melalui forum konsultasi publik, peningkatan literasi digital, dan penguatan peran masyarakat sipil dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan birokrasi yang terbuka, adaptif, dan profesional dalam mewujudkan pembangunan daerah yang responsif dan berkeadilan.

B. Arah Kebijakan Rekomendasi KLHS RPJMD 2025-2029

Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan yang berkelanjutan, telah disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RPJMD Tahun 2025–2029. Dokumen ini memuat rumusan rekomendasi arahan kebijakan dan program yang dirancang untuk menjawab isu-isu strategis beserta skenario proyeksinya. Arahan tersebut disusun berdasarkan alternatif strategi dari masing-masing isu strategis KLHS, rekomendasi kebijakan Tahap I (2025–2029) dalam KLHS RPJPD 2025–2045, serta diselaraskan dengan Rancangan RPJPN 2045, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, dan RPPLH Kabupaten Bengkulu Selatan. Rumusan rekomendasi yang dihasilkan dari KLHS ini menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2029. Adapun rekomendasi arahan kebijakan dan program prioritas dari KLHS tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III-5 Arah Kebijakan dan Program Prioritas Rekomendasi KLHS

Isu Strategis	Hasil diharapkan	Arah Kebijakan KLHS	Program kegiatan
Angka kemiskinan penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang masih tinggi 17,1% pada tahun 2024	Menurunnya Angka kemiskinan menjadi minimal 9%	Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan usaha mikro	Program Pengembangan UMKM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
		Peningkatan kemudahan akses modal usaha melalui koperasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
	Peningkatan perlindungan sosial dan pemenuhan hak-hak masyarakat miskin dan rentan	Perlindungan dan jaminan sosial	Program pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
		Perlindungan anak dan perempuan	Program Perlindungan Perempuan
		Program Perlindungan Khusus anak	
Pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	
Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal	Meningkatnya angka partisipasi anak sekolah	Peningkatan kualitas pendidikan	Pengelolaan pendidikan
			Program pendidik dan tenaga kependidikan
			Program Pengembangan kurikulum
	Meningkatnya kehidupan sehat masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			Peningkatan sumber daya tenaga kesehatan
			Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Isu Strategis	Hasil diharapkan	Arah Kebijakan KLHS	Program kegiatan
Pelayanan infrastruktur dasar air minum yang belum optimal	Mencapai akses air minum yang aman dan terjangkau secara universal dan merata	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur penyediaan dan pelayanan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Pengendalian beban pencemar di sumber air baku air bersih	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Meningkatkan akses sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan	Peningkatan penyediaan, pengembangan dan pengelolaan sanitasi	Program pemantauan, pengawasan dan penindakan terkait pencemaran air di sumber air baku untuk PDAM dan air minum
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Pertumbuhan ekonomi belum optimal Pengangguran dan ketenagakerjaan yang masih tinggi	Pertumbuhan ekonomi sebesar 7 %	Penguatan UMKM dan Ekonomi Digital	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
			Pelatihan digitalisasi UMKM
			Peningkatan alokasi KUR
	Menurunnya angka pengangguran	Peningkatan investasi dan daya saing industri	Penyederhanaan perizinan investasi
			Peningkatan insentif fiskal
		Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengembangan SDM yang berdaya saing tinggi
Daerah rawan bencana	Indeks Resiko bencana menurun dari angka 119	Mitiasi dan pencegahan bencana	Pengembangan UMKM
			Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
Pengelolaan lingkungan hidup, terutama sampah, yang belum optimal	Menurunnya jumlah sampah di TPA	Pengurangan timbulan sampah dari sumbernya	Program pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
		Pengelolaan limbah domestik yang berkelanjutan	Program pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)

C. Arah Kebijakan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan merupakan instrumen penting untuk merumuskan arah pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan secara lebih spesifik, sesuai dengan kondisi geografis, potensi sumber daya, serta karakteristik sosial ekonomi masing-masing wilayah. Penyusunan arah kebijakan kewilayahan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis yang mencerminkan kepentingan pembangunan jangka menengah dan jangka

panjang daerah, utamanya dalam rangka memperkuat fondasi pembangunan dan mewujudkan visi daerah Menuju Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan. Pertimbangan strategis tersebut antara lain mencakup Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Arah Pembangunan Kewilayahan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029; pengembangan Kawasan Strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan; serta hasil identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi landasan dalam memastikan integrasi dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam arah pembangunan kewilayahan.

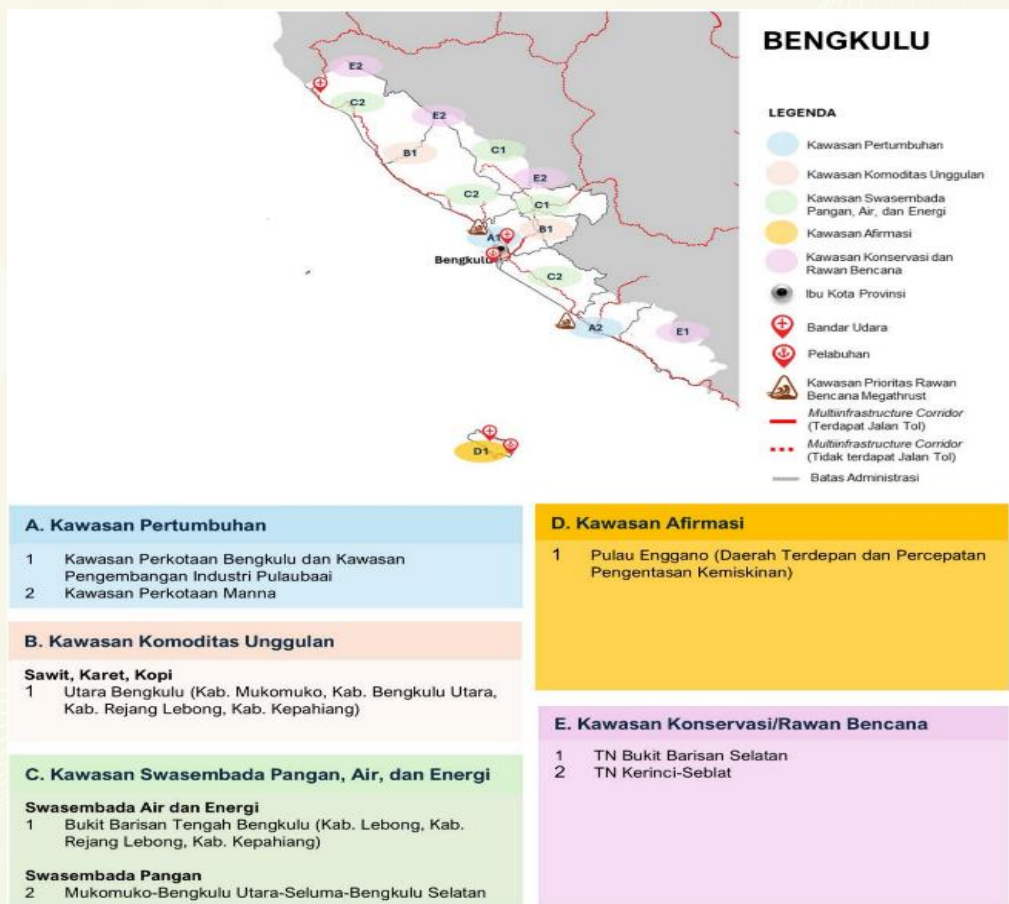
Dokumen RPJMN 2025-2029 memuat 8 Prioritas Nasional yang terdiri dari 83 Kegiatan Prioritas Utama dalam mencapai sasaran nasional, yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Pada dokumen RPJMN 2025-2029 terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis, dimana pelaksanaannya dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai bentuk kontribusi terhadap pencapaian sasaran-sasaran RPJMN Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal ini berkomitmen penuh untuk mendukung PSN dimana indikasi nya dijelaskan sebagai berikut:

1. Makan Bergizi Gratis: Program Makan Bergizi Gratis (Nasional)
2. Swasembada Pangan: Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat; Layanan irigasi pendukung lumbung pangan Nasional (Nasional)

3. Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital: Hilirisasi produk unggulan daerah, pengembangan kawasan industri terpadu; pengembangan layanan digital pemerintah terpadu (Nasional)

4. Perumahan dan Permukiman: Pembangunan 3 Juta Rumah (Nasional)

Mempedomani Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 pada Lampiran IV terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan untuk Provinsi Bengkulu yang terbagi kedalam 4 (empat) klaster: kawasan pertumbuhan, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada (pangan, air, dan energi), kawasan afirmasi, dan kawasan konservasi/rawan bencana.



Gambar III-1 Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Bengkulu

Sumber: Perpres No. 12 Tahun 2025 (lampiran IV)

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan penjabaran lima tahunan melalui RPJMN 2025-2029, Kabupaten Bengkulu Selatan menempati posisi strategis sebagai bagian dari tiga kawasan prioritas nasional, yaitu Kawasan Perkotaan Manna, Kawasan Swasembada Pangan lintas kabupaten (Mukomuko-Bengkulu Utara-Seluma-Bengkulu Selatan), serta Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Kecamatan Kedurang. Penguatan kebijakan kewilayahan ini dirancang untuk mengintegrasikan pembangunan lintas sektor dan spasial secara berkelanjutan, serta mendorong sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten.

I. Kawasan Perkotaan Manna

Kawasan Perkotaan Manna ditetapkan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi dan pusat pelayanan publik regional. Berbagai kebijakan diarahkan untuk mengembangkan kawasan ini sebagai kota agropolitan yang modern, inklusif, dan produktif. Strategi pembangunan mencakup penyusunan masterplan penataan kawasan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan persoalan perkotaan. Prioritas diberikan pada pemenuhan layanan dasar seperti air minum, pengelolaan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau, serta pembangunan perumahan layak bersanitasi untuk MBR, generasi milenial, dan pekerja. Penataan permukiman kumuh juga dilakukan secara terpadu guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban.

Dari sisi konektivitas, penguatan jalur strategis Manna-Tais, Manna-Pagaralam, dan Manna-Bintuhan-Krui menjadi fokus utama untuk membuka akses regional dan mempercepat arus barang dan jasa. Dukungan terhadap pengembangan SDM dilakukan melalui layanan pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan. Selain itu, penguatan sektor kesehatan diarahkan pada pengembangan layanan unggulan di

RSUD Hasanuddin Damrah Manna untuk mendukung sistem rujukan regional bagi ibu-anak, kanker, jantung, dan stroke. Pengembangan SPAM Perkotaan Manna menjadi salah satu kunci untuk menjamin keberlanjutan pasokan air minum. Seluruh kebijakan ini saling menopang dalam menguatkan posisi Manna sebagai pusat agropolitan dan pusat pertumbuhan baru di Provinsi Bengkulu bagian selatan.

II. Kawasan Swasembada Pangan

Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi bagian dari Kawasan Swasembada Pangan lintas kabupaten, bersama Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Seluma. Dalam kawasan ini, Bengkulu Selatan memainkan peran penting sebagai sentra produksi pangan, peternakan, dan hortikultura yang mendukung ketahanan pangan regional dan nasional. Kebijakan diarahkan pada rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan pusat maupun daerah, termasuk pada Daerah Irigasi Air Nipis Seginim dan Air Seluma. Optimalisasi daya guna lahan dilakukan melalui intensifikasi pertanian, penyediaan air berkelanjutan, serta pembangunan tampungan air dan infrastruktur irigasi modern.

Dukungan juga diberikan untuk meningkatkan produktivitas peternakan dan hortikultura melalui pengembangan kawasan peternakan, penyediaan pakan organik, benih dan bibit unggul, serta mitigasi serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan penyakit ternak. Selain itu, penguatan ekonomi petani didorong dengan penyediaan alsintan modern, perluasan infrastruktur konektivitas fisik dan digital, serta peningkatan sarana pascapanen dan akses pasar. Kebijakan reforma agraria dan konsolidasi lahan turut dilaksanakan untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan.

III. Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP), di Kecamatan Kedurang

Dalam dokumen RPJMN 2025-2029, Kabupaten Bengkulu Selatan juga ditetapkan sebagai lokasi tambahan Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP), khususnya di Kecamatan Kedurang yang mencakup tujuh desa: Palak Siring, Nanti Agung, Bumi Agung, Karang Agung, Lubuk Resam, Rantau Sialang, dan Batu Ampar. Pengembangan kawasan ini diarahkan sebagai kawasan perdesaan berbasis food estate, yang berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Pembangunan di kawasan ini akan terfokus pada penguatan produksi pangan melalui intensifikasi lahan, penyediaan sarana produksi, pembangunan irigasi, dan pemberdayaan masyarakat tani. Selain itu, pengembangan infrastruktur dasar, konektivitas jalan, serta peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan akan dilakukan secara terpadu untuk mewujudkan kawasan perdesaan yang maju dan mandiri.

Dengan ketiga pilar kebijakan kewilayahan ini, RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan untuk memperkuat struktur ruang wilayah, memperkecil ketimpangan antarwilayah, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, serta berbasis potensi lokal. Kebijakan ini sekaligus menjadi wujud kontribusi daerah dalam mendukung pencapaian sasaran transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola dalam RPJPN 2025-2045.

D. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, diperlukan strategi yang tepat, terarah, dan berkesinambungan. Strategi pembangunan ini disusun berdasarkan isu-isu strategis daerah,

tantangan pembangunan lintas sektor, serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

1. Mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata antarwilayah untuk meningkatkan kualitas desa serta menurunkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masyarakat

Sasaran ini diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan fokus pada peningkatan kualitas desa, penurunan angka kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan ekonomi antarwilayah. Untuk mencapai sasaran ini, strategi utama yang diterapkan adalah pengembangan desa berbasis potensi lokal yang terintegrasi dengan program penanggulangan kemiskinan lintas sektor. Langkah ini disertai dengan pemerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah kecamatan untuk membuka akses ekonomi yang setara. Dukungan konkret diwujudkan melalui penguatan konektivitas fisik antarwilayah melalui pembangunan dan preservasi ruas jalan strategis seperti Manna-Tais, Manna-Pagaralam, dan Manna-Krui, yang tidak hanya berfungsi sebagai jalur logistik utama, tetapi juga membuka akses masyarakat desa terhadap pusat layanan dan pasar.

Secara khusus, Kabupaten Bengkulu Selatan telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi tambahan Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dalam RPJMN 2025-2029. Terdapat tujuh desa di Kecamatan Kedurang yang menjadi lokus pengembangan kawasan ini, yakni Desa Palak Siring, Desa Nanti Agung, Desa Bumi Agung, Desa Karang Agung, Desa Lubuk Resam, Desa Rantau Sialang, dan Desa Batu Ampar. Ketujuh desa ini akan dikembangkan sebagai Kawasan

Perdesaan Berbasis Food Estate, dengan pendekatan pengembangan terintegrasi mencakup penguatan kelembagaan petani, peningkatan produktivitas pangan, penyediaan infrastruktur dasar, dan penguatan konektivitas ekonomi. Intervensi ini diharapkan mempercepat transformasi desa-desa tersebut menjadi desa mandiri yang mampu mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi lokal secara merata dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan strategis secara merata

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan, air minum, sanitasi, dan listrik. Outcome yang diharapkan dari sasaran ini adalah meningkatnya konektivitas antarwilayah, kemudahan akses terhadap layanan dasar, serta terbukanya peluang aktivitas ekonomi masyarakat secara inklusif. Strategi untuk mencapai sasaran ini dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar dan strategis secara terintegrasi, dengan menghindari pendekatan sektoral yang terfragmentasi. Pembangunan infrastruktur diutamakan di wilayah yang selama ini tertinggal dari sisi akses, seperti desa-desa terpencil dan perdesaan yang belum terhubung secara optimal dengan pusat pertumbuhan. Dukungan konkret terhadap strategi ini tercermin dari pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan strategis penghubung antarwilayah, seperti ruas Manna-Tais, Manna-Pagaralam, dan Manna-Krui, yang menjadi tulang punggung konektivitas logistik dan mobilitas penduduk lintas kecamatan.

Penguatan infrastruktur dasar juga diarahkan secara khusus pada kawasan prioritas pembangunan seperti tujuh desa di

Kecamatan Kedurang yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) berbasis food estate. Ketujuh desa tersebut adalah Desa Palak Siring, Desa Nanti Agung, Desa Bumi Agung, Desa Karang Agung, Desa Lubuk Resam, Desa Rantau Sialang, dan Desa Batu Ampar. Pengembangan infrastruktur di kawasan ini tidak hanya berfungsi untuk memenuhi hak dasar warga terhadap air bersih, sanitasi, dan listrik, tetapi juga menopang produktivitas sektor pertanian, pengolahan hasil pertanian, dan distribusi pangan lokal secara efisien. Pendekatan berbasis kawasan ini memastikan intervensi infrastruktur tidak sekadar menyentuh permukiman warga, tetapi juga mendukung produktivitas dan ketahanan ekonomi lokal di wilayah perdesaan.

Selain itu, dukungan pembangunan infrastruktur dasar turut diperkuat di Kawasan Perkotaan Manna sebagai pusat pertumbuhan daerah, melalui peningkatan kualitas layanan permukiman, jalan lingkungan, drainase, dan sistem sanitasi terpadu. Dengan sinergi antara pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan, diharapkan pemerataan infrastruktur tidak hanya terjadi secara spasial, tetapi juga fungsional dalam mendukung transformasi sosial dan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan secara menyeluruh.

3. Meningkatnya kualitas pembangunan berkelanjutan

Sasaran ini diarahkan untuk menjamin bahwa pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan dan ketangguhan wilayah terhadap risiko bencana. Outcome yang ingin dicapai adalah terjaganya kualitas lingkungan hidup serta meningkatnya kapasitas adaptasi masyarakat dan wilayah terhadap bencana alam serta dampak perubahan iklim. Dua indikator utama

digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Risiko Bencana (IRB). IKLH mencerminkan kesehatan ekosistem dan pencemaran lingkungan, sedangkan IRB menilai kerentanan dan kapasitas mitigasi wilayah terhadap bencana.

Untuk mencapai sasaran ini, strategi pembangunan diarahkan pada penguatan tata kelola lingkungan hidup dan mitigasi risiko bencana berbasis kawasan. Pengembangan ruang terbuka hijau difokuskan di Kawasan Perkotaan Manna sebagai upaya menurunkan emisi karbon, menjaga keseimbangan tata air, dan menyediakan ruang ekologis yang sehat bagi masyarakat. Pembangunan RTH ini akan disinergikan dengan penataan permukiman, ruang publik ramah anak, dan koridor hijau kota.

Di wilayah perdesaan, upaya penguatan ketahanan ekologis dan pangan dilakukan melalui pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan, khususnya di Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Kecamatan Kedurang. Ketujuh desa dalam KPP—Palak Siring, Nanti Agung, Bumi Agung, Karang Agung, Lubuk Resam, Rantau Sialang, dan Batu Ampar—akan dikembangkan sebagai kawasan food estate dengan pendekatan konservasi sumber daya alam, penggunaan pupuk organik, serta optimalisasi irigasi hemat air. Inisiatif ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menjaga keberlanjutan kesuburan tanah dan keseimbangan ekosistem pertanian.

Melalui strategi yang mengintegrasikan prinsip lingkungan dalam seluruh siklus pembangunan, Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan menjadi wilayah yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga tangguh terhadap bencana, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

4. Meningkatnya ketahanan pangan melalui sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Sasaran ini difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penopang utama ketahanan dan kemandirian pangan daerah. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta terciptanya sistem pangan lokal yang tangguh, berkelanjutan, dan berbasis potensi wilayah.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Ketahanan Pangan dan kontribusi sektor primer terhadap PDRB. Kedua indikator tersebut digunakan untuk menilai secara menyeluruh aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan, sekaligus mencerminkan daya tahan sektor pertanian dalam mendukung struktur ekonomi daerah.

Strategi utama untuk mencapai sasaran ini meliputi peningkatan produktivitas pertanian melalui perluasan akses terhadap benih unggul, teknologi pertanian tepat guna, sarana produksi, serta penguatan sistem irigasi, khususnya di daerah sentra pangan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan juga berkomitmen menjaga keberlanjutan lahan pertanian melalui perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan pemanfaatan data spasial untuk perencanaan pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Secara khusus, pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) di tujuh desa di Kecamatan Kedurang—yaitu Palak Siring, Nanti Agung, Bumi Agung, Karang Agung, Lubuk Resam, Rantau Sialang, dan Batu Ampar—menjadi strategi utama dalam membangun kawasan produksi pangan berbasis food estate. Kawasan ini diarahkan untuk menjadi pusat produksi pertanian yang terintegrasi

dengan penguatan kelembagaan petani, penyediaan infrastruktur pertanian dasar, dan pengembangan usaha pengolahan hasil pertanian berbasis lokal. Intervensi di KPP ini juga didesain untuk menjawab tantangan pengangguran dan kemiskinan di wilayah perdesaan, dengan menjadikan pertanian sebagai penggerak utama ekonomi lokal.

Selain itu, pembangunan Kota Agropolitan Manna akan difokuskan sebagai simpul distribusi hasil pertanian sekaligus pusat pengolahan produk pertanian, guna mempendek rantai distribusi dan meningkatkan nilai tambah. Upaya ini diperkuat dengan pelatihan tenaga kerja sektor pertanian dan penguatan akses terhadap pasar melalui digitalisasi rantai pasok.

Melalui strategi yang terintegrasi antara penguatan kawasan produksi pangan, pembangunan distribusi dan pengolahan, serta pemberdayaan petani lokal, Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan menjadi daerah yang memiliki ketahanan pangan yang kokoh, berdaulat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan.

5. Meningkatkan kontribusi sektor ekonomi kreatif dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi

Sasaran ini ditujukan untuk mendorong sektor ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai penggerak baru pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara berkelanjutan dan inklusif, dengan memperluas lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Inovasi Daerah, serta kontribusi sektor ekonomi kreatif dan pariwisata terhadap PDRB, khususnya dari subsektor akomodasi, perdagangan, transportasi, dan industri pengolahan skala kecil. Indikator-indikator tersebut menjadi tolok ukur terhadap efektivitas kebijakan daerah dalam menumbuhkan usaha kreatif berbasis kearifan lokal serta mengembangkan destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran ini, strategi diarahkan pada pembangunan ekosistem ekonomi kreatif yang ditopang oleh budaya lokal dan ekspresi generasi muda. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan akan mendorong pertumbuhan UMKM kreatif melalui fasilitasi produksi, pelatihan manajemen usaha, pembukaan akses pasar, serta pemanfaatan teknologi digital. Komunitas kreatif di bidang kuliner tradisional, kriya, seni pertunjukan, dan produk desain lokal menjadi prioritas pengembangan, terutama yang tumbuh di kawasan Perkotaan Manna dan desa-desa wisata potensial.

Dalam sektor pariwisata, pengembangan diarahkan pada destinasi unggulan berbasis potensi alam, budaya, dan sejarah yang tersebar di berbagai kecamatan. Pemerintah daerah akan memperkuat infrastruktur pendukung wisata seperti jalan akses menuju destinasi, ruang terbuka hijau, fasilitas sanitasi, serta akomodasi skala kecil, sehingga menciptakan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkesan.

Revitalisasi Kawasan Perkotaan Manna sebagai pusat pertumbuhan juga menjadi bagian integral dalam pengembangan sektor ini. Kota Manna diarahkan menjadi kota agropolitan yang mengintegrasikan fungsi perdagangan, pengolahan hasil pertanian, serta sentra jasa dan wisata, melalui penataan ruang publik,

peningkatan kualitas visual kota, dan pengembangan pusat kegiatan ekonomi berbasis komunitas kreatif.

Dengan strategi yang menyeluruh dan berbasis potensi nyata, Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan untuk tumbuh sebagai daerah inovatif, kreatif, dan kompetitif, dengan ekonomi yang ditopang oleh sektor-sektor baru yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keunggulan lokal.

6. Meningkatkan stabilitas ekonomi makro

Sasaran ini difokuskan pada penguatan struktur dan daya tahan ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja yang produktif, serta peningkatan kemandirian fiskal. Outcome yang diharapkan dari sasaran ini adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka, meningkatnya partisipasi angkatan kerja, tumbuhnya investasi daerah, serta terjaganya stabilitas fiskal sebagai dasar pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui empat indikator utama, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Keempat indikator tersebut mencerminkan daya serap tenaga kerja, keberdayaan fiskal daerah, dan dinamika investasi yang berlangsung di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, penyediaan data peluang investasi, serta pemberian insentif untuk sektor-sektor produktif dan padat karya. Potensi ekonomi lokal seperti pertanian dan industri pengolahan hasil

pertanian, perdagangan lokal, serta ekonomi kreatif akan dioptimalkan sebagai basis penguatan ekonomi masyarakat. Kawasan Perkotaan Manna difungsikan sebagai simpul aktivitas ekonomi dan distribusi regional, yang terintegrasi dengan penguatan konektivitas antarwilayah dan pengembangan sektor unggulan.

Konektivitas fisik diperkuat melalui pembangunan dan preservasi ruas jalan strategis seperti Manna-Tais, Manna-Pagaralam, dan Manna-Krui, yang memiliki peran vital dalam memperlancar arus barang, jasa, dan tenaga kerja antarwilayah. Selain konektivitas darat, transformasi digital juga menjadi prioritas, terutama untuk mendukung efisiensi usaha, memperluas akses pasar UMKM, dan mempercepat layanan ekonomi berbasis teknologi, termasuk di sektor pertanian dan pariwisata.

Pemerintah daerah juga akan mendorong peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pembinaan wajib pajak, serta penguatan sistem digital dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus memperkuat pembiayaan pembangunan dari sumber internal.

Dengan pendekatan yang terpadu antara peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan optimalisasi penerimaan daerah, Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan mampu membangun struktur ekonomi yang tangguh, mandiri, dan inklusif, yang mendukung stabilitas makroekonomi dalam jangka menengah hingga panjang

7. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia

yang sehat, produktif, dan tangguh. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) yang mencerminkan hasil akumulatif dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam sistem pelayanan kesehatan. Indikator ini merepresentasikan kualitas layanan dasar, status gizi, sanitasi, serta akses masyarakat terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai.

Untuk mencapai sasaran ini, strategi diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar secara merata di seluruh wilayah. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan akan melakukan revitalisasi sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas, pustu, posyandu, dan klinik pratama di wilayah kecamatan dan desa yang masih terbatas akses, termasuk di wilayah perbukitan dan pedesaan seperti Kecamatan Kedurang, Kedurang Ilir, dan Seginim. Revitalisasi mencakup pembangunan, rehabilitasi fisik, serta penyediaan alat kesehatan yang sesuai standar pelayanan minimal.

Penguatan sistem layanan rujukan juga menjadi prioritas, dengan fokus pada peningkatan kapasitas RSUD Hasanuddin Damrah Manna sebagai rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Bengkulu Selatan. RSUD ini akan dikembangkan sebagai pusat unggulan untuk penanganan penyakit prioritas seperti kesehatan ibu dan anak, penyakit jantung, stroke, dan kanker, serta difungsikan sebagai pusat pelatihan tenaga medis daerah, guna menjawab kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang profesional dan berkelanjutan.

Strategi lainnya mencakup penguatan layanan promotif dan preventif berbasis komunitas, seperti peningkatan cakupan imunisasi, skrining kesehatan sejak dini, serta edukasi gizi seimbang dan

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pendekatan ini difokuskan terutama pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lanjut usia melalui dukungan program terpadu lintas sektor, termasuk intervensi perbaikan sanitasi, akses air bersih, dan penyediaan rumah sehat.

Upaya integratif juga dilakukan dengan mengoptimalkan peran kader kesehatan, tenaga gizi desa, dan tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya kesehatan sebagai bagian dari ketahanan keluarga. Selain itu, sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan akan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung akurasi data dan kecepatan respon terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan pelaksanaan strategi yang komprehensif dan menyeluruh, Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan mampu mencapai peningkatan signifikan dalam umur harapan hidup, mengurangi kesenjangan layanan antarwilayah, serta memperkuat sistem kesehatan daerah yang resilien dan responsif terhadap tantangan zaman.

8. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat yang merata

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan memperkuat budaya literasi secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya capaian pendidikan masyarakat serta terbentuknya ekosistem literasi yang mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang secara bersama

mencerminkan capaian pendidikan faktual, potensi pendidikan ke depan, dan kebiasaan membaca dalam masyarakat.

Strategi untuk mencapai sasaran ini difokuskan pada perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu. Pemerintah daerah akan mendorong pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sarana belajar berbasis teknologi yang ramah anak dan ramah disabilitas. Hal ini ditujukan untuk menjamin kesetaraan kesempatan belajar bagi seluruh anak di Bengkulu Selatan, tanpa terkecuali.

Selain infrastruktur fisik, penguatan kapasitas tenaga pendidik menjadi aspek krusial. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan akan memprioritaskan distribusi guru profesional ke wilayah yang kekurangan tenaga pengajar, serta meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan yang selaras dengan kurikulum nasional dan kebutuhan lokal. Sistem insentif juga akan diterapkan bagi guru yang bertugas di daerah tertinggal atau dengan akses terbatas.

Dalam rangka menumbuhkan budaya literasi, strategi akan diarahkan pada pengembangan program literasi berbasis sekolah dan komunitas, seperti perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, dan kegiatan literasi keluarga. Pemerintah daerah akan menggandeng pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, dan pegiat literasi lokal untuk memperluas akses terhadap bahan bacaan bermutu dan relevan dengan konteks lokal, termasuk dalam bahasa daerah.

Di Kawasan Perkotaan Manna, sebagai pusat pertumbuhan wilayah, penguatan literasi diarahkan pada pengembangan pusat pembelajaran masyarakat (PKBM), pelatihan vokasional, dan bimbingan keterampilan dasar yang menysasar kelompok usia

produktif, perempuan, dan penyandang disabilitas. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi fungsional, mendorong peningkatan produktivitas, serta mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah dan antargenerasi.

Dengan pendekatan yang menyeluruh mulai dari pemerataan akses, peningkatan mutu, hingga penguatan budaya literasi di tingkat keluarga dan masyarakat, Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan menjadi daerah yang unggul dalam pencapaian pendidikan dasar dan membangun generasi yang cerdas, kreatif, serta berdaya saing di tingkat regional dan nasional.

9. Terciptanya lingkungan keluarga yang sehat dan berkualitas

Sasaran ini difokuskan pada pembentukan keluarga yang sehat, harmonis, dan berdaya sebagai fondasi utama pembangunan sosial. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya peran keluarga dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang optimal, sehat, dan aman. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Keluarga Sehat dan Indeks Perlindungan Anak, yang mencerminkan kemampuan keluarga dalam memenuhi hak dasar anak, menjamin kesejahteraan fisik dan psikis, serta menghadirkan lingkungan rumah tangga yang mendukung pembangunan karakter generasi penerus.

Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi pembangunan diarahkan pada penguatan program ketahanan keluarga yang mencakup edukasi pengasuhan berbasis nilai lokal, peningkatan peran keluarga dalam pendidikan anak usia dini, dan pendampingan bagi keluarga rentan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan akan memperluas akses terhadap layanan konseling keluarga dan penyuluhan kesehatan keluarga melalui jaringan Puskesmas, Posyandu, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Selain itu, promosi pola hidup bersih dan sehat (PHBS) juga menjadi bagian integral dalam membentuk keluarga tangguh. Edukasi mengenai sanitasi rumah tangga, pencegahan stunting, dan pemenuhan gizi keluarga akan dilakukan secara berkelanjutan melalui program intervensi terpadu berbasis keluarga dan komunitas. Kolaborasi lintas sektor dengan organisasi perempuan, tokoh agama, dan lembaga pendidikan akan diperkuat untuk memastikan keterjangkauan program hingga ke tingkat rumah tangga.

Langkah konkret lainnya adalah penyediaan hunian layak bersanitasi baik bagi keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), generasi milenial, dan pekerja produktif melalui program rumah subsidi yang difokuskan di Kawasan Perkotaan Manna. Hunian ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang aman dan sehat, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi interaksi keluarga, tumbuh kembang anak, serta pemberdayaan perempuan di lingkungan sekitarnya.

Dari sisi perlindungan anak, strategi diarahkan pada peningkatan akses terhadap layanan pengaduan, pendampingan korban kekerasan, dan edukasi perlindungan anak yang terintegrasi dengan sistem layanan sosial dasar. Di wilayah dengan potensi kerentanan sosial seperti daerah transmigrasi dan pemukiman urban padat, akan dibentuk mekanisme perlindungan berbasis komunitas yang mampu mengidentifikasi risiko secara dini dan memberikan respon cepat.

Dengan strategi yang menempatkan keluarga sebagai unit strategis dalam pembangunan daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan sosial yang sehat, aman, dan inklusif, yang mendukung pembentukan generasi masa depan Kabupaten Bengkulu Selatan yang kuat, berdaya saing, dan berkarakter.

10. Terciptanya kualitas lingkungan masyarakat yang inklusif

Sasaran ini diarahkan untuk membangun masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan harmonis, dengan outcome yang diharapkan berupa meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta terjaganya kerukunan umat beragama sebagai fondasi kehidupan sosial yang damai dan berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Keempat indikator ini secara bersama-sama mencerminkan tingkat partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, kualitas pengambilan keputusan yang setara, serta keharmonisan hubungan antarumat beragama di tengah keberagaman masyarakat.

Strategi pencapaian diarahkan pada penguatan inklusi sosial dan kesetaraan gender dalam seluruh proses pembangunan daerah. Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan layak, layanan publik, serta ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan akan menjadi prioritas utama. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan akan mendorong representasi perempuan dalam kelembagaan desa, forum musyawarah pembangunan, serta lembaga pengawasan sosial, termasuk melalui pelatihan kepemimpinan perempuan di berbagai sektor.

Dalam konteks keberagaman wilayah, penguatan kohesi sosial akan difokuskan pada komunitas multikultural yang berkembang di kawasan transmigrasi dan urban. Akan dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan sosial melalui pembentukan forum komunikasi lintas budaya dan lintas agama. Forum ini berfungsi

sebagai wadah dialog dan kolaborasi antarwarga, serta sebagai mekanisme deteksi dini terhadap potensi konflik sosial.

Program pemberdayaan perempuan akan dilaksanakan secara terintegrasi dengan peningkatan kapasitas ekonomi keluarga, termasuk melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, dan akses pembiayaan. Di sisi lain, pendekatan budaya lokal dan agama akan digunakan sebagai instrumen edukatif untuk mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai bentuk intervensi konkret, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan akan memperluas program rumah layak huni bersanitasi baik bagi perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan lainnya di kawasan-kawasan prioritas, seperti Kawasan Perkotaan Manna. Program ini diintegrasikan dengan layanan sosial dasar dan perlindungan anak, sehingga mendorong terbentuknya lingkungan yang aman, setara, dan mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Dengan strategi yang terfokus dan kontekstual ini, diharapkan Kabupaten Bengkulu Selatan mampu mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil, inklusif, dan harmonis, serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah keberagaman masyarakatnya.

11. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital, transparan, dan berintegritas

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik melalui transformasi digital yang terstruktur. Outcome yang ingin dicapai adalah meningkatnya efisiensi birokrasi,

keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Pelayanan Publik, nilai kepatuhan pelayanan publik, Survei Penilaian Integritas (SPI), dan Indeks Reformasi Hukum, yang mencerminkan kesiapan digital birokrasi, kualitas layanan publik, serta integritas tata kelola pemerintahan.

Strategi pencapaian diarahkan pada transformasi digital dalam layanan publik, terutama pada sektor-sektor yang memiliki intensitas layanan tinggi kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan perizinan usaha. Proses ini mencakup digitalisasi sistem pelayanan, penggunaan dashboard monitoring kinerja, serta integrasi data antarperangkat daerah melalui satu sistem informasi terpusat. Digitalisasi ini akan dimulai secara progresif dari Kawasan Perkotaan Manna sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat, yang menjadi pilot project reformasi tata kelola berbasis elektronik.

Untuk mendukung transformasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan akan melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam penguasaan teknologi informasi, literasi data, dan etika pelayanan digital. Pelatihan teknis dan peningkatan kompetensi akan difokuskan pada pegawai unit layanan publik, operator aplikasi, serta pejabat pengelola sistem informasi pemerintahan, agar dapat menjalankan fungsi pelayanan secara profesional, cepat, dan adaptif terhadap dinamika digitalisasi.

Selanjutnya, Pemerintah juga akan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berbasis digital di seluruh unit kerja penyedia layanan dasar. SPM ini akan menjadi rujukan untuk

menjamin kualitas dan keadilan layanan, serta menjadi alat ukur kinerja unit pelayanan secara periodik dan terbuka.

Reformasi tata kelola ini juga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan publik. Melalui platform digital partisipatif, seperti portal pengaduan masyarakat dan forum konsultasi daring, warga dapat secara aktif terlibat dalam menyampaikan masukan, aspirasi, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan program dan anggaran.

Dengan penerapan sistem pengawasan berbasis data terbuka, pemerintah akan mengintegrasikan mekanisme pelaporan dan pengendalian berbasis bukti digital untuk mendorong akuntabilitas yang tinggi di seluruh lini pemerintahan. Penggunaan teknologi ini juga memperkuat mitigasi praktik penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah.

Melalui sinergi antara digitalisasi pelayanan, peningkatan kapasitas SDM, dan penerapan prinsip tata kelola yang baik, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan menjadi pemerintahan daerah yang cerdas, responsif, dan transparan dalam melayani masyarakat di era digital.

12. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, guna menjamin efisiensi, efektivitas, dan integritas penggunaan anggaran publik. Outcome yang diharapkan adalah terciptanya tata kelola keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip audit publik dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat serta lembaga pengawas eksternal.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah. Nilai SAKIP mencerminkan efisiensi, efektivitas, dan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program. Sementara itu, opini BPK menjadi tolok ukur terhadap kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk aspek pengendalian internal, transparansi anggaran, serta tata kelola belanja dan pendapatan daerah.

Strategi untuk mencapai sasaran ini diawali dengan peningkatan transparansi anggaran daerah melalui penyediaan informasi keuangan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat. Portal informasi keuangan daerah akan dioptimalkan agar publik dapat memantau perencanaan, alokasi, dan realisasi anggaran secara real time. Selain itu, partisipasi masyarakat akan didorong dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum musrenbang yang ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan dokumentasi dan informasi berbasis data.

Selanjutnya, dilakukan penguatan sistem pengawasan internal dengan memperkuat kapasitas dan independensi Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Pengawasan berbasis risiko akan diterapkan untuk mengantisipasi potensi penyimpangan program, sekaligus memberikan masukan perbaikan kebijakan secara lebih dini. Sistem audit internal juga akan didukung oleh integrasi laporan kinerja dengan laporan keuangan, guna menghasilkan penilaian menyeluruh yang lebih akurat dan objektif.

Perbaikan sistem pelaporan kinerja menjadi fokus strategis lainnya, melalui pengembangan dashboard monitoring kinerja berbasis elektronik yang terhubung langsung dengan sistem

perencanaan dan penganggaran daerah. Pendekatan ini memastikan keterpaduan antara input, output, dan outcome dalam seluruh tahapan pelaksanaan program, sekaligus mempercepat proses evaluasi dan pelaporan.

Strategi reformasi ini diperkuat oleh pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola keuangan dan pemerintahan, termasuk penerapan aplikasi e-planning, e-budgeting, dan e-reporting secara menyeluruh. Penggunaan sistem data terbuka dan interoperabilitas antar platform akan menjadi fondasi dalam menciptakan pengawasan publik yang transparan dan partisipatif.

Dalam mendukung seluruh strategi tersebut, peningkatan kapasitas ASN menjadi aspek penting, khususnya di bidang perencanaan, keuangan, dan pengawasan. Pelatihan reguler, pendampingan teknis, dan penyusunan SOP yang berbasis akuntabilitas akan memastikan bahwa seluruh aparatur mampu menjalankan fungsi pengelolaan keuangan secara profesional, konsisten, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional maupun dinamika kebutuhan masyarakat.

Dengan strategi yang terarah dan terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mendapatkan kepercayaan publik melalui praktik pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab.

Tabel III-6. Strategi Pembangunan Menurut Tujuan dan Sasaran

Sasaran	Kondisi yang diharapkan di akhir RPJMD	Strategi
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas desa melalui pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi		
Mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata antarwilayah untuk meningkatkan kualitas desa serta menurunkan ketimpangan ekonomi masyarakat	Semakin meratanya pembangunan antarwilayah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas desa serta menurunnya ketimpangan ekonomi masyarakat. Dengan indikator Persentase kecamatan yang memiliki status indeks desa; dan Indeks Gini	Mendorong pengembangan desa berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur antarkecamatan. Penguatan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan preservasi jalan strategis (Manna-Tais, Manna-Pagaralam, Manna-Krui) serta peningkatan infrastruktur permukiman dan layanan dasar di kawasan Perkotaan Manna.
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan strategis secara merata	Meningkatnya pemerataan akses infrastruktur dasar dan strategis untuk mendukung aktivitas ekonomi. Dengan indikator komponen bidang infrastruktur dasar pada IPI dan komponen bidang infrastruktur strategis serta konektivitas wilayah pada IPI	Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik secara terintegrasi. Optimalisasi program pengembangan kawasan perdesaan berbasis food estate di Kecamatan Kedurang untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi antarwilayah.
Meningkatnya kualitas pembangunan berkelanjutan	Terjaganya keseimbangan lingkungan dan ketangguhan terhadap risiko bencana. Dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup dan Indeks Resiko Bencana	Penguatan kebijakan pembangunan hijau, pengelolaan sumber daya alam secara lestari, dan pengurangan risiko bencana. Peningkatan pemerataan akses air minum, sanitasi, listrik, dan konektivitas jalan melalui pembangunan SPAM Perkotaan Manna, penataan permukiman, dan rumah bersanitasi baik. Penguatan kebijakan lingkungan dan mitigasi risiko bencana melalui pengembangan ruang terbuka hijau, pengelolaan lahan berkelanjutan, serta tata ruang berbasis daya dukung lingkungan.
Tujuan 2: Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk daya saing daerah. Dengan indikator: Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Daya Saing Daerah		
Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah melalui peningkatan produktivitas serta penguatan peran sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan dan Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB (harga konstan)	Peningkatan produktivitas pertanian, penguatan irigasi dan distribusi pangan, serta perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Diversifikasi ekonomi daerah melalui pengembangan kota agropolitan Manna, sektor unggulan, dan pelatihan tenaga kerja berbasis permintaan pasar.
Meningkatkan kontribusi sektor ekonomi kreatif dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan indikator Indeks Inovasi Daerah; Kontribusi sektor Industri Pengolahan; Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Kontribusi sektor Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Kontribusi sektor Jasa lainnya	Pengembangan ekosistem kreatif, dukungan promosi pariwisata, dan fasilitasi UMKM berbasis budaya dan lokalitas. Penguatan ketahanan dan kemandirian pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, intensifikasi pertanian, pengembangan peternakan, dan penyediaan air berkelanjutan di kawasan swasembada pangan. Pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata melalui revitalisasi kawasan kota, dukungan UMKM kreatif, dan penguatan infrastruktur layanan pendukung pariwisata.

Sasaran	Kondisi yang diharapkan di akhir RPJMD	Strategi
Meningkatkan stabilitas ekonomi makro	Meningkatnya kapasitas ekonomi daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB; dan Pembentukan Modal Tetap Bruto	Mendorong investasi produktif, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kapasitas fiskal daerah. Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi iklim usaha, pembangunan infrastruktur penunjang produksi dan pascapanen, serta penguatan konektivitas fisik dan digital.
Tujuan 3: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan lingkungan masyarakat yang unggul dan berbudaya		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Dengan indikator Umur Harapan Hidup	Peningkatan layanan kesehatan dasar, revitalisasi fasilitas kesehatan, dan penguatan sistem rujukan. Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan melalui penguatan RSUD Hasanuddin Damrah sebagai pusat layanan unggulan dan integrasi pelatihan tenaga kerja.
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat yang merata	Meningkatnya akses dan capaian pendidikan serta budaya literasi sebagai dasar penguatan sumber daya manusia berkualitas. Dengan indikator Rata-Rata lama sekolah; Harapan Lama Sekolah (tahun); dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pemerataan akses pendidikan dan penguatan literasi melalui infrastruktur dan SDM pendidikan yang memadai.
Terciptanya lingkungan keluarga yang sehat dan berkualitas	Meningkatnya partisipasi keluarga dalam mewujudkan keluarga sehat dan ramah anak. Dengan indikator Indeks Keluarga Sehat dan Indeks Perlindungan Anak	Penguatan program ketahanan keluarga, promosi pola hidup sehat, dan peningkatan perlindungan anak. Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan literasi masyarakat melalui integrasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan perluasan akses pendidikan di kawasan terpencil.
Terciptanya kualitas lingkungan hidup masyarakat yang inklusif	Meningkatnya kesetaraan, pemberdayaan, dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Dengan indikator Indeks Ketimpangan Gender; Indeks Pembangunan Gender; Indeks Pemberdayaan Gender; dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Penguatan inklusi sosial dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta penguatan kelembagaan sosial masyarakat. Penguatan ketahanan keluarga melalui penyediaan hunian layak bersanitasi, edukasi kesehatan keluarga, dan perlindungan anak yang terintegrasi dengan layanan sosial dasar.
Tujuan 4: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel		
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital, transparan, dan berintegritas	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang efisien, terbuka, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Indeks Pelayanan Publik; Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan Survei Penilaian Integritas; dan Indeks Reformasi Hukum	Transformasi digital dalam layanan publik, peningkatan kapasitas birokrasi, dan penerapan standar pelayanan minimal. Peningkatan inklusi sosial dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, kampanye toleransi, dan penguatan komunitas lintas budaya di kawasan transmigrasi dan urban.
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Terciptanya tata kelola keuangan yang standar, transparan, dan akuntabel. Dengan indikator Nilai SAKIP dan Opini BPK	Peningkatan transparansi anggaran, penguatan sistem pengawasan internal, dan perbaikan sistem pelaporan kinerja. Transformasi tata kelola birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kapasitas ASN, serta penerapan sistem pengawasan berbasis data terbuka.

Tabel III-7 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Serta Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029

Visi Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan						
Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Mewujudkan pembangunan desa dan kota yang setara melalui pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Tujuan 1.1: Meningkatkan kualitas desa melalui pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Sasaran 1.1.1: Mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata antarwilayah untuk meningkatkan kualitas desa serta menurunkan ketimpangan ekonomi masyarakat	Indeks desa Indeks Gini	Mendorong pengembangan desa berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur antarkecamatan. Penguatan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan preservasi jalan strategis (Manna-Tais, Manna-Pagaralam, Manna-Krui) serta peningkatan infrastruktur permukiman dan layanan dasar di kawasan Perkotaan Manna.	<ol style="list-style-type: none"> Memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk pemerataan pembangunan wilayah Mendorong perencanaan pembangunan yang inklusif, berwawasan lingkungan Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis Percepatan pengembangan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Penguatan kolaborasi dengan sektor swasta dan pencanaan untuk program lingkungan
			Sasaran 1.1.2: Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan strategis secara merata	Nilai komponen Bidang Infrastruktur Dasar pada IPI Nilai komponen Bidang Infrastruktur Strategis serta Konektivitas Wilayah pada IPI	Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik secara terintegrasi. Optimalisasi program pengembangan kawasan perdesaan berbasis food estate di Kecamatan Kedurang untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi antarwilayah.	
			Sasaran 1.2.3: Meningkatnya kualitas pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup Indeks Resiko Bencana	Penguatan kebijakan pembangunan hijau, pengelolaan sumber daya alam secara lestari, dan pengurangan risiko bencana. Peningkatan pemerataan akses air minum, sanitasi, listrik, dan konektivitas jalan melalui pembangunan SPAM Perkotaan Manna, penataan permukiman, dan rumah bersanitasi baik. Penguatan kebijakan lingkungan dan mitigasi risiko bencana melalui pengembangan ruang terbuka hijau, pengelolaan lahan berkelanjutan, serta tata ruang berbasis daya dukung lingkungan.	

Visi Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan

Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2: Mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, industri kreatif, dan pariwisata dalam meningkatkan daya saing daerah	Tujuan 2.1: Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk daya saing daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2.1.1: Meningkatnya ketahanan pangan melalui sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Indeks Ketahanan Pangan	Peningkatan produktivitas pertanian, penguatan irigasi dan distribusi pangan, serta perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Diversifikasi ekonomi daerah melalui pengembangan kota agropolitan Manna, sektor unggulan, dan pelatihan tenaga kerja berbasis permintaan pasar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pembangunan infrastruktur ekonomi (pasar, kawasan industri, pariwisata, dan pusat pertanian terpadu) 2. Ekspansi dan diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, industri pengolahan, penguatan pariwisata berbasis kearifan lokal, serta peningkatan kemitraan dan kolaborasi investasi 3. Peningkatan kapasitas produk pangan lokal melalui penguatan infrastruktur hilirisasi dan implementasi digitalisasi pemasaran 4. Mendorong inovasi ekonomi kreatif berbasis potensi lokal 5. Optimalisasi sumber daya alam dan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan daya saing produk unggulan, serta pariwisata berkualitas dan berkelanjutan 6. Optimalisasi hilirisasi dan peningkatan daya saing produk pangan lokal secara terintegrasi 7. Memperluas jejaring kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat
				Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB (harga konstan)		
		Indeks daya saing daerah	Sasaran 2.1.2: Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%) (harga konstan)	Pengembangan ekosistem kreatif, dukungan promosi pariwisata, dan fasilitasi UMKM berbasis budaya dan lokalitas. Penguatan ketahanan dan kemandirian pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, intensifikasi pertanian, pengembangan peternakan, dan penyediaan air berkelanjutan di kawasan swasembada pangan. Pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata melalui revitalisasi kawasan kota, dukungan UMKM kreatif, dan penguatan infrastruktur layanan pendukung pariwisata.	
				persentase pertumbuhan sektor ekraf aktif (%)		
		Sasaran 2.1.3: Meningkatnya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Pengangguran Terbuka	Mendorong investasi produktif, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kapasitas fiskal daerah. Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi iklim usaha, pembangunan infrastruktur penunjang produksi dan pascapanen, serta penguatan konektivitas fisik dan digital.		
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)						
Pembentukan Modal Tetap Bruto						

Visi Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan

Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3: Menyediakan layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas untuk membentuk sumber daya manusia dan lingkungan masyarakat yang unggul dan inklusif	Tujuan 3.1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan lingkungan masyarakat yang unggul dan berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	Sasaran 3.1.1: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Peningkatan layanan kesehatan dasar, revitalisasi fasilitas kesehatan, dan penguatan sistem rujukan. Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan melalui penguatan RSUD Hasanuddin Damrah sebagai pusat layanan unggulan dan integrasi pelatihan tenaga kerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kualitas akses pendidikan dan pelatihan 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur sosial dan akses layanan yang inklusif untuk mendorong produktivitas dan daya saing SDM 3. Peningkatan produktivitas dan penguatan daya saing SDM untuk meningkatkan kualitas hidup melalui keterbukaan akses pekerjaan tanpa diskriminasi 4. Mengintegrasikan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang
			Sasaran 3.1.2: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat yang merata	Rata-Rata lama sekolah	Pemerataan akses pendidikan dan penguatan literasi melalui infrastruktur dan SDM pendidikan yang memadai.	
				Harapan Lama Sekolah (tahun)		
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
			Sasaran 3.1.3: Terciptanya lingkungan keluarga yang sehat dan berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	Penguatan program ketahanan keluarga, promosi pola hidup sehat, dan peningkatan perlindungan anak. Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan literasi masyarakat melalui integrasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan perluasan akses pendidikan di kawasan terpencil.	
				Indeks Perlindungan Anak		
Sasaran 3.1.4: Terciptanya kualitas lingkungan masyarakat yang inklusif	Indeks Pemberdayaan Gender	Penguatan inklusi sosial dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta penguatan kelembagaan sosial masyarakat.				
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Penguatan ketahanan keluarga melalui penyediaan hunian layak bersanitasi, edukasi kesehatan keluarga, dan perlindungan anak yang terintegrasi dengan layanan sosial dasar.				
			Sasaran 3.1.5: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan		

Visi Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan

Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan	Tujuan 4.1: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital, transparan, dan berintegritas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Transformasi digital dalam layanan publik, peningkatan kapasitas birokrasi, dan penerapan standar pelayanan minimal. Peningkatan inklusi sosial dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, kampanye toleransi, dan penguatan komunitas lintas budaya di kawasan transmigrasi dan urban.	1. Evaluasi e-government dan peningkatan kualitas kapasitas SDM 2. Reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan 3. Penguatan transparansi dan pengawasan dengan digitalisasi 4. Penguatan implementasi kebijakan antikorupsi dan memperluas partisipasi masyarakat 5. Konsolidasi transformasi tata kelola pemerintahan dan memastikan keberlanjutan program
			Sasaran 4.1.2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Indeks Pelayanan Publik Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Survei Penilaian Integritas Indeks Reformasi Hukum Indeks Inovasi Daerah Indeks Profesionalitas ASN		

E. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjamin keselarasan arah pembangunan jangka menengah daerah dengan kerangka kebijakan nasional, penyusunan program prioritas Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa program prioritas daerah merupakan turunan langsung dari visi, misi, tujuan, sasaran, serta *outcome* yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, program prioritas Kabupaten Bengkulu Selatan juga diselaraskan dengan program prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang tertuang dalam Perpres No. 12 Tahun 2025, serta program prioritas Provinsi Bengkulu melalui RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029. Berikut ini merupakan keselarasan antara prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu dan Nasional:

Tabel III-8 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Bengkulu dan Nasional

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu	Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029
1	Pemerataan pembangunan dasar dan strategis secara berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan strategis, serta memperkuat konektivitas antar wilayah	PN6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
2	Penguatan ketahanan pangan berbasis pertanian modern dan agromaritim melalui hilirisasi serta industrialisasi produk unggulan daerah	Memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mewujudkan ketahanan pangan mandiri melalui hilirisasi dan industrialisasi produk pangan unggulan	PN2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
3	Menumbuhkembangkan UMKM dan industri kreatif berbasis potensi lokal, serta penguatan eco-agrotourism yang terintegrasi	Meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal dan inovasi yang berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi dalam jaringan ekonomi lokal	PN3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter melalui perbaikan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, budaya, serta lingkungan	Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang	PN4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu	Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029
	masyarakat yang inklusif	disabilitas	Z), dan penyandang disabilitas
5	Meningkatkan harmonisasi sosial, budaya dan lingkungan melalui pelestarian alam, peningkatan toleransi antarumat beragama, serta pembangunan masyarakat yang adil dan makmur	Mewujudkan rasa aman dan keseimbangan kehidupan yang harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur	PN8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
6	Reformasi birokrasi digital untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif.	Mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, dengan prinsip tata kelola pemerintah yang transparan, bersih, berkeadilan, dan berlandaskan nilai religius	PN7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pemberantasan kemiskinan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 telah disusun secara selaras dengan arah kebijakan Provinsi Bengkulu maupun RPJMN 2025-2029. Keselarasan ini menunjukkan adanya kesinambungan pembangunan dari tingkat nasional hingga daerah, sehingga program yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi.

Berdasarkan kerangka tersebut, selanjutnya akan dijabarkan secara lebih rinci mengenai prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan beserta program-program prioritasnya, yang menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan:

1. Pemerataan pembangunan dasar dan strategis secara berkelanjutan dengan program prioritas antara lain:
 - a. Perepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis, serta konektivitas antar wilayah secara berkelanjutan
 - b. Peningkatan pembangunan wilayah berbasis koridor pertumbuhan desa-kota
 - c. Pembangunan pelabuhan pengumpan dan perikanan

- d. Pengembangan kawasan perdesaan prioritas untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - e. Pengembangan kawasan agropolitan untuk menciptakan pembangunan yang berimbang, berkelanjutan, dan berdaya saing
2. Penguatan ketahanan pangan berbasis pertanian modern dan agromaritim melalui hilirisasi serta industrialisasi produk unggulan daerah dengan program prioritas antara lain:
- a. Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan
 - b. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, kehutanan dan perikanan melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi
 - c. Percepatan hilirisasi dan industrialisasi produk unggulan
 - d. Akselerasi pengembangan pusat riset, inovasi dan teknologi dalam rangka pengembangan varietas unggulan dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas pertanian, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
3. Menumbuhkembangkan UMKM dan industri kreatif berbasis potensi agromaritim daerah, serta penguatan ekowisata secara terintegrasi dengan program prioritas antara lain:
- a. Peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, Koperasi dan industri kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal
 - b. Optimalisasi potensi wisata alam, bahari, dan budaya melalui kolaborasi multipihak untuk membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing
 - c. Peningkatan iklim investasi
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter melalui perbaikan akses dan mutu pendidikan,

- kesehatan, budaya, serta lingkungan masyarakat yang inklusif dengan program prioritas antara lain:
- a. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan secara merata, melalui peningkatan cakupan *universal health coverage* (UHC), pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan penyakit menular.
 - b. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan
 - c. Pengembangan budaya, karakter dan masyarakat inklusif
5. Memperkuat harmonis sosial, budaya dan lingkungan melalui pelestarian alam, peningkatan toleransi antarumat beragama, serta pembangunan masyarakat yang adil dan makmur dengan program prioritas antara lain:
- a. Pelestarian adat dan budaya untuk memperkuat harmonisasi sosial, menjaga identitas masyarakat, serta mengantisipasi dampak modernisasi guna mewujudkan kehidupan berkeadilan dan berkelanjutan
 - b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - c. Penguatan kerukunan umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial, memperkuat toleransi, serta mendukung terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur
 - d. Pengembangan pusat peradaban dan aktivitas keagamaan
6. Reformasi birokrasi digital untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan program prioritas antara lain:
- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital
 - b. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik
 - c. Penguatan transparansi dan partisipasi publik
 - d. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan integritas aparatur

Sebagai program tambahan, Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2025-2029. Beberapa program strategis yang diadopsi dan dikembangkan di daerah antara lain Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Ketiga program ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan kelompok rentan.

1. Makan Bergizi Gratis

Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya program nasional Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam mengatasi masalah stunting dan gizi buruk yang masih menjadi tantangan di daerah. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan akan menjamin pemenuhan gizi anak usia sekolah dan balita secara merata, dengan menyediakan makanan sehat dan bergizi secara gratis di satuan pendidikan dasar dan posyandu. Pelaksanaan program ini akan dilakukan secara terintegrasi dengan layanan kesehatan dasar, pendidikan, dan pengawasan sosial, melalui kolaborasi antar-perangkat daerah, dukungan masyarakat, serta keterlibatan sektor swasta.

Kabupaten Bengkulu Selatan juga mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal bergizi sebagai bahan baku utama, guna menciptakan rantai ekonomi yang produktif di tingkat lokal. Teknologi digital akan dimanfaatkan untuk pencatatan distribusi dan pemantauan status gizi penerima manfaat secara berkala. Seluruh upaya ini akan didukung oleh berbagai program daerah yang relevan, seperti program pemenuhan gizi anak dan ibu, peningkatan mutu pendidikan dasar, dan penguatan ketahanan pangan lokal.

2. Koperasi Merah Putih

Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen untuk mendukung program nasional terkait penguatan koperasi melalui inisiatif Koperasi Merah Putih sebagai strategi utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini diarahkan untuk membangun kelembagaan koperasi yang kuat dan inklusif di seluruh desa, khususnya di 158 desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Koperasi akan dikembangkan agar memiliki legalitas, tata kelola yang baik, serta kegiatan usaha yang jelas dan produktif.

Sebagai bagian dari implementasinya, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui pelatihan manajemen, literasi keuangan, dan transformasi digital. Akses pembiayaan usaha mikro juga akan diperluas dengan menjalin kemitraan strategis antara koperasi, BUMDes, BUMD, dan sektor swasta. Koperasi didorong untuk menjadi simpul penggerak ekonomi lokal, khususnya dalam pengembangan sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM.

3. Sekolah Rakyat

Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen untuk mendukung program nasional dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui inisiatif Sekolah Rakyat. Program ini merupakan bentuk inovasi daerah untuk menjawab tantangan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan, terpencil, dan bagi kelompok rentan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem pendidikan formal.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai layanan pendidikan alternatif berbasis komunitas yang partisipatif dan kontekstual, dengan memanfaatkan potensi lokal dan kearifan masyarakat. Pemerintah daerah akan memberdayakan tenaga pendidik lokal, relawan, serta tokoh masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang inklusif. Program ini juga difokuskan untuk memperkuat literasi dasar, pendidikan kewargaan, kewirausahaan desa, dan pembentukan karakter masyarakat.

Komitmen ini akan diwujudkan melalui inovasi pendidikan inklusif berbasis komunitas, pemberdayaan pendidikan non-formal, peningkatan literasi dan numerasi masyarakat, pengembangan PKBM, serta penguatan peran masyarakat dalam pendidikan. Dengan langkah ini, Kabupaten Bengkulu Selatan mendukung penuh upaya nasional untuk menciptakan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga.

F. Program Unggulan Kabupaten Bengkulu Selatan

- a. Program peningkatan jalan dan jembatan dan area irigasi
- b. Program pembangunan jalan dua jalur dalam Kota
- c. Program percepatan pembangunan infrastruktur dasar, strategis dan konektivitas antar wilayah secara berkelanjutan
- d. Program pembangunan pelabuhan pengumpan dan pelabuhan perikanan
- e. Program pengembangan energi alternatif berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT)
- f. Program cetak sawah baru dan perbaikan serta peningkatan irigasi dalam mewujudkan ketahanan pangan
- g. Program pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan modern

- h. Program pengembangan nilai tambah beras Seginim dan beras Kedurang melalui inovasi, re-branding, dan penguatan daya saing pasar
- i. Program pembangunan tambak udang berkelanjutan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dan kesejahteraan masyarakat pesisir
- j. Program penguatan ketahanan pangan keluarga melalui peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas konsumsi pangan bergizi seimbang
- k. Pembangunan Industri Air Minum Dalam Kemasan
- l. Program penguatan kelembagaan dan pemberdayaan UMKM serta koperasi untuk meningkatkan daya saing dan mendukung pencapaian prioritas nasional
- m. Program penataan destinasi dan pengembangan daya tarik wisata unggulan yang berfokus pada peningkatan kualitas amenities, atraksi, dan aksesibilitas, serta penguatan identitas lokal
- n. Program peningkatan kualitas dan kapasitas layanan jaminan kesehatan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan yang merata dan berkualitas
- o. Program peningkatan kualitas dan kapasitas layanan pendidikan guna mencetak sumber daya manusia yang cerdas, unggul, dan berdaya saing
- p. Program pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui perlindungan, rehabilitasi, dan peningkatan kemandirian sosial
- q. Program pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi, kesehatan, dan pemberdayaan keluarga
- r. Program pengembangan sarana, prasarana, dan media pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan

- s. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan secara merata, melalui peningkatan cakupan universal health coverage (UHC), pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan penyakit menular
- t. Program penegakan peraturan daerah dan hukum sesuai kewenangan pemerintah daerah untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum
- u. Program pelestarian nilai adat dan budaya dalam rangka mengantisipasi dampak negatif modernisasi
- v. Penguatan implementasi reformasi birokrasi dan SAKIP
- w. Program gerakan bengkulu selatan bersih (GEBER)

Tabel III-9. Visi, Misi, Sasaran, Indikator, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KET. (07)
Visi: Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan						
Mewujudkan Pembangunan Desa dan Kota yang Setara Melalui Pengembangan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Kualitas Desa Melalui Pengembangan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Merata Antar wilayah untuk Meningkatkan Kualitas Desa Serta Menurunkan Ketimpangan Ekonomi Masyarakat		Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)(Angka)		
				Indeks Gini (Angka)		
				Indeks Desa (%)		
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Dasar	Nilai Rata-Rata Assesmen SD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Pendidikan SD Terakreditasi B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa (%)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri.	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
				Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya produktifitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya kualitas pembangunan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	
		Indeks Resiko Bencana (Poin)				
Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati (Indeks)	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase penanganan pra bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah atau Legal (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Pengurangan Volume Sampah Kabupaten (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan strategis secara merata		Nilai komponen Bidang Infrastruktur Dasar pada IPI (Nilai)			
				Nilai komponen Bidang Infrastruktur Strategis serta Konektivitas Wilayah pada IPI (Nilai)			
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		Rasio kemantapan jalan (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya Akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Layak (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
					Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi		Persentase pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
					Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknis/analisis (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung		Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/kota (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
					Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman		Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Konektivitas Darat (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang		Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani pemerintah daerah (Hari)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.			
				Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Kasus)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kab/kota (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Persentase kondisi irigasi kewenangan kab/kota (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
			Mendorong Diversifikasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Industri Kreatif, dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi untuk Daya Saing Daerah	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro		Pertumbuhan Ekonomi(%)		
							Indeks Daya Saing Daerah(Angka)		
							Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))		
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)								
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)								
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)								
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan dsitribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI							
Meningkatnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI							

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.	
			Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
			Meningkatnya realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
			Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB (harga konstan) (%)			
				Indeks Ketahanan Pangan (Angka)			
				Meningkatnya Kelestarian laut dan Keanekaragaman Hayati	Luasan Kawasan Konservasi (Km ²)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (Angka)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya jumlah cadangan pangan daerah	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
					Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.	
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
				Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (diperoleh dari Surveyance Penyakit dari 5 PHMS) (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
				Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Pendukung Ketersediaan Cadangan Pangan (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
					Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Hektar)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
					Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
			Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi		Persentase Pertumbuhan Sektor Ekraf Aktif (%) (%)		
					Kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
					Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
					Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang) (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
Menyediakan Layanan Dasar yang Terjangkau dan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)				
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))				

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
Berkualitas untuk Membentuk Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Masyarakat yang Unggul dan Inklusif	Lingkungan Masyarakat yang Unggul dan Berbudaya	Terciptanya Kualitas Lingkungan Masyarakat yang Inklusif	Meningkatnya etika dan budaya politik	Indeks Pemberdayaan Gender (%) Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			meningkatkan ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina (%)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera(KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Calon pengantin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh TPK (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan (%)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		Umur Harapan Hidup (Tahun)	
				Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT sesuai Standar (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Sarana IRTP yang Memenuhi Ketentuan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Stunting (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Pemberian obat pencegahan massal (POPM) cacangan pada anak usia 6-23 bulan (baduta) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) atau ibu hamil risiko KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
					DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Anak usia 6-23 bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Remaja putri yang diskriminasi anemia (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan yang diare (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Ibu hamil periksa kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penemuan kasus pneumonia balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Bayi di bawah usia dua tahun (baduta) yang memperoleh imunisasi rutin lengkap (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)/multivitamin & mineral supplementation (MMS) untuk ibu hamil minimal 180 tablet selama masa kehamilan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Penemuan Kasus TB (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Pemberian obat pencegahan massal (POPM) cacingan pada balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 6-23 bulan (baduta) yang diare (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
					DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Anak berusia di bawah lima tahun (balita) bermasalah gizi (gizi kurang) yang mendapat tambahan asupan gizi (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Proporsi Jumlah UKM (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya Mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDMk sesuai Standar (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (Rasio)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat yang merata		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
				Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)		
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
			Meningkatnya Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	
			Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B (%) Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Kesetaraan/Non Formal	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV (%) Persentase Tenaga Pendidik Kesetaraan Berijazah DIV/S1 (%) Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Menengah Pertama	Persentase Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi B (%) Nilai Rata-Rata Assesmen SMP (%) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase) Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai) Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
			Meningkatnya pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%) Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan (%)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase) Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.		
		Terciptanya lingkungan keluarga yang sehat dan berkualitas	Meningkatnya Tata Kelola Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) (Angka)				
				Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)				
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mendukung kesetaraan, gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
				Proporsi Jumlah UKM (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Meningkatnya Pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan (%)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
			Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
				Pelayanan keluarga berencana (KB) pascapersalinan dalam 42 hari pascapersalinan (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Terjaminnya Pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Terkendalnya Pertambahan Jumlah Penduduk		Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
					Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
Angka Kemiskinan (%)								
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat			Tingkat Kemiskinan (%)					

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Meningkatnya pekerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Persentase Pekerja Informal (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
			meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun (Orang)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Angka)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Angka)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
			meningkatkan tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
			Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
			terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.	
			yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase) Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Transparan, dan Akuntabel dengan Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pembangunan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Transparan, dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Digital, Transparan, dan Berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)			
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Angka)			
				Indeks Pelayanan Publik (Indeks)			
				Indeks Reformasi Hukum (Indeks)			
				Survei Penilaian Integritas (%)			
				Indeks Inovasi Daerah (Angka)			
				Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (%)			
				Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)			
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
			Meningkatnya kualitas pengolahan aplikasi informatika	Indeks SPBE (Angka) Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%) Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%) Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
			Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase) Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Efektifitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Persentase Produk Hukum yang Dihilangkan (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Nilai)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (Nilai)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase program prioritas nasional yang di dukung program daerah (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			meningkatkan layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkara serta Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkara serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebutuhan yang Terpenuhi (Angka)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			meningkatkan tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Menurunkan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanjuz Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
		Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (%)		6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
		Manajemen Resiko Indeks (Angka)		6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
			Tercapainya kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Terkendalanya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Indeks) Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (%)		
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Angka)	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Capaian Kinerja Seluruh ASN (%)	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tercapainya Tujuan OPD (Persentase PDRB Sektor Perdagangan, Industri Pengolahan serta Meningkatkan Pertumbuhan Koperasi dan UMKM) (%)	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai AKIP OPD (Angka)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Manajemen Aset (Kategori)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			meningkatkan kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Nilai)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Nilai AKIP OPD	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Dalam perencanaan kinerja pembangunan daerah, keterkaitan antara aspek strategis dan operasional menjadi dasar penting dalam memastikan efektivitas pencapaian pembangunan jangka menengah. Aspek strategis tercermin melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029. Sementara itu, aspek operasional diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan perangkat daerah yang secara langsung dirancang untuk menjawab isu strategis serta mendorong pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Setiap perangkat daerah menyusun program kerja yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah, serta diarahkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD). Program-program tersebut tidak hanya mencerminkan prioritas daerah, tetapi juga dirancang untuk mendukung pelaksanaan 83 kegiatan prioritas utama dalam RPJPN 2025-2029. Dengan demikian, keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dan arah pembangunan nasional dapat terwujud secara sinergis dan saling menguatkan.

Penetapan program dilakukan secara selektif dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat serta kapasitas fiskal daerah. Program diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu program strategis atau prioritas yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan, dan program pendukung yang menunjang efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan. Penetapan ini dilaksanakan secara

konsisten dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain mempertimbangkan prioritas pembangunan, penetapan program daerah juga memperhatikan kewajiban alokasi anggaran minimal, seperti 20% belanja daerah untuk sektor pendidikan sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003, serta alokasi sebesar 0,16% untuk pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kemendagri No. 893.5/9039/SJ.

Penetapan alokasi anggaran juga diarahkan untuk menjamin pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam PP No. 2 Tahun 2018, yang mencakup enam urusan wajib pelayanan dasar, yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial. Seluruh program dirancang dengan proyeksi pendanaan indikatif yang rasional dan realistis berdasarkan analisis kapasitas fiskal dan tren realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya. Kebutuhan belanja baik langsung maupun tidak langsung diproyeksikan secara proporsional dalam lima tahun ke depan, dan disusun ke dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai tanggung jawab urusan masing-masing. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif, terukur, dan adaptif terhadap dinamika keuangan daerah dan kebutuhan strategis pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel IV-1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					177.067.689.000,00		177.933.277.000,00		178.803.318.000,00		179.677.835.000,00		180.556.849.000,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					135.116.689.000,00		135.755.377.000,00		136.396.479.000,00		137.041.012.000,00		137.688.992.000,00	
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	8	8	8	135.116.689.000,00	8	135.755.377.000,00	8	136.396.479.000,00	8	137.041.012.000,00	8	137.688.992.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					41.430.000.000,00		41.637.900.000,00		41.846.839.000,00		42.056.823.000,00		42.267.857.000,00	
Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase APS Paud Formal (%)	90	91	92	6.000.000.000,00	95	6.100.000.000,00	95,5	6.200.000.000,00	95,7	6.300.000.000,00	96	6.400.000.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Dasar	Persentase APS Pendidikan SD (%)	95	96	97	16.000.000.000,00	98	16.000.000.000,00	98,5	16.000.000.000,00	98,7	16.000.000.000,00	99	16.000.000.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Kesetaraan/Non Formal	Persentase APS Pendidikan Kesetaraan (%)	62	62,5	63	3.000.000.000,00	63,5	3.100.000.000,00	64	3.200.000.000,00	64,5	3.300.000.000,00	65	3.400.000.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Menengah Pertama	Persentase APS Pendidikan SMP (%)	88	88,5	89	16.430.000.000,00	90	16.437.900.000,00	90,5	16.446.839.000,00	90,8	16.456.823.000,00	91	16.467.857.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					221.000.000,00		230.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	100	221.000.000,00	100	230.000.000,00	100	240.000.000,00	100	250.000.000,00	100	260.000.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	100	100	100	100.000.000,00	100	105.000.000,00	100	110.000.000,00	100	115.000.000,00	100	120.000.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					200.000.000,00		205.000.000,00		210.000.000,00		215.000.000,00		220.000.000,00	
Meningkanya Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100	100	100	200.000.000,00	100	205.000.000,00	100	210.000.000,00	100	215.000.000,00	100	220.000.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					151.495.395.000,00		152.252.872.000,00		153.014.136.000,00		153.779.207.000,00		154.548.103.000,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					105.367.535.000,00		105.894.373.000,00		106.351.731.000,00		106.955.964.000,00		107.490.744.000,00	
terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	50	80	80	105.367.535.000,00	80	105.894.373.000,00	80	106.351.731.000,00	80	106.955.964.000,00	80	107.490.744.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	78	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Manajemen Aset (Kategori)	75	80	80		80		80		85		85		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					42.490.521.000,00		42.702.973.000,00		42.916.488.000,00		43.131.071.000,00		43.346.726.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Cakupan Penemuan Kasus TB (Angka)	90	91	92	42.490.521.000,00	93	42.702.973.000,00	94	42.916.488.000,00	95	43.131.071.000,00	96	43.346.726.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	90,51	91	92		93		94		95		96		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (%)	18,3	17,7	16,9		15,9		15		14,1		13,3		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	189	122	109		97		89		77		67		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	16,85	12,62	11,63		10,97		10,46		9,96		8,46		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
					1.108.016.000,00		1.113.556.000,00		1.191.238.000,00		1.124.719.000,00		1.130.343.000,00	
Meningkatnya Mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (Rasio)	100	100	80	1.108.016.000,00	90	1.113.556.000,00	80	1.191.238.000,00	90	1.124.719.000,00	95	1.130.343.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai Standar (%)	80	75	75		75		75		75		75		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN														
					710.000.000,00		713.550.000,00		717.117.000,00		720.703.000,00		724.306.000,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT sesuai Standar (%)	25	75	80	710.000.000,00	85	713.550.000,00	90	717.117.000,00	95	720.703.000,00	100	724.306.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu (%)	50	75	80		85		90		95		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Sarana IRTP yang Memenuhi Ketentuan (%)	25	50	55		60		65		70		75		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan (%)	50	75	80		85		90		95		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	25	50	55		60		65		70		75		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)	25	75	80		85		90		95		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	25	30	40		55		65		78		85		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.819.323.000,00		1.828.420.000,00		1.837.562.000,00		1.846.750.000,00		1.855.984.000,00	
meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Proporsi Jumlah UKM (Persentase)	60	65	70	1.819.323.000,00	71	1.828.420.000,00	72	1.837.562.000,00	73	1.846.750.000,00	74	1.855.984.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	60	65	70		71		72		73		74		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					46.420.535.000,00		46.652.638.000,00		46.885.901.000,00		47.120.330.000,00		47.355.932.000,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.000.000.000,00		9.000.000.000,00		9.000.000.000,00		9.000.000.000,00		9.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	60	61	62	9.000.000.000,00	63	9.000.000.000,00	64	9.000.000.000,00	65	9.000.000.000,00	66	9.000.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					1.200.000.000,00		1.206.000.000,00		1.212.030.000,00		1.218.090.000,00		1.224.180.000,00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	44,5	44,6	45	1.200.000.000,00	46	1.206.000.000,00	47	1.212.030.000,00	48	1.218.090.000,00	49	1.224.180.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					2.336.535.000,00		2.393.218.000,00		2.450.186.000,00		2.507.438.000,00		2.564.975.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Layak (%)	68,26	69,02	69,78	2.336.535.000,00	70,54	2.393.218.000,00	71,3	2.450.186.000,00	72,06	2.507.438.000,00	72,82	2.564.975.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					804.000.000,00		808.020.000,00		812.060.000,00		816.120.000,00		820.201.000,00	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	0	15	20	804.000.000,00	25	808.020.000,00	30	812.060.000,00	35	816.120.000,00	40	820.201.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.000.000.000,00		1.005.000.000,00		1.010.025.000,00		1.015.075.000,00		1.020.150.000,00	
Meningkatnya Akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	84,42	85,18	85,94	1.000.000.000,00	86,7	1.005.000.000,00	87,46	1.010.025.000,00	88,22	1.015.075.000,00	88,98	1.020.150.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.300.000.000,00		2.311.500.000,00		2.323.057.000,00		2.334.672.000,00		2.346.346.000,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam	0	25	28	2.300.000.000,00	30	2.311.500.000,00	33	2.323.057.000,00	35	2.334.672.000,00	40	2.346.346.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Kondisi Baik (Persentase)														Umum dan Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					500.000.000,00		502.500.000,00		505.012.000,00		507.537.000,00		510.075.000,00		
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	20	22	500.000.000,00	25	502.500.000,00	28	505.012.000,00	30	507.537.000,00	33	510.075.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					430.000.000,00		432.150.000,00		434.310.000,00		436.482.000,00		438.664.000,00		
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	70,59	70,59	70,59	430.000.000,00	70,59	432.150.000,00	76,47	434.310.000,00	76,47	436.482.000,00	82,35	438.664.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					1.250.000.000,00		1.256.250.000,00		1.262.531.000,00		1.268.843.000,00		1.275.188.000,00		
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	0	25	28	1.250.000.000,00	30	1.256.250.000,00	33	1.262.531.000,00	35	1.268.843.000,00	38	1.275.188.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					27.000.000.000,00		27.135.000.000,00		27.270.675.000,00		27.407.028.000,00		27.544.063.000,00		
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Rasio kemandapan jalan (%)	55:55	56.19:56.19	56.74:56.74	27.000.000.000,00	57.29:57.29	27.135.000.000,00	57.84:57.84	27.270.675.000,00	58.39:58.39	27.407.028.000,00	58.94:58.94	27.544.063.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					200.000.000,00		201.000.000,00		202.005.000,00		203.015.000,00		204.030.000,00		
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil (%)	0	10	15	200.000.000,00	20	201.000.000,00	25	202.005.000,00	30	203.015.000,00	35	204.030.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					400.000.000,00		402.000.000,00		404.010.000,00		406.030.000,00		408.060.000,00		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Kasus)	0	0	0	400.000.000,00	0	402.000.000,00	0	404.010.000,00	0	406.030.000,00	0	408.060.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					4.819.574.000,00		4.843.672.000,00		4.867.891.000,00		4.892.232.000,00		4.916.693.000,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.742.247.000,00		3.760.966.000,00		3.779.772.000,00		3.798.674.000,00		3.817.667.000,00	
meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	70	75	55	3.742.247.000,00	60	3.760.966.000,00	65	3.779.772.000,00	70	3.798.674.000,00	75	3.817.667.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					109.257.000,00		109.796.000,00		110.345.000,00		110.896.000,00		111.451.000,00	
terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	109.257.000,00	100	109.796.000,00	100	110.345.000,00	100	110.896.000,00	100	111.451.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					316.070.000,00		317.650.000,00		319.238.000,00		320.834.000,00		322.438.000,00	
meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	25	40	12	316.070.000,00	20	317.650.000,00	28	319.238.000,00	36	320.834.000,00	44	322.438.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					330.000.000,00		331.650.000,00		333.308.000,00		334.974.000,00		336.649.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	25	40	12	330.000.000,00	20	331.650.000,00	28	333.308.000,00	36	334.974.000,00	44	336.649.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					322.000.000,00		323.610.000,00		325.228.000,00		326.854.000,00		328.488.000,00	
Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	100	100	100	322.000.000,00	100	323.610.000,00	100	325.228.000,00	100	326.854.000,00	100	328.488.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					24.495.300.000,00		24.617.776.000,00		24.740.865.000,00		24.864.569.000,00		24.988.892.000,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.742.850.000,00		21.852.354.000,00		21.969.231.000,00		22.071.306.000,00		22.176.936.000,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	67,25	68	69	2.775.868.000,00	70	2.789.747.000,00	70	2.811.309.000,00	70	2.817.715.000,00	70	2.831.804.000,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	70	70	75	18.966.982.000,00	80	19.062.607.000,00	80	19.157.922.000,00	80	19.253.591.000,00	80	19.345.132.000,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					987.450.000,00		991.597.000,00		996.553.000,00		1.001.535.000,00		1.006.539.000,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	30	30	50.000.000,00	40	110.000.000,00	42	110.550.000,00	55	111.102.000,00	63	111.657.000,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	90	90	90	299.000.000,00	90	300.495.000,00	90	301.997.000,00	90	303.506.000,00	90	255.053.000,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	0	70	75	330.450.000,00	80	272.102.000,00	85	273.462.000,00	90	274.830.000,00	100	326.203.000,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota SATPOL PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Perda / PERKADA Serta Penyelenggaraan Trantibuntranmas (%)	70	70	75	308.000.000,00	80	309.000.000,00	85	310.544.000,00	90	312.097.000,00	95	313.626.000,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.515.000.000,00		1.522.575.000,00		1.522.575.000,00		1.537.838.000,00		1.545.527.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	90	90	90	825.000.000,00	90	825.000.000,00	95	825.000.000,00	95	840.263.000,00	95	840.263.000,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah atau Legal (%)	90	90	90		90		95		95		95		1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	90	90	90	410.000.000,00	90	410.000.000,00	95	410.000.000,00	95	410.000.000,00	95	410.000.000,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	90	90	90	280.000.000,00	90	287.575.000,00	95	287.575.000,00	95	287.575.000,00	95	295.264.000,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					250.000.000,00		251.250.000,00		252.506.000,00		253.890.000,00		259.890.000,00	
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	80	80	80	250.000.000,00	80	251.250.000,00	80	252.506.000,00	85	253.890.000,00	90	259.890.000,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	80	80	80		80		80		85		90		1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.598.717.000,00		5.626.710.000,00		5.654.844.000,00		5.683.118.000,00		5.711.534.000,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.790.000.000,00		4.795.000.000,00		4.800.000.000,00		4.805.000.000,00		4.810.000.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	61,85	68,45	69,50	4.790.000.000,00	70,55	4.795.000.000,00	71,65	4.800.000.000,00	72,75	4.805.000.000,00	73,85	4.810.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					265.717.000,00		270.710.000,00		275.844.000,00		281.118.000,00		286.534.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	40	50	60	265.717.000,00	70	270.710.000,00	80	275.844.000,00	90	281.118.000,00	100	286.534.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	40	50	60		70		80		90		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					290.000.000,00		295.000.000,00		300.000.000,00		305.000.000,00		310.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)	80	85	90	290.000.000,00	92	295.000.000,00	94	300.000.000,00	96	305.000.000,00	98	310.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)	80	85	90		92		94		96		98		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)	80	85	90		92		94		96		98		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)	80	85	90		92		94		96		98		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Angka)	56,1	56,1	56,6		57,1		57,6		58,1		58,6		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)	80	85	90		92		94		96		98		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Angka)	48,98	48,98	49,48		49,98		50,48		50,98		51,48		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					95.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	75	85	87	95.000.000,00	89	100.000.000,00	91	105.000.000,00	93	110.000.000,00	95	115.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat	3	3	3		3		3		3		3		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Kemandirian Ekonomi (Persentase)														
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					100.000.000,00		104.000.000,00		108.000.000,00		112.000.000,00		116.000.000,00		
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	104.000.000,00	100	108.000.000,00	100	112.000.000,00	100	116.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					58.000.000,00		62.000.000,00		66.000.000,00		70.000.000,00		74.000.000,00		
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	70	80	84	58.000.000,00	88	62.000.000,00	93	66.000.000,00	97	70.000.000,00	100	74.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					4.127.301.000,00		4.147.937.000,00		4.168.678.000,00		4.189.524.000,00		4.210.475.000,00		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.897.301.000,00		3.916.787.000,00		3.936.378.000,00		3.956.074.000,00		3.975.875.000,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	60	60	65	3.897.301.000,00	65	3.916.787.000,00	70	3.936.378.000,00	75	3.956.074.000,00	80	3.975.875.000,00	2.07.3.32.0.00.02.0000 - Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.000,00		20.300.000,00		20.400.000,00		
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	70	70	70	20.000.000,00	70	20.100.000,00	80	20.200.000,00	80	20.300.000,00	80	20.400.000,00	2.07.3.32.0.00.02.0000 - Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN					20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.000,00		20.300.000,00		20.400.000,00		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	20	20	20	20.000.000,00	30	20.100.000,00	30	20.200.000,00	50	20.300.000,00	50	20.400.000,00	2.07.3.32.0.00.02.0000 - Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					120.000.000,00		120.600.000,00		121.200.000,00		121.800.000,00		122.400.000,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	70	70	70	120.000.000,00	70	120.600.000,00	70	121.200.000,00	70	121.800.000,00	70	122.400.000,00	2.07.3.32.0.00.02.0000 - Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					70.000.000,00		70.350.000,00		70.700.000,00		71.050.000,00		71.400.000,00	
Meningkatnya pekerja	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	100	110	121	70.000.000,00	133	70.350.000,00	147	70.700.000,00	162	71.050.000,00	178	71.400.000,00	2.07.3.32.0.00.02.0000 - Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					688.126.000,00		691.566.000,00		695.025.000,00		698.500.000,00		701.993.000,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					368.126.000,00		369.967.000,00		371.820.000,00		373.680.000,00		375.549.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	5,55	6,05	6,10	368.126.000,00	6,60	369.967.000,00	7,10	371.820.000,00	7,60	373.680.000,00	8,10	375.549.000,00	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	56,22	56,28	56,30		56,34		56,37		56,42		56,46		2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					100.488.000,00		100.990.000,00		101.495.000,00		102.002.000,00		102.512.000,00	
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	95	95	98	100.488.000,00	98,5	100.990.000,00	99	101.495.000,00	99,5	102.002.000,00	100	102.512.000,00	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					25.000.000,00		25.125.000,00		25.250.000,00		25.376.000,00		25.503.000,00	
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mendukung kesetaraan, gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	100	3,85	29,49	25.000.000,00	55,13	25.125.000,00	74,36	25.250.000,00	90,38	25.376.000,00	100	25.503.000,00	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					25.000.000,00		25.125.000,00		25.250.000,00		25.376.000,00		25.503.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan (%)	100	100	100	25.000.000,00	100	25.125.000,00	100	25.250.000,00	100	25.376.000,00	100	25.503.000,00	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					25.000.000,00		25.125.000,00		25.250.000,00		25.376.000,00		25.503.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terjaminnya Pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	66,25	66,25	68,18	25.000.000,00	68,91	25.125.000,00	69,59	25.250.000,00	70,60	25.376.000,00	71,61	25.503.000,00	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					144.512.000,00		145.234.000,00		145.960.000,00		146.690.000,00		147.423.000,00	
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	90	90	92,25	144.512.000,00	95,50	145.234.000,00	95,75	145.960.000,00	96	146.690.000,00	96,25	147.423.000,00	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	89,14	89,14	90,2		91,2		92,2		95,5		96,2	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					4.883.101.792,00		4.907.517.301,00		4.932.054.887,00		4.956.715.162,00		4.981.498.738,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.283.101.792,00		4.305.592.301,00		4.327.329.887,00		4.349.040.162,00		4.370.848.738,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	80	80	80	4.283.101.792,00	80	4.305.592.301,00	80	4.327.329.887,00	80	4.349.040.162,00	80	4.370.848.738,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					100.000.000,00		100.500.000,00		101.000.000,00		101.500.000,00		102.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk	Persentase Pendukung Ketersediaan	45	45	45,5	100.000.000,00	46	100.500.000,00	46,5	101.000.000,00	47	101.500.000,00	47,5	102.000.000,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kedaulatan dan kemandirian pangan	Cadangan Pangan (%)													
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					350.000.000,00		350.675.000,00		352.225.000,00		353.925.000,00		355.650.000,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (Angka)	91,60	91,60	92,00	115.000.000,00	92,25	115.575.000,00	92,50	116.150.000,00	92,75	116.725.000,00	93,00	117.300.000,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya jumlah cadangan pangan daerah	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	100	100	100	235.000.000,00	100	235.100.000,00	100	236.075.000,00	100	237.200.000,00	100	238.350.000,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					115.000.000,00		115.575.000,00		116.150.000,00		116.725.000,00		117.300.000,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	12,00	12,00	11,75	115.000.000,00	11,50	115.575.000,00	11,25	116.150.000,00	11,00	116.725.000,00	10,75	117.300.000,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					35.000.000,00		35.175.000,00		35.350.000,00		35.525.000,00		35.700.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	80	80	80	35.000.000,00	80	35.175.000,00	80	35.350.000,00	80	35.525.000,00	80	35.700.000,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					30.000.000,00		30.150.000,00		30.300.000,00		30.450.000,00		30.603.000,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					10.000.000,00		10.050.000,00		10.100.000,00		10.150.000,00		10.201.000,00	
meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terelesaiannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.050.000,00	100	10.100.000,00	100	10.150.000,00	100	10.201.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					10.000.000,00		10.050.000,00		10.100.000,00		10.150.000,00		10.201.000,00	
meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.050.000,00	100	10.100.000,00	100	10.150.000,00	100	10.201.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					10.000.000,00		10.050.000,00		10.100.000,00		10.150.000,00		10.201.000,00	
meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.050.000,00	100	10.100.000,00	100	10.150.000,00	100	10.201.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					10.246.981.000,00		10.298.216.000,00		10.349.709.000,00		10.401.462.000,00		10.453.476.000,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.404.981.000,00		9.452.066.000,00		9.499.309.000,00		9.546.912.000,00		9.594.776.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	45,30	45,70	45,90	9.404.981.000,00	48,00	9.452.066.000,00	49,50	9.499.309.000,00	50,00	9.546.912.000,00	50,50	9.594.776.000,00	2.11.3.28.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					30.000.000,00		30.150.000,00		30.300.000,00		30.450.000,00		30.600.000,00	
Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	90	91	92	30.000.000,00	93	30.150.000,00	94	30.300.000,00	95	30.450.000,00	96	30.600.000,00	2.11.3.28.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					120.000.000,00		120.600.000,00		121.200.000,00		121.800.000,00		122.400.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	45,60	59,06	59,26	120.000.000,00	59,46	120.600.000,00	59,66	121.200.000,00	59,86	121.800.000,00	60,06	122.400.000,00	2.11.3.28.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	92,11	72,72	73,02		73,32		73,62		73,92		74,22		2.11.3.28.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					60.000.000,00		60.300.000,00		60.600.000,00		60.900.000,00		61.200.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	46,95	69,85	69,92	60.000.000,00	69,99	60.300.000,00	70,06	60.600.000,00	70,12	60.900.000,00	70,19	61.200.000,00	2.11.3.28.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					30.000.000,00		30.150.000,00		30.300.000,00		30.450.000,00		30.600.000,00	
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	60	70	80	30.000.000,00	82	30.150.000,00	84	30.300.000,00	86	30.450.000,00	88	30.600.000,00	2.11.3.28.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					60.000.000,00		60.300.000,00		60.600.000,00		60.900.000,00		61.200.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	74	76	78	60.000.000,00	80	60.300.000,00	82	60.600.000,00	84	60.900.000,00	86	61.200.000,00	2.11.3.28.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					30.000.000,00		30.150.000,00		30.300.000,00		30.450.000,00		30.600.000,00	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	80	82	84	30.000.000,00	86	30.150.000,00	88	30.300.000,00	90	30.450.000,00	92	30.600.000,00	2.11.3.28.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					60.000.000,00		60.300.000,00		60.600.000,00		60.900.000,00		61.200.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	90	91	92	60.000.000,00	93	60.300.000,00	94	60.600.000,00	95	60.900.000,00	96	61.200.000,00	2.11.3.28.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					30.000.000,00		30.150.000,00		30.300.000,00		30.450.000,00		30.600.000,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	50	55	60	30.000.000,00	65	30.150.000,00	70	30.300.000,00	75	30.450.000,00	80	30.600.000,00	2.11.3.28.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					30.000.000,00		30.150.000,00		30.300.000,00		30.450.000,00		30.600.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	85	86	87	30.000.000,00	88	30.150.000,00	89	30.300.000,00	90	30.450.000,00	91	30.600.000,00	2.11.3.28.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					392.000.000,00		393.900.000,00		395.900.000,00		397.800.000,00		399.700.000,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Pengurangan Volume Sampah Kabupaten (%)	38,75	39,00	39,25	392.000.000,00	39,50	393.900.000,00	39,75	395.900.000,00	40,00	397.800.000,00	40,25	399.700.000,00	2.11.3.28.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.738.108.000,00		5.766.798.000,00		5.795.632.000,00		5.824.610.000,00		5.853.733.000,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.138.108.000,00		5.163.798.000,00		5.189.620.000,00		5.215.566.000,00		5.241.645.000,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelolah Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	1	1	1	5.138.108.000,00	1	5.163.798.000,00	1	5.189.620.000,00	1	5.215.566.000,00	1	5.241.645.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					150.000.000,00		150.750.000,00		151.503.000,00		152.261.000,00		153.022.000,00	
Meningkanya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	-	30	30	150.000.000,00	30	150.750.000,00	30	151.503.000,00	30	152.261.000,00	30	153.022.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					150.000.000,00		150.750.000,00		151.503.000,00		152.261.000,00		153.022.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	-	100	100	150.000.000,00	100	150.750.000,00	100	151.503.000,00	100	152.261.000,00	100	153.022.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	-	100	100			100		100		100		100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang	-	100	100			100		100		100		100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Melaporkan (Persentase)													
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					150.000.000,00		150.750.000,00		151.503.000,00		152.261.000,00		153.022.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	40	50	50	150.000.000,00	60	150.750.000,00	70	151.503.000,00	80	152.261.000,00	90	153.022.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					150.000.000,00		150.750.000,00		151.503.000,00		152.261.000,00		153.022.000,00	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	150.000.000,00	100	150.750.000,00	100	151.503.000,00	100	152.261.000,00	100	153.022.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					4.683.752.000,00		4.707.170.000,00		4.730.706.000,00		4.754.360.000,00		4.778.132.000,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.229.719.000,00		4.251.017.000,00		4.272.422.000,00		4.293.934.000,00		4.315.554.000,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	64,05	72	65	4.229.719.000,00	67	4.251.017.000,00	70	4.272.422.000,00	75	4.293.934.000,00	80	4.315.554.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (%)	0	45	50	20.000.000,00	60	20.000.000,00	70	20.000.000,00	75	20.000.000,00	80	20.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitas Kerja Sama Desa (%)	0	45	48	10.000.000,00	50	10.000.000,00	52	10.000.000,00	56	10.000.000,00	60	10.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					173.974.000,00		174.844.000,00		175.718.000,00		176.597.000,00		177.480.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	70	72	75	173.974.000,00	77	174.844.000,00	78	175.718.000,00	80	176.597.000,00	85	177.480.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					250.059.000,00		251.309.000,00		252.566.000,00		253.829.000,00		255.098.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	37	40	47	250.059.000,00	55	251.309.000,00	60	252.566.000,00	65	253.829.000,00	70	255.098.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					4.376.060.000,00		4.397.941.000,00		4.419.930.000,00		4.442.029.000,00		4.464.239.000,00	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.888.060.000,00		3.907.501.000,00		3.927.038.000,00		3.946.673.000,00		3.966.407.000,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	73	74	75	3.888.060.000,00	76	3.907.501.000,00	77	3.927.038.000,00	78	3.946.673.000,00	79	3.966.407.000,00	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					45.000.000,00		45.225.000,00		45.451.000,00		45.678.000,00		45.906.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Total Fertily Rate (TFR). (Orang)	2,34	2,24	2,23	45.000.000,00	2,22	45.225.000,00	2,21	45.451.000,00	2,21	45.678.000,00	2,20	45.906.000,00	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertily Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	29,9	19.5-19.3	19.1-18.9		18.7-18.5		18.3-18.0		17.9-17.5		17.3-17.0	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					403.000.000,00		405.015.000,00		407.040.000,00		409.075.000,00		411.120.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	72,4	67,05	67,1	403.000.000,00	68	405.015.000,00	69	407.040.000,00	70	409.075.000,00	71	411.120.000,00	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	7,6	13	12,5		12		11,01		10,5		10		2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	0	89,4	89,9		90,3		90,8		91,2		91,7		2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN					40.000.000,00		40.200.000,00		40.401.000,00		40.603.000,00		40.806.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera(KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	60	65	70	40.000.000,00	75	40.200.000,00	80	40.401.000,00	85	40.603.000,00	90	40.806.000,00	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	75	74,4	74,8		75,2		75,6		75,9		76,2	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	0	87,8	88,9		89,9		90,9		91,7		92,5	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	0	12,6	25,3		37,9		47,4		70,2		83,5	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					3.916.389.000,00		3.935.971.000,00		3.955.651.000,00		3.975.429.000,00		3.995.307.000,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.570.437.000,00		3.588.289.000,00		3.606.230.000,00		3.624.261.000,00		3.642.383.000,00	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	59	59	60	3.570.437.000,00	60	3.588.289.000,00	65	3.606.230.000,00	65	3.624.261.000,00	65	3.642.383.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					345.952.000,00		347.682.000,00		349.421.000,00		351.168.000,00		352.924.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	60	62	64	345.952.000,00	66	347.682.000,00	68	349.421.000,00	70	351.168.000,00	72	352.924.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	25	30	35		40		45		50		55		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.076.750.000,00		8.117.134.000,00		8.157.719.000,00		8.198.509.000,00		8.239.501.000,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.361.750.000,00		4.383.559.000,00		4.405.477.000,00		4.427.506.000,00		4.449.643.000,00	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	65	70	75	4.361.750.000,00	80	4.383.559.000,00	85	4.405.477.000,00	90	4.427.506.000,00	95	4.449.643.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.075.000.000,00		1.080.375.000,00		1.085.776.000,00		1.091.205.000,00		1.096.661.000,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	80	83	84	1.075.000.000,00	85	1.080.375.000,00	87	1.085.776.000,00	88	1.091.205.000,00	90	1.096.661.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.640.000.000,00		2.653.200.000,00		2.666.466.000,00		2.679.798.000,00		2.693.197.000,00	
Meningkatnya kualitas pengolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (Angka)	2,87	2,95	3,02	2.640.000.000,00	3,09	2.653.200.000,00	3,23	2.666.466.000,00	3,3	2.679.798.000,00	3,37	2.693.197.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					240.000.000,00		241.200.000,00		242.404.000,00		243.616.000,00		244.836.000,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.000,00		20.301.000,00		20.403.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	18,18	18,18	18,18	20.000.000,00	19,09	20.100.000,00	20	20.200.000,00	20,90	20.301.000,00	21,81	20.403.000,00	3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					40.000.000,00		40.200.000,00		40.401.000,00		40.603.000,00		40.806.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	13,63	13,63	18,18	40.000.000,00	20,45	40.200.000,00	22,72	40.401.000,00	25	40.603.000,00	25	40.806.000,00	3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.000,00		20.301.000,00		20.403.000,00	
Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	20	20	22	20.000.000,00	24	20.100.000,00	25	20.200.000,00	27	20.301.000,00	30	20.403.000,00	3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					60.000.000,00		60.300.000,00		60.601.000,00		60.904.000,00		61.209.000,00	
Meningkatnya produktifitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	20	20	22	60.000.000,00	24	60.300.000,00	25	60.601.000,00	27	60.904.000,00	30	61.209.000,00	3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					80.000.000,00		80.400.000,00		80.802.000,00		81.206.000,00		81.612.000,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri.	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	15,50	15,50	19,40	80.000.000,00	22	80.400.000,00	25,90	80.802.000,00	29,80	81.206.000,00	29,80	81.612.000,00	3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	15,50	15,50	15,50		19,40		22		25,90		29,80		3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.000,00		20.301.000,00		20.403.000,00	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	220	220	220	20.000.000,00	350	20.100.000,00	500	20.200.000,00	550	20.301.000,00	600	20.403.000,00	3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.573.793.000,00		4.596.662.000,00		4.619.646.000,00		4.642.744.000,00		4.665.957.000,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.773.793.000,00		3.792.662.000,00		3.811.628.000,00		3.830.686.000,00		3.849.838.000,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	60	70	70	3.773.793.000,00	75	3.792.662.000,00	75	3.811.628.000,00	85	3.830.686.000,00	85	3.849.838.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					300.000.000,00		301.500.000,00		303.007.000,00		304.522.000,00		306.045.000,00	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Jumlah PMA/PMDN Realisasi Investasi (%)	100	100	100	300.000.000,00	100	301.500.000,00	100	303.007.000,00	100	304.522.000,00	100	306.045.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					100.000.000,00		100.500.000,00		101.002.000,00		101.507.000,00		102.015.000,00	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.500.000,00	100	101.002.000,00	100	101.507.000,00	100	102.015.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					200.000.000,00		201.000.000,00		202.005.000,00		203.015.000,00		204.030.000,00	
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	200.000.000,00	100	201.000.000,00	100	202.005.000,00	100	203.015.000,00	100	204.030.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN					150.000.000,00		150.750.000,00		151.503.000,00		152.261.000,00		153.022.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL															
Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	35	40	40	150.000.000,00	45	150.750.000,00	45	151.503.000,00	50	152.261.000,00	50	153.022.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					50.000.000,00		50.250.000,00		50.501.000,00		50.753.000,00		51.007.000,00		
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	35	40	40	50.000.000,00	45	50.250.000,00	45	50.501.000,00	50	50.753.000,00	50	51.007.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					5.440.683.000,00		5.467.886.000,00		5.495.226.000,00		5.522.702.000,00		5.550.316.000,00		
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.890.045.000,00		3.909.495.000,00		3.929.044.000,00		3.948.690.000,00		3.968.433.000,00		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	58	60	61	3.890.045.000,00	62	3.909.495.000,00	63	3.929.044.000,00	64	3.948.690.000,00	65	3.968.433.000,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					34.000.000,00		34.170.000,00		34.340.000,00		34.512.000,00		34.685.000,00		
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirusaha Pemuda (Persentase)	1,86	1,96	2,06	34.000.000,00	2,16	34.170.000,00	2,26	34.340.000,00	2,36	34.512.000,00	2,46	34.685.000,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.266.638.000,00		1.272.971.000,00		1.279.336.000,00		1.285.732.000,00		1.292.161.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	2	2,50	3	1.266.638.000,00	3,50	1.272.971.000,00	4	1.279.336.000,00	4,50	1.285.732.000,00	5	1.292.161.000,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					250.000.000,00		251.250.000,00		252.506.000,00		253.768.000,00		255.037.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	3,54	3,64	3,74	250.000.000,00	3,84	251.250.000,00	3,94	252.506.000,00	4,04	253.768.000,00	4,14	255.037.000,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					65.000.000,00		65.325.000,00		65.651.000,00		65.979.000,00		66.309.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					65.000.000,00		65.325.000,00		65.651.000,00		65.979.000,00		66.309.000,00	
Tercapainya kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,6	2,80	2,83	65.000.000,00	2,87	65.325.000,00	2,88	65.651.000,00	2,89	65.979.000,00	3,00	66.309.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					140.000.000,00		140.700.000,00		141.404.000,00		142.110.000,00		142.821.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					140.000.000,00		140.700.000,00		141.404.000,00		142.110.000,00		142.821.000,00	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	300	300	310	140.000.000,00	320	140.700.000,00	330	141.404.000,00	340	142.110.000,00	350	142.821.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.050.000.000,00		1.075.000.000,00		1.100.000.000,00		1.125.000.000,00		1.150.000.000,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					600.000.000,00		615.000.000,00		630.000.000,00		645.000.000,00		660.000.000,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	100	100	100	600.000.000,00	100	615.000.000,00	100	630.000.000,00	100	645.000.000,00	100	660.000.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	100	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					300.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	100	100	100	300.000.000,00	100	310.000.000,00	100	320.000.000,00	100	330.000.000,00	100	340.000.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	100	100	100				100		100		100		1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					3.286.843.000,00		3.303.276.000,00		3.319.792.000,00		3.336.392.000,00		3.353.076.000,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.784.343.000,00		2.798.263.000,00		2.812.254.000,00		2.826.317.000,00		2.840.451.000,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	46,30	60	61	2.784.343.000,00	62	2.798.263.000,00	63	2.812.254.000,00	64	2.826.317.000,00	65	2.840.451.000,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					402.000.000,00		404.010.000,00		406.030.000,00		408.060.000,00		410.100.000,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	17,16	18	19	402.000.000,00	20	404.010.000,00	21	406.030.000,00	22	408.060.000,00	23	410.100.000,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					100.500.000,00		101.003.000,00		101.508.000,00		102.015.000,00		102.525.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0,1	0,1	0,1	100.500.000,00	0,1	101.003.000,00	0,1	101.508.000,00	0,1	102.015.000,00	0,1	102.525.000,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					361.800.000,00		363.610.000,00		365.429.000,00		367.255.000,00		369.089.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					165.825.000,00		166.655.000,00		167.488.000,00		168.325.000,00		169.167.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	71	72	72	165.825.000,00	72	166.655.000,00	73	167.488.000,00	73	168.325.000,00	73	169.167.000,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					165.825.000,00		166.655.000,00		167.488.000,00		168.325.000,00		169.166.000,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	78,6	72	72	165.825.000,00	72	166.655.000,00	73	167.488.000,00	73	168.325.000,00	73	169.166.000,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					30.150.000,00		30.300.000,00		30.453.000,00		30.605.000,00		30.756.000,00	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	78,6	72	72	30.150.000,00	72	30.300.000,00	73	30.453.000,00	73	30.605.000,00	73	30.756.000,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					4.391.434.000,00		4.413.392.000,00		4.435.459.000,00		4.457.636.000,00		4.479.924.000,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.823.960.000,00		3.843.079.000,00		3.862.295.000,00		3.881.606.000,00		3.901.014.000,00	
Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80	80	80	3.823.960.000,00	81,60	3.843.079.000,00	83,20	3.862.295.000,00	84,80	3.881.606.000,00	86,40	3.901.014.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					144.625.000,00		145.349.000,00		146.076.000,00		146.807.000,00		147.541.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.643	1.643	1.651	144.625.000,00	1.659	145.349.000,00	1.668	146.076.000,00	1.676	146.807.000,00	1.684	147.541.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					311.104.000,00		312.659.000,00		314.222.000,00		315.793.000,00		317.372.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	13.230	15.200	15.276	311.104.000,00	15.352	312.659.000,00	15.429	314.222.000,00	15.506	315.793.000,00	15.584	317.372.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					11.847.000,00		11.907.000,00		11.966.000,00		12.026.000,00		12.086.000,00	
Meningkatnya Kelestarian laut dan Keanekaragaman Hayati	Luasan Kawasan Konservasi (Km ²)	40,5	40,5	40,5	11.847.000,00	40,5	11.907.000,00	40,5	11.966.000,00	40,5	12.026.000,00	40,5	12.086.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					99.898.000,00		100.398.000,00		100.900.000,00		101.404.000,00		101.911.000,00	
Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	15.206.000	15.206.000	15.206.000	99.898.000,00	15.282.030	100.398.000,00	15.358.440	100.900.000,00	15.435.232	101.404.000,00	15.512.409	101.911.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					3.425.240.000,00		3.442.366.000,00		3.459.578.000,00		3.476.876.000,00		3.494.260.000,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.204.132.000,00		3.220.151.000,00		3.236.302.000,00		3.252.434.000,00		3.268.775.000,00	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	59,20	65,00	65,10	3.204.132.000,00	65,20	3.220.151.000,00	65,30	3.236.302.000,00	65,40	3.252.434.000,00	65,50	3.268.775.000,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					41.473.000,00		41.680.000,00		41.889.000,00		42.098.000,00		42.309.000,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	80	82	85	41.473.000,00	87	41.680.000,00	90	41.889.000,00	92	42.098.000,00	95	42.309.000,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					101.486.000,00		101.994.000,00		102.504.000,00		103.016.000,00		103.531.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	80	82	85	101.486.000,00	87	101.994.000,00	90	102.504.000,00	92	103.016.000,00	95	103.531.000,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					34.890.000,00		35.065.000,00		35.240.000,00		35.416.000,00		35.514.000,00	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	80	82	85	34.890.000,00	87	35.065.000,00	90	35.240.000,00	92	35.416.000,00	95	35.514.000,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					43.259.000,00		43.476.000,00		43.643.000,00		43.912.000,00		44.131.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	80	82	85	43.259.000,00	87	43.476.000,00	90	43.643.000,00	92	43.912.000,00	95	44.131.000,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					21.249.780.000,00		21.356.029.374,00		21.462.809.521,00		21.570.123.569,00		21.677.974.187,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.974.965.000,00		16.051.029.374,00		16.136.143.521,00		16.315.123.569,00		16.301.062.187,00	
Nilai AKIP OPD	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	60	63	71	15.974.965.000,00	75	16.051.029.374,00	79	16.136.143.521,00	80	16.315.123.569,00	85	16.301.062.187,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					600.000.000,00		625.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		725.000.000,00	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	105,75	107,65	109,55	600.000.000,00	111,45	625.000.000,00	113,35	650.000.000,00	115,25	700.000.000,00	117,15	725.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	105	106,50	108		109,50		111		112,50		114		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	110,20	112	113,80		115,60		117,40		119,20		121		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	125,50	127	128,50		130		131,50		133		134,50		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					3.299.815.000,00		3.405.000.000,00		3.376.666.000,00		3.040.000.000,00		3.311.912.000,00	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	7.630,30	7.630,30	7.630,30	3.299.815.000,00	7.630,30	3.405.000.000,00	7.630,30	3.376.666.000,00	7.630,30	3.040.000.000,00	7.630,30	3.311.912.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					465.000.000,00		490.000.000,00		515.000.000,00		490.000.000,00		515.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	4	4	4	465.000.000,00	4	490.000.000,00	4	515.000.000,00	4	490.000.000,00	4	515.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	10	15	20		40		60		80		80		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	0	10	20	50.000.000,00	40	50.000.000,00	60	50.000.000,00	80	50.000.000,00	100	50.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					610.000.000,00		485.000.000,00		485.000.000,00		725.000.000,00		525.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	20	30	40	610.000.000,00	50	485.000.000,00	60	485.000.000,00	70	725.000.000,00	80	525.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	10	20	40		60		80		90		100		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					90.000.000,00		90.450.000,00		90.900.000,00		91.350.000,00		91.800.000,00	
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					90.000.000,00		90.450.000,00		90.900.000,00		91.350.000,00		91.800.000,00	
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati (Indeks)	46,95	69,85	69,92	90.000.000,00	69,99	90.450.000,00	70,06	90.900.000,00	70,12	91.350.000,00	70,19	91.800.000,00	2.11.3.28.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					3.302.489.000,00		3.319.011.000,00		3.335.618.500,00		3.352.306.488,00		3.369.075.950,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.796.377.000,00		2.810.358.000,00		2.824.410.500,00		2.838.532.488,00		2.852.724.950,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Tercapainya Tujuan OPD (Persentase PDRB Sektor Perdagangan, Industri Pengolahan serta Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM) (%)	80	80	80	2.796.377.000,00	80	2.810.358.000,00	80	2.824.410.500,00	80	2.838.532.488,00	80	2.852.724.950,00	3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,
	Nilai AKIP OPD (Angka)	80	80	80		80		80		80		80		3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,
	Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Angka)	80	80	80		80		80		80		80		3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,
	Persentase Capaian Kinerja Seluruh ASN (%)	80	80	80		80		80		80		80		3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					40.000.000,00		40.200.000,00		40.401.000,00		40.603.000,00		40.806.000,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	80	80	81	40.000.000,00	82	40.200.000,00	83	40.401.000,00	84	40.603.000,00	85	40.806.000,00	3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					100.000.000,00		100.500.000,00		101.002.000,00		101.507.000,00		102.015.000,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan dsitribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	50	50	51	100.000.000,00	52	100.500.000,00	53	101.002.000,00	54	101.507.000,00	55	102.015.000,00	3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					176.203.000,00		177.085.000,00		177.974.000,00		178.864.000,00		179.755.000,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	80	80	81	176.203.000,00	82	177.085.000,00	83	177.974.000,00	84	178.864.000,00	85	179.755.000,00	3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					60.000.000,00		60.300.000,00		60.601.000,00		60.904.000,00		61.209.000,00	
Meningkatnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	50	50	51	60.000.000,00	52	60.300.000,00	53	60.601.000,00	54	60.904.000,00	55	61.209.000,00	3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					89.909.000,00		90.358.000,00		90.810.000,00		91.264.000,00		91.720.000,00	
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	16,6	16,6	16,6	89.909.000,00	16,6	90.358.000,00	16,6	90.810.000,00	16,6	91.264.000,00	16,6	91.720.000,00	3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					40.000.000,00		40.210.000,00		40.420.000,00		40.632.000,00		40.846.000,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	80	80	81	40.000.000,00	82	40.210.000,00	83	40.420.000,00	84	40.632.000,00	85	40.846.000,00	3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					290.000.000,00		291.450.000,00		292.906.000,00		294.370.000,00		295.843.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					210.000.000,00		211.050.000,00		212.105.000,00		213.165.000,00		214.231.000,00	
Meningkatnya realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	20	20	22	210.000.000,00	24	211.050.000,00	26	212.105.000,00	28	213.165.000,00	30	214.231.000,00	3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.000,00		20.301.000,00		20.403.000,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	17,8	17,8	18,8	20.000.000,00	19,8	20.100.000,00	20,8	20.200.000,00	21,8	20.301.000,00	22,8	20.403.000,00	3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					60.000.000,00		60.300.000,00		60.601.000,00		60.904.000,00		61.209.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	75	75	76	60.000.000,00	77	60.300.000,00	78	60.601.000,00	79	60.904.000,00	80	61.209.000,00	3.31.3.30.2.17.99.0000 - Dinas Perdagangan,
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					159.680.000,00		160.478.000,00		161.279.000,00		162.083.000,00		162.890.000,00	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					30.000.000,00		30.150.000,00		30.300.000,00		30.450.000,00		30.600.000,00	
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	70	70	75	30.000.000,00	80	30.150.000,00	80	30.300.000,00	90	30.450.000,00	90	30.600.000,00	2.07.3.32.0.00.02.0000 - Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.000,00		20.300.000,00		20.400.000,00	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	11,7	11,7	11,7	20.000.000,00	11,7	20.100.000,00	11,7	20.200.000,00	11,7	20.300.000,00	11,7	20.400.000,00	2.07.3.32.0.00.02.0000 - Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					109.680.000,00		110.228.000,00		110.779.000,00		111.333.000,00		111.890.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	40	45	45	109.680.000,00	50	110.228.000,00	66,67	110.779.000,00	100	111.333.000,00	100	111.890.000,00	2.07.3.32.0.00.02.0000 - Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					43.234.966.000,00		43.451.141.000,00		43.668.397.000,00		43.886.739.000,00		44.106.173.000,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.291.875.000,00		38.483.336.000,00		38.675.753.000,00		38.869.131.000,00		39.063.477.000,00	
meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	28	32	35	38.291.875.000,00	37,1	38.483.336.000,00	40	38.675.753.000,00	43	38.869.131.000,00	45	39.063.477.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	3,2	3,4	3,6		3,8		4		4,2		4,5		4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					2.503.937.000,00		2.516.456.000,00		2.529.038.000,00		2.541.684.000,00		2.554.392.000,00	
meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	90	92	93	2.503.937.000,00	95	2.516.456.000,00	95	2.529.038.000,00	95	2.541.684.000,00	95	2.554.392.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase Produk Hukum yang Dihilangkan (Persentase)	92	93	94		95		96		98		100		4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.439.154.000,00		2.451.349.000,00		2.463.606.000,00		2.475.924.000,00		2.488.304.000,00	
meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	75	80	85	2.439.154.000,00	87	2.451.349.000,00	90	2.463.606.000,00	92	2.475.924.000,00	95	2.488.304.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	3	3	3		3		3		4		5		4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					42.347.360.000,00		42.775.269.000,00		43.068.374.000,00		43.273.215.000,00		43.500.699.100,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.118.013.000,00		25.468.776.000,00		25.676.404.000,00		25.814.136.000,00		25.942.483.000,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	43,80	50	50,10	25.118.013.000,00	50,15	25.468.776.000,00	50,20	25.676.404.000,00	50,25	25.814.136.000,00	50,30	25.942.483.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					17.229.347.000,00		17.306.493.000,00		17.391.970.000,00		17.459.079.000,00		17.558.216.100,00	
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	75	75	80	16.929.323.000,00	80	17.004.971.000,00	85	17.088.941.000,00	85	17.154.535.000,00	90	17.252.151.100,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	75	75	80	300.024.000,00	80	301.522.000,00	85	303.029.000,00	85	304.544.000,00	90	306.065.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	75	75	80		80		85		85		90		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					10.518.482.300,00		10.571.074.000,00		10.624.013.500,00		10.677.150.450,00		10.730.618.000,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.423.482.300,00		8.465.599.000,00		8.507.927.650,00		8.550.467.850,00		8.593.219.000,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	62,05	76,00	76,10	8.423.482.300,00	76,30	8.465.599.000,00	76,50	8.507.927.650,00	76,70	8.550.467.850,00	77,00	8.593.219.000,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					794.000.000,00		797.970.000,00		801.959.850,00		805.969.600,00		809.999.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	0	100	100	794.000.000,00	100	797.970.000,00	100	801.959.850,00	100	805.969.600,00	100	809.999.000,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		100	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Persentase program prioritas nasional yang di dukung program daerah (%)	0	100	100		100		100		100		100		100	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.301.000.000,00		1.307.505.000,00		1.314.126.000,00		1.320.713.000,00		1.327.400.000,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	0	100	100	651.000.000,00	100	654.255.000,00	100	657.526.000,00	100	660.813.000,00	100	664.200.000,00	100	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	0	100	100	650.000.000,00	100	653.250.000,00	100	656.600.000,00	100	659.900.000,00	100	663.200.000,00	100	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah (Persentase)	0	100	100											5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.02 - KEUANGAN					205.683.702.000,00		206.712.120.000,00		207.745.681.000,00		208.784.410.000,00		209.828.332.000,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.380.380.000,00		23.497.284.000,00		23.614.649.000,00		23.732.640.000,00		23.851.229.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP BKD (Angka)	80	80	85	19.942.470.000,00	85	20.042.185.000,00	90	20.142.396.000,00	90	20.243.108.000,00	95	20.344.323.000,00	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Keuangan Daerah
Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	62,00	70,00	70,50	3.437.910.000,00	71,00	3.455.099.000,00	71,50	3.472.253.000,00	72,00	3.489.532.000,00	72,50	3.506.906.000,00	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					179.828.609.000,00		180.727.750.000,00		181.631.389.000,00		182.539.546.000,00		183.452.244.000,00	
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	940.100.000,00	100	944.800.000,00	100	949.524.000,00	100	954.272.000,00	100	959.043.000,00	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Keuangan Daerah
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	42	42	36	177.930.510.000,00	30	178.820.162.000,00	30	179.714.263.000,00	30	180.612.834.000,00	30	181.515.898.000,00	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Keuangan Daerah
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	22	22	36		40		40		40		40		5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Keuangan Daerah
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	100	100	100	957.999.000,00	100	962.788.000,00	100	967.602.000,00	100	972.440.000,00	100	977.303.000,00	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Keuangan Daerah
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	50	50	60		70		80		90		100		5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Keuangan Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.344.713.000,00		1.351.436.000,00		1.358.193.000,00		1.364.984.000,00		1.371.809.000,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	65	70	75	1.344.713.000,00	75	1.351.436.000,00	80	1.358.193.000,00	90	1.364.984.000,00	100	1.371.809.000,00	5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Keuangan Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.130.000.000,00		1.135.650.000,00		1.141.450.000,00		1.147.240.000,00		1.153.050.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan	69	94	94	155.000.000,00	98	155.775.000,00	98	156.580.000,00	98	157.380.000,00	98	158.180.000,00	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pendapatan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pendapatan (Persentase)													
Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	80,00	92,80	92,85	100.000.000,00	92,90	100.500.000,00	92,95	101.010.000,00	93,00	101.520.000,00	93,50	102.030.000,00	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	2,00	2,95	3,00	875.000.000,00	3,20	879.375.000,00	3,30	883.860.000,00	3,40	888.340.000,00	3,50	892.840.000,00	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					6.004.316.000,00		6.034.338.000,00		6.064.509.000,00		6.094.832.000,00		6.125.306.000,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.088.683.000,00		5.114.125.000,00		5.139.696.000,00		5.165.395.000,00		5.191.222.000,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	60,90	62	65	5.088.683.000,00	67	5.114.125.000,00	68	5.139.696.000,00	69	5.165.395.000,00	70	5.191.222.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					915.633.000,00		920.213.000,00		924.813.000,00		929.437.000,00		934.084.000,00	
meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	80	80	80	360.061.000,00	85	361.861.000,00	85	363.670.000,00	90	365.489.000,00	90	367.316.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	80	85	90	240.873.000,00	90	242.078.000,00	92	243.288.000,00	95	244.504.000,00	95	245.727.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	90	90	90	199.894.000,00	90	200.894.000,00	92	201.898.000,00	92	202.908.000,00	95	203.922.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	80	80	80	114.805.000,00	85	115.380.000,00	85	115.957.000,00	90	116.536.000,00	90	117.119.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					92.397.000,00		92.858.000,00		93.323.000,00		93.789.000,00		94.258.000,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					92.397.000,00		92.858.000,00		93.323.000,00		93.789.000,00		94.258.000,00	
meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	75	75	75	92.397.000,00	80	92.858.000,00	85	93.323.000,00	95	93.789.000,00	100	94.258.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					504.000.000,00		506.520.000,00		509.050.000,00		511.590.000,00		514.300.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					254.000.000,00		255.270.000,00		256.550.000,00		257.830.000,00		259.200.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil keitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	0	33,33	33,33	254.000.000,00	33,33	255.270.000,00	33,33	256.550.000,00	33,33	257.830.000,00	33,33	259.200.000,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					250.000.000,00		251.250.000,00		252.500.000,00		253.760.000,00		255.100.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	50,00	51,00	52,00	250.000.000,00	53,00	251.250.000,00	54,00	252.500.000,00	55,00	253.760.000,00	56,00	255.100.000,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					14.044.676.000,00		14.114.900.000,00		14.185.474.000,00		14.256.402.000,00		14.327.684.000,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.648.900.000,00		11.648.900.000,00		11.648.474.000,00		11.648.402.000,00		11.648.684.000,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	60,55	69,10	70,00	11.648.900.000,00	71,01	11.648.900.000,00	72,56	11.648.474.000,00	73,22	11.648.402.000,00	79,01	11.648.684.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.475.776.000,00		1.486.000.000,00		1.486.000.000,00		1.542.000.000,00		1.565.000.000,00	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanjuz Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	82,77	83,00	83,50	1.475.776.000,00	84,00	1.486.000.000,00	84,50	1.486.000.000,00	84,90	1.542.000.000,00	85,00	1.565.000.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					920.000.000,00		980.000.000,00		1.051.000.000,00		1.066.000.000,00		1.114.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,057	3,100	3,125	920.000.000,00	3,150	980.000.000,00	3,200	1.051.000.000,00	3,220	1.066.000.000,00	3,230	1.114.000.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
	Peningkatan Keababilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3,000	3,015	3,025										6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
7.01 - KECAMATAN					38.348.831.000,00		38.544.009.000,00		38.736.719.000,00		38.930.222.000,00		39.124.691.000,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					34.051.450.000,00		34.156.079.000,00		34.261.833.000,00		34.376.986.000,00		34.420.981.000,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	77	78	79	1.973.371.000,00	80	1.983.238.000,00	81	1.993.077.000,00	82	2.003.046.000,00	83	2.013.065.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Kedurang
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	40	50	60	1.824.569.000,00	65	1.833.694.000,00	70	1.842.870.000,00	75	1.852.076.000,00	80	1.861.339.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Ulu Manna
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70	75	75	6.784.495.000,00	75	6.818.417.000,00	75	6.852.509.000,00	75	6.886.772.000,00	75	6.921.205.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kota Manna

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	30	50	50	7.231.869.000,00	60	7.268.028.000,00	60	7.304.368.000,00	65	7.340.890.000,00	70	7.377.594.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Pasar Manna
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70	75	78	2.739.685.000,00	80	2.753.115.000,00	85	2.767.121.000,00	85	2.780.701.000,00	89	2.794.356.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Manna
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	1	2	3	1.861.782.000,00	4	1.862.409.000,00	5	1.862.409.000,00	6	1.862.409.000,00	7	1.862.409.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Bunga Mas
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78	80	85	1.594.450.000,00	88	1.602.424.000,00	90	1.610.437.000,00	95	1.618.491.000,00	98	1.626.584.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Kedurang Ilir
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	1	2	3	1.870.392.000,00	4	1.879.745.000,00	5	1.889.143.000,00	6	1.898.591.000,00	7	1.908.083.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Air Nipis
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	65	70	75	3.108.221.000,00	80	3.124.764.000,00	83	3.141.388.000,00	85	3.158.094.000,00	90	3.174.886.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Seginim
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75	78	80	2.601.326.000,00	82	2.564.223.000,00	85	2.528.194.000,00	90	2.501.240.000,00	95	2.402.361.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Pino
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78	80	85	2.461.290.000,00	86	2.466.022.000,00	87	2.470.317.000,00	88	2.474.676.000,00	89	2.479.099.000,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Pino Raya
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					206.417.000,00		227.905.000,00		246.116.000,00		254.161.000,00		264.207.000,00	
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	100	100	100	5.079.000,00	100	11.029.000,00	100	11.200.000,00	100	11.200.000,00	100	11.200.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kota Manna
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	100	100	100	25.000.000,00	100	27.000.000,00	100	28.000.000,00	100	29.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Pasar Manna
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	60	65	70	5.500.000,00	75	6.500.000,00	75	7.500.000,00	80	8.500.000,00	80	9.500.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Manna
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	1	2	3	20.000.000,00	4	30.000.000,00	5	40.000.000,00	6	40.000.000,00	7	45.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Bunga Mas
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	85	90	93	10.069.000,00	95	10.119.000,00	97	10.169.000,00	98	10.220.000,00	100	10.270.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Kedurang Ilir
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	77	78	79	35.000.000,00	80	35.175.000,00	81	35.350.000,00	82	35.527.000,00	83	35.705.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Kedurang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	80	82	84	29.628.000,00	86	29.776.000,00	88	29.925.000,00	90	30.074.000,00	92	30.225.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Air Nipis
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	70	73	75	19.647.000,00	80	19.745.000,00	82	19.843.000,00	89	19.943.000,00	90	20.042.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Seginim
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	75	77	78	28.000.000,00	80	30.000.000,00	85	35.000.000,00	85	40.000.000,00	90	42.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Pino
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	40	50	60	13.494.000,00	70	13.561.000,00	75	13.629.000,00	80	13.697.000,00	85	13.765.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Ulu Manna
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	100	100	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.500.000,00	100	16.000.000,00	100	16.500.000,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Pino Raya
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.698.119.000,00		3.760.012.000,00		3.818.060.000,00		3.876.102.000,00		3.993.221.000,00	
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)	1	2	3	30.000.000,00	4	35.000.000,00	5	40.000.000,00	6	45.000.000,00	7	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Bunga Mas
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	75	80	85	26.120.000,00	90	26.250.000,00	93	26.381.000,00	95	26.512.000,00	98	26.646.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Kedurang Ilir
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	75	80	85	30.000.000,00	85	30.150.000,00	85	30.380.000,00	85	30.531.000,00	85	30.682.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Kedurang
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)	80	83	86	25.650.000,00	89	25.778.000,00	92	25.907.000,00	95	26.036.000,00	98	26.166.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Air Nipis
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)	70	74	76	219.441.000,00	78	219.538.000,00	80	219.635.000,00	85	219.734.000,00	90	219.832.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Seginim
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)	40	50	60	13.494.000,00	65	13.561.000,00	70	13.629.000,00	75	13.697.000,00	76	13.765.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Ulu Manna
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	42.000.000,00	100	45.000.000,00	100	48.000.000,00	100	51.000.000,00	100	54.000.000,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Pino Raya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	1.220.000.000,00	100	1.226.100.000,00	100	1.232.230.000,00	100	1.238.391.000,00	100	1.244.583.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kota Manna
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	1.579.214.000,00	100	1.585.435.000,00	100	1.592.698.000,00	100	1.600.001.000,00	100	1.607.347.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Pasar Manna
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)	65	70	73	220.200.000,00	75	220.200.000,00	80	220.200.000,00	83	220.200.000,00	85	220.200.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Manna
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)	75	78	80	292.000.000,00	82	333.000.000,00	85	369.000.000,00	90	405.000.000,00	95	500.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Pino
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					164.776.000,00		165.313.000,00		168.698.000,00		171.602.000,00		177.499.000,00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	100	100	100	12.353.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kota Manna
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Pasar Manna
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	70	71	73	9.000.000,00	75	9.500.000,00	80	9.500.000,00	83	10.000.000,00	85	10.500.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Manna
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	1	2	3	20.000.000,00	4	20.000.000,00	5	20.000.000,00	6	20.000.000,00	7	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Bunga Mas
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebutuhan yang Terpenuhi (Angka)	75	78	80	17.150.000,00	85	17.235.000,00	88	17.321.000,00	90	17.408.000,00	95	17.495.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Kedurang Ilir
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	77	78	79	17.000.000,00	80	17.085.000,00	81	17.170.000,00	82	17.255.000,00	85	17.341.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Kedurang
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	80	82	84	18.000.000,00	86	18.090.000,00	88	18.180.000,00	90	18.271.000,00	92	18.362.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Air Nipis
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	70	75	80	13.779.000,00	83	13.847.000,00	85	13.917.000,00	90	13.986.000,00	95	14.056.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Seginim

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	70	75	80	20.000.000,00	82	21.000.000,00	85	23.000.000,00	88	24.000.000,00	90	28.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Pino
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	40	50	60	12.494.000,00	75	12.556.000,00	75	12.610.000,00	80	12.682.000,00	90	12.745.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Ulu Manna
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	100	100	100	15.000.000,00	100	16.000.000,00	100	17.000.000,00	100	18.000.000,00	100	19.000.000,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Pino Raya
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					228.069.000,00		234.700.000,00		242.012.000,00		251.371.000,00		268.783.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	100	100	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kota Manna
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	100	100	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Pasar Manna
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	65	70	73	11.700.000,00	78	11.700.000,00	80	11.700.000,00	85	11.700.000,00	85	11.700.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Manna
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	1	2	3	29.227.000,00	4	23.405.000,00	5	18.259.000,00	6	23.162.000,00	7	23.115.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Bunga Mas
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	80	85	90	16.110.000,00	95	16.190.000,00	97	16.271.000,00	98	16.351.000,00	100	16.432.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Kedurang Ilir
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	77	78	79	26.500.000,00	80	26.632.000,00	81	26.764.000,00	82	26.896.000,00	83	27.028.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Kedurang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	80	82	84	11.395.000,00	86	11.451.000,00	88	11.509.000,00	90	11.566.000,00	92	11.624.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Air Nipis
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	70	75	80	24.639.000,00	82	24.762.000,00	85	24.886.000,00	86	25.010.000,00	90	25.135.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Segininim
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	70	75	80	38.000.000,00	82	46.000.000,00	85	54.000.000,00	88	54.000.000,00	90	67.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Pino
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	40	50	60	12.498.000,00	75	12.560.000,00	80	12.623.000,00	85	12.686.000,00	90	12.749.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Ulu Mana
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	100	100	100	13.000.000,00	100	17.000.000,00	100	21.000.000,00	100	25.000.000,00	100	29.000.000,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Pino Raya
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					6.415.914.000,00		6.447.994.000,00		6.480.234.000,00		6.512.635.000,00		6.545.198.000,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.115.914.000,00		3.131.494.000,00		3.147.154.000,00		3.162.889.000,00		3.178.703.000,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	5	5	5	3.115.914.000,00	5	3.131.494.000,00	5	3.147.154.000,00	5	3.162.889.000,00	5	3.178.703.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.150.000.000,00		1.155.750.000,00		1.161.528.000,00		1.167.336.000,00		1.173.173.000,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	65,75	70	75	1.150.000.000,00	75,50	1.155.750.000,00	75,75	1.161.528.000,00	80	1.167.336.000,00	80,25	1.173.173.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.430.000.000,00		1.437.150.000,00		1.444.335.000,00		1.451.557.000,00		1.458.815.000,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	80,25	80,30	81	1.430.000.000,00	83	1.437.150.000,00	85	1.444.335.000,00	85,50	1.451.557.000,00	85,75	1.458.815.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					150.000.000,00		150.750.000,00		151.503.000,00		152.261.000,00		153.022.000,00	
meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina (%)	65,75	70	70,25	150.000.000,00	70,50	150.750.000,00	70,75	151.503.000,00	75	152.261.000,00	75,50	153.022.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					160.000.000,00		160.800.000,00		161.604.000,00		162.412.000,00		163.224.000,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	75,75	80	85	160.000.000,00	85,50	160.800.000,00	86	161.604.000,00	86,50	162.412.000,00	87	163.224.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI					410.000.000,00		412.050.000,00		414.110.000,00		416.180.000,00		418.261.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL														
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan (%)	72	75	80	410.000.000,00	82	412.050.000,00	83	414.110.000,00	84	416.180.000,00	85	418.261.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					871925165092.00		876504403675.00		880966236408.00		885360406669.00		889798390975.00	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan organisasi, yang merepresentasikan capaian dari pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang diemban. Dalam konteks perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029, penetapan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan melalui IKU yang disusun secara selektif.

Indikator-indikator yang dipilih merupakan ukuran terpilih yang relevan dan strategis untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan, baik dalam aspek outcome maupun output. Proses penetapan target IKU ini tidak hanya mengacu pada hasil evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis, peluang pembangunan jangka menengah dan panjang, serta tantangan daerah hingga tahun 2030. Dengan demikian, IKU yang digunakan dalam RPJMD diarahkan untuk memperkuat efektivitas pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah secara lebih terukur dan akuntabel. Adapun rincian target IKU tersebut disajikan dalam tabel-tabel pada bagian berikutnya.

Tabel IV-2. Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029

Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Pembangunan Infrastruktur	2,88	2,91	2,93	2,95	3,00	3,02	3,06
Indeks desa	80,13	80,13	82,05	84,33	86,43	88,22	90,11
Tingkat kemiskinan	17,1	17,09-16,65	16,64-15,65	15,64-14,65	14,64-13,65	13,64-12,65	12,64-11,65
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,25	3,2	3,15	3,1	3,05	3	2,95

Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Gini	0,3	0,295	0,29	0,285	0,28	0,275	0,27
Indeks kualitas lingkungan hidup	67,03	66,96	67,17	67,38	67,59	67,8	68,01
Pertumbuhan Ekonomi	4,37	4,38-4,70	4,71-5,14	5,15-5,68	5,69-6,32	6,33-6,96	6,97-7,60
Indeks daya saing daerah	3,64	3,68	3,72	3,76	3,8	3,84	3,9
Indeks Ketahanan Pangan	74,91	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,5
Indeks Pembangunan Manusia	74,53	74,53	74,85	75,17	75,49	75,81	76,13
Indeks Reformasi Birokrasi	BB	71,00 (BB)	72,00 (BB)	75 (BB)	78,02 (BB)	80,10 (A)	80,25 (A)

Penentuan target kinerja pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU merupakan landasan utama dalam mengawal pelaksanaan RPJMD serta berfungsi sebagai instrumen pengendali pembangunan yang terukur dan terarah. Sementara itu, IKD menjadi turunan teknis dan sektoral dari IKU, yang memberikan ukuran lebih rinci terhadap kinerja masing-masing perangkat daerah, sehingga mampu menjembatani capaian antara sasaran makro dan operasional secara konsisten dan berkelanjutan.

IKU dan IKD yang ditetapkan berlaku mulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 ditetapkan sebagai tahun transisi, di mana pencapaiannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Dengan pengaturan ini, kesinambungan pembangunan di Bengkulu Selatan dapat terjaga secara lebih terarah, serta memperkuat akuntabilitas dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Tabel IV-3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	angka	74,91	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,5
2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	9,42	8,82	8,22	7,61	7,01	6,41	5,81
3	Akses rumah tangga terhadap air minum layak	%	68,26	69,02	69,78	70,54	71,3	72,06	72,82
4	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH)	IKLH	67,03	66,96	67,17	67,38	67,59	67,8	68,01
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	84,42	85,18	85,94	86,7	87,46	88,22	88,98
6	Indeks Resiko Bencana	poin	149,84	145	143	142	141	140	139
7	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,13	1,2	1,26	1,33	1,39	1,46	1,52
9	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	146,12	147,91	149,66	151,37	153,04	154,66	156,25
II.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,37	4,38-4,70	4,71-5,14	5,15-5,68	5,69-6,32	6,33-6,96	6,97-7,60
2	Tingkat Kemiskinan	%	17,1	17,09-16,65	16,64-15,65	15,64-14,65	14,64-13,65	13,64-12,65	12,64-11,65
3	PDRB Perkapita	Rp. Juta Per Tahun	45,38	48,28	51,18	54,08	56,98	59,88	62,78
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,25	3,2	3,15	3,1	3,05	3	2,95
5	Indeks Gini	angka	0,3	0,295	0,29	0,285	0,28	0,275	0,27
6	Indeks Pembangunan Manusia	angka	74,53	74,83	75,15	75,47	75,81	76,13	76,45
7	Usia Harapan Hidup	tahun	73,05	73,44	73,82	74,21	74,59	74,98	75,37
8	Indeks Keluarga Sehat	indeks	66	67	68	69	70	71	72
9	Prevalensi Stunting	%	18,3	17,7	16,9	15,9	15	14,1	13,3
10	Prevelensi Wasting	%	8,1	8	7,5	7	6,5	5	4,5
11	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,42	9,6	9,78	9,96	10,14	10,32	10,5
12	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,66	13,9	13,97	14,05	14,07	14,13	14,14
13	Angka Literasi/Numerasi	%							
	Literasi SD	%	60,36	71,87	73	75	77	78	80
	Numerasi SD	%	55,96	74,28	75	76	78	79	81
	Literasi SMP	%	66,68	67,79	68	70	72	74	75
	Numerasi SMP	%	61,09	65,1	67	68	71	73	75
14	Persentase kelulusan TKA (SD-SMP)	%	0	95	96	97	98	99	99,9

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
15	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	39,96	40	40,5	41	41,5	42	42,5
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	71,67	72,67	73,00	73,35	73,67	74,00	74,67
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	36,76	57,56	67,96	58,96	61,76	66,56	70,76
19	Indeks Perlindungan Anak	indeks	63,34	64,37	65,38	66,39	67,4	68,1	69
20	Persentase penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak	%	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	100	100	100	100	100	100	100
22	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	0-100	65,02	65,49	66,16	67,04	67,91	68,88	69,65
23	Indeks Ketimpangan Gender	point	0,316	0,315	0,314	0,313	0,312	0,311	0,310
24	Indeks Pembangunan Gender	point	94,76	94,78	94,8	94,82	94,84	94,86	94,88
25	Indeks Pembangunan Pemuda	angka	1,81	1,91	2,11	2,21	2,31	2,41	2,51
26	Indeks Zakat Nasional	angka	0	0,2	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35
27	Indeks Kesejahteraan Sosial Umum	angka	51,67	51,67	52,17	52,67	53,17	53,67	54,17
28	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	angka	48,98	48,98	49,48	49,98	50,48	50,98	51,48
29	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	angka	56,1	56,1	56,6	57,1	57,6	58,1	58,6
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2,82%	2,83	2,84	2,85	2,86	2,87	2,88
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,11%	2,15	2,19	2,23	2,27	2,31	2,35
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	74,45	74,66	74,87	75,08	75,29	75,5	75,71
4	Indeks inovasi daerah	skor	54,34	55	62,5	63	63,5	64	65,01
5	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	37,95	38,39	38,82	39,26	39,69	40,13	40,57
6	Indeks Akses Keuangan daerah (IKAD)	nilai	3,93	3,98	4	4,02	4,05	4,07	4,08
7	Indeks Pembangunan Infrastruktur	nilai	2,88	2,91	2,93	2,95	3	3,02	3,06
8	Persentase Desa Mandiri	%	9,86	10,56	11,27	11,97	12,68	13,38	14,08
iv	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	nilai	87,32	87,82	88,32	88,82	89,32	89,82	90,32
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	2,87	2,95	2,97	3,01	3,02	3,32	3,37
3	Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	range	95,27	95,27	95,5	95,8	96	96,35	96,75
4	Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
5	Persentase Capaian Aksi HAM	%	83,6	83,88	84,16	84,44	84,72	85	85,28
6	Indeks Demokrasi Indonesia	%	70	75	80	85	90	95	100
7	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,64	3,68	3,72	3,76	3,8	3,84	3,9

BAB V. PENUTUP

RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk mengarahkan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara komprehensif dan sistematis dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan pada periode sebelumnya, analisis isu strategis yang berkembang di tingkat lokal, regional, nasional, dan global, serta merespons visi dan misi kepala daerah terpilih yang menjadi pijakan utama arah pembangunan ke depan. Dalam proses penyusunannya, pendekatan teknokratik, partisipatif, dan berbasis bukti (evidence-based) digunakan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mampu menghadapi tantangan pembangunan secara adaptif dan inovatif.

Dokumen ini juga dirancang untuk menjaga kesinambungan dan sinergi pembangunan antara kabupaten, provinsi, dan pusat, khususnya dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, dokumen RPJMD ini telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai salah satu landasan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Guna menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, maka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan **kaidah pelaksanaan** meliputi:

1. **konsistensi perencanaan dan pendanaan**, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level keluaran dan memastikan pelaksanaannya, serta penguatan mekanisme proses utamanya yang dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan termasuk memperhatikan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusi sosial
2. **keterkaitan perencanaan pembangunan**, daerah dengan nasional yang digambarkan dengan keterkaitan RPJMD dengan dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029, serta RPJMD akan dijabarkan dalam dokumen RKPD setiap tahunnya mulai dari RKPD Tahun 2026 sampai dengan RKPD Tahun 2030, serta menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah
3. **penerapan casecading** dalam penyusunan RPJMD dengan tetap menerapkan prinsip kerangka kerja logis, dimana penjabaran tujuan dan sasaran daerah berdasarkan visi dengan tetap memperhatikan misi, yang disusun dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, disertai indikator kinerja pembangunan yang disusun dengan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, result oriented/relevant, dan time-bound* (SMART), dimana seluruh indikator RPJMD akan dijabarkan dalam Renstra PD

4. **kerangka pengendalian** yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dengan ruang lingkup meliputi: (a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah mencakup penjabaran dokumen RPJMD ke dokumen Renstra PD, penetapan ukuran keberhasilan, konsistensi perencanaan dan penganggaran, identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya, serta mencakup penjabaran dokumen RPJMD ke dokumen RKPD, integrasi RKPD ke Renja PD, (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko, serta (c) hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati dan DPRD serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas
5. **mekanisme perubahan** yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan baik di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan, serta dengan tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan; penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan, dimana sistem elektronik terpadu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD, dan tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama

6. **komunikasi publik** untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan, dimana komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk pihak swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia
7. **pengarusutamaan kebijakan** dalam pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional meliputi kebijakan gender dan inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), transformasi digital, pembangunan rendah karbon, dan pembangunan berketahanan iklim.

Pada akhirnya, perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini akan dapat diwujudkan dengan baik dengan dukungan komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, dan peran serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah. Hal ini juga menjadi wujud kolaborasi untuk bersama membangun Bengkulu Selatan dalam rangka mewujudkan Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”.

